INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

3

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari, Pasha Aulia Muhammad, & Radityo Dharmaputra

LIPI

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

3

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian
dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

3

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari, Pasha Aulia Muhammad, & Radityo Dharmaputra

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LIPI Press

© 2021 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 3 Hubungan Internasional/Fauziah Rohmatika Mayangsari, Pasha Aulia Muhammad, & Radityo Dharmaputra (Ed.)–Jakarta: LIPI Press, 2021.

xix hlm. + 233 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-207-4 (no. seri lengkap cetak)
978-602-496-210-4 (cetak)
978-602-496-220-3 (no. seri lengkap *e-book*)
978-602-496-223-4 (*e-book*)

1. Indonesia 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Hubungan Internasional

327

Copy editor : Martinus Helmiawan
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Arneta Iftita Pramadhani
Penata isi : Vidia Cahyani Ayuningtyas dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama : Juli 2021

LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
LIPI Press
@lipi_press
lipi.press

Bekerja sama dengan:
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia
Mayapada Tower 1, Lt. 19,
Jln. Jend. Sudirman, Kav. 28,
Jakarta Selatan 12920
e-mail: kesekretariatan@ppi.id
website: ppi.id

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Pengantar Penerbit ix
Kata Pengantar Koordinator PPI Dunia 2020–2021 xi
Kata Pengantar Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021 xv
Kata Pengantar Prof. Dr. Makarim Wibisono xvii

Bab I *Middle-Power*, Praktik Diplomasi, dan Prospek Indonesia Emas 2045
Radityo Dharmaputra 1

BAGIAN 1 KEMITRAAN ANTARA INDONESIA DAN NEGARA BESAR

Bab II Arah Baru Politik Amerika Serikat dan Peluang Bagi Pembangunan Indonesia Emas 2045
Pasha Aulia Muhammad 15

Bab III Revitalisasi Kerja Sama Indonesia-Tiongkok sebagai Upaya Mencapai SDGs No. 17
Ahmad Hidayat & Kurnia Trisno Yudhonegoro 35

Bab IV Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan: *Capacity Development* dalam Program Bantuan Luar Negeri untuk Indonesia
Fauziah Rohmatika Mayangsari 55

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAGIAN 2 KEMITRAAN ANTARA INDONESIA DAN NEGARA BERKEMBANG

Bab V Kerja Sama Indonesia-Palestina dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Kemitraan Selatan-Selatan
Irfan Afendi 75

Bab VI Hubungan Indonesia dan ASEAN: Mendorong Pembangunan Melalui Kolaborasi Regional di Asia Tenggara
Muhammad Riefat Dhaniswara Arya Perkasa 89

Bab VII Kerja Sama Indonesia-Pasifik Selatan: Penguatan Ikatan Ekspor-Impor Indonesia dan Pasifik Selatan melalui Pacific Island Forum
Muhammad Zidane Faturrahman 105

BAGIAN 3 AKTIVITAS INDONESIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

Bab VIII Indonesia dan Keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB: Posisi Strategis dan Potensi Penguatan Pengaruh
Muhammad Ibrahim Arfah 123

Bab IX Peran Indonesia dalam Permasalahan Pengungsi di Dunia
Annisa Sekaringrat 141

Bab X Indonesia dan WTO: Potensi Peran Indonesia sebagai Pendorong Kerja Sama Utara-Selatan
Annisa Pratamasari 157

Bab XI Indonesia dan G20: Memainkan Peran Mediator Antara Ekonomi Negara Maju dan Berkembang
Elmo Juanara 173

Bab XII Peran Indonesia dalam APEC: Mendorong Kerja Sama Multilateral untuk Pembangunan Global
Binar Mentari Malahayati 189

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab XIII Diplomasi Aktivis à la Indonesia: Menyongsong Indonesia Emas 2045
Radityo Dharmaputra 209

Indeks 221
Biografi Editor 225
Biografi Penulis 227
Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021 233

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku bunga rampai ini merupakan satu dari 12 seri buku hasil pemikiran para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri, dengan tujuan untuk menggariskan konsep "Indonesia Emas Berkelanjutan 2045". Isu yang dibahas adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) disertai dengan analisis dan rekomendasi untuk meraih "Indonesia Emas Berkelanjutan 2045". Kelebihan bunga rampai ini adalah memiliki perspektif lintas disiplin.

Seri Hubungan Internasional berbicara tentang SDGs 17, yakni pengimplementasian kemitraan dan kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs 17 memiliki peran yang sangat penting bagi strategi dan perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Penyelarasan antara visi Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

SDGs 17 dapat menguatkan posisi Indonesia di dunia internasional, dalam kaitannya sebagai pemrakarsa yang mendorong kemitraan di berbagai level.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku bunga rampai ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar Koordinator PPI Dunia 2020–2021

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran intelektual anak bangsanya. Bermula dari perhimpunan yang bernama Indische Vereeniging yang dibentuk di negeri penjajah, para pelajar seperti Mohammad Hatta, Soetomo, dan Achmad Soebardjo mengubah organisasi tersebut menjadi lebih revolusioner. Pada tahun 1922 organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging dan sejak Januari 1923 mendaulat Hatta untuk merevitalisasi majalah *Hindia Poetra* sebagai media perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sepulang para pelajar itu ke tanah air, mereka menjadi tulang punggung pergerakan perjuangan bangsa Indonesia.

Hari ini, pada tahun 2021 atau tepat 99 tahun sejak PPI diinisiasi oleh Hatta dan rekan-rekannya, PPI Dunia mencoba meneruskan semangat juang, ide, dan pemikiran Hatta dan Habibie serta untuk meneruskan inisiasi para pendahulu, PPI Dunia berkolaborasi dengan PPI Negara yang tersebar di seluruh dunia menerbitkan buku dengan judul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 3 Hubungan Internasional* sebagai refleksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepedulian seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, mencermati laporan Price Waterhouse Coopers pada 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar dunia dan menghasilkan GDP terbesar keempat di dunia di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, PPI Dunia berpendapat bahwa sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara terbesar keempat di dunia tahun 2050.

PPI Dunia, yang saat ini memosisikan diri sebagai *expert community* yang intelektual dan akademis, mencoba memberikan sumbangsih pemikiran melalui buku ini sebagai *expert opinions* kepada *policy makers* dan *stakeholders* di Indonesia. Buku ini menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia serta untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dengan berprinsip tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Melalui Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia, buku ini merepresentasikan 17 tujuan dalam SDGs yang terbagi dalam berbagai bab dan ditulis oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di luar negeri dari berbagai negara.

Ide sederhana dari buku ini adalah menyalurkan energi positif para pelajar Indonesia sebagai *social capital* yang luar biasa untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Buku ini adalah bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membayar utang kepada negara atas kesempatan yang kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Asia-Oseania, dan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika serta 60 PPI Negara yang ikut serta memberikan pemikiran, dukungan moral, serta dukungan SDM hingga buku ini bisa terwujud. Kami ucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LIPI beserta jajarannya yang ikut ambil bagian dan menjadi penerbit buku ini sehingga buku ini bisa menambah khazanah baru pemikiran pembangunan bagi kemajuan bangsa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar dan langsung bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Choirul Anam,

Charles University, Ceko

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Para pembaca yang kami hormati,

Atas nama Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia 2020–2021, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas terbitnya rangkaian buku ini dengan tema "Mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia". Buku ini merupakan rangkaian tulisan pemikiran pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, dalam rangka memberikan sumbangsih konsep untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Rangkaian buku ini terdiri dari 12 judul. Sebanyak 11 buku berfokus pada definisi Indonesia sebagai negara maju yang berorientasi berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya. Dari sisi konten, bahasan setiap bab dalam 11 buku ini terkait erat dengan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Landasan pemikiran kami sangat sederhana bahwa Indonesia emas haruslah berkelanjutan dan proses pembangunan haruslah bertahap. Di samping itu, terdapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1 buku yang berfokus pada kajian keislaman dan Timur Tengah dalam kaitannya dengan konteks Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah terlibat aktif dalam penulisan buku ini. Tak lupa juga kepada LIPI Press yang berkenan menerbitkan buku kami serta seluruh jajaran pengurus Ditlitka PPI Dunia 2020–2021 yang berjumlah lebih dari 130 orang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja bersama dengan insan cemerlang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk menuntut ilmu.

Terakhir, kami tentu berharap rangkaian buku ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan di Indonesia. Semoga rangkaian buku ini bisa menjadi literatur yang baik dan menjadi catatan sejarah kontribusi pemikiran para pemuda Indonesia yang peduli pada negara dan bangsanya. Untuk Indonesia Jaya!

Hormat Kami,

Direksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Makarim Wibisono[1]

Dengan sangat gembira saya menyaksikan buku ini dipersiapkan untuk diterbitkan dengan judul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Buku yang ditulis oleh PPI Dunia dan diterbitkan oleh LIPI Press ini membahas perjuangan mulia untuk mencapai Indonesia Emas Berkelanjutan di tahun 2045, tepat 100 tahun sejak kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini adalah seri ke-4 dari total 12 seri yang diterbitkan, yang secara khusus membahas topik mengenai hubungan internasional dan politik luar negeri Republik Indonesia.

Buah pemikiran para penulis yang bersekolah di berbagai universitas di seluruh dunia ini merupakan sumbangsih yang sangat berharga, lewat usaha mereka meresapi pengetahuan, pengalaman dan fakta keadaan yang dialami selama menempuh studi. Ini merupakan hal yang sangat krusial karena narasinya menggambarkan perjalanan Indonesia 24 tahun ke depan untuk mencapai kejayaan sebagai negara

1 Diplomat senior, mantan Indonesian Ambassador and Permanent Representative to the United Nations in New York (1997–2000) and Geneva (2004–2007), serta mantan Special Rapporteur on the Situation in Palestinian Territories (2014–2016).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

maju di tahun 2045, sebagaimana telah ditulis oleh McKinsey dan Price Waterhouse Coopers di tahun 2017.

Penerbitan buku ini sangat berarti di tengah kondisi ekonomi dan politik dunia yang sulit dan multi-kompleks. Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi nasional negara-negara di seluruh penjuru dunia. Negara-negara tersebut masih menghadapi dampak ekonomi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, belum selesainya perumusan Doha Development Agenda, masih rendahnya laju investasi, dan rendahnya harga-harga komoditas yang memengaruhi lalu lintas perdagangan, jasa, investasi serta pariwisata dunia.

Yang menarik adalah rekomendasi PPI Dunia untuk memanfaatkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesepakatan global yang dicapai di Paris, sebagai fondasi penting perjuangan bangsa dan dapat dimanfaatkan dalam bekerja sama secara bilateral, regional, inter-regional dan global. 17 tujuan SDG adalah mekanisme yang memungkinkan anak cucu kita untuk dapat menyaksikan keindahan bumi dan menikmati kekayaan alam seperti apa yang kita alami.

Untuk memperjelas kemungkinan aktivitas luar negeri Indonesia, PPI Dunia telah menugaskan anggotanya yang bersekolah di berbagai universitas untuk membahas hubungan Indonesia dengan negara-negara besar seperti, Amerika Serikat, Tiongkok, dan bangsa yang terus menderita seperti Palestina, serta pendekatan pembangunan kapasitas sebagai program bantuan luar negeri Indonesia. Juga menggambarkan manfaat kelompok regional seperti ASEAN dan Pacific Island Forum sebagai forum untuk mengembangkan kolaborasi regional dan penguatan ekspor-impor Indonesia. Di samping itu, peran dan kerja sama multilateral Indonesia telah dibahas luas yang meliputi kerja sama di forum-forum Dewan Keamanan PBB, usaha untuk mengatasi masalah pengungsi dunia, WTO, G20 dan APEC.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini perlu dibaca, karena merupakan pemikiran-pemikiran generasi muda Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri dan masih memiliki perhatian dan kepedulian yang besar bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia di usia 100 tahun.

Selamat membaca.

Jakarta, 2 Mei 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Middle-Power, Praktik Diplomasi, dan Prospek Indonesia Emas 2045

Radityo Dharmaputra

Saat memunculkan visi Indonesia Emas 2045 dalam pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan target menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 27 juta rupiah per bulan, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 7 triliun dolar AS, serta menjadi negara di peringkat lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen (Dewi, 2019). Target-target ekonomi tersebut tak pelak lagi menjadi salah satu dasar mengapa para diplomat Indonesia di luar negeri ditugaskan sebagai duta investasi dan diperintahkan untuk memfokuskan diri pada diplomasi ekonomi (Sofia, 2020). Di saat yang sama, tulisan tangan dari Presiden Jokowi sendiri, yang ditulis di Merauke, 30 Desember 2015, menegaskan bahwa impian Indonesia pada 2015–2085 adalah menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia-Pasifik (BAPPENAS, 2019). Impian ini tentunya menyiratkan bahwa diplomasi Indonesia bukan hanya soal investasi dan menjual barang demi ekonomi, tapi juga pada penguatan peran negara kita di arena internasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pertanyaan dasar yang lantas harusnya ditanyakan adalah apa sebetulnya visi diplomasi Indonesia dalam kaitannya dengan penguatan peran kita di level global, terutama di kawasan Asia-Pasifik? Apabila Indonesia, sesuai impian Presiden Jokowi, ingin menjadi negara paling berpengaruh, apa yang sudah dilakukan selama ini (modal apa yang dimiliki) dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Apakah ini berarti Indonesia ingin menyaingi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menjadi *great power* atau negara besar di kawasan? Ataukah Indonesia ingin bergeser dari posisi *middle-power* (atau negara menengah) menjadi *major power* atau pemain utama di Asia-Pasifik? Seberapa jauh Indonesia sudah memiliki modal untuk menjalankan peran tersebut?

Fakta menarik yang sering dilupakan adalah, posisi Indonesia di kawasan saat ini sebetulnya masih jauh dari harapan Presiden Jokowi. Dalam Asia Power Index yang diterbitkan Lowy Institute (2020), Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 26 negara, di bawah AS, Tiongkok, Jepang, India, Rusia, Australia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bahkan dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara pun, Indonesia masih berada di urutan keempat. Setelah dilacak, di luar kriteria ekonomi dan militer ataupun sumber daya di masa depan, Indonesia masih lemah dalam konteks jaringan dan aliansi diplomasi serta pertahanan.

Oleh karena itu, bab ini akan mengajak pembaca untuk fokus pada argumen pentingnya penguatan strategi diplomasi dan pengaruh kawasan sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045. Bab ini adalah refleksi dari keingintahuan sekaligus upaya memberikan benang merah dari keseluruhan pembahasan di buku ini: bagaimana diplomasi bisa berperan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, bab ini menyediakan sedikit refleksi mengenai konsep *middle-power* dalam kajian Hubungan Internasional (HI), bagaimana efeknya pada status dan peran yang diharapkan dari Indonesia di kawasan, serta bagaimana impian Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu kunci pemenuhan status serta peran yang diharapkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. KONSEP *MIDDLE-POWER* & DIPLOMASI: MENJADI NEGARA BERPENGARUH DENGAN BERTINDAK DAN MEMAINKAN PERAN PENTING

Dalam kajian HI, salah satu konsep dasar yang bisa membantu memahami keterkaitan diplomasi dengan status serta peran Indonesia sebagai negara berpengaruh di kawasan (sesuai impian Jokowi), adalah debat dan diskursus terkait *middle-power*. Selama ini, Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu *middle-power* yang ada di dunia (Alexandra, 2014; Aljunied, 2012; Azra, 2015; Bley, 2019; Karim, 2018; Nabbs-Keller & Errington, 2020; Robertson, 2020; Thies & Sari, 2018). Beberapa peneliti bahkan sudah berargumen bahwa Indonesia akan segera menjadi salah satu *great power* di Asia (Quayle, 2013; Roberts & Sebastian, 2015). Dari sudut pandang pengambil kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI (2015) dalam Rencana Strategis 2015–2019 bahkan menuliskan bahwa penguatan diplomasi *middle-power* adalah salah satu tujuan utama Kemlu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (2018) menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia adalah *middle*-power di kawasan Indo-Pasifik. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu, apa itu *middle-power*, bagaimana kita akan menggunakan konsep ini untuk memahami Indonesia Emas 2045, dan bagaimana strategi diplomasi Indonesia untuk mencapai/mempertahankan/memperbaiki status tersebut.

Konsep *middle-power* sedang menjadi salah satu primadona dalam debat kajian HI. Walaupun disebutkan bahwa istilah ini sudah muncul sejak abad ke-16 di era Giovanni Botero—atau pun sebelumnya sejak era Thomas Aquinas di abad ke-13—perdebatan sengit dan diskusi mengenai konsep ini baru mengemuka sesudah Perang Dunia II (terkait Kanada dan Australia) serta sesudah Perang Dingin berakhir (Robertson, 2017). Untuk memahaminya secara sederhana, status negara di level internasional dikelompokkan secara hierarkis menjadi empat kategori, yaitu *great*, *major*, *middle*, serta *minor power* (Schweller, 2017). Di level Asia Pasifik, kita tentu bisa melihat bahwa AS dan Tiongkok adalah dua *great power* di kawasan yang sedang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saling bersaing satu sama lain. Sementara itu, *major power* adalah aktor penting di kawasan, yang juga mampu memainkan peran di level global. Di Asia-Pasifik, Jepang adalah salah satu *major power* yang nampak jelas (Schweller, 2017, 4). Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian kita mendefinisikan *middle-power*? Apakah ada kriteria khusus klasifikasi negara ini, karena banyak negara yang berbeda-beda dikelompokkan ke dalam kategori ini, mulai dari Indonesia, Australia, Kanada, Brazil, Korea Selatan, bahkan Malaysia dan Singapura?

Indikator khusus sebagai penanda kriteria *middle-power* adalah cara pandang kelompok hierarkikal (Chapnick, 1999). Cara pandang ini membagi negara—seperti yang dilakukan Schweller (2017)—berdasarkan indikator seperti PDB dan populasi masyarakat (Holbraad, 1984), ataupun dengan menambahkan anggaran militer per kapita, tingkat kematian bayi, serta tingkat literasi (Neack, 1992). Persoalannya, cara pandang model hierarkis ini, selain gagal memberikan klasifikasi yang presisi karena banyaknya variasi indikator yang digunakan (Chapnick, 1999), juga tidak mampu memprediksi perilaku negara tersebut (Ravenhill, 1998). Dengan begitu, klasifikasi yang dilakukan seakan tidak ada artinya, karena hanya memberikan ranking pada negara begitu saja tanpa mengetengahkan apa arti penting dari status tersebut.

Berangkat dari kritik ini, ada dua cara pandang yang digunakan sebagai benang merah di buku ini, yaitu pandangan pertama yang melihat bahwa menjadi *middle-power* berkaitan dengan pola perilaku tertentu, serta pandangan kedua yang melihat bahwa *middle-power* terkait erat dengan peran dan fungsi yang bisa dimainkan oleh negara tersebut. Pandangan pertama adalah model behavioralis yang berangkat dari argumen dasar Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) serta lantas dilengkapi oleh Efstathopoulos (2018). Sementara itu, pandangan kedua adalah pandangan fungsionalis berlandaskan teori peran, yang dikembangkan oleh Thies (2010), Thies dan Sari (2018), serta Karim (2018). Gabungan dari keduanya menjadi dasar argumen bahwa apabila Indonesia ingin dianggap sebagai negara dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kekuatan menengah atau bahkan dianggap sebagai negara besar di kawasan, maka Indonesia harus mampu memainkan perannya (yang sesuai dengan status yang diinginkan) serta mampu berperilaku sebagaimana seharusnya negara *middle-power*. Hanya dengan memainkan peran serta berperilaku sebagaimana diharapkan inilah, Indonesia akan bisa mengklaim impiannya sebagai negara berpengaruh dan akan bisa dianggap serta diterima sebagai aktor utama di kawasan.

Permasalahannya, peran dan perilaku macam apa yang diharapkan dari negara *middle-power*, terutama yang hendak bergeser menjadi negara besar? Cooper dkk. (1993) menyebutkan perilaku *middle-power* adalah mencari solusi multilateral, cenderung mengedepankan kompromi, serta aktif menjadi bagian dari solusi persoalan global. Efstathopoulos (2018) menambahkan beberapa aspek seperti upaya memosisikan diri sebagai warga dunia yang baik, memiliki preferensi untuk aktif di forum multilateral, mampu memimpin upaya-upaya resolusi konflik, memfokuskan diri hanya pada satu atau dua aspek saja dari isu global (atau fokus pada *niche diplomacy*), menyediakan kepemimpinan intelektual berbasis ide kreatif, serta kecenderungan menyusun dan memimpin koalisi pihak-pihak yang sejalan. Sebagai sebuah *emerging middle-power*, pola perilaku lainnya adalah orientasi regional yang tinggi serta keinginan mendorong dan memimpin integrasi kawasan, terkadang bersikap revisionis, serta kecenderungannya untuk aktif secara global dengan menjaga jarak terhadap aktor-aktor lemah di kawasannya (Jordaan, 2003). Perilaku-perilaku yang disebutkan tersebut bisa dikaitkan dengan peran *middle-power* sebagai fasilitator-katalis-dan manajer di lingkup multilateral (Cooper dkk., 1993), pendukung institusi multilateral dan tatanan global (Thies & Sari, 2018), atau bahkan perwakilan negara berkembang dan pembangun jembatan antarkelompok yang berseberangan (Karim, 2018).

Poin utama dari bagian diskusi konseptual ini adalah memberikan argumen dasar pada para pembaca, bahwa jalan menuju keberhasilan mewujudkan impian Indonesia Emas 2045 adalah dengan bertindak selayaknya negara maju di tataran diplomasi. Benar, bahwa untuk mencapai posisi berpengaruh dibutuhkan kapabilitas seperti ekonomi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

militer, ataupun populasi masyarakat. Namun, yang lebih penting daripada kapabilitas adalah perilaku dan peran yang dimainkan Indonesia.

Pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh buku ini adalah, apakah Indonesia bisa memainkan peran tersebut? Apa isu yang sebaiknya difokuskan oleh Indonesia dalam kaitannya dengan *niche diplomacy*? Apakah selama ini diplomasi Indonesia sudah diarahkan pada peningkatan posisi Indonesia di kawasan sebagai negara *middle-power*, sebagaimana disampaikan pada Renstra Kemlu 2015–2019?

B. AKTIVITAS DIPLOMASI *MIDDLEPOWER* INDONESIA, ASPEK KEMITRAAN GLOBAL DALAM SDGS, DAN PENGARUH INDONESIA: PENGANTAR STRUKTUR BUKU

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab melalui penelusuran benang merah dari masing-masing bab. Secara singkat, buku ini memberikan hipotesis bahwa fokus pada pemenuhan target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah langkah paling tepat yang dapat diambil sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045 dan sebagai pilihan isu *niche diplomacy* Indonesia. Pembahasan di setiap bab selanjutnya akan menentukan apakah memang benar pemenuhan target SDGs layak menjadi fokus utama Indonesia. Namun, perlu juga diperjelas bahwa target SDGs yang bisa dengan mudah dikerangkakan dalam pemahaman HI adalah SDGs-17 yang terkait penguatan kemitraan global. Aspek ini menjadi dasar analisis semua bab dalam buku ini, karena terkait erat dengan aspek bantuan luar negeri serta investasi dari negara maju (17.1–17.5), bantuan teknis (17.6–17.8), peningkatan kapasitas (17.9), reformasi aturan perdagangan global (17.10–17.12), sampai ke isu-isu sistemik institusi internasional (17.13–17.19).

Bab-bab selanjutnya juga secara spesifik menekankan aspek kemitraan global dari SDGs serta bagaimana pola diplomasi *middlepower* Indonesia dijalankan di tiga level kemitraan: 1) hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia sebagai tetangga terdekat; 2) hubungan dengan negara-negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berkembang atau negara-negara "Selatan" seperti Palestina, negara-negara Asia Tenggara dalam konteks Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan negara-negara Pasifik Selatan; 3) serta dalam level kemitraan global di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan G20.

Dalam setiap pembahasannya, ada asumsi awal yang melandasi analisis setiap bab. Dalam tiga bab terkait hubungan Utara-Selatan atau hubungan Indonesia dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (Bab 2 oleh Pasha Aulia Muhammad), Tiongkok (Bab 3 oleh Ahmad Hidayat dan Kurnia Tresno Yudhonegoro), serta Australia (Bab 4 oleh Fauziah Rohmatika Mayangsari), asumsi dasar yang dibangun adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan hubungan tersebut melalui bantuan luar negeri, investasi, serta bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dalam isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan. Ketiga bab difokuskan pada upaya Indonesia menggunakan peluang dari kemitraan dengan negara-negara "Utara" ini demi meningkatkan kapabilitasnya sebagai *middlepower* dan, konsekuensinya, memungkinkan Indonesia memainkan peranan lebih aktif terutama dalam konteks memimpin negara berkembang.

Aspek kemitraan dengan negara berkembang ini (atau kerja sama Selatan-Selatan) menjadi dasar dari analisis mengenai Palestina (Bab 5 oleh Irfan Afendi), Asia Tenggara (Bab 6 oleh Muhammad Riefat Dhaniswara Arya Perkasa), serta mengenai negara-negara Pasifik Selatan seperti Fiji dan Vanuatu (Bab 7 oleh Muhammad Zidane Faturrahman). Asumsi utama yang digunakan adalah kapabilitas Indonesia sudah mencukupi (berdasarkan bantuan dari negara-negara Utara) sehingga mampu berperan aktif di kawasan yang secara umum dihuni oleh negara-negara berkembang. Bantuan dari Indonesia, baik berupa bantuan kemanusiaan, investasi ekonomi, maupun solidaritas kawasan menjadi kunci utama.

Akan tetapi, analisis mengenai peran Indonesia belumlah lengkap jika kita tidak melihat bagaimana Indonesia memainkan peranan krusial (atau memiliki potensi untuk berperan krusial) dalam konteks

Buku ini tidak diperjualbelikan.

organisasi internasional. Asumsi dasarnya adalah, peningkatan kapabilitas Indonesia dan mulai aktifnya Indonesia dalam diplomasi bilateral/kawasan di lingkup negara berkembang akan memperkuat modal Indonesia untuk bersuara di level organisasi global. Analisis mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB (Bab 8 oleh Muhammad Ibrahim Arfah) dan mengenai aktivisme Indonesia terkait isu pengungsi dan migrasi di PBB (Bab 9 oleh Annisa Sekaringrat) menggambarkan bagaimana Indonesia telah memiliki kemampuan dan profil untuk aktif di level global. Lebih spesifik lagi, dibahas bagaimana persoalan terkait reformasi aturan perdagangan global yang menjadi salah satu target SDGs 17 (Bab 10 oleh Annisa Pratamasari). Aktivisme Indonesia di level yang lebih relevan (kawasan) juga dibahas, terutama dalam konteks G20 (Bab 11 oleh Elmo Juanara) dan dalam kerangka APEC (Bab 12 oleh Binar Mentari Malahayati).

Dalam keseluruhan konteks pembahasan, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa target yang ingin dicapai adalah menganalisis kapabilitas Indonesia serta adanya (atau absennya) keinginan Indonesia untuk lebih berperan dalam isu-isu global. Aspek kemitraan global yang didorong oleh tujuan-tujuan SDGs menjadi pintu masuk belaka, tetapi kemampuan dan potensi menjadi negara maju dan memenuhi visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya berhenti dalam konteks pembangunan berkelanjutan saja, tetapi pada keberhasilan menjadi pemain penting di level global.

REFERENSI

Alexandra, L. (2014, 28 Mei). Becoming a 'middle power'. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2014/05/28/becoming-a-middle-power.html.

Aljunied, S. M. A. (2012). Locating the rise of Indonesia: Is the great power status possible? *The World View*. https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/locating-the-rise-of-indonesia-is-the-great-power-status-possible.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Azra, A. (2015). Indonesia's middle power public diplomacy: Asia and beyond. Dalam J. Mellisen & Y. Sohn (Eds.), *Understanding public diplomacy in East Asia: Middle powers in a troubled region* (131–154). Palgrave Macmillan.

BAPPENAS. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur*. https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.

Bley, B. (2019, 23 Agustus). A middle-power moment. *The Interpreter*. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/middle-power-moment.

Chapnick, A. (1999). The middle power. *Canadian Foreign Policy Journal*, *7*(2), 73–82. https://doi.org/10.1080/11926422.1999.9673212.

Cooper, A.F., Higgott, R., & Nossal, K. (1993). *Relocating middle powers: Australia and Canada in a changing world order*. UBC Press.

Dewi, R. K. (2019, 20 Oktober). Jokowi sebut cita-cita Indonesia di tahun 2045, apa saja?. *Kompas*. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/190800865/jokowi-sebut-cita-cita-indonesia-di-tahun-2045-apa-saja-?page=all.

Efstathopoulos, C. (2018). Middle powers and the behavioural model. *Global Society*, *32*(1), 47–69. https://doi.org/10.1080/13600826.2017.1351422.

Holbraad, C. (1984). *Middle powers in international politics*. St. Martin's Press.

Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: Distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, *30*(2), 165–181. https://doi.org/10.1080/02589340320001472 82.

Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: The cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, *72*(4), 343–363. https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis 2015–2019*. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRm.

Lowy Institute. (2020). *Asia power index: 2020 Edition*. https://power.lowyinstitute.org/.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nabbs-Keller, G., & Errington, I. (2020, 8 April). Indonesia's and Australia's middle-power moment. *ASPI - The Strategist*. https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-and-australias-middle-power-moment/.

Neack, L. (1992). Empirical observations on "middle state" behavior at the start of a new international system. *Pacific Focus*, *7*(1), 5–21. https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.1992.tb00139.x.

Pandjaitan, L. B. (2018, 15 Februari). Indonesia ready to take on bigger role in Indo-Pacific. *The Straits Times*. https://www.straitstimes.com/opinion/indonesia-ready-to-take-on-bigger-role-in-indo-pacific.

Quayle, L. (2013). Power and paradox: Indonesia and the 'English School' concept of great powers. *International Relations of the Asia-Pacific*, *13*(2), 301–330. https://doi.org/10.1093/irap/lct001.

Ravenhill, J. (1998). Cycles of middle power activism: Constraint and choice in Australian and Canadian foreign policies. *Australian Journal of International Affairs*, *52*(3), 309–327. https://doi.org/10.1080/10357719808445259.

Roberts, C.B., & Sebastian, L.C. (2015). Ascending Indonesia: Significance and conceptual foundations. Dalam C. Roberts, A. Habir, & L. Sebastian (Eds.), *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order* (1–21). Palgrave Macmillan.

Robertson, J. (2017). Middle-power definitions: Confusion reigns supreme. *Australian Journal of International Affairs*, *71*(4), 355–370, https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1293608.

Robertson, J. (2020, 6 Juni). Middle powers after the middle-power moment. *East Asia Forum*. https://www.eastasiaforum.org/2020/06/06/middle-powers-after-the-middle-power-moment/.

Schweller, R. (2017). The concept of middle power. Dalam V.D. Cha & M. Dumond (Eds.), *The Korean Pivot: The study of South Korea as global power* (3–9). Center for Strategic and International Studies.

Sofia, H. (2020, 9 Januari). Presiden Jokowi minta para dubes fokus lakukan diplomasi ekonomi. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/1242200/presiden-jokowi-minta-para-dubes-fokus-lakukan-diplomasi-ekonomi.

Thies, C. & Sari, A.C. (2018). A role theory approach to middle powers: Making sense of Indonesia's place in the international system. *Contemporary Southeast Asia*, *40*(3), 397–421. https://doi.org/10.1355/cs40-3c.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Thies, C. (2010). Role theory and foreign policy. Dalam R.A. Denemark & R. Marlin-Bennett (Eds.), *International studies encyclopedia*. Wiley-Blackwell.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian 1

Kemitraan antara Indonesia dan Negara Besar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB II

Arah Baru Politik Amerika Serikat dan Peluang Bagi Pembangunan Indonesia Emas 2045

Pasha Aulia Muhammad

Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Memperkuat sarana implementasi dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
(SDGs 17, dalam bahasa Indonesia)

Tahun 2020 telah menjadi tahun yang memberi bekas mendalam bagi kehidupan kita. Thomas Friedman, seorang jurnalis terkenal Amerika Serikat (AS), bahkan membandingkannya dengan peristiwa serangan teroris 9/11 dan Resesi Besar (*Great Recession*) tahun 2008 (The Print, 2020). Globalisasi ekonomi pun menerima hantaman yang hebat. He Yafei, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, menyebut bahwa pandemi ini seperti mengembalikan globalisasi ke periode 1980 an (He, 2020). Niblett (2021), CEO dari *think tank* terkemuka Chatham House, bahkan menulis dalam laporannya bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan "…globalisasi menjadi mogok dan meningkatkan kompetisi geopolitik." Dan hal ini baru sejumlah kecil dari tantangan-tantangan lain yang akan kita hadapi ke depan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lantas, apa yang bisa AS tawarkan kepada Indonesia, mengingat semua tantangan dan poin-poin di atas? Seperti yang terlihat di bagian selanjutnya, walaupun AS akan menjadi relatif isolasionis, dalam artian berusaha untuk mengurangi keterlibatan dengan dunia luar dan fokus hanya ke beberapa wilayah di dunia saja (Zeihan, 2020), Indonesia bersama dengan negara sahabat di ASEAN memiliki peluang besar untuk mendapat keuntungan dari arah baru politik AS.

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai masih relevannya tujuan yang tercantum pada poin ke-17 Sustainable Development Goals (SDGs 17) bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya, tantangan-tantangan besar yang akan dihadapi oleh ekonomi Indonesia menuju 2045, kondisi geopolitik dan ekonomi politik di masa mendatang, serta bentuk kerja sama dengan AS yang dapat membantu Indonesia menuju mimpi Indonesia Emas 2045. Secara umum, bab ini mengambil posisi optimis hati-hati terhadap masa depan Indonesia. Walaupun mencapai mimpi 2045 tidak mustahil, tantangan yang akan dihadapi pun tidak bisa dianggap remeh.

A. RELEVANSI SDGS 17 SEBAGAI PANDUAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN

Walaupun SDGs untuk 2030 diluncurkan sebelum pandemi Covid-19, tujuan pembangunan ini tetap masih relevan. Poin 17 dari SDGs, kemitraan untuk mencapai tujuan, adalah poin yang sangat diperlukan saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia saat ini telah bergerak ke arah yang lebih unilateralis, di mana negara-negara berusaha untuk memikirkan kepentingannya sendiri di saat pandemi. Misalnya, banyak negara maju yang memilih untuk melakukan pembelian vaksin langsung kepada produsen dan mengabaikan program Covax milik WHO. Praktis WHO hanya menjadi perantara program pembelian vaksin bagi negara-negara berkembang dan terbelakang yang tidak mendapat anggaran yang cukup (Mancini dan Peel, 2020). Selain itu, target SDGs 17—khususnya subpoin 17.2, 17.3, hingga 17.4 yang akan menjadi fokus dari bab ini—bahkan bisa dibilang menjadi semakin relevan, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun setelahnya, hingga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ke masa depan. Hal ini dikarenakan poin-poin tersebut sangat erat kaitannya dalam membantu pembangunan ekonomi di suatu negara, terutama dari segi bantuan, manajemen utang, dan mengundang arus modal investasi dalam negeri.

Pertama, subpoin SDGs 17.2. menekankan pada kontribusi negara maju dalam bentuk bantuan internasional (*Official Development Assistance*). Subpoin ini mendorong negara yang termasuk dalam kategori maju untuk memberi angka tetap dari pendapatan nasional bruto mereka kepada negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang (United Nations, t.t.). Dalam konteks terkini, pandemi Covid-19 memberi urgensi yang besar atas pentingnya kerja sama antarnegara. Sebab, pandemi memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Data dari World Food Programme (WFP, 2020) menunjukkan bahwa proyeksi jumlah orang yang kelaparan di dunia meningkat sebanyak 82% dibanding dengan tahun 2019. Oxfam (2020) bahkan mengatakan bahwa titik-titik wilayah di mana orang mengalami kelaparan juga meningkat. Walaupun belum ada penelitian dan data mengenai kasus kelaparan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia pada saat penulisan bab ini, laporan media Indonesia mulai mengangkat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia (Kompas TV, 2020). Keadaan ini diperparah dengan negara maju yang mengurangi angka komitmen bantuan internasionalnya, seperti Inggris yang mengurangi angka bantuan luar negeri dari 0,7% Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menjadi 0,5% (Dickson, 2020).

Kedua, subpoin SDG 17.3 berfokus pada pencarian bantuan dana bagi negara berkembang dari berbagai sumber (United Nations, t.t.). Terkait hal ini, sebelum pandemi Covid-19 saja, defisit investasi infrastruktur di negara-negara berkembang di Asia Tenggara hingga tahun 2030 berkisar USD 197–224 miliar, dengan Indonesia yang defisit investasinya mencapai USD 77–87 miliar (Asian Development Bank, 2017). Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya investasi di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting mengenai ketahanan sistem kesehatan dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menghadapi pandemi ini adalah rasio tempat tidur dan tempat tidur ICU terhadap populasi (Moghadas dkk., 2020). Padahal, banyak negara berkembang, seperti Indonesia, yang hingga kini memiliki rasio tempat tidur RS dengan populasi yang tidak seimbang dan bahkan cenderung rendah (Statista, 2020). Oleh karena itu, dibukanya berbagai sumber dana baru untuk investasi di bidang ini akan membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Ketiga adalah subpoin SDG 17.4 tentang bantuan pengelolaan utang berkelanjutan bagi negara berkembang (United Nations, t.t.). Efek dari pandemi Covid-19 telah memberi beban berat bagi keuangan negara. Misalnya, G20 meluncurkan program untuk menghentikan sementara pembayaran utang internasional untuk meringankan beban negara-negara berpendapatan rendah (Wheatly, 2020). Di Indonesia sendiri, pandemi telah memaksa Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan ekonomi yang belum pernah diambil sebelumnya seperti *Quantitative Easing* (QE) guna mendukung keuangan pemerintah dengan cara mencetak uang untuk membeli surat utang pemerintah (Palma, 2020).

Kebijakan seperti ini tidak hanya diimplementasikan oleh Indonesia, dan sejalan dengan konsensus banyak ahli ekonomi. Contohnya adalah International Monetary Fund (IMF) yang meminta agar negara-negara dapat meningkatkan pengeluaran mereka sebanyak mungkin untuk menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi (Spend as much, 2021). Walaupun begitu, tantangan yang diakibatkan naiknya jumlah hutang ini tetap harus diamati dengan serius karena ancaman kebangkrutan negara (*sovereign default*), terutama untuk negara-negara berkembang yang tidak bisa dianggap remeh (Arellano dkk., 2020). Oleh karena itu, pengelolaan utang yang berkelanjutan oleh negara berkembang menjadi isu yang semakin relevan saat ini.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di tengah guncangan yang hebat akibat pandemi Covid-19, poin-poin yang diangkat oleh SDGs masih relevan untuk dijadikan panduan bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Di bagian selanjutnya, relevansi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

poin-poin SDGs dengan tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan dijelaskan lebih lanjut.

B. TANTANGAN EKONOMI YANG DIHADAPI INDONESIA

Dalam proses pencapaian mimpi besar Indonesia Emas 2045, satu generasi ke depan (2021–2045) merupakan periode krusial bagi pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memahami tantangan di berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Secara umum, terdapat lima tantangan besar di bidang ekonomi yang harus dihadapi Indonesia, yakni dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, persiapan bonus demografi di 2020–2030, pemulihan ekonomi K (*K-shaped recovery*), peralihan dari ketergantungan terhadap industri ekstraktif menjadi ekonomi berorientasi manufaktur dan jasa, serta efek perubahan iklim. Kelima tantangan ini harus dijawab Indonesia dalam kurun waktu jangka pendek hingga panjang.

Pertama, pemulihan ekonomi dari efek pandemi Covid-19. Dari perspektif murni ekonomi, IMF (dalam Giles, 2021) memprediksi bahwa angka pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang selain Tiongkok pada 2022 akan turun sebanyak 8% jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Prediksi ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan ke depannya.

Kedua adalah tantangan bonus demografi. Jati (2015) menulis bahwa tahun 2020 hingga 2030 adalah gelombang kedua bonus demografi Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bersiap tidak hanya memulihkan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga pada saat bersamaan harus mencetak lapangan pekerjaan bagi generasi bonus demografi ini. Apabila tidak berhati-hati, terdapat kemungkinan bonus demografi gelombang kedua ini malah menjadi "generasi yang hilang" (*lost generation*).

Tantangan ketiga yang masih berhubungan dengan tantangan bonus demografi hadir dalam bentuk ancaman *K-shaped recovery*. Secara sederhana, *K-shaped recovery* dapat dipahami sebagai kondisi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pemulihan ekonomi, biasanya setelah resesi, yang tidak merata antara negara. Beberapa dapat mengalami pemulihan dengan tren positif, sisanya menunjukkan tren negatif sehingga dalam grafik berbentuk seperti huruf K (Chen, 2020). Dalam konteks terkini, kebijakan bantuan ekonomi untuk menghadapi Covid-19 diterima lebih banyak oleh kelompok yang memiliki aset benda bernilai dibandingkan kelompok yang hanya mengandalkan pemasukan dari bekerja. Akibatnya, pemulihan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kelompok saja. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana bursa saham kemungkinan akan mengalami pertumbuhan, sedangkan angka PHK melonjak dan tidak ada penambahan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan. Kondisi ini dapat menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Bahkan, bukan tidak mungkin ketidakstabilan tersebut menimbulkan efek di sektor lainnya. Seperti misalnya yang terjadi di Timur Tengah, ketika angka pengangguran pemuda yang tinggi menjadi salah satu alasan utama ketidakstabilan politik yang memicu munculnya *Arab Spring* (Al-Shammari & Willoughby, 2017)

Keempat adalah transisi penggerak ekonomi Indonesia dari sektor ekstraktif ke sektor manufaktur dan jasa. Sektor ekstraktif telah memainkan peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi urgensi untuk mengalihkan mesin utama ekonomi dari sektor ini semakin besar. Hal ini dikarenakan ketergantungan terhadap sektor ini dapat membuat Indonesia terancam terjebak dalam *middle income trap* (jebakan pendapatan menengah) (Tran, 2013). Selain itu, sektor ekstraktif bukan merupakan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah industri sawit yang prospek ke depannya sulit untuk dikembangkan karena ekspansi lahan membutuhkan biaya yang tidak murah (Tapia dkk., 2021). Contoh lain juga dapat dilihat di sektor pertambangan dan migas mengingat jumlah cadangan batubara dan migas yang dapat diakses dengan murah juga terus berkurang (Nasruddin dkk., 2016).

Tantangan kelima hadir dari isu perubahan iklim. Penting bagi Indonesia untuk mulai memperhatikan perubahan iklim mengingat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap isu ini. Contoh dari pergeseran ini dapat dilihat dari maraknya gerakan untuk memboikot produk kelapa sawit di Uni Eropa yang bahkan berujung dengan dicabutnya sawit dari daftar produk nabati yang bisa menjadi bahan baku bahan bakar nabati (Eur-Lex, 2019). Contohnya, di bidang pertambangan, Tesla yang bergantung kepada nikel di Indonesia mengaku kesulitan menemukan pemasok bahan baku yang produksinya ramah lingkungan (Sanderson, 2020). Hal ini bukanlah hal yang aneh, sebab perusahaan-perusahaan kini mulai dituntut untuk memastikan bahwa rantai pasok *(supply chain)* dari hulu ke hilir tidak melanggar prinsip lingkungan (Grewal dkk., 2016). Bahkan, terdapat satu kategori investasi khusus yang menjadikan unsur ini sebagai elemen paling utama sebelum berinvestasi ke suatu perusahaan, yaitu investasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Napoletano, 2021). Data menunjukkan bahwa investasi ESG ini pada 2018 sudah mencapai 30 triliun US Dollar (Global Sustainable Investment Alliance [GSIA], 2019), atau hampir 30 kali lipat besar PDB Indonesia di tahun 2018 (World Bank, 2021). Ke depannya, tren investasi ESG diprediksi masih akan terus berlanjut (Katugampola & Calvi, 2021). Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa apabila perusahaan di Indonesia tidak memberi perhatian lebih ke dampak lingkungan dan bahkan sosial dalam produksinya, maka bukan tidak mungkin laju investasi akan terhambat, seperti misalnya yang terjadi pada komoditas nikel.

Lebih lanjut, adanya teknologi *blockchain* juga memudahkan perusahaan-perusahaan untuk mengecek standar ESG di setiap tahapan titik rantai produksi, bahkan hingga melacak siapa perusahaan atau pekerja individu yang bertanggung jawab dalam operasional (Saberi dkk., 2018). Paradigma baru ini jelas adalah tantangan bagi banyak bisnis di Indonesia, tetapi jika kita bisa hadapi dengan tepat dapat menjadi kelebihan bagi Indonesia dalam proses peralihan mesin utama ekonomi kita dari sektor ekstraktif ke sektor manufaktur.

Selain itu, perubahan iklim juga memiliki efek terhadap keamanan dan stabilitas negara, seperti misalnya ancaman kenaikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

air laut (Rahmstof, 2010) dan cuaca yang tidak stabil serta ekstrim (Stott, 2016). Kenaikan air laut adalah ancaman yang sangat besar bagi Indonesia dikarenakan negara kita adalah negara kepulauan yang rakyatnya bermukim dekat dengan pesisir (Neumann dkk., 2015). Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di kemudian hari. Cuaca yang tidak stabil dan ekstrem juga menjadi ancaman yang sangat serius mengingat kenaikan suhu dapat menyebabkan gagal panen produksi agrikultur (Mohanty dkk., 2013). Oleh karena itu, apabila tidak melakukan tindak pencegahan, bukan tidak mungkin akan terjadi guncangan di sektor politik dan ekonomi akibat perubahan iklim.

Secara keseluruhan, bagian ini telah menjelaskan bagaimana Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah di banyak sektor. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia harus memikirkan kerja sama dengan negara lain guna mengatasi tantangan-tantangan di atas. Di bagian berikutnya, dijelaskan mengenai situasi di Amerika Serikat dan mengapa negara ini dapat menjadi salah satu mitra yang cocok untuk membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

C. AMERIKA SERIKAT DAN DUNIA

Walaupun tampuk kepemimpinan di AS telah resmi berganti dari Presiden Trump ke Presiden Biden pada awal 2021, tidak dapat dipungkiri bahwa Trump telah mengubah *status quo* kebijakan luar negeri AS. Terdapat dua tren yang setidaknya untuk jangka menengah akan memengaruhi geopolitik dunia, yakni berlanjutnya ketegangan hubungan ekonomi AS dan Tiongkok di bawah Biden (Council on Foreign Relations, 2020), dan perubahan orientasi pemerintah AS yang lebih fokus ke isu dalam negeri dibandingkan dengan isu luar negeri (Zeihan, 2020). Walaupun demikian, pemerintahan AS di bawah Biden mengatakan bahwa mereka akan menjadikan bantuan luar negeri sebagai fokus utama dari kebijakan luar negeri AS, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan untuk membantu sesama negara demokrasi (Cordell, 2020). Arah baru politik Amerika Serikat ini patut menjadi perhatian dalam proses implementasinya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tren pertama yang dapat diantisipasi adalah berlanjutnya ketegangan hubungan ekonomi antara AS dan Tiongkok di bawah administrasi Biden. Sebelumnya, ketegangan hubungan ekonomi AS dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan di tengah pandemi, yang ditunjukkan dengan upaya pemerintahan Trump untuk melarang beberapa perusahaan Tiongkok yang memiliki koneksi dengan militer Tiongkok untuk *listing* di Wall Street (Fried, 2021). Kebijakan zaman administrasi Trump yang berseteru dengan Tiongkok ini sepertinya tidak akan berubah banyak di masa Biden, walaupun administrasi Biden telah menolak *decoupling* total antara AS dan Tiongkok (Lewis, 2020). Kondisi ini terjadi karena kebijakan untuk mengambil respon yang lebih keras terhadap Tiongkok merupakan keputusan bipartisan, baik dari partai Republik maupun Demokrat (Gramer & Detsch, 2020). Bahkan Menteri Luar Negeri AS di tahun 2021, Antony Blinken, menyatakan bahwa walaupun kini pemerintahan Biden ingin menjalin kerja sama dengan Tiongkok, tetapi beberapa topik seperti isu Uyghur tidak akan dihiraukan—Amerika Serikat tetap menganggap yang dilakukan pemerintahan Tiongkok kepada etnis Uighur di Xinjiang adalah sebuah genosida (New US Secretary, 2021). Hal ini menyebabkan ada kemungkinan dalam waktu dekat ketegangan antara ekonomi AS dan Tiongkok belum akan menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Di sisi lain, terdapat potensi perubahan respon kebijakan AS terhadap Tiongkok di tingkat implementasi. Hal ini dikarenakan di bawah Presiden Trump, banyak posisi di tingkat Departemen di AS yang dibiarkan kosong (Tenpas, 2020; Staf Partai Demokrat, 2020). Sementara itu, di bawah pemerintahan Biden dalam laporan Staf Partai Demokrat (2020), disebutkan rekomendasi khusus untuk mengisi posisi-posisi ini demi memperkuat Departemen Luar Negeri AS agar kebijakan luar negeri AS dapat menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, ada kemungkinan di masa depan cara Amerika Serikat dalam merespon Tiongkok selama periode Trump tidak akan terulang kembali.

Tren lain yang juga mungkin akan terjadi adalah arah politik Amerika Serikat yang lebih fokus pada isu dalam negeri (Zeihan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2020). Biden mungkin tidak menggunakan slogan *America First* seperti Trump, tetapi kebijakan luar negeri AS tetap berorientasi ke dalam negeri, atau dalam bahasa Jake Sullivan, penasihat kebijakan luar negeri Biden, kebijakan luar negeri yang "bekerja bagi keluarga pekerja di AS" *("works for working families")* (Manson, 2020). Begitu pula dengan kebijakan vaksin AS yang dituding tidak memperhatikan situasi internasional dan lebih berfokus kepada keadaan domestik (Serhan, 2021). Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena selama ini Amerika Serikat sering mengambil peran besar dalam berbagai isu yang ada di tingkat global.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh AS akan mundur dari dunia. Salah satu kasus paling menarik untuk dilihat adalah ditahannya tanker berbendera Korea Selatan yang melewati Selat Hormuz oleh Iran (Smith, 2021). Kaitannya dengan AS adalah semenjak Perang Dunia Kedua, menjamin pelayaran bebas di laut lepas merupakan bagian dari kepentingan global AS (Etzioni, 2016). Di daerah Teluk Persia, kepentingan ini mendasari lahirnya doktrin Carter, yang memosisikan Teluk Persia sebagai wilayah yang sangat penting bagi kepentingan global AS untuk menjaga keamanan suplai minyak dunia (Collins & Krane, 2017). Praktik dari doktrin ini terlihat paling jelas pada tahun 1987, pada Operasi Earnest Will, ketika AS memberi perlindungan kepada konvoi tanker di daerah Teluk Persia (Kelley, 2007). Terkait kasus kapal Korea Selatan di Selat Hormuz, posisi Amerika kembali dipertanyakan. Apakah AS akan memperdulikan nasib kapal Korea Selatan? Walaupun Biden mengatakan mendukung kebijakan AS untuk melindungi suplai minyak global (Council on Foreign Relations, 2020), tetapi hingga saat penulis menulis belum ada penyelesaian bagi masalah ini.

Walaupun begitu, bukan berarti kebijakan AS tidak berorientasi ke luar. Pemerintahan Biden telah memberi sinyal bahwa kebijakan luar negeri AS akan berfokus terhadap hubungan dengan sesama negara demokrasi (Council on Foreign Relations, 2020). Di bidang bantuan internasional, Biden juga akan memberikan fokus lebih di sektor pendidikan dan kesehatan (Cordell, 2020). Selain itu, ada pula

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemungkinan kebijakan domestik Biden memiliki dampak di tingkatan internasional. Salah satunya apabila pemerintahan Biden berhasil untuk meloloskan stimulus fiskal hijau (berfokus ke infrastruktur hijau) di Kongres, maka kebutuhan akan sumber daya alam akan melonjak. Versi paling ambisius dari kebijakan ini adalah seperti Green New Deal, yang membutuhkan banyak sumber daya alam yang tidak bisa dipenuhi dari sumber daya alam di AS saja (Dizard, 2019). Dengan kata lain, AS akan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu konsekuensi dari perubahan arah politik Amerika Serikat adalah fokus yang lebih terkonsentrasi di kawasan khusus. Misalnya, hanya di sekitar wilayah ASEAN karena AS memiliki kepentingan strategis di wilayah ini sebagai respons terhadap Tiongkok (Sokolsky dkk., 2000). Apabila situasi ini terjadi, maka bisa menjadi momentum besar bagi pembangunan ekonomi ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia harus bersiap untuk memanfaatkan kesempatan yang ada guna menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat.

D. KERJA SAMA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN PROSPEK PEMBANGUNAN INDONESIA

Setelah di bagian sebelumnya dijelaskan tren arah politik Amerika Serikat ke depan, di bagian ini dijelaskan aspek apa saja yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kerja sama di bidang teknologi hijau dan kebijakan moneter. Pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas bantuan internasional AS di bawah pemerintahan Biden. Mengingat ketegangan yang terjadi antara AS dan Tiongkok, ditambah dengan fakta bahwa Tiongkok kini meningkatkan investasi di bidang kesehatan (Shepherd, 2021), kemungkinan besar dua sektor ini akan menjadi prioritas jangka panjang AS, terutama dalam konteks pandemi Covid-19.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam konteks hubungan AS dan Indonesia di bidang kesehatan, fokus bantuan AS ke rantai pasokan vaksin (Cordell, 2020) dapat menjadi angin segar untuk meningkatkan infrastruktur medis di Indonesia. Sementara itu, di bidang pendidikan secara umumnya, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya dapat melalui cara meningkatkan jumlah beasiswa warga Indonesia ke AS dan pembentukan sekolah teknik dan kesehatan yang bekerja sama erat dengan institusi pendidikan terbaik di AS. Kerja sama antarinstitusi ini dapat dimanfaatkan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia. Ini bisa menjadi hal yang sangat bagus sebagai tahap pendidikan setelah SMK di Indonesia dan pemulihan ekonomi pada umumnya.

Potensi kerja sama kedua ada di bidang teknologi hijau. Stimulus fiskal atas pengembangan teknologi hijau di tingkatan domestik AS juga akan memiliki efek terhadap peningkatan permintaan global atas sumber daya tambang untuk bahan bakar, misalnya nikel. Faktor ini, bersamaan dengan faktor ketegangan hubungan ekonomi antara AS dan Tiongkok yang dijelaskan sebelumnya, adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk melakukan integrasi industri manufaktur dengan AS dan peluang untuk kerja sama secara umum. Kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tesla mengenai pabrik baterai dan nikel, serta telepon Presiden Jokowi dengan Elon Musk mengenai pembangunan *spaceport* untuk SpaceX di Indonesia (Rayda, 2020) adalah salah satu bentuk kerja sama yang bisa ditempuh di bidang ini. Bentuk kerja sama lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan penguasaan teknologi di tingkat manufaktur lokal dan kerja sama di bidang riset. Kerja sama ini dapat terjalin antara perusahaan atau universitas top AS dengan perguruan tinggi di dalam negeri.

Selain itu, ketegangan ekonomi antara AS dengan Tiongkok bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ke depannya. Walaupun pengaruh terhadap investasi AS di Tiongkok masih belum bisa dilihat dengan jelas, perubahan pola ini mungkin akan lebih melibatkan perusahaan swasta daripada Pemerintah AS sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan AS dapat mengeluarkan kebijakan atau insentif untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membuat perusahaan AS keluar dari Tiongkok, seperti yang dilakukan oleh Jepang (Akoyama, 2020). Di sisi lain, ketegangan antara AS dan Tiongkok telah menyebabkan beberapa perusahaan untuk memikirkan ulang operasinya di Tiongkok dan bergerak ke wilayah lain, seperti ASEAN (Hille, 2020; Reed, 2019). Dengan kata lain, perusahaan Indonesia dapat mengajukan diri menjadi calon potensial untuk bermitra dengan perusahaan AS. Terakhir adalah potensi kerja sama dengan AS di bidang kebijakan moneter. Untuk aspek ini, hubungan yang lebih strategis dengan Bank Sentral Amerika (the Fed) dapat membantu ekonomi Indonesia. Misalnya, Indonesia menerima *dollar swap line* dari the Fed untuk menjaga likuiditas dolar di pasar valas Indonesia (Akhlas, 2020). Dengan naiknya utang Indonesia yang disebabkan oleh pengeluaran lebih sebagai respons terhadap pandemi, menjalin hubungan yang lebih strategis dengan the Fed bisa membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.

Secara keseluruhan, berbagai sektor kerja sama ini memberi Indonesia peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia akibat peralihan fokus kebijakan AS, terutama akibat ketegangan dengan Tiongkok. Dengan kata lain, dengan bekerja sama di sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintahan Biden sembari membidik kekuatan AS baik di sektor teknologi maupun di sektor keuangan, Indonesia dapat mendapat manfaat sekaligus memenuhi target SDGs. Hal ini merupakan *sweet spot* antara kepentingan Indonesia dan AS yang juga menjamin perkembangan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan di antara kedua negara.

E. PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT KE DEPAN

Dunia telah menghadapi goncangan yang hebat akibat pandemi Covid-19, begitu pula dengan Indonesia. Walaupun begitu, poin SDGs ke-17 berikut dengan subpoin yang ada bukan hanya masih relevan tetapi justru semakin relevan akibat pandemi ini. Tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya tidak hanya akibat pandemi, tetapi juga tantangan-tantangan lain yang lebih bersifat jangka panjang,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti bonus demografi dan perubahan iklim. Apabila tidak dihadapi dengan hati-hati maka tantangan tersebut dapat menimbulkan masalah berkelanjutan yang dapat merugikan Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan global juga bergerak menuju arah yang berbeda dan lebih tidak stabil dibanding era sebelumnya. Meskipun pemerintahan di AS telah berganti dari Trump ke Biden, bukan berarti kondisi global kembali ke masa sebelum 2016. Dapat dikatakan, kebijakan luar negeri Biden tetap akan memberi fokus lebih ke dalam negeri walaupun lebih menekankan pada kerja sama multilateral dan berorientasi keluar jika dibandingkan dengan pemerintahan Trump. Selain itu, kebijakan luar negeri Biden yang masih bersitegang dengan Tiongkok, janjinya untuk membendung pengaruh otoritarianisme di dunia, dan fokus bantuan internasional di bidang kesehatan dan pendidikan membuka peluang kerja sama bagi Indonesia. Utamanya dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, sosial, maupun pembangunan—sesuai dengan subpoin SDGs 17, Indonesia dapat bekerja sama dengan AS. Kerja sama ini dapat terjalin di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri, hingga ekonomi.

Dalam proses menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia memang akan menghadapi banyak tantangan, tetapi ada peluang besar untuk memanfaatkan kepentingan bersama dengan AS melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Namun, satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerja sama dengan negara manapun, termasuk AS, adalah prinsip bebas aktif dan menjaga tujuan Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, kita semua tetap harus berpartisipasi aktif dan memastikan agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap bermanfaat bagi kepentingan semua pihak.

F. PRINSIP BEBAS AKTIF DEMI PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2045

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan besar kepada dunia, termasuk ke Indonesia. Efek dari Covid-19 telah memperparah berbagai kesenjangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dunia dan Indonesia, termasuk yang sebelumnya telah disoroti dalam SDGs, se-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perti SDGs 17. Tantangan-tantangan ini jika dibiarkan dapat memiliki efek yang besar terhadap masa depan Indonesia. Arah kebijakan AS di bawah Biden memberi banyak peluang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama yang dapat membantu Indonesia dalam *recovery* setelah pandemi Covid-19 dan membantu menghadapi tantangan-tantangan SDGs. Misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membantu industrialisasi Indonesia dengan integrasi rantai produksi Indonesia dengan AS, kerja sama dengan investor dan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dari AS, dan meningkatkan kerja sama moneter bilateral antara kedua negara untuk menjamin kestabilan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, kebijakan luar negeri Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, kita semua tetap harus berpartisipasi aktif dan menjaga agar kebijakan luar negeri kita tetap memperhatikan kepentingan kita semua. Kerja sama dengan AS yang berdasar kesamaan kepentingan dan tujuan seperti yang diuraikan dalam bab ini dapat menjadi kerja sama saling menguntungkan yang membantu pembangunan bangsa demi mencapai mimpi Indonesia emas 2045.

REFERENSI

Akhlas, A. W. (2020, 8 April). Bank Indonesia strikes $60b repo facility deal with US Fed as forex reserves drop. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/08/bank-indonesia-strikes-60b-repo-facility-deal-with-us-fed-as-forex-reserves-drop.html.

Akoyama, H. (2020, 9 September). Japan companies line up for "China exit" subsidies to come home. *Nikkei Asia*. https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-companies-line-up-for-China-exit-subsidies-to-come-home.

Al-Shammari, N., & Willoughby, J. (2017). Determinants of political instability across Arab Spring countries. *Mediterranean Politics*, *24*(2), 196–217. https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1389349.

Arellano, C., Bai, Y., & Mihalache, G. (2020). *Deadly debt crises: COVID-19 in emerging markets* (Working Paper No. 27275). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27275.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Asian Development Bank (2017). *Meeting Asia's infrastructure needs.* Asian Development Bank.

Chen, J. (2020). K-shaped Recovery. *Investopedia.* https://www.investopedia.com/k-shaped-recovery-5080086.

Collins, G., & Krane, J. (2017). *Carter Doctrine 3.0: Evolving US military guarantees for Gulf Oil Security* (Baker Institute Policy Brief, No. 27, April). Baker Institute https://www.bakerinstitute.org/files/11686/.

Cordell, C. A. (2020, 30 Desember). What's next for foreign aid under Biden?. *Council on Foreign Relations.* https://www.cfr.org/in-brief/whats-next-foreign-aid-under-biden.

Council on Foreign Relations. (2020, 7 November). President-Elect Biden on Foreign Policy. *Council on Foreign Relations*. https://www.cfr.org/election2020/candidate-tracker.

Council on Foreign Relations. (2021, 2 Februari). Territorial disputes in the South China Sea. *Global Conflict Tracker.* https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea.

Dickson, A. (2020). Spending review: Reducing the 0.7% aid commitment. *House of Commons Library*. https://commonslibrary.parliament.uk/spending-review-reducing-the-aid-commitment/.

Dizard, J. (2019, 22 Maret). America's Green New Deal needs copper but is there enough? *Financial Times*. https://www.ft.com/content/b25539e8-4251-3ffc-9a22-4f7efe6145ab.

Etzioni, A. (2016). Freedom of navigation assertions: The United States as the world's policeman. *Armed Forces & Society*, *42*(3), 501–517. https://doi.org/10.1177/0095327X15599635.

Eur-Lex. (2019). *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:133:TOC.

Fried, J. (2021, 13 Januari). Why Trump's attempt to delist China from US will backfire. *Financial Times.* https://www.ft.com/content/cbca56a9-2026-4176-8045-fe82248f0452.

Giles, C. (2021, 26 Januari). IMF expects US and China to recover most strongly from virus economic hit. *Financial Times.* https://www.ft.com/content/341577c5-92f2-4bd3-a235-331d0db5dbbd?accessToken=zwA

Buku ini tidak diperjualbelikan.

AAXeujOvYkc80FXfFkvJL09OiNTMdDbXbvQ.MEUCIHUSgGV_y9_U4yiFVH5n3VeFpuINYMXqHaPKj7JXHg2wAiEAl1lA4aKxTpgoLaF5rct9Knt0Y-dRZFX_eCFVVHhVJzY&sharetype=gift?token=91e75e59-1321-42dd-a3ea-edaad9dd6383.

Global Sustainable Investment Alliance. (2019). *2018 Global Sustainable Investment Review*. http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf.

Gramer, R., & Detsch, J. (2020, 17 September). U.S. democrats unveil hawkish strategy to counter China. *Foreign Policy.* https://foreignpolicy.com/2020/09/17/senate-democrat-unveil-hawkish-strategy-counter-china-biden-trump-election/.

Grewal, J., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). *Shareholder activism on sustainability issues* (Harvard Business School Working Paper, No. 17-003). Harvard Business School. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27864360.

He, Y. (2020, 10 Juni). After the pandemic: More or less anarchy?. *China-US Focus.* https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/after-the-pandemic-more-or-less-anarchy

Hille, K. (2020, 6 Oktober). The great uncoupling: One supply chain for China, one for everywhere else. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/40ebd786-a576-4dc2-ad38-b97f796b72a0.

INFID. (2017). Sustainable Development Goals. https://www.sdg2030indonesia.org/

Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia. *Populasi*, *23*(1), 1–19. https://doi.org/10.22146/jp.8559.

Katugampola, N., & Calvi, B. (2021, 4 Januari). A sustainable future? 5 sustainable investing themes that will define 2021. *Morgan Stanley Investment Management.* https://www.morganstanley.com/im/en-us/registered-investment-advisor/insights/articles/5-sustainable-investing-themes-that-will-define-2021.html.

Kelley, S. A. (2007). *Better lucky than good: Operation Earnest Will as gunboat diplomacy*. Naval Postgraduate School.

Kompas TV. (2020, 19 April). Memprihatinkan, satu keluarga kelaparan tak makan 2 hari karena dampak corona [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=V2J_vUkSgzk.

Lewis, R. (2020, 8 Desember). Decoupling from China rejected by Biden team. *Asia Times.* https://asiatimes.com/2020/12/decoupling-from-china-rejected-by-biden-team/.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mancini, D. P., & Peel, M. (2020, September 2). "Vaccine nationalism" delays WHO's struggling Covax scheme. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/502df709-25ac-48f6-aee1-aec7ac03c759

Manson, K. (2020, 25 November). Biden's foreign policy: The return of American exceptionalism. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/7b687a78-109c-416e-9795-793bb017f964.

Moghadas, S. M., Shoukat, A., Fitzpatrick, M. C., Wells, C. R., Sah, P., Pandey, A., Sachs, J. D., Wang, Z., Meyers, L. A., Singer, B. H., & Galvani, A. P. (2020). Projecting hospital utilization during the COVID-19 outbreaks in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(16), 9122–9126. https://doi.org/10.1073/pnas.2004064117.

Mohanty, S., Wassmann, R., Nelson, A., Moya, P., & Jagadish, S. V. K. (2013). *Rice and climate change: Significance for food security and vulnerability* (IRRI Discussion Paper Series, No. 49). International Rice Research Institute. http://books.irri.org/DPS49_content.pdf.

Napoletano, E. (2021, January 21). Environmental, social and governance: What is ESG investing? (B. Curry, Ed.). *Forbes Advisor*. https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/

Nasruddin, Alhamid, M. I., Daud, Y., Surachman, A., Sugiyono, A., Aditya, H. B., & Mahlia, T. M. I. (2016). Potential of geothermal energy for electricity generation in Indonesia: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *53*, 733–740. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.032

Neumann, B., Vafeidis, A. T., Zimmermann, J., & Nicholls, R. J. (2015). Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding - A global assessment. *PLOS ONE*, *10*(3), 1–34. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118571.

New US secretary of state Blinken favours cooperation with China despite "genocide" of Uighurs. (2021, 28 Januari). *The Straits Times*. https://www.straitstimes.com/world/united-states/new-us-secretary-of-state-blinken-favours-cooperation-with-china-despite.

Niblett, R. (2021). Global Britain, global broker A blueprint for the UK's future international role. Dalam *Chatham House* (1–68). The Royal Institute of International Affairs Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-01-11-global-britain-global-broker-niblett.pdf

Oxfam. (2020). *The hunger virus: How Covid-19 is fuelling hunger in a hungry world*. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Palma, S. (2020, June 15). Jakarta to use QE for as long as needed to tackle pandemic. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/9420eee8-5ee9-4c7e-ad67-b27d4b1ac539

Rahmstorf, S. (2010). A new view on sea level rise. *Nature Climate Change*, *1*, 44–45. https://doi.org/10.1038/climate.2010.29.

Rayda, N. (2020, 14 Desember). Jokowi invites Elon Musk to consider Indonesia as SpaceX launch site. *Channel News Asia,* https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesia-jokowi-elon-musk-spacex-launch-site-biak-papua-13768726.

"Spend as much as you can," IMF head urges governments worldwide. (2021, 15 Januari). *Reuters.* https://www.reuters.com/article/us-russia-imf/spend-as-much-as-you-can-imf-head-urges-governments-worldwide-idUSKBN29K1XJ.

Reed, J. R. (2019, 1 September). President Trump ordered US firms to ditch China, but many already have and more are on the way. *CNBC;* https://www.cnbc.com/2019/09/01/trump-ordered-us-firms-to-ditch-china-but-many-already-have.html.

Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2018). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, *57*(7), 2117–2135. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261.

Sanderson, H. (2020, 1 September). Tesla's nickel quest highlights metal's environmental burden. *Financial Times.* https://www.ft.com/content/5d6fc188-2b9c-4df7-848e-a6c1795dc691.

Serhan, Y. (2021, 4 February). Joe Biden's "America first" vaccine strategy. *The Atlantic.* https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/joe-biden-vaccines-america-first/617903/.

Shepherd, C. (2021, 26 Januari). China pours money into green belt and road projects. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/8ec30baf-69e9-4d73-aa25-13668dcb659f.

Smith, F. (2021, 7 Januari). South Korea presses Iran over seized oil tanker as Gulf tensions rise. *DW*. https://www.dw.com/en/south-korea-iran-oil-tanker-sanctions/a-56156528.

Sokolsky, R., Rabasa, A., & Neu, C.R. (2000). The role of Southeast Asia in US strategy toward China. RAND Corp.

Staf Partai Demokrat AS. (2020). Diplomacy in crisis: The Trump administration's decimation of the State Department. *Committee on Foreign Relations*,*United States Senate*. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Diplomacy%20in%20Crisis%20--%20SFRC%20Democratic%20Staff%20Report.pdf.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Statista. (2020). *Ranking of the average number of hospital beds available per 1,000 people in Asia by country 2020*. https://www-statista-com.libproxy.ucl.ac.uk/forecasts/1167587/hospital-bed-density-in-asia-by-country.

Stott, P. (2016). How climate change affects extreme weather events. *Science*, *352*(6293), 1517--1518. https://doi.org/10.1126/science.aaf7271.

Tapia, J. F. D., Doliente, S. S., & Samsatli, S. (2021). How much land is available for sustainable palm oil? *Land Use Policy*, *102*, 105187. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105187.

Tenpas, K. D. (2020, 24 September). Vacancies, acting officials and the waning role of the U.S. Senate. *Brookings Institute*. https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/09/24/vacancies-acting-officials-and-the-waning-role-of-the-u-s-senate/.

ThePrint. (2020). *Off the cuff with Thomas Friedman* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KkwRieeP9gE.

Tran, V. T. (2013). The middle-income trap: Issues for members of the Association of Southeast Asian Nations. *SSRN Electronic Journal*, *421*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2266239.

United Nations. (t.t.). *Sustainable development goals knowledge platform*. https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals.

Wheatly, J. (2020, November 13). World's poorest countries get fresh debt relief hope from creditor nations. *Financial Times*. https://www.ft.com/content/a7b160fe-784c-48e9-b959-4c2174d37c91

World Bank. (2021). GDP (current US$)-Indonesia. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID.

World Food Programme. (2020, June 29). *World Food Programme to assist largest number of hungry people ever, as coronavirus devastates poor nations*. https://www.wfp.org/news/world-food-programme-assist-largest-number-hungry-people-ever-coronavirus-devastates-poor.

Zeihan, P. (2020, November 4). Beyond the election: Part I. *Zeihan on Geopolitics Global View;* https://us11.campaign-archive.com/?u=de2bc41f8324e6955ef65e0c9&id=bd0cc85e35.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB III

Revitalisasi Kerja Sama Indonesia-Tiongkok sebagai Upaya Mencapai SDGs No. 17

Ahmad Hidayat & Kurnia Trisno Yudhonegoro,

Memahami hubungan terkini Indonesia-Tiongkok, termasuk lewat sudut pandang *Sustainable Development Goals* (SDGs), tidak terlepas dari sejarah relasi kedua negara di masa lampau. Berbagai momentum historis menjadi referensi kedua negara dalam berinteraksi, yang cenderung pragmatis. Sedari awal munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, selalu ada keterkaitan antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini penting untuk dipahami secara baik agar tujuan penulisan bab ini, yakni analisis revitalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok selaras dalam memperkuat capaian SDGs 17, dapat dijelaskan dengan baik serta reflektif terhadap kondisi masa lampau.

Berkembangnya *city-states* dan kerajaan berbasis mandala (*zone of influence*) di Nusantara merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari ketidakamanan di Jalur Sutra darat yang terimbas konflik antara Kekaisaran Tiongkok dan suku nomadik pada akhir abad ke-2 Masehi (Munoz, 2006). Kontak dagang serta pertukaran ide, barang, dan kekayaan merupakan poin penting yang didapatkan dari kemunculan 'Jalur Sutra maritim' (Rabeya & Hossain, 2019) yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melintasi Nusantara. Kebangkitan dan keruntuhan kerajaan awal di Nusantara juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kestabilan politik di Tiongkok; sebuah contoh sempurna adalah turunnya permintaan di pasar Tiongkok yang berakibat pada kejatuhan banyak *city state* di pesisir Semenanjung Malaya dan pesisir timur Pulau Sumatra, serta kemunculan Dinasti Tang yang berimbas pada kebangkitan Kerajaan Sriwijaya (Munoz, 2006).

Pada masa selanjutnya, hubungan antara kerajaan di Nusantara dengan Tiongkok semakin erat pada saat Laksamana Cheng Ho melaksanakan misi kunjungannya yang terkenal, di mana akulturasi dan penyebaran pengaruh diplomasi maupun ekonomi Tiongkok menjadi semakin solid di Nusantara (Chen, 2009). Di Nusantara sendiri terjadi dikotomi yang kental di antara ekonomi Pulau Jawa dan luar Jawa, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi Jawa lebih berorientasi ke dalam, sementara ekonomi luar Jawa lebih berorientasi keluar (Ricklefs, 2008), hal ini sedikit banyak menjadi dasar relasi politik Indonesia ke depan.

Pada masa pasca-kemerdekaan, hubungan Tiongkok-Indonesia mengalami pasang surut yang ekstrem. Kemesraan hubungan Tiongkok-Indonesia dimulai pada pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 (Poesponegoro, & Notosusanto, 2010), dan hubungan kedua negara menjadi semakin erat sampai pada satu titik puncaknya adalah banyak anggota tim dokter kepresidenan yang berasal dari Tiongkok serta banyaknya proyek *technical assistance* dan pinjaman lunak yang diberikan oleh Tiongkok (Anwar, 2006). Kehangatan hubungan kedua negara kemudian berubah menjadi hubungan yang beku setelah terjadinya G30S/PKI, di mana hubungan diplomatik kedua negara dibekukan oleh pihak Indonesia pada pertengahan tahun 1967 (Ricklefs, 2008).

Runtut panjang perjalanan sejarah Tiongkok-Indonesia tidak melulu berdasar kepada hubungan antar kerajaan-negara. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia juga menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia penuh dengan kisah konflik horizontal, di antaranya yang paling terkenal adalah *geger pecinan*,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketika VOC "mendorong" terjadinya pembantaian ribuan etnis Tionghoa karena ketakutan akan membelot (Daradjadi, 2017). Di sisi lain, pembantaian ini justru menghasilkan persekutuan pertama antara etnis Tionghoa dan pribumi Jawa untuk menghadapi VOC, dalam perang yang sering disebut Perang Cina Jawa 1740–1743 (Ricklefs, 2008). Pasca-perang ini, etnis Tionghoa kembali diberikan tempat hidup yang tersegregasi seperti sebelumnya serta tidak diperbolehkan untuk memiliki lahan atau turut langsung mengelola perkebunan, tetapi mereka masih diizinkan untuk berdagang dan mengelola kredit (Onghokham, 1989). Namun, justru karena serangkaian peraturan inilah etnis Tionghoa berperan penting sebagai alat "penengah" antara aparat negara milik kolonial Belanda dan subjek mereka, yaitu Pribumi di Hindia Timur Belanda, tanpa perlu memberikan ekstra uang atau wewenang kepada para bangsawan pribumi (Chua, 2006). Setelah Era Kolonial, etnis Tionghoa kembali memegang peranan penting pada ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Lama, pemerintah mencoba untuk melakukan sinergi melalui sistem Ali-Baba (Pribumi dan Tionghoa), tetapi yang terjadi malah ekonomi sistem rente dan korupsi (Ricklefs, 2008). Barulah pada masa Orde Baru, tepatnya di pertengahan 1970-an, muncul semacam kongsi antara konglomerasi etnis Tionghoa dan rezim yang berkuasa, di mana kekuatan ekonomi diberikan oleh para konglomerasi, sedangkan perlindungan diberikan oleh rezim yang berkuasa (Onghokham, 1989). Kecemburuan dan ketegangan sosial antara Pribumi dan etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada kejadian di penghujung pemerintahan Orde Baru, yaitu kerusuhan Mei 1998, di mana banyak usaha milik keturunan Tionghoa yang dirusak, dibakar, dan dijarah massa serta banyak warga keturunan Tionghoa yang mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan hingga terluka dan tewas (Jusuf dkk., 2008)

Semua hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok seringkali terbatas pada manfaat pragmatis hubungan dagang-investasi, dengan potensi konflik politik dan sosial budaya yang cukup tinggi. Tensi hubungan kedua negara dapat tiba-tiba menjadi sangat buruk apabila masalah politik muncul ke permukaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan reaksi publik yang cukup sensitif, seperti pada kasus Laut Natuna Selatan, buruh pabrik asing, dan isu lainnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu isu yang bisa menghambat tumbuh kembangnya negara, antara lain yang diejawantahkan dalam SDGs, terutama SDGs 17 yang mensyaratkan adanya kerja sama yang menyeluruh di antara kedua negara, tidak sekadar kepentingan pragmatis jangka pendek.

A. KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDONESIA-TIONGKOK TERKINI: INVESTASI, PINJAMAN, PERDAGANGAN, DAN BANTUAN

Sejarah hubungan kedua negara yang naik turun dari masa kerajaan sampai di awal kemerdekaan menjadi acuan hubungan terkini. Potensi konflik yang cukup besar di antara kedua negara tidak menghambat berbagai kerja sama ekonomi pembangunan yang tetap berjalan. Hubungan pembangunan tersebut meliputi beberapa sektor utama, seperti investasi, pinjaman, perdagangan, dan bantuan. Aspek tersebut penting sebagai landasan mengkaji kerja sama berwawasan SDGs kedua negara, SDGs 17 yang secara resmi dimulai di tahun 2015.

Pertama berkaitan dengan investasi atau arus modal. Kedua negara, Indonesia-Tiongkok memiliki kemitraan yang kuat di bidang ini, ditunjukan oleh peningkatan investasi langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) Tiongkok setiap tahunnya. Pada Semester I 2020, realisasi investasi dari Tiongkok (gabungan dari Tiongkok dan Hongkong) mencapai total 4,2 miliar USD, merupakan yang terbesar setelah Singapura (Indonesia tetap optimis, 2020). Kondisi ini sejalan dngan data pertumbuhan pesat FDI Tiongkok di Indonesia yang hampir mencapai 10 kali lipat dalam satu dekade (2009–2019). FDI Tiongkok yang dulunya hanya 0,23 miliar USD di tahun 2009 tumbuh pesat mencapai 2,22 miliar USD di tahun 2019. Lonjakan terbesar terjadi di tahun 2012, yang mencapai 100 persen dalam satu tahun. FDI Tiongkok sempat turun di masa pemilu 2014, kemudian kembali meningkat secara stabil setiap tahun di masa pemerintahan Jokowi. Lebih detail data pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

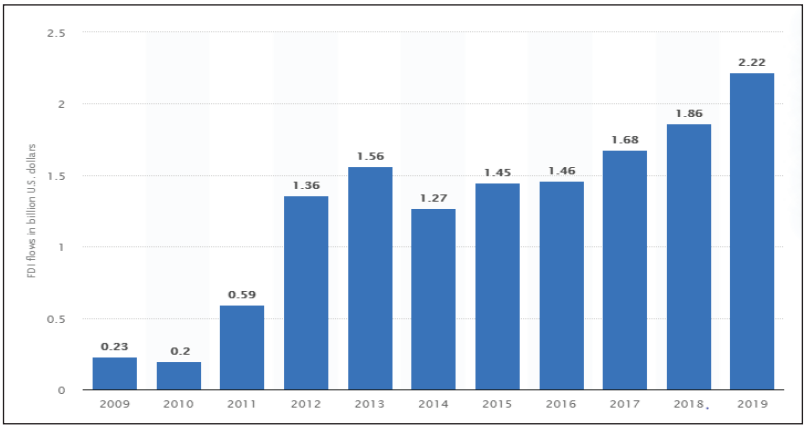

Sumber: Textor (2020)

Gambar 3.1 Foreign Direct Investment Tiongkok ke Indonesia 2009–2019 (Miliar USD)

Dari segi sektor, potret investasi Tiongkok di Indonesia semenjak 2015 hingga triwulan III 2020 mayoritas berkonsentrasi pada industri logam dasar (42% dari total investasi) atau sebanyak 7,32 miliar USD. Dua proyek yang menjadi contoh untuk sektor ini adalah pengembangan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku. Kemudian, diikuti oleh investasi pada sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi (20%) sebesar 3,43 miliar USD dengan Kereta Cepat Indonesia-China Jakarta Bandung sebagai proyek percontohan, serta investasi di sektor listrik, gas, dan air sebesar 3,28 miliar USD (19%) (Lahadalia, 2021). Investasi pada sektor manufaktur dasar, pertambangan, dan transportasi masih sangat dominan.

Sektor yang digarap oleh kedua negara masih belum merefleksikan sektor industri berkelanjutan seperti energi terbarukan, ekonomi kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, atau lingkungan. Investasi Tiongkok yang pesat tidak diiringi oleh penguatan investasi sektor berkelanjutan di Indonesia. Investasi berkelanjutan masih sangat tertinggal di Indonesia karena berbagai hal, termasuk pemahaman yang salah terkait berkelanjutan/ekonomi hijau dan keuntungannya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(Pramudya dkk., 2018). Walaupun begitu, hal ini sekaligus indikasi masih ada banyak ruang gerak untuk investasi pada bidang jasa, terutama jasa yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, sektor pendidikan, dan R&D lainnya (Lahadalia, 2021) serta sektor energi baru dan terbarukan.

Data investasi Tiongkok di Indonesia hampir sejalan dengan data pinjaman yang tumbuh pesat. Pinjaman dari Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir meningkat hampir 8,5 kali lipat (2,488 juta USD pada 2010, menjadi 20,632 juta USD di tahun 2020) berdasarkan laporan utang luar negeri oleh Bank Indonesia (2021). Hal ini jauh lebih besar dibandingkan pinjaman Indonesia dari Amerika Serikat yang dulunya menjadi pemain utama (5,598 juta USD pada tahun 2010, menjadi 30,409 juta USD di tahun 2020 atau 5,5 kali lipat). Peningkatan utang luar negeri dari Tiongkok dalam 10 tahun tumbuh sangat pesat mencapai 656%, dengan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2015 setelah presiden Jokowi aktif berkuasa. Orientasi pembangunan infrastruktur Jokowi sangat berkontribusi besar terhadap meroketnya utang Indonesia secara umum, terutama kepada Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat lebih detail pada Gambar 3.2.

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Gambar 3.2 Utang Luar Negeri Indonesia dari Tiongkok 2010–2020 (juta USD)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemanfaatan utang dari Tiongkok juga masih sangat terbatas di sektor berkelanjutan. Proyek infrastruktur seperti tol, bandara, bendungan, dan pelabuhan yang berkaitan erat dengan investasi Tiongkok di sektor industri ekstraktif masih mendominasi portofolio utang Indonesia. Pinjaman Tiongkok cenderung menjadi alternatif instan pendanaan pembangunan fisik yang sulit didapatkan dari negara Barat. Hal ini terlebih disaat pandemi yang membuat kondisi perekonomian Indonesia sulit pendanaan. Secara makro fiskal 2021, pemerintah Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa total penarikan utang baru sebesar 1.177 triliun Rupiah kurang lebih sama dengan 67% dari total target rencana pendapatan negara. Hal ini disebabkan antara lain karena beban bunga utang yang semakin meningkat, menjadi 373 triliun Rupiah atau setara dengan 13% dari total belanja negara atau 21% dari pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2021). Padahal pada saat yang sama, kebutuhan investasi Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan 5% diestimasikan sebesar 5.800–5.900 triliun rupiah, dengan 90% berasal dari sektor swasta (Irawan, 2020).

Kemudian dari segi arus perdagangan**,** Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia dengan nilai ekspor tahun 2019 hampir mencapai 28 miliar US$, atau sekitar 16,67% dari total ekspor Indonesia. Sejak 2015, ekspor ke Tiongkok selalu meningkat cukup stabil setelah beberapa tahun selalu melemah sejak 2010. Akan tetapi, peningkatan ekspor tidak bisa dikomparasikan dengan lonjakan impor yang terjadi sejak 2010, mencapai lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade. Nilai impor 2019 mencapai 72,8 miliar USD atau 21% dari total nilai impor (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini tentunya berakibat pada besarnya tekanan defisit neraca perdagangan Indonesia setiap tahun. Lebih detail hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

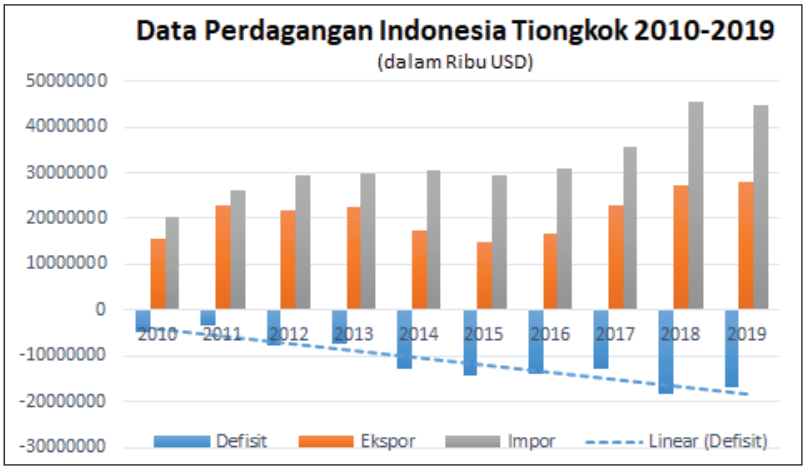

Sumber: International Trade Center (2019)

Gambar 3.3 Data Perdagangan Indonesia Tiongkok 2010-2019 (dalam ribu USD)

Ketidakseimbangan perdagangan kedua negara juga berkaitan dengan produk yang ditransaksikan. Indonesia masih menjadi sumber bahan baku industri olahan Tiongkok terutama dari segi tambang, seperti batu bara, nikel, dan timah, selain juga serat alam seperti seperti kayu, sawit, ikan, coklat, dan lainnya. Di sisi lain, Tiongkok banyak mengekspor elektronik, mesin, plastik, dan produk rumah tangga lainnya. Indonesia cukup konsumtif terhadap barang-barang murah dari Tiongkok yang juga membanjiri pasar global. Hal tersebut tentunya masih sangat kontroversial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Sejauh ini belum ada bentuk perdagangan yang fokus meningkatkan transaksi produk ramah lingkungan. Masyarakat Indonesia yang masih sangat sensitif harga banyak mengorbankan aspek berkelanjutan dari produk yang dikonsumsi. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga belum memiliki komitmen kuat untuk fokus pada produksi manufaktur ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.

Terakhir adalah aspek kerja sama bantuan luar negeri (*foreign aid*). Aspek ini penting bagi Indonesia ataupun Tiongkok dalam proses pembangunan nasional karena dapat menjadi sumber pendanaan, sekaligus media transfer teknologi dan kapasitas. Bantuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembangunan umumnya berupa hibah, kredit ringan, barang, dan pelatihan teknis. Indonesia di tahun 1990-an sampai pertengahan 2000-an masih berfokus pada bantuan negara Utara yang merupakan anggota DAC-OECD. Akan tetapi, hal ini berkurang cukup signifikan setelah 2010 ketika Indonesia dinilai sudah lebih berkembang dan harus mengurangi ketergantungan dengan bantuan luar negeri. Di saat yang bersamaan, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang drastis dan menjadi salah satu sumber pendanaan dengan arah/motivasi yang cukup berbeda dari Global Utara.

Setali dengan investasi dan utang luar negeri, bantuan Tiongkok di tahun 2016 senilai 266,09 triliun Rupiah juga difokuskan ke proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik, bendungan, atau proyek pembangunan fisik yang tidak menjadi fokus bagi negara Utara pada saat itu. Sementara itu, anggota DAC-OECD fokus kepada isu primer dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Konteks awal ini menjadi cikal bakal pendekatan Indonesia-Tiongkok menjalin kerja sama SDGs yang dimulai per 2015 menggantikan MDGs. Tiongkok dianggap sebagai alternatif dan potensi pengganti pendanaan yang berkurang dari negara-negara Utara.

Kerja sama pembangunan kedua negara mulai dari segi investasi, perdagangan hingga bantuan tidak terlepas dari beberapa permasalahan, seperti kegagalan regulasi, insentif, korupsi, ketimpangan, dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat sipil. Hal ini tentunya sekaligus menjadi hambatan bagi kerja sama pembangunan yang berkelanjutan.

Investasi asing di Indonesia, termasuk dari Tiongkok, sering terkendala regulasi yang tidak jelas, biaya pembuatan usaha yang relatif mahal, dan masih terfokusnya upaya pemerintah RI pada menarik investasi ketimbang upaya mempertahankannya (Noviannei, 2020). Upaya serius harus dilakukan, salah satu contohnya dengan proses perizinan benar-benar dilakukan di bawah satu atap seperti di Singapura, terutama di sektor prioritas SDGs. Sembari terus berpikir untuk mencari perbaikan dan mengejar perusahaan besar dan investor (Yew, 2011). Di sisi lain, penggelontoran insentif besar-besaran berupa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemudahan pajak, subsidi, dan tindakan proteksionisme lainnya juga beresiko untuk menciptakan pengusaha 'kapitalis semu', yang tergantung pada fasilitas dan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan usahanya (Prasetiantono, 2005). Pemerintah Indonesia harus dapat fokus mengatasi isu kebijakan yang tidak tepat sasaran agar insentif dan birokrasi kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar dan minim potensi korupsi.

Terakhir, isu dalam kerja sama pembanguan kedua negara adalah partisipasi multipihak dalam pelbagai isu sistemik, terutama pelibatan organisasi masyarakat (*Civil Society Organization,* CSO), pelaku usaha, ataupun akademisi dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua negara diharapkan dalam diskusi penguatan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai SDG. Hal ini dapat berupa advokasi suara masyarakat, data lapangan, dan lainnya. Jika menggunakan indikator UN, Indonesia dan Tiongkok dianggap masih rendah dalam melibatkan aktor non negara dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat rendah sejalan dengan terbatasnya sarana dialog yang dan keterbukaan pemerintah dalam proses pembangunan. Perkembangan pesat ekonomi Tiongkok tidak diiringi oleh transformasi pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka bagi publik domestik dan internasional. Kritik pembangunan masih sangat sulit terwujud dengan adanya ancaman persekusi. Kondisi yang sama terjadi di Indonesia masa pemerintahan Soeharto yang menjadi salah satu sejarah kelam demokrasi Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia bekerja sama dengan Tiongkok yang memiliki keterbukaan rendah. Indonesia sebagai negara berkembang juga dapat terjebak dalam kondisi yang sama.

B. ANALISIS KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDONESIA-TIONGKOK DARI SUDUT PANDANG SDGS 17: HORIZONTAL DAN VERTIKAL

SDGs 17 mensyaratkan pentingnya kerja sama antarpihak dan sektor untuk mencapai keseluruhan goals. Hal ini meliputi lima bidang utama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yaitu, pendanaan, teknologi, pengembangan kapasitas, perdagangan-investasi, dan isu sistemik/multi stakeholder yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Kelima komponen tersebut diturunkan lebih detail melalui 25 indikator dalam 19 target (UNDESA, 2015). SDGs 17 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan negara berkembang atau miskin mencapai target dari agenda pembangunan berkelanjutan global 2030. Negara maju dan negara berkembang didorong untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dan menyelaraskan kebijakan masing-masing agar tercapai sinergi pembangunan berkelanjutan.

Khusus pada konteks hubungan Indonesia-Tiongkok, hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, hubungan Indonesia-Tiongkok sebagai sesama negara berkembang dan *emerging economies* (hubungan horizontal)—hubungan Selatan-Selatan. Kedua, Tiongkok sebagai negara dominan (*superpower*) dengan ekonomi maju yang berpengaruh bagi Indonesia (hubungan vertikal). Hubungan bentuk kedua dapat digambarkan sebagai hubungan Utara-Selatan ketika Tiongkok lebih kuat secara ekonomi-politik dibandingkan Indonesia.

Dari segi relasi horizontal, kerja sama pembangunan Indonesia-Tiongkok sama-sama tidak progresif mengejar pembangunan berkelanjutan menimbang sesama status negara berkembang. Tidak adanya kondisionalitas untuk reformasi menjadi salah satu ciri khas hubungan kerja sama pembangunan kedua negara secara horizontal. Hal ini tampak dari mudahnya akses pinjaman dan bantuan Tiongkok ke Indonesia. Berbeda dengan negara OECD yang memiliki urgensi untuk mendorong transformasi ekonomi hijau, HAM, dan keterbukaan publik. Dengan kata lain, kedua negara tidak fokus mengarahkan kerja sama pembangunan menuju SDGs.

Tiongkok selalu berusaha menunjukan kesetaraan hubungan kedua mitra secara simbolik seperti yang terjadi pada Pertemuan Puncak Forum Kerja Sama Afrika-Tiongkok. Tiongkok sebagai tuan rumah secara khusus memilih meja bundar berukuran raksasa agar para kepala negara/pemerintahan bisa secara sejajar duduk, tanpa ada satu negara yang lebih menonjol (Jiaxuan, 2011). Kondisionalitas menjadi salah satu kritik terbesar dari bantuan pembangunan negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dunia pertama terhadap negara berkembang. Kondisi ini sejalan dengan tujuan kesetaraan yang diamanatkan SDG secara global. Indonesia dapat lebih leluasa dalam menentukan prioritas pendanaan dari Tiongkok dibandingkan negara Utara dengan kondisionalitasnya. Akan tetapi, penting bagi kedua negara untuk sama-sama memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan.

Terdapat persepsi negatif terhadap bantuan pembangunan, investasi, atau kegiatan ekonomi lainnya dari Tiongkok di negara berkembang, terutama di kalangan elit nasional dan internasional. Di Latin Amerika peningkatan kegiatan ekonomi Tiongkok memunculkan *winner* dan *loser*, ketika kalangan usahawan mendapat penikmat keuntungan terbesar dengan *privilege* ekonomi yang dimiliki (Eichenauer dkk., 2018). Hal ini menggarisbawahi potensi ketimpangan dan eksploitasi lingkungan.

Bergerak menuju agenda berkelanjutan sulit bagi negara berkembang yang masih belum mencapai level teknologi dan pengetahuan terkini. Ini sejalan dengan pokok kedua yaitu Indonesia-Tiongkok sama-sama memiliki keterbatasan dalam mencapai proteksi lingkungan dan inklusivitas. Masalah lingkungan masih dominan sebab investasi Tiongkok rentan merusak lingkungan dan rawan konflik dengan warga lokal (dikarenakan adanya bentuk eksploitasi lingkungan dan sosial dalam kegiatan ekonomi). Indikasi menguatnya otoritarianisme di kedua negara juga menghambat partisipasi publik dalam kemitraan SDGs. Selain itu, donor baru dari Selatan global, seperti Tiongkok, membuat investasi tersedia tanpa standar dan kondisi bantuan tradisional. Mereka memprioritaskan kepentingan bersama dan solusi "sama-sama menguntungkan"—hampir tanpa transparansi dan pengukuran hasil pembangunan (Pipa, 2019). Masyarakat internasional memiliki pengamatan yang lebih spesifik tentang bantuan luar negeri Tiongkok daripada sebelumnya, dengan beberapa masalah, seperti transparansi, dampak lingkungan, komunikasi dengan komunitas lokal, dan promosi pekerjaan serta pertumbuhan telah dibahas dalam diskusi yang luas dan terperinci. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pengaruh internasional dari bantuan luar negerinya,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tiongkok perlu memberikan perhatian yang cukup pada pertanyaan-pertanyaan di atas (Haibing, 2017).

Perspektif terakhir adalah relasi vertikal Indonesia-Tiongkok. Tiongkok pada posisi negara yang masih tertinggal dibandingkan rival negara maju di sektor lingkungan, *governance* dan sosial tidak menggunakan SDGs 17 sebagai tujuan, melainkan cara dalam membangun kekuatan. Terdapat ketidakpastian terhadap motivasi ataupun arahan jangka panjang dari peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok di kawasan. Indonesia yang dianggap sebagai *primus interpares* bagi ASEAN memiliki kekhawatiran terhadap peningkatan *power* Tiongkok di kawasan yang dapat mengubah relasi *power* di ASEAN serta kerja sama di dalamnya (Sukma, 2009). Hal ini sejalan dengan beberapa tulisan terkait relasi patronase yang muncul dari kerja sama Tiongkok dengan negara-negera Afrika yang jauh lebih terbelakang dan konfliktual (Akanle & Adesina, 2018). Tiongkok pada konteks tersebut dapat dimaknai sama dengan relasi *power* Utara-Selatan yang terlebih dahulu didirikan oleh negara Eropa di Benua Hitam di masa kolonialisme ataupun pasca-kolonialisme dengan *Official Development Assistance* (ODA) (Goldsmith, 2002). Hal ini pada akhirnya menghasilkan kritik yang sama yaitu ancaman ketergantungan dan keamanan/kedaulatan bagi negara yang lebih lemah.

Tiongkok dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam Indonesia dan ketergantungan bagi Indonesia terhadap produk murah buatan Tiongkok. Hal ini sejalan dengan impor Tiongkok yang sebagian besar merupakan bahan baku industri manufaktur. Hasil produksi kembali masuk pasar Indonesia sebagai impor barang murah. Di sisi lain, utang yang selalu meningkat tanpa perbaikan manajemen dan birokrasi rentan disalahgunakan, layaknya jebakan utang yang dikhawatirkan Bank Dunia (International Monetary Fund [IMF], 2020).

Beban utang yang terus meningkat dan impor yang tumbuh sangat pesat dapat menjadi daya tawar Tiongkok secara politik, dari pengalaman negara Afrika dan Pasifik. Jebakan utang dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sedikit tenaga produktif telah menambah kekhawatiran kawasan itu saat kesulitan keuangan dan menjadi lebih rentan terhadap tekanan diplomatik dari Tiongkok (Ferchen & Perera, 2019). Pada konteks Indonesia, kerja sama pendanaan pembangunan dari Tiongkok tidak diarahkan secara langsung kepada pembangunan berkelanjutan, utamanya lingkungan. Melainkan, bagi Tiongkok, hal ini menjadi pengukuhan kondisi Indonesia sebagai patron, seperti perspektif negara Utara bekerja sama dengan Indonesia. Hal ini sangat krusial di saat isu Laut Natuna Utara muncul dengan adanya tindakan melanggar teritorial dari Tiongkok, seperti pencurian ikan, kapal pengintai ilegal, dan klaim wilayah.

Pada pelaksanaannya, baik pada masa lampau maupun masa kini, secara jelas masih jelas terasa ketimpangan dalam hal pendanaan dan transfer teknologi dari Tiongkok sehingga kurang membantu Indonesia dalam mencapai peningkatan indikator pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diejawantahkan dalam SDGs.

C. EMPAT POIN REVITALISASI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK

Kompleksitas hubungan Indonesia-Tiongkok harus menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Mengubah perspektif hubungan yang lebih berorientasi SDGs merupakan salah satu kunci mencapai hal tersebut. Indonesia-Tiongkok dapat meningkatkan kerja sama strategis yang berlandaskan kesejahteraan masyarakat kedua negara dengan tetap menjaga lingkungan, tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga anak cucu. Pendekatan pragmatis yang hanya menguntungkan beberapa kelompok, terutama pelaku usaha (importir khususnya) tidak sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan rentan terhadap berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan empat poin sebagai berikut.

Pertama, mengarahkan pendanaan untuk pembangunan dari Tiongkok dan Indonesia—baik itu investasi, pinjaman, maupun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hibah—ke sektor prioritas SDGs, seperti energi baru-terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Tiongkok yang memiliki keahlian/keunggulan komparatif di bidang tersebut dibandingkan negara berkembang lainnya bisa menjadi mitra strategis meningkatkan kapasitas Indonesia dalam teknologi hijau, melalui transfer teknologi dan pengetahuan. Sektor hilirisasi energi primer, seperti proyek gasifikasi dan likuifaksi batubara dengan nilai kalori rendah, dalam rangka diversifikasi bauran energi nasional dapat menjadi proyek transisi ke energi hijau. Selektif dalam perihal pendanaan penting bagi Indonesia menjawab berbagai kritik terkait minimnya dampak positif investasi Tiongkok di Indonesia walaupun selalu meningkat setiap tahunnya. Kualitas pendanaan seperti investasi dari Tiongkok harus diutamakan dari sekedar kuantitas yang sulit diawasi dan dijamin mutunya sehingga betul berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Kedua, Indonesia-Tiongkok perlu mengembangkan media atau instrumen komunikasi bagi pelaku non-negara dan bisnis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta proyek pembangunan Indonesia-Tiongkok. Kritik yang membangun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM/*NGO*) dan institusi akademik penting menjaga kebebasan dan partisipasi masyarakat, terlepas dari sistem pemerintahan Tiongkok yang cenderung tertutup. Indonesia harus akuntabel dan transparan bagi masyarakat luas, seperti yang disyaratkan target 17 dalam SDGs 17; *encourage effective partnerships.* Hal ini dapat dimulai dengan undangan terhadap NGOs dalam berbagai rapat strategis kedua negara. Suara kelompok masyarakat terutama kurang mampu dan marjinal seperti masyarakat adat dapat didengar.

Ketiga, percepatan institusionalisasi pusat investasi Indonesia dengan otoritas yang lebih luas dan profesional. Pembentukan lembaga yang lebih independen dengan sistem kerja yang lebih kompromis dengan *governance* lembaga swasta dapat membantu efektivitas dan efisiensi program. Pusat investasi (*Sovereign Wealth Fund*/SWF*)* dapat menjadi instrumen untuk menyalurkan investasi dari Tiongkok ke

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sektor-sektor yang dianggap strategis, tanpa melibatkan pemerintahan Tiongkok secara langsung. Namun, metode ini membutuhkan waktu karena lembaga SWF Indonesia belum memiliki reputasi di dunia internasional.

Keempat, menjaga *balance of power* dengan Tiongkok, yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan kawasan dan Indonesia. Ekonomi politik Indonesia harus terbuka dan mendorong keterlibatan mitra besar lainnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India untuk relasi power yang lebih berimbang. Regionalisme dan multilateralisme tetap didorong agar mendilusi kekuatan daya tawar Tiongkok. Mempertahankan sentralitas ASEAN merupakan salah satu bentuk mencapai hal tersebut dalam berbagai event lintas kawasan seperti ASEAN++, East Asian Summit, Regional Economic Partnership (RCEP), dan EU-ASEAN. Indonesia harus dapat mengoptimalkan keberadaan ASEAN sebagai daya tawar menghadapi Tiongkok.

Kesimpulannya, hubungan Indonesia-Tiongkok yang masih sangat pragmatis memengaruhi upaya pencapaian SDGs 17 terutama dalam hal kerja sama lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat. Sejarah masa lampau, perbedaan budaya, ideologi, sudut pandang pembangunan ekonomi turut andil dalam hal tersebut. Pada akhirnya, relasi horizontal kedua negara sebagai sesama negara berkembang tidak mendorong terjadinya percepatan pembangunan berkelanjutan dari bantuan luar negeri dan investasi. Secara vertikal, Tiongkok yang semakin kuat dan menuju *superpower* dengan menantang AS dapat memanfaatkan kerangka kerja sama ini sebagai alat tekanan diplomatik di isu-isu sensitif seperti Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengubah perspektif kerja sama dengan Tiongkok menjadi lebih substansial dan terarah ke SDGs sehingga lebih selektif dan terbuka dengan aktor non-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan kunci utama SDGs yaitu pembangunan yang berorientasi jangka panjang, tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi melainkan juga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Akanle, O., & Adésìnà, J.O. (2018). Introduction: The Development of Africa: Issues, Diagnoses and Prognoses. Dalam O. Akanle & J. Adésìnà (Eds.), *The Development of Africa* (pp. 1-8). Springer, Cham.

Anwar, R. (2006). *Sukarno-Tentara-PKI : Segitiga kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965.* Yayasan Obor Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2020, 23 Juli). *Nilai ekspor menurut negara tujuan utama (Nilai FOB: juta US$), 2000-2019*. https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2019.html.

Bank Indonesia. (2021). *Indonesia external debt statistics*. https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/.

Chen, D. (2009). *Cheng Ho and Islam in South East Asia.* Institute of Southeast Asian Studies.

Chua, C. 2006. *Chinese big business in Indonesia: The State of capital* [Tesis PhD, National University of Singapore]. ScholarBank@NUS. https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/15592.

Daradjadi. 2017. *Geger Pacinan 1740-1743 persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC.* Kompas Gramedia.

Eichenauer, V. Z., Fuchs, A. & Brückner, L. (2018). *The effects of trade, aid, and investment on China's image in developing countries* (Discussion Paper Series, No. 646). University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg. http://dx.doi.org/10.11588/heidok.00024209.

Eng, van der P. (2017, 2 Desember). Why does Indonesia seem to prefer foreign aid from China? *East Asia Forum.* https://www.eastasiaforum.org/2017/12/02/why-does-indonesia-seem-to-prefer-foreign-aid-from-china/.

Ferchen, M. & Perera, A. (2019, Juli). *Why unsustainable Chinese infrastructure deals are a two-way street*. Carnegie-Tshinghua Centre for Global Policy. https://carnegieendowment.org/files/7-15-19_Ferchen_Debt_Trap.pdf.

Goldsmith, E. (2002). Development as colonialism. *World Affairs: The Journal of International Issues*, *6*(2), 18–36. http://www.jstor.org/stable/45064890.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Haibing, Z. (2017). The development and transformation of China's foreign aid. *CSIS*. https://www.csis.org/development-and-transformation-chinas-foreign-aid.

Indonesia tetap optimis, investasi penyokong ekonomi kala pandemi COVID-19. (2020, Juli). https://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2403401/61401

International Monetary Fund. (2020). *The evaluation of public debt vulnerabilities in lower income economies* (Policy Paper No. 20/003). https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/02/05/The-Evolution-of-Public-Debt-Vulnerabilities-In-Lower-Income-Economies-49018.

International Trade Centre. (2019). *Trade map - Bilateral trade between Indonesia and China in 2019*. https://www.trademap.org/Bilateral.

Irawan, K. I. (2020, 29 Desember). Tahun 2021 RI butuh investasi Rp 5.900 Triliun. *Kompas*. https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/12/29/ri-butuh-investasi-rp-5-900-triliun-tahun-2021/.

Jiaxuan, T. (2011). *Heavy storm and gentle breeze*. Harper Collins.

Jusuf, E. I. Timbul, H., Frishka, S., Gultom, O., & Simanjorang, R. R. (2008). *Kerusuhan Mei 1998: Data, fakta dan analisa.* Solidaritas Nusa Bangsa.

Kementerian Keuangan RI. (2021). *Informasi APBN 2021 percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.* Direktorat Jenderal Anggaran.

Lahadalia, B. (2021, 13 Januari). Mengupas kerja sama investasi China di Indonesia. *Kompas*. https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia.

Munoz, P. M. (2006). *Early kingdoms: Indonesian archipelago and the Malay Peninsula.* Continental Sales, Inc.

Noviannei, M. (2020). Mewujudkan Indonesia sebagai destinasi ramah investasi menuju Indonesia 4.0. Dalam D. Irawan dkk. (Eds.), *Mewujudkan Indonesia 4.0 Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia di Australia* (28–35). Yayasan Obor Indonesia.

Onghokham. (1989). Chinese capitalism in Dutch Java. *Southeast Asian Studies*, *27*(2), 156–176. https://doi.org/10.20495/tak.27.2_156.

Pipa, A. F. (2019. 18 November). The need to get the statistical computation of official development right. *Brookings Institute*. https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/11/18/the-need-to-get-the-statistical-computation-of-official-development-assistance-right/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah nasional jilid VI.* Balai Pustaka.

Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2018). Friend or foe? The various responses of the Indonesian state to sustainable non-state palm oil initiatives. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, *3*(1). https://doi.org/10.1186/s41180-018-0018-y.

Prasetiantono, A. T. (2005). *Rambu rambu yang diabaikan.* Kompas.

Prawiro, R. (1998). *Indonesia's struggle for economic development.* Oxford University Press.

Priyandita, G. (2019). From rivals to partners: Constructing the Sino-Indonesian strategic partnership. *Global: Jurnal Politik Internasional, 21*(1), 1–26. https://doi.org/10.7454/global.v21i1.361.

Rabeya, S., & Hossain, I. (2019). China's One Belt One Road (OBOR) Initiative and the Muslim World. *The Journal of Social, Political, and Economic studies*, *44*(1–2), 3–38.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2008.* Serambi.

Sukma, R. (2009). Indonesia-China relations: The politics of re-engagement. *Asian Survey, 49*(4), 591–608. https://doi.org/10.1525/as.2009.49.4.591

Textor, C. (2020, 25 November). Annual flow of foreign direct investments from China to Indonesia between 2009 and 2019. *Statista*. https://www.statista.com/statistics/720273/china-outward-fdi-flows-to-indonesia/

Tjhin, C. S. (2012). Indonesia's relations with China: Productive and pragmatic, but not yet a strategic partnership. *China Report*, *48*(3), 303–315. https://doi.org/10.1177/0009445512462303.

Umagapi, J. L. (2017). The rise of China-Indonesia relationship: Soft power, resources, and prospect in the future. *Indonesian Perspective, 2*(2), 131–142. https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18475.

UNDESA. (2015). *Global sustainable development report 2015*. United Nations. https://www.un.org/en/development/desa/publications/global-sustainable-development-report-2015

Yew, L. K. (2011). *From third world to first.* Harper Business.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan: *Capacity Development* dalam Program Bantuan Luar Negeri untuk Indonesia

Fauziah Rohmatika Mayangsari

Wabah pandemi SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus mengkaji ulang strategi pembangunan negaranya. Indonesia yang diprediksikan oleh beberapa ahli ekonomi akan menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia (menurut PDB) di tahun 2030 (2030, Indonesia diprediksi, 2019), kini terancam kehilangan kesempatan tersebut. Sama seperti banyak negara lain, pandemi telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% (Rosana, 2021). Tidak hanya itu, Indonesia yang masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan sejak sebelum pandemi, yakni sebesar 9,4% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2019 (Asian Development Bank, 2020), pun harus mempersiapkan diri atas kondisi yang semakin memburuk. Lembaga riset SMERU, memprediksikan akan ada penambahan sebesar 8,5 juta orang miskin baru atau peningkatan kemiskinan hingga 12,4% di tahun 2020 (Al Izzati, 2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan memulihkan ekonomi, salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia adalah bantuan luar negeri. Mengingat Indonesia bukan merupakan aktor baru dalam politik kerja sama bantuan luar negeri, pemanfaatan sektor ini tentu bisa menjadi solusi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia menduduki peringkat kelima negara penerima bantuan luar negeri terbesar di seluruh dunia (OECD, 2021a). Dana bantuan luar negeri yang diterima mayoritas digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk proyek pembangunan.

Bab ini menelaah bagaimana Indonesia sebaiknya memanfaatkan bantuan luar negeri yang diterima untuk kepentingan pembangunannya. Penulis berargumen bahwa diperlukan lebih banyak program pembangunan yang menekankan pada *capacity development* guna menciptakan hasil dan dampak yang berkelanjutan. Nantinya, program-program ini juga akan berdampak pada usaha Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 yang juga selaras dengan visi Indonesia 2045. Secara khusus, penulis berfokus pada kerja sama bantuan luar negeri yang terjalin antara Indonesia dan Australia melalui berbagai program pembangunan. Untuk menjelaskan argumen tersebut, bab ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama, identifikasi bagaimana perkembangan tren bantuan luar negeri secara umum dan khusus antara Indonesia dan Australia. Bagian ini berisi bagaimana kini dalam isu pembangunan, paradigma yang berlaku adalah *aid for development*. Bagian kedua menjelaskan konsep *capacity development* dalam pembangunan dan bagaimana konsep ini sejauh ini telah diimplementasikan di Indonesia. Bagian ketiga merupakan refleksi bagaimana Indonesia bisa melanjutkan program pembangunan yang berkelanjutan ke depannya.

A. BANTUAN LUAR NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN: AUSTRALIA DAN INDONESIA

Bantuan luar negeri adalah hubungan yang sarat nilai politik. Secara historis, bantuan luar negeri muncul pertama kali sejak akhir Perang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dunia II, sehingga secara tradisional kepentingan geopolitik seringkali menjadi motivasi utama di balik bantuan luar negeri (Bermeo, 2017). Hal ini terlihat dari bagaimana awalnya bantuan luar negeri diberikan oleh negara atau institusi donor dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan mereka. Didirikannya *Development Assistance Committee* (DAC) pada tahun 1961 di bawah payung lembaga OECD membuktikan kondisi tersebut. Bantuan luar negeri diberikan oleh negara anggota DAC dalam bentuk bantuan teknis guna meningkatkan kondisi perekonomian dan finansial negara penerima (Hynes & Scott, 2013). Bantuan teknis yang diberikan oleh donor umumnya memiliki standar dan indikator yang telah ditentukan sejak awal oleh donor sebagai syarat bantuan, misalnya orientasi pasar yang terbuka untuk ekspor dan impor.

Keberadaan tujuan pembangunan seperti *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sedikit banyak telah mengubah tatanan politik bantuan luar negeri. Namun, sebelum ada wacana MDGs pada tahun 2000, sejak tahun 1990-an mulai ada perubahan dalam praktik distribusi bantuan luar negeri. Menurut beberapa literatur pembangunan (Calleja & Prizzon, 2019; Gore, 2013), terdapat tiga tren besar perubahan dalam skema bantuan luar negeri di tingkatan global. Pertama, adanya peningkatan jumlah donor non-tradisional yang bukan merupakan anggota DAC, seperti Tiongkok. Kedua, perubahan ekonomi di negara penerima bantuan. Kini banyak negara telah "naik kelas" dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah (baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas), contohnya Indonesia. Ketiga, agenda SDGs 2030 turut mengubah praktik bantuan luar negeri yang kini tidak bisa hanya untuk tujuan materiil, tetapi lebih ke hasil pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan SDGs 2030 selaras dengan berkembangnya diskursus *beyond aid* yang digagas oleh banyak praktisi pembangunan dunia. Konsep *beyond aid* sendiri mengkritik praktik pembangunan tradisional yang dianggap asimetris antara donor dan penerima (Day, 2016). Oleh karena itu, diperlukan orientasi baru yang menekankan pada hubungan setara demi tercapainya kemakmuran bersama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lebih lanjut, alasan lain dari berkembangnya diskursus *beyond aid* adalah kritikan dari praktisi pembangunan terhadap pola pemberian bantuan luar negeri yang dianggap tidak terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan masalah global, terutama di bidang kemiskinan (Dijkstra, 2015). Di bawah paradigma baru ini, ada dorongan bagi donor untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan negara penerima. Selain itu, konstituensi pembangunan sebuah negara juga memegang peranan penting. Menurut Day (2016), kapabilitas sebuah negara dalam menjalankan program pembangunannya memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggaran bantuan luar negeri yang diterima. Dorongan inilah yang kemudian menginspirasi munculnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kolaborasi antar negara dan institusi untuk menyelesaikan isu global. Dalam jangka panjang, bentuk kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang transformatif, berskala besar dan lama, serta berkelanjutan bagi semua pihak (Al Sabbagh & Copeland, 2019). Kesepakatan yang dicapai oleh lebih dari 100 negara pada Paris Declaration on Aid Effectiveness semakin memperkuat pergeseran paradigma bantuan luar negeri. Kesepakatan Paris menekankan pada pentingnya kepemilikan (*ownership)* negara penerima bantuan atas program pembangunan yang dijalankan (OECD, 2005). Dengan kata lain, negara penerima turut terlibat dalam menentukan arah kebijakan program turunan dari bantuan luar negeri. Lebih penting lagi adalah kemampuan sebuah negara untuk menyusun strategi dalam menjalankan program pembangunan guna mendapatkan hasil yang konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai studi kasus, kerja sama bantuan luar negeri yang terjalin antara Indonesia dan Australia sedikit banyak juga menggambarkan pergeseran paradigma yang sebelumnya telah dijelaskan. Namun, sebelumnya penting untuk memahami dinamika hubungan bilateral kedua negara. Walaupun sering digambarkan memiliki perbedaan yang sangat kontradiktif dari sisi karakteristik politik, sosial dan budaya, tidak dapat dipungkiri bahwa Australia dan Indonesia adalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negara tetangga yang saling membutuhkan satu sama lain. Wilayah Indo-Pasifik adalah fokus utama dari kepentingan nasional Australia seperti tertuang dalam *Foreign Policy White Paper* (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2017). Di sisi lain, Indonesia adalah aktor penting di Kawasan Indo-Pasifik karena posisinya yang strategis. Oleh karena itu, penting bagi Australia untuk memasukkan Indonesia dalam prioritas kepentingan nasionalnya.

Bentuk kepentingan Australia ini terlihat dalam konteks bantuan luar negeri, di mana Australia telah memberikan bantuan kepada Indonesia semenjak tahun 1950-an di bawah skema Colombo Plan (Davies, 2018). Di tengah naik dan turunnya hubungan Indonesia dan Australia, bantuan luar negeri merupakan satu elemen yang cukup membantu bertahannya hubungan kedua negara. Tidak sedikit proyek kerja sama kedua negara yang membuahkan hasil positif, seperti misalnya beberapa program bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia untuk membantu transisi politik dan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi 1998 (Bayuni, 2018). Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika mantan Perdana Menteri Gareth Evans mendeskripsikan bantuan luar negeri sebagai *"ballast in the relationship"* atau bahan pemberat untuk menjaga kestabilan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia (Davies, 2018).

Selama puluhan dekade, Indonesia adalah salah satu penerima utama bantuan luar negeri Australia. Menurut data dari DevPolicy (2020a), bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pasca-Tsunami 2004. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dana bantuan luar negeri Indonesia mengalami penurunan dari A$613,7 juta di tahun 2014 menjadi A$298,5 juta di tahun 2019 (DevPolicy, 2020a). Situasi ini terjadi karena pada tahun 2016, Australia mengalihkan prioritas bantuan pembangunannya ke wilayah Pasifik melalui inisiatif *"Pacific Step-Up"* (Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], 2017). Walaupun hingga kini Indonesia masih menjadi prioritas Australia, terutama untuk wilayah Asia Tenggara, tidak ada jaminan bahwa kondisi ini akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mengingat bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, setidaknya sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, tidak menutup kemungkinan bahwa Australia akan mengkaji ulang signifikansi Indonesia sebagai penerima bantuannya.

Secara domestik, Australia mengalami perubahan yang cukup esensial dalam pengelolaan bantuan luar negeri sebagai bagian dari kepentingan luar negerinya. Sebelum tahun 2013, dana bantuan luar negeri Australia dikelola oleh lembaga independen bernama AusAID. Namun, setelah pergantian pemerintahan di tahun 2013 dari partai buruh ke partai liberal-nasional atau koalisi, Perdana Menteri Tony Abbott mengumumkan integrasi AusAID dengan DFAT atau Kementerian Luar Negeri Australia (Abbott, 2013). Perubahan ini memengaruhi strategi pengiriman dan alokasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia. Hal ini dapat dilihat karena sejak 2013, pemerintahan Australia atau koalisi kerap memotong anggaran bantuan luar negeri. Dalam kurun waktu tujuh tahun, anggaran Australia mengalami pemotongan yang cukup signifikan dari $5,2 miliar atau 0,35% total *Gross National Income* (GNI) di tahun 2012 (DFAT, 2013), menjadi sekitar $4 miliar atau setara dengan 0,21% total GNI Australia di tahun 2019 (DFAT, 2019a). Hal ini menyebabkan Australia kini menduduki peringkat donor ke-19 dari 29 negara DAC (DevPolicy, 2020b). Di sisi lain, angka ini juga menunjukkan bahwa Australia masih belum bisa memenuhi komitmennya sebagai anggota DAC OECD untuk menyumbang sebesar 0,7% dari total GNI untuk bantuan luar negeri. Namun, perlu dicatat bahwa tren ini tidak hanya terjadi di Australia, tetapi juga pada donor tradisional lainnya, terutama karena kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin tidak menentu pascapandemi COVID-19 di tahun 2020 (United Nations, t.t.).

Lebih lanjut, saat ini Australia memiliki tiga prioritas dalam bantuan luar negeri untuk pembangunan di Indonesia (DFAT 2019b). Pertama, institusi dan infrastruktur ekonomi yang efektif. Kedua, pembangunan manusia untuk masyarakat yang sehat dan produktif. Ketiga, terciptanya masyarakat inklusif melalui pemerintahan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

efektif. Tiga sektor utama yang kemudian menerima anggaran terbesar adalah pendidikan (27%), pemerintahan yang efektif (25%), serta infrastruktur dan perdagangan (25%). Menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh DFAT (DFAT 2019b), sektor prioritas ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa program yang terjalin antara Indonesia dan Australia di bawah skema bantuan luar negeri Australia (beberapa di antaranya juga melalui kerja sama dengan *multilateral development bank* seperti Bank Dunia atau ADB) yang mulai berorientasi peningkatan kapasitas sebagai bagian dari target keberhasilannya (Prizzon dkk., 2017). Beberapa program yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti MAMPU, KOMPAK, INOVASI selalu melibatkan rekan lokal sebagai pelaksana kegiatan. Bentuk nyata dari program bantuan luar negeri, termasuk kendala yang dihadapi, dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya.

B. *CAPACITY DEVELOPMENT* UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proses pelaksanaan *capacity development* dalam praktik pembangunan di banyak negara seringkali tidak semudah yang digambarkan dalam teori. Walaupun banyak pihak mengamini pentingnya *capacity development*, salah satunya sebagai mesin penggerak pembangunan manusia (Kanni, 2009), seringkali elemen ini tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti batasan waktu dan dana yang membuat proyek pembangunan cenderung berbentuk *ad-hoc* (Fanany dkk, 2011). Kondisi ini tentu menjadi masalah karena menurut Joseph Stiglitz (dalam Shimoda, 2019) *capacity development* merupakan proses pembelajaran *trial and erro*r yang melibatkan individu, institusi dan masyarakat, serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini juga selaras dengan argumen Sato (dalam Shimoda, 2019) yang menyatakan bahwa untuk melihat hasil dari *capacity development,* seringkali dibutuhkan waktu lebih dari satu siklus program.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Seperti yang telah digambarkan di bagian sebelumnya, sejak awal peningkatan kapasitas di negara penerima sudah menjadi bagian dari tujuan bantuan luar negeri. Namun hingga saat ini, ketiadaan definisi yang konkret dan ketidakjelasan cara paling efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas masih menjadi salah satu sumber kebingungan praktisi pembangunan (Wetterberg dkk., 2015). Seringkali pemahaman mengenai *capacity development* tumpang tindih dengan pemahaman terhadap *capacity building* atau *institution building.* Misalnya, beberapa praktisi mengartikan *capacity development* sebagai usaha meningkatkan kapasitas organisasi dan individu dengan cara yang kolaboratif (Fowler & Ubels, 2010). Ada juga yang memahaminya sebagai pemanfaatan tenaga eksternal untuk membantu meningkatkan kapasitas dari organisasi lokal (Land dkk. dalam Willan dkk., 2019). Di sisi lain, menurut United Nations Development Programme (UNDP), *capacity development* adalah transformasi dari dalam *(endogenous)* yang terjadi di tingkatan individu, pemimpin, organisasi hingga masyarakat (Kanni, 2009). Namun, satu hal yang kemudian membedakan *capacity development* dari praktik pemberdayaan lainnya—seperti bantuan atau kerja sama teknis—adalah sedapat mungkin program pembangunan harus melibatkan dan memanfaatkan kapabilitas yang telah ada di masyarakat lokal. Melalui proses ini, negara penerima bantuan luar negeri akan memiliki rasa kepemilikan dan akuntabilitas atas program yang berlangsung. Dengan kata lain, *capacity development* adalah proses sekaligus tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, implementasi dari program pembangunan yang dikerjakan langsung oleh masyarakat lokal sudah berjalan sejak lama. Menurut beberapa literatur pembangunan, sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia pada akhir 1990-an, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan program pembangunan yang digerakkan dari bawah oleh masyarakat atau *bottom-up local development* (Shimoda, 2019). Hal ini dikarenakan pemerintah lokal setingkat provinsi, kabupaten, dan kota kini memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

daerahnya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan adanya kebutuhan untuk proyek pembangunan yang menekankan pada pentingnya *core capacities* dari pelaku pembangunan di tingkatan subnasional. Kapasitas inti ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berkomitmen dan terlibat langsung, dari proses awal dan akhir dalam proyek pembangunan, termasuk kemampuan untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan dari proyek tersebut (Hosono dkk. dalam Shimoda, 2019). Sederhananya, pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan negara harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam atas apa yang dilakukan. Oleh karena itu, kini banyak proyek bantuan luar negeri yang menerapkan pendekatan partisipatoris guna meningkatkan kapasitas masyarakat yang menjadi target utama dari proyek tersebut.

Seperti halnya di negara lain, praktik pembangunan di Indonesia juga masih menemui kendala di lapangan. Merujuk pada beberapa literatur yang mengkaji program pembangunan dari bantuan luar negeri, terdapat dua kondisi yang kerap ditemui. Pertama, proses pencarian partner lokal yang tidak mudah sebagai penanggung jawab program. Kedua, masih kurangnya kondisi pendukung atau *enabling environment*, terutama pada program yang melibatkan hubungan antara negara dan sipil.

Salah satu faktor yang mendukung efektifitas pelaksanaan *capacity development* adalah kolaborasi yang bermakna dengan mitra yang bergerak di bidang tersebut (Wetterberg dkk., 2015; Willan dkk., 2019). Berdasarkan hasil studi terhadap program *What Works to Prevent Violence Against Women* yang disponsori oleh Pemerintah Inggris untuk negara-negara *global South*, diperlukan prekondisi berupa pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada sebelumnya agar program pembangunan mampu memenuhi target. Namun, dalam implementasinya proses pencarian mitra yang sesuai ini tidak mudah. Wetterberg dkk. (2015) pada studi tentang program KINERJA (hasil bantuan USAID), menunjukkan bahwa pada proses perencanaan awal seringkali donor menemui kesulitan untuk menemukan mitra yang sesuai. Beberapa harus melakukan penyesuaian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di tengah program agar dapat terus melaksanakan program sesuai perencanaan. Kondisi serupa ditemui oleh program *Knowledge Sector Initiatives* (KSI) hasil kemitraan Australia-Indonesia. Pada awal implementasinya, pihak KSI kesulitan untuk mendapatkan pelaksana program yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang pembuatan kebijakan dan penelitian, sekaligus keterampilan fasilitasi dan moderasi yang mumpuni (Willan dkk., 2019). Akibatnya, di beberapa tahun awal, KSI harus mencoba beberapa metode sebelum bisa menemukan mitra, baik individu maupun organisasi, yang tepat untuk menjalankan misinya.

Selain isu ketersediaan mitra yang tepat, kendala lain ada pada faktor *enabling environment* atau kondisi yang memungkinkan eksekusi program, secara khusus merujuk pada isu sistemik. Seperti yang telah diketahui, Indonesia mengalami proses demokratisasi pada tahun 1998 yang mengawali kesempatan bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses kenegaraan. Sejak 1998, banyak organisasi sipil mulai bertumbuh untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia (Antlöv dkk., 2010). Oleh karena itu, banyak donor yang memberikan bantuan luar negeri guna membantu proses transisi demokrasi Indonesia. Namun, permasalahan yang sering muncul dari proses demokratisasi adalah masalah birokrasi dan sistem yang perlu banyak pembenahan. Salah satunya terlihat dari masih adanya rasa saling curiga antara pemerintah dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di bidang penguatan demokrasi (Antlöv dkk., 2010). Oleh karena itu, tidak jarang sulit bagi NGO untuk membangun dan atau menjalin relasi yang kuat dengan institusi pemerintah. Hal ini nantinya berpengaruh pada proses implementasi kegiatan pembangunan.

Salah satu contoh dari kendala birokrasi ini terlihat pada program MAMPU. Sebagai program yang berfokus di bidang pemberdayaan perempuan, kendala yang dihadapi oleh mitra MAMPU seringkali hadir dalam bentuk resistensi institusi dan atau masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di tingkat subnasional (Savirani dkk., 2020). Contohnya yang terjadi di Bang-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kalan, Madura, ketika aktivitas mitra lokal dari MAMPU mendapat tentangan dari pemimpin desa dan masyarakat saat proses advokasi. Selain karena resistensi secara sistemik, faktor lain yang menyebabkan resistensi ini adalah norma sosial di mana struktur kuasa yang berlaku di masyarakat masih bersifat patriarkis sehingga kemudian peran perempuan di ranah non-domestik dianggap tidak layak (Wardhani & Cahyaningrum dalam Savirani dkk., 2020). Kondisi serupa juga ditemui pada fase awal KSI saat proses diagnosa permasalahan perumusan kebijakan di Indonesia. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Jackson dkk. (2020), berbagai permasalahan mulai dari minimnya anggaran riset negara, kurangnya sumber daya yang mampu mengimplementasikan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan, hingga masalah fundamental seperti regulasi yang berbelit merupakan kendala yang harus dihadapi oleh para praktisi saat menjalankan program pembangunan hasil bantuan luar negeri.

Bagian ini telah menjelaskan mengenai bagaimana elemen *capacity development* diimplementasikan dalam program pembangunan hasil bantuan luar negeri. Walaupun secara konseptual *capacity development* bukan suatu hal yang rumit, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Transisi dari *donor-oriented* program menjadi *recipient-oriented* di mana negara penerima memiliki wewenang dan keterlibatan penuh dalam implementasi memang sudah semakin terlihat. Kini banyak organisasi masyarakat, tidak hanya skala nasional namun lokal, mampu menjalankan program dengan kapasitas penuh. Namun, seperti yang dipaparkan dalam bagian ini, masih banyak isu di lapangan yang kemudian menjadi indikasi bahwa masih banyak improvisasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut.

C. REFLEKSI PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Konsep pembangunan berkelanjutan atau *development goal*s merupakan kerangka pembangunan yang disepakati bersama oleh negara anggota PBB sebagai solusi berbagai permasalahan global seperti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemiskinan, kelaparan global, ketimpangan sosial hingga krisis iklim (United Nations Development Programme, t.t.). Secara umum, agenda SDGs 2030 yang diadopsi pada tahun 2015 menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam mencapai tujuan pembangunan. Kemitraan antar-aktor di berbagai tingkatan, mulai dari global, regional, nasional, hingga lokal merupakan kunci utama. Hal inilah yang kemudian menjadi inti dari tujuan SDGs 17 yang bertema *Partnership for the Go*als. Secara khusus, tujuan ke-17 menekankan pada implementasi dan revitalisasi program pembangunan serta kerja sama yang inklusif dari berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, pelaku bisnis hingga akademisi (United Nations, 2020). Poin SDGs 17 dikembangkan dari MDGs 8 dan melingkupi kegiatan pembangunan di bidang keuangan, investasi, teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, koherensi kebijakan dan institusi, kerja sama *multi-stakeholder*, hingga ketersediaan dan akuntabilitas data (Michel, 2016). Melalui agenda ini, diharapkan pada 2030 dapat tercipta perubahan yang transformatif terhadap tantangan sistemik yang terjadi di dunia (United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability, 2018).

Selaras dengan semangat yang dibawa SDGs 17, Indonesia juga memiliki visi guna mempersiapkan diri menuju Indonesia 2045. Indonesia diharapkan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dan memiliki pembangunan yang merata serta berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama yang sudah terjalin dengan banyak negara dan institusi dalam lingkup bantuan luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kedua bab ini, politik bantuan luar negeri di tingkatan global terus mengalami perubahan. Tidak hanya dari sisi donor tetapi juga dinamika yang terjadi di negara penerima. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan tren positif tentu akan mengubah relasi dengan donor, seperti misalnya pemotongan anggaran bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia. Apabila menggunakan istilah OECD, pada akhirnya negara penerima akan diharapkan untuk "lulus" dari daftar penerima ODA karena dianggap tidak lagi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membutuhkan bantuan luar negeri (Calleja & Prizzon, 2019). Tidak menutup kemungkinan, dan atau bahkan diharapkan, Indonesia juga dapat segera masuk dalam daftar ini karena kondisi itu mengindikasikan bahwa Indonesia telah mampu untuk menjalankan proses pembangunan dalam negeri secara mandiri.

Namun, untuk mencapai kondisi tersebut tentu dibutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu solusi yang kemudian dapat dijadikan alternatif adalah program yang menekankan pada elemen *capacity development,* yang digarisbawahi dalam indikator pencapaian SDGs 17 pada poin 2, 9, 18, dan 19. Elemen ini penting karena dalam prosesnya, pelibatan mitra lokal sebagai aktor utama secara tidak langsung juga memberikan wewenang atas proses pembangunan yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, organisasi akar rumput atau individu yang terlibat dalam program dapat meneruskan proses pembangunan, bahkan setelah donor tidak lagi terlibat aktif, karena telah mendapatkan kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Hanya saja, untuk mencapai titik ini dibutuhkan kerja sama dari semua lapisan masyarakat—mulai dari rakyat, organisasi sipil, hingga institusi pemerintah. Secara khusus, seperti yang telah dijelaskan pada bagian ketiga, masalah sistem birokrasi terkadang masih menjadi kendala. Sentimen yang dimiliki oleh pemegang otoritas kebijakan, seperti misalnya pemimpin desa, terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sebaiknya segera dibenahi. Walaupun seringkali organisasi terkait memiliki strategi khusus untuk mengatasi resistensi, tetapi hal ini bisa menunda proses implementasi program pembangunan yang ada.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa transisi paradigma bantuan luar negeri yang kini lebih menekankan keterlibatan dan agensi negara penerima merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Salah satunya dengan menambah program pembangunan yang berorientasi *capacity development*. Kerja sama yang terjalin dengan salah satu donor lama Indonesia, yakni Australia, terbukti telah banyak membantu Indonesia dalam menjalankan komitmen pembangunannya. Selain itu, Australia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga terbuka untuk menyesuaikan program bantuannya agar dapat berjalan beriringan dengan rencana pembangunan Indonesia yang tercantum dalam RPJMN. Dinamika ini tentunya akan membawa manfaat positif bagi Indonesia dalam mencapai visi masa depannya.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah aktif terlibat dalam proses penyusunan program pembangunan, terutama pada penentuan sektor tujuan dari bantuan luar negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan bahwa program pembangunan yang diberikan tidak hanya menguntungkan pihak donor dan masih selaras dengan semangat *aid for development* dan SDGs secara umum. Sehingga kemudian secara keseluruhan, Indonesia mampu mendapatkan keuntungan maksimal dari kerja sama bantuan luar negeri yang didapat, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

REFERENSI

2030, Indonesia diprediksi jadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. (2019, 1 September). *Kompas*. https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/124556326/2030-indonesia-diprediksi-jadi-negara-ekonomi-terbesar-keempat-di-dunia.

Abbott, T. (2013). *The Coalition will restore strong, stable and accountable government*, https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22media/pressrel/2734800%22.

Al Izzati, R. (2020). Estimasi dampak pandemi Covid-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia. *SMERU Institute.* https://smeru.or.id/id/content/estimasi-dampak-pandemi-covid-19-pada-tingkat-kemiskinan-di-indonesia.

Al Sabbagh, S., & Copeland, E. (2019). Partnering for sustainable development: Case study of a 10-year donor–recipient partnership. *Development in Practice*, *29*(5), 651–661. https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1601161.

Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia. *Voluntas*, *21*(3), 417–439. https://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-x.

Asian Development Bank. (2020). *Poverty data: Indonesia*. https://www.adb.org/countries/indonesia/poverty.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAPPENAS. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur*. https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.

Bayuni, E. M. (2018). Indonesia and Australia: Ties that rarely bind. Dalam T. Lindsey & D. McRae (Eds.), *Strangers next door? : Indonesia and Australia in the asian century* (1st ed., 287–304). Hart Publishing.

Bermeo, S. B. (2017). Aid allocation and targeted development in an increasingly connected world. *International Organization*, *71*(4), 735–766. https://doi.org/10.1017/S0020818317000315.

Calleja, R., & Prizzon, A. (2019, Desember). Moving away from aid: Lessons from country studies. *Overseas Development Institute*. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/191128_summary_report_final_v1.pdf.

Davies, R. (2018). The unexamined gift: Australia's aid relationship with Indonesia. Dalam T. Lindsey & D. McRae (Eds.), *Strangers next door? : Indonesia and Australia in the asian century* (1st ed., 443–470). Hart Publishing.

Day, B. (2016). Australian aid after the 'Golden Consensus': From aid policy to development policy? *Australian Journal of International Affairs*, *70*(6), 641–656. https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1220493.

Department of Foreign Affairs and Trade. (2013). *Summary of Australia's overseas aid program 2012-13*. https://archive.budget.gov.au/2012-13/ministerial_statements/ms_ausaid.pdf

Department of Foreign Affairs and Trade. (2017). *Foreign policy white paper*. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf.

Department of Foreign Affairs and Trade. (2019a). *Australian aid budget summary 2019–20*. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2019-20-australian-aid-budget-summary.pdf.

Department of Foreign Affairs and Trade (2019b). *Indonesia: Development cooperation, fact sheet*. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/development-cooperation-fact-sheet-indonesia.pdf

DevPolicy (2020a), *Australian aid tracker: Destination*. http://devpolicy.org/aidtracker/destinations/.

DevPolicy (2020b), *Australian aid tracker: Comparison*. http://devpolicy.org/aidtracker/comparisons/.

Dijkstra, G. (2015). The new aid paradigm: A case of policy incoherence. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, *6*(2). https://doi.org/10.1142/S179399331550009X.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fanany, I., Fanany, R., & Kenny, S. (2011). The meaning of capacity building in Indonesia. *Community Development Journal*, *46*(1), 89–103. https://doi.org/10.1093/cdj/bsp044.

Fowler, A., & Ubels J. (Ed.). (2010). *Capacity development in practice*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849776363

Gore, C. (2013). The new development cooperation landscape: Actors, approaches, architecture introduction. *Journal of International Development*, *25*(6), 769–786. https://doi.org/10.1002/jid.2940.

Hynes, W., & Scott, S. (2013). The evolution of official development assistance. *OECD Development Co-Operation Working Papers*, *12*, 1–28.

Jackson, E., Pellini, A., & Prasetiamartati, B. (2020). Improving the enabling environment for evidence-informed policymaking: An example from Indonesia. *Evidence and Policy*, *16*(3), 503–514. https://doi.org/10.1332/174426418X15394255863408.

Kanni, W. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. http://www.undp.org/capacity.

Michel, J. (2016). *Beyond aid: The integration of sustainable development in a coherent international agenda.* Center for Strategic and International Studies.

OECD (2005), *Paris Declaration on aid effectiveness*. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264098084-en.

OECD. (2021). *Aid at a glance charts: Top ten recipients of gross ODA (US million)*. https://public.tableau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_count=no?&:showVizHome=no#1

OECD. (t.t.). *Aid at a glance charts: Net ODA by income group*. https://public.tableau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_count=no?&:showVizHome=no#1.

OECD. (t.t.). *Aid at a glance charts: Net ODA by Recipient (Indonesia)*. https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no.

OECD. (t.t.). *The paris declaration on aid effectiveness: Five principles for smart aid.* https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827300.pdf.

Prizzon, A., Rogerson, A., & Jalles d'Orey, M. A. (2017, Maret). Moving away from aid? The case of Indonesia. *Overseas Development Institute*. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11345.pdf.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rosana, F. (2021). BPS: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 -2,07 Persen. *Tempo.* https://bisnis.tempo.co/read/1429918/bps-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-207-persen.

Savirani, A., Diprose, R., Hartoto, A.S., & Setiawan, K.M.P. (Ed.) (2020). *Membuka jalan untuk pembangunan inklusif gender di daerah pedesaan Indonesia: Bunga rampai kajian aksi kolektif perempuan dan pengaruhnya pada pelaksanaan Undang-Undang Desa* [Forging pathways for gender-inclusive development in rural Indonesia: Case studies of women's collective action and influence on Village Law implementation]. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. https://doi.org/10.46580/124328.

Shimoda, Y. (2019). Capacity development re-examined through the lens of Indonesia's learning experiences with international donors. *Development Policy Review*, *37*(6), 750–768. https://doi.org/10.1111/dpr.12401.

United Nations Development Programme (UNDP) (t.t). *Sustainable Development Goals.* https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/sustainable-development-goals.html

United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability. (2018). *Partnering for sustainable development guidelines for multi-stakeholder partnerships to implement the 2030 agenda in Asia and the Pacific*. United Nations.

United Nations. (t.t). *Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/.

Wetterberg, A., Brinkerhoff, D. W., & Hertz, J. C. (2015). From compliant to capable: Balanced capacity development for local organisations. *Development in Practice*, *25*(7), 966–985. https://doi.org/10.1080/09614524.2015.1073224.

Willan, S., Kerr-Wilson, A., Parke, A., & Gibbs, A. (2019). A study on capacity development in the "What Works to Prevent Violence Against Women" programme. *Development in Practice*, *29*(6), 786–797. https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1615410.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian 2

Kemitraan antara Indonesia dan Negara Berkembang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB V

Kerja Sama Indonesia-Palestina dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Kemitraan Selatan-Selatan

Irfan Afendi

Satu tahun setelah Indonesia mengakui pendeklarasian Palestina sebagai sebuah negara pada 16 November 1988, keduanya resmi menjalin hubungan diplomatik di tingkat kedutaan besar, tepatnya pada 19 Oktober 1989. Sebagai salah satu negara besar dengan penduduk mayoritas muslim, kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara muslim lainnya menjadi pertimbangan tersendiri, terutama dengan Palestina. Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina memiliki urgensi mengingat Palestina memiliki tempat tersendiri di hati mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Kerja sama bilateral Indonesia-Palestina sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan zaman menuntut kedua negara untuk mampu menyesuaikan perkembangan dan menghadapi problematika global yang ada untuk mengintensifkan hubungan bilateral antara keduanya.

Indonesia dan Palestina sudah menjalin kerja sama sebagai mitra dalam berbagai lingkup organisasi. Salah satunya yaitu Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), adalah kerja sama antara negara-negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selatan atau negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan. KSS didefinisikan oleh United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) sebagai kerangka kerja sama dalam konteks luas, kolaborasi antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan teknis. Hal ini melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, dapat terjadi atas dasar bilateral, regional, atau antarregional. Negara-negara berkembang berbagi keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan juga sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan mereka (UNOSSC, 2018). Ditambah Indonesia yang kini tengah dalam proses mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, maka diperlukan strategi tambahan dan kejelian dalam menganalisis setiap kebijakan kerja sama termasuk Palestina yang berada dalam lingkup pelaksanaannya.

Di masa pandemi Covid-19, Palestina tengah dalam kondisi yang sangat berat jika juga menengok permasalahan lain yang dihadapi negara tersebut. Di secara khusus, wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami konflik panjang yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan membawa kesenjangan dalam masalah kesehatan. Dampak dari konflik serta ketegangan politik di wilayah tersebut telah mendorong penyebaran Covid-19. Tingkat korban dan kematian yang disebabkan pandemi di kawasan tersebut bisa dibilang bervariasi. Kasus Covid-19 secara resmi banyak dilaporkan di negara Timur Tengah yang memiliki fasilitas kesehatan memadai, seperti Qatar. Sementara itu, negara yang kondisi politiknya memanas mengalami banyak kasus yang tidak dilaporkan dan dipetakan dengan baik. Penanganan juga tidak terlaksana dengan baik, mulai dari penerapan *social distancing* hingga masalah obat-obatan.

Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan untuk mengurangi penyebaran. Negara yang berkonflik telah berusaha menahan diri dan meredakan ketegangan politik sejalan dengan situasi saat ini, tetapi di lain tempat pendudukan Israel malah menggencarkan serangan terhadap warga Palestina dan mengganggu langkah-langkah untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengekang penyebaran Covid-19 (Crisis Group, 2020). Krisis kesehatan masyarakat ini jelas mengungkapkan kesenjangan besar dalam sistem politik dan sosial negara-negara yang menghadapi konflik di kawasan Timur Tengah, ketika kerentanan, disparitas, dan ketidakadilan terlihat dari kurangnya kebijakan strategis dan komprehensif, kesalahan alokasi sumber daya, serta kurangnya investasi dalam prioritas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ada kekhawatiran serius tentang kondisi saat ini yang memerlukan gebrakan nyata untuk segera menghentikan penyebaran pandemi ini.

Indonesia yang memiliki peran aktif dalam forum global dan kerja sama internasional, serta posisi Indonesia yang dikatakan sebagai pemain netral dalam kancah global seharusnya memberikan nilai tambah dalam menjalin kerja sama dengan negara Selatan. Apalagi pandemi yang tengah melanda seluruh dunia ini memaksa negara seperti Indonesia dan Palestina untuk mereformasi pola kerja sama yang telah terbentuk selama ini. Indonesia dan Palestina memang sudah terlibat dalam berbagai organisasi, seperti OKI dan Kerja Sama Selatan-Selatan, keduanya sudah membentuk pola kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak selama bertahun-tahun. Namun, pandemi yang kini tengah melanda mengharuskan kedua negara ini melakukan penguatan kerja sama, diperlukan adanya respons sistem kesehatan terhadap penanggulangan pandemi khususnya di Palestina, dalam hal ini tidak hanya melibatkan antar lembaga pemerintah saja melainkan melibatkan setiap unsur yang meliputi pakar kesehatan, peneliti, masyarakat, dan LSM terkait.

Adapun metode penelitian yang diambil merupakan penelitian berdasar studi kasus permasalahan pandemi yang sedang terjadi di Palestina, pengamatan dan refleksi yang dihasilkan menggunakan analisis berdasarkan bukti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari jurnal dan website penunjang yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi solusi dan alternatif dalam menghadapi pandemi yang terjadi di Palestina melalui hipotesis yang bisa diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ke depan dalam membangun hubungan bilateral dengan Palestina.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. COVID-19 DAN FASILITAS KESEHATAN DI PALESTINA

Kasus pertama Covid-19 di Palestina diumumkan pada 5 Maret 2020. Otoritas pemerintah Palestina mengumumkan keadaan darurat dan memulai tindakan pencegahan, termasuk PSBB di Betlehem, diikuti Tepi Barat pada 22 Maret. Terhitung sampai bulan Januari 2021, ada 155 ribu kasus yang telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Banyak yang menganggap bahwa jumlah ini tidak valid, karena Otoritas Pemerintah Israel (OPS) tidak transparan dalam membagikan informasi kepada Otoritas Pemerintah Palestina (OPP) mengenai jumlah kasus untuk warga Palestina di Yerusalem. Hampir sepertiga dari total kasus di Palestina berasal dari Yerusalem di mana intervensi pencegahan dan misi serta peralatan medis terganggu oleh Otoritas Pemerintah Israel (OPS). Meskipun demikian, Otoritas Pemerintah Palestina (OPP) di Tepi Barat bersama dengan aktor non-negara, terutama WHO telah berupaya memimpin kesiapsiagaan dan menanggapi respons Covid-19 di Palestina. OPP telah menanggapi secara reaktif dengan memberlakukan tindakan penguncian yang ketat di kota-kota, termasuk bisnis yang tidak penting, semua fasilitas pendidikan, dan tempat-tempat keagamaan seperti masjid di mana langkah-langkah ini dipercaya cukup efektif (EMRO WHO, 2020).

Namun, kondisi politik dan kemanusiaan di Palestina sangat kompleks dan sangat berpengaruh bagi berjalan atau tidaknya usaha dalam menghadapi wabah ini. Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Palestina, seperti kondisi sosial ekonomi dan kehidupan yang buruk, serta sistem kesehatan yang lumpuh telah menghalangi kemampuan Palestina untuk mempersiapkan dan menangani wabah pandemi ini. Ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung dan pemisahan geografis antara Jalur Gaza dan Tepi Barat adalah penyebab utama dari tantangan ini dan mengakibatkan kondisi kemanusiaan yang semakin buruk selama pandemi Covid-19.

Sistem kesehatan Palestina dibentuk oleh tiga pilar penyelenggara kesehatan: Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan penyelenggara utama, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA), dan LSM. Sistem kesehatan ini memiliki tata kelola yang kurang efektif. Padahal sangat penting bagi penyelenggara untuk merancang dan melaksanakan rencana kedaruratan kesehatan yang efektif (AlKhaldi, dkk., 2018a). Ada obat-obatan dan persediaan yang tidak memadai di rumah sakit di Palestina; dengan hanya 375 tempat tidur ICU dan 295 ventilator di Jalur Gaza dan Tepi Barat (EMRO WHO, 2020). OPI melakukan kontrol ketat terhadap perbatasan dan pembatasan pergerakan individu dan serta komoditas dengan harus melalui lebih dari 700 pos pemeriksaan dan titik penyeberangan yang mengendalikan pergerakan Palestina di Tepi Barat dan blokade di Jalur Gaza. Hal ini selanjutnya akan mengganggu kemampuan untuk memobilisasi peralatan medis, persediaan, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, serta tim medis di seluruh gubernur dan ke/dari Palestina (OCHA, 2018). Belum lagi serangan pendudukan Israel terhadap warga Palestina sebagian besar merusak fasilitas kesehatan dan menargetkan staf kesehatan; keduanya harus dilindungi untuk mempertahankan layanan rutin dan darurat.

Selain itu, pemadaman listrik setiap hari di Jalur Gaza membuat kapasitas rumah sakit menjadi tidak efisien. Listrik di Jalur Gaza telah dibatasi hanya 13 jam per hari selama lima bulan terakhir (OCHA, t.t.b) Kualitas buruk sistem air dan sanitasi yang disebabkan oleh kurangnya daya menyebabkan kemampuan fasilitas kesehatan masyarakat untuk mematuhi protokol penanggulangan yang disarankan dalam memerangi Covid-19 akan terhalang. Kekurangan listrik, fasilitas, dan suplai tentu mengganggu kelangsungan pelayanan bagi masyarakat yang berada di pusat karantina.

Terlepas dari kurangnya kapasitas, sumber daya, dan pemerintahan, respons sistem kesehatan Palestina telah memuaskan, tetapi beberapa upaya untuk menanggapi pandemi ini telah gagal akibat pendudukan Israel. Misalnya, pusat pengujian yang didirikan oleh orang Palestina di Yerusalem bulan lalu dihancurkan oleh otoritas Israel karena diberi label sebagai 'kolaborasi' dengan Palestinian Authority Government (PAG) (Palestinian governor, 2020). Gubernur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Palestina di Yerusalem ditahan oleh polisi pendudukan Israel, atas apa yang disebut 'tuduhan' bekerja sama dengan PAG untuk memerangi Covid-19 di Yerusalem (Hasson, 2020).

Pandemi diperkirakan akan memperdalam kerapuhan sistem kesehatan Palestina yang sudah melampaui batasnya. Ini akan menghambat kapasitasnya untuk menangani pandemi dan kebutuhan kesehatan mendesak lainnya yang sudah ada sebelumnya bagi rakyat Palestina.

B. RESPON INDONESIA TERHADAP PROBLEMATIKA PANDEMI DI PALESTINA

Salah satu permasalahan Palestina dalam menghadapi pandemi ini adalah keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan. Dalam mempertahankan komitmen untuk membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Indonesia lewat Badan POM menyelenggarakan kegiatan *virtual training* bertema *"Indonesian FDA's Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority"*, yang dilaksanakan pada bulan November 2020. Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Badan POM dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Palestina, Dr. Mai Al-Kaila dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Balai Besar/Balai POM, kementerian/lembaga terkait dan 20 peserta pelatihan dari Kementerian Kesehatan Palestina.

Pelatihan virtual ini diselenggarakan untuk melanjutkan komitmen Badan POM dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional. Program ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Pada tahun ketiga, peningkatan kapasitas difokuskan pada persiapan Pemerintah Palestina dalam membangun *Regulatory Authority* yang independen dalam bidang obat dan makanan yang tentunya sekaligus menjadi tindakan penanggulangan pandemi di bumi Palestina (Christian, 2020).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam kegiatan *Extraordinary Ministerial Pledging Conference for UNRWA* yang digelar pertengahan tahun 2020, diikuti oleh deputi perdana menteri, menteri, wakil menteri dan duta besar dari 60 negara, dan juga Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres serta Komisaris Jenderal UNRWA, Filippe Lazarini, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan politik Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh dan berdaulat. Tujuan utama konferensi itu adalah untuk penguatan kembali dukungan politis terhadap perjuangan bangsa Palestina dan menggalang dana bagi UNRWA. Dalam hal ini, dukungan terhadap UNRWA berarti dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Komitmen Indonesia dalam membantu Palestina untuk menghadapi pandemi yaitu berupa bantuan kemanusiaan. Indonesia akan menyalurkan langsung bantuan tersebut kepada Pemerintah Palestina, dan juga melalui UNRWA dan Komite Palang Merah Internasional (*International Committee for Red Cross*/ICRC) (Sinaga, 2020).

Di samping pemerintah menguatkan tali solidaritas terhadap Palestina di masa pandemi, banyak lembaga swadaya masyarakat juga semakin gencar memberikan pelayanan medis secara gratis bagi masyarakat Palestina, di antaranya ACT yang melalui tim medisnya berkeliling selama satu bulan penuh untuk melayani masyarakat Gaza yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Dari data yang diperoleh tim medis, pasien yang ditangani antara lain mengalami penyakit diabetes, cedera, lumpuh, gagal ginjal, hernia, hingga perawatan luka pasca-operasi. Pasien yang dilayani paling banyak berusia 45–50 tahun dengan persentase pasien laki-laki lebih banyak.

C. PENTINGNYA KEMITRAAN DAN TATA KELOLA BILATERAL

Beberapa bantuan luar negeri memang terus datang, seperti dari Indonesia melalui pemerintah ataupun LSM, yang terbukti cukup meringankan beban warga Palestina. Yang menjadi fokus saat ini setelah sekian banyak bantuan yang diberikan adalah bagaimana warga Palestina mampu memanfaatkan dengan efektif bantuan tersebut dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagaimana solidaritas yang datang mengelola agar bangsa Palestina tidak begitu bergantung kepada bantuan yang diberikan. Perlu adanya dorongan dari luar, termasuk Indonesia, untuk mengatasi dan menengahi situasi politik yang terjadi. Mengingat bobroknya tata kelola bantuan terjadi karena adanya benturan aturan di kawasan Palestina yang berada di bawah otoritas pemerintah Israel. Bantuan jasa dan moral memang sangat penting untuk keberlangsungan hidup warga Palestina, tetapi juga perlu diperhatikan efektivitas bantuan yang diberikan. Setidaknya beberapa rekomendasi berikut mampu membantu memberikan solusi alternatif kepada pembuat kebijakan.

1. *Sumber Daya*

   Sumber daya sistem kesehatan memainkan peran utama dalam kemampuannya untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat. Banyak negara sudah memberikan bantuan ke Palestina, tetapi untuk investasi sistem dan regulasi kesehatan setidaknya masih kurang.

   Fakta lapangan menyebutkan bahwa hanya terdapat 1,8 dokter per 1.000 orang, 375 Intensive Care Unit (ICU), 16 ICU pediatrik, dan 296 ventilator di Palestina (EMRO WHO, 2020). Sumber daya ini tidak cukup untuk mengatasi peningkatan kasus Covid-19—terutama yang parah—yang membutuhkan perawatan berminggu-minggu, serta layanan perawatan kesehatan penting (non-Covid-19) lainnya. Di Jalur Gaza, 25% bahan habis pakai medis, 65% perlengkapan laboratorium, dan 43% obat-obatan esensial telah dikonsumsi dan mengimbau 100 ventilator dan 140 tempat tidur ICU diluncurkan (Duz, 2020). Selain itu, terdapat kekurangan APD, alat penguji, disinfektan, peralatan medis, suplai obat-obatan, dan staf kesehatan di seluruh Palestina serta ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dan mengisi kembali sumber daya ini (Palestinian governor, 2020).

   Bantuan dari Indonesia berupa pembangunan otoritas regulator yang independen tentu harus mendapatkan apresiasi dari kita semua. Namun, tentunya perlu ada penguraian kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan keuangan secara dini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan terperinci dalam koordinasi dengan faktor kesehatan lain, termasuk fasilitas swasta dan rumah sakit. Selain itu, rencana untuk tenaga kesehatan nasional harus ada, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana spesialisasi medis yang paling dibutuhkan diprioritaskan di universitas dan rencana kerja pemerintah, serta pelaksanaan program pelatihan di seluruh negeri untuk pencegahan dan pengendalian wabah. Selain memajukan kapasitas teknologi sistem kesehatan, prioritas ini merupakan peluang nyata yang dapat diinvestasikan OPP dan pihak dari luar Palestina saat ini dalam waktu dekat.

2. *Kolaborasi dan Koordinasi*
   Kolaborasi dan keterlibatan mitra lain dalam kesiapsiagaan membutuhkan penguatan. Banyak komite antarlembaga, baik dalam dan luar negeri termasuk Indonesia yang dibentuk dalam membantu untuk membendung wabah Covid-19 di Palestina, tetapi kolaborasi komite tersebut masih ambigu. Hal ini disebabkan oleh koordinasi nasional yang buruk dan kurangnya tanggung jawab hukum yang mendesak dari kekuatan pendudukan Israel untuk bekerja sama dengan Palestina dalam keadaan seperti itu. Pendudukan Israel melumpuhkan berbagai tindakan kesiapsiagaan dan respons. Ini mengganggu upaya kolaboratif yang dimaksudkan untuk mengekang penyebaran pandemi di Palestina. Dari hal tersebut, diperlukan negosiasi di antara pemerintah Indonesia dan Israel—jika memungkinkan—agar terciptanya efektivitas bantuan yang diberikan. Mendorong organisasi-organisasi hak asasi manusia, advokasi lokal, dan internasional agar memberikan tekanan untuk mengakhiri permainan sepihak Israel atas Palestina.

3. *Tata Kelola*
   Tata kelola adalah salah satu blok bangunan utama dari sistem kesehatan dan penggerak kapasitas dan sumber daya. Tata kelola kesehatan yang kuat sangat penting untuk menanggapi kebutuhan kesehatan yang ada dan yang muncul di suatu negara. Kekurangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sistem kesehatan di Palestina dapat diartikan sebagai penyebab tantangan pemerintahan yang belum terjawab; manajemen sistem yang buruk adalah salah satu tantangan tersebut. Namun, Covid-19 menawarkan peluang berharga untuk memperkuat fungsi sistem ini, dorongan politik juga dibutuhkan untuk menopang tata kelola. Selain itu, pembuatan kebijakan berdasarkan bukti sangat penting untuk mendukung tata kelola kesehatan dan untuk memperkuat sistem kesehatan, baik dalam kondisi darurat maupun rutin. Untuk mencapai hal ini, penguatan sistem penelitian nasional yang lemah di Palestina menjadi prioritas dalam keadaan seperti itu untuk membantu para pelaku sistem kesehatan membuat tindakan yang berarti dalam hal penyusunan strategi dan perencanaan, alokasi sumber daya, pengawasan, koordinasi, dan evaluasi (AlKhaldi dkk., 2018b).

Namun, pemerintah Indonesia sendiri dalam menangani pandemi sejatinya masih kesulitan, terutama dalam hal tata kelola. Bagi kedua negara, perlu adanya peningkatan masif di sektor akademik untuk memberikan informasi kepada pejabat kesehatan dengan pengetahuan baru dan praktik terbaik untuk membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dalam krisis. Kontribusi sektor akademik dalam penelitian dan inovasi untuk menginformasikan pejabat kesehatan dalam menanggapi Covid-19 sangat terbatas karena kurangnya prioritas dan kemauan politik yang ditentukan. Kesenjangan yang konstan ini perlu dijembatani untuk integrasi yang lebih baik dari masyarakat ilmiah dalam keadaan darurat.

D. MELIHAT KE DEPAN KEMITRAAN INDONESIA-PALESTINA

Wabah pandemi ini adalah problem kesehatan yang sangat serius di seluruh dunia, terutama dalam kawasan konflik seperti Palestina. Situasi politik di Palestina mengancam keamanan kesehatan warga Palestina di saat pandemi. Pendudukan Israel yang berlangsung selama 72 tahun di Palestina menyebabkan situasi kemanusiaan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengerikan. Kondisi politik yang buruk ini lah yang membuat bangsa Palestina tidak memiliki fleksibilitas dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melawan Covid-19.

Respons yang ringkas dan terpadu dengan visi jangka panjang termasuk solusi alternatif yang tepat; sangat penting untuk memerangi pandemi di Palestina secara efektif. Penanganan wabah ini harus meliputi arahan strategis; peningkatan investasi keuangan dan upaya memperkuat tata kelola sistem kesehatan masyarakat, kapasitas, serta penelitian dan pengawasan kesehatan. Penekanan pentingnya penguatan sistem penelitian nasional dan memainkan peran penting dalam meningkatkan komponen strategis tersebut di semua kondisi.

Dalam unsur kerja sama Selatan-Selatan, perlu adanya peningkatan kolaborasi dari setiap pelaku kesehatan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Ini termasuk institusi dan rumah sakit pemerintah, non-pemerintah, dan swasta. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menanggapi Covid-19 perlu diperkuat. Dalam kaitannya dengan kontribusi yang dibawa oleh Indonesia untuk membantu Palestina dalam saat pandemi, Indonesia dapat mengambil peran aktif untuk menggalang bantuan, baik secara bilateral maupun dengan mengajak negara lain. Hal ini terlihat dari beberapa inisiatif yang telah disebutkan sebelumnya seperti *virtual training* yang dilakukan oleh BPOM RI dan Kementerian Kesehatan Palestina. Dukungan yang diberikan oleh Indonesia kepada Palestina di tengah kondisi pandemi penting menunjukkan solidaritas yang kuat antarkedua negara. Selain itu, tindakan kolektif dan strategi investasi yang diadopsi oleh semua pihak dan mitra pembangunan dan kemanusiaan regional dan internasional harus menjadi lebih efisien, sistemik, dan saling melengkapi untuk bertindak, yaitu memobilisasi segala upaya dan sumber daya untuk upaya mitigasi dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Indonesia yang dalam hal ini merupakan mitra Palestina harus lebih selektif berpartisipasi dalam penanganan dan pemulihan kondisi kesehatan di Palestina, baik melalui badan pemerintah maupun melewati lembaga swadaya masyarakat yang masih aktif melakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kegiatan kemanusiaan di Palestina. Hal ini bertujuan agar setiap bantuan yang tersalurkan ke bumi Palestina menjadi sangat efektif dan bermanfaat. Reformasi kerja sama ini nantinya juga akan menjadi penguat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melihat konsep visi Indonesia Emas 2045 yang digagas sebelum pandemi merebak, dengan adanya evaluasi kerja sama ini memungkinkan juga bagi pemangku kebijakan dalam mengolah kembali strategi yang sudah dijalankan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dengan mengambil peran aktif di bawah kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia tidak hanya melakukan tanggung jawabnya sebagai aktor internasional, tetapi juga secara bersamaan menjalankan visi Indonesia Emas 2045. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada Palestina dalam mengatasi pandemi Covid-19 mengafirmasi tujuan Indonesia untuk perlahan menjalankan perannya menjadi *emerging middle-power*. Selain itu, kerja sama ini juga dapat diartikan sebagai upaya Indonesia dalam memenuhi komitmen terhadap SDGs 17 yang berorientasi kemitraan global. Meskipun demikian, masih banyak perbaikan yang bisa dilakukan oleh Indonesia, seperti misalnya tata kelola bilateral yang lebih terstruktur dan sistematis.

REFERENSI

AlKhaldi, M., Abed, Y., Pfeiffer, C., Haj-Yahia, S., & Alkaiyat, A. (2018a). Understanding the concept and importance of the health research system in Palestine: A qualitative study. *Health Research Policy Systems, 16*(1). https://doi.org/10.1186/s12961-018-0315-z

AlKhaldi, M., Alkaiyat, A., Abed, Y., Pfeiffer, C., Halaseh, R., Salah, R., Idries, M., Abueida, S., Idries, I., Jeries, I., Meghari, H., Shaar, A., Tanner, M., & Haj-Yahia, S. (2018b). The Palestinian health research system: who orchestrates the system, how and based on what? A qualitative assessment. *Health Research Policy and Systems, 16*(1). https://doi.org/10.1186/s12961-018-0347-4

Christian, I. (2020, November 24). Kerja sama Indonesia-Palestina bidang obat dan makanan ditingkatkan. *RRI*. https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/934414/kerja sama-indonesia-palestina-bidang-obat-dan-makanan-ditingkatkan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Crisis Group. (2020, April 17). COVID-19 and conflict: Seven trends to watch. https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch

Duz, Z. N. (2020, April 1). Palestine fighting COVID-19 with limited resources. *AA*. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestine-fighting-covid-19-with-limited-resources/1788721

EMRO WHO. (2020, Maret 26). State of emergency Palestine's COVID-19 response plan. http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Palestine_Authority_COVID-19_Response_Plan_Final_26_3_2020.pdf?ua=1

Hasson, N. (2020, April 15). Israel shuts Palestinian coronavirus testing clinic in East Jerusalem. *Haaretz.Com*. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-police-raid-palestinian-coronavirus-testing-clinic-in-east-jerusalem-1.8767788?fbclid=IwAR0PupfB_-xctVqQzWZlEDDg3O6oGtxUri_NrLQeCIaI6mGyGUl4jovyijM

OCHA. (2018, Oktober 8). Over 700 road obstacles control Palestinian movement within the West. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank

OCHA. (t.t.a). Data on demolition and displacement in the West Bank. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. Retrieved February 18, 2021, from https://www.ochaopt.org/data/demolition

OCHA. (t.t.b). Gaza Strip electricity supply. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. Retrieved February 18, 2021, from https://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply

Palestinian governor of Jerusalem freed after trying "to limit spread of coronavirus.". (2020, April 7). *The National*. https://www.thenationalnews.com/world/mena/palestinian-governor-of-jerusalem-freed-after-trying-to-limit-spread-of-coronavirus-1.1002605

Sinaga, Y. A. (2020, Juni 24). Indonesia tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahun ini. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/1571490/indonesia-tingkatkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-palestina-tahun-ini

United Nations Office for South-South Cooperation. (2018, June 12). About South-South and Triangular Cooperation. https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI

Hubungan Indonesia dan ASEAN: Mendorong Pembangunan Melalui Kolaborasi Regional di Asia Tenggara

Muhammad Riefat Dhaniswara Arya Perkasa

Di tengah dunia internasional yang bersifat anarkis ini, suatu negara harus melakukan adaptasi untuk dapat menjaga kedaulatannya. Indonesia merupakan sedikit dari sekian banyak negara yang dinilai mampu menginisiasi kerja sama regional yang dihormati dunia internasional. Indonesia juga dinilai konsisten berpegang teguh untuk mempertahankan doktrin politik luar negerinya yang dikenal sebagai 'bebas aktif' meskipun makna bebas-aktif disini telah berevolusi seiring berjalannya waktu (Yani & Montratama, 2017). Doktrin politik internasional indonesia 'bebas-aktif' ini dicetuskan pertama kali oleh Muhammad Hatta pada pidatonya di Komisi Nasional Indonesia Pusat tahun 1948. Akan tetapi, makna bebas aktif sebenarnya sudah tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.

Pada mulanya, makna bebas dalam politik luar negeri Indonesia adalah Indonesia bebas dari segala bentuk penjajahan atau kolonialisme yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (Kadarisman, 2017). Dewasa ini, makna bebas menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Pernyataan pers tahunan, 2021) dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berkaca dari ucapan Bung Hatta bahwa Indonesia akan tetap menjadi subjek dalam pertarungan politik internasional, yang mana Indonesia berhak menentukan sikap terhadap konflik-konflik internasional. Tidak ada evolusi makna yang signifikan dari pernyataan tersebut. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ini, Indonesia masih turut aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional.

Tujuan utama politik luar negeri adalah mencapai kepentingan nasional (kesejahteraan, ideologi, integrasi, keamanan, dan kedaulatan). Istilah "lingkaran konsentris" dicetuskan pertama kali oleh menteri luar negeri yang menjabat pada pemerintahan Orde Baru saat itu, Ali Alatas. Beliau menggagaskan ide baru Indonesia dalam menganalisa dan menghadapi konflik-konflik internasional. Lingkaran konsentris ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, lingkaran konsentris ini memiliki arti struktur prioritas politik luar negeri indonesia.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan sedikit dari negara yang berhasil dalam melakukan inisiasi politik internasional dalam skala regional yang dipandang dunia menjadi salah satu hasil dari inisiatif ini adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Putra, 2015) kerja sama regional, bilateral, ataupun multilateral merupakan bukti nyata Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia memiliki sistem politik bebas aktif.

Sama seperti manusia yang memiliki mimpi ketika mereka hidup, setiap negara di dunia ini juga memiliki mimpi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begitu pun Indonesia, memiliki mimpi yang juga dikenal dengan nama Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia tahun 2045 diprediksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia dengan PDB per kapita 23.199 USD (Idris, 2021).

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan gagasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang adil, berdaulat, maju dan makmur yang ditargetkan terealisasi ketika Dirgahayu Indonesia ke-100 tahun pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahun 2045 (Bappenas, 2017). Pada saat itu, posisi kaum milenial menjadi kaum paling produktif. Visi ini dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2019 dan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo ketika beliau berpidato pada 9 Mei 2019.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tersebut, PBB juga telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin dunia dan mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015. Diharapkan agenda SDGs ini dapat terealisasi pada tahun 2030. SDGs memiliki 169 target yang terbagi ke dalam 17 kategori. Bab ini akan berfokus pada SDGs nomor 17 yang berhubungan langsung dengan hubungan internasional. SDGs 17 tersebut berbunyi "*partnership for the goals*" atau "kemitraan untuk tujuan".

Pertanyaan besar adalah apakah ASEAN sebagai lingkaran konsentris utama Indonesia dapat membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045?

A. SEJARAH ASEAN

Secara historis, negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh negara yang mendominasi saat itu. Selama ratusan tahun, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis dikarenakan posisi jalur perdagangan internasional yang terletak di antara jalur dagang Tiongkok dan India. Jalur perdagangan internasional yang strategis ini memicu merebaknya kolonialisme di kawasan Asia Tenggara kala itu; bahkan pada akhir abad ke-18, seluruh negara Asia Tenggara, kecuali Thailand, sudah menjadi daerah jajahan negara-negara Barat.

Sekitar 70 tahun yang lalu, konsep "Asia Tenggara" belum dikenal seperti sekarang. Saat ini, konsep "Asia Tenggara" adalah terminologi umum yang sering digunakan dan mengacu terhadap 11 negara di kawasan. Konsep "Asia Tenggara" merupakan sebuah hasil geopolitik dari Perang Dunia ke-2 di kawasan pasifik ketika Blok Sekutu melawan Jepang (Pye & Weatherbee, 2005). Pada Juli 1945, Louis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mountbatten ditunjuk sebagai Komandan Inggris di Asia Tenggara yang biasa dikenal sebagai British Southeast Asia Command (SEAC).

Sebenarnya, ASEAN bukan merupakan organisasi regional yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), Association of Southeast Asia (ASA), dan Malaysia-Filipina-Indonesia (MAPHILINDO) merupakan organisasi regional sebelum ASEAN (Koesrianti, 2014; Pye & Weatherbee, 2005). Akan tetapi, umur organisasi regional sebelum itu tidaklah panjang (tidak berhasil), hanya beberapa tahun saja dikarenakan konflik-konflik di antara negara anggota organisasi regional tersebut.

ASEAN berbeda dengan organisasi regional sebelumnya. Pembentukan ASEAN merupakan murni inisiasi dari seluruh negara-negara kawasan Asia Tenggara, sedangkan organisasi regional sebelumnya melibatkan dan disponsori oleh negara adidaya saat itu (Koesrianti, 2014). ASEAN merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok lewat penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh utusan masing-masing negara anggota. Indonesia mengirimkan Adam Malik, Singapura mengirimkan S. Rajaratnam, Malaysia mengirimkan Tun Abdul Razak, Filipina mengirimkan Narciso Ramos dan Thailand mengirimkan Thanat Khoman untuk menandatangani Deklarasi Bangkok tersebut (ASEAN, t.t.b).

Ketika mendirikan ASEAN, para delegasi dari lima negara sepakat bahwa keanggotaan ASEAN sangat terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Akan tetapi, pada realitasnya butuh 31 tahun untuk merealisasikan mimpi para pendiri ASEAN setelah Kamboja menjadi anggota terakhir pada tahun 1998. Memang pada awal pembentukan ASEAN, hanya lima negara saja yang menandatangani Deklarasi Bangkok, akan tetapi bukan berarti lima negara pelopor tidak mengajak Burma (Myanmar), Laos, Kamboja dan Vietnam untuk bergabung. Empat negara tersebut pada saat itu belum tertarik untuk masuk (Koesrianti, 2014).

Bagaimana dengan keanggotaan ASEAN untuk Timor Leste? Secara geografis, Timor Leste masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Timor Leste sebenarnya sudah mendaftar menjadi keanggotaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ASEAN sejak tahun 2011, tetapi hingga sekarang belum mendapatkan keanggotaan ASEAN. Indonesia yang menjadi anggota paling berpengaruh di Asia Tenggara sangat mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN (Arisanto, 2020). Namun, tidak sepenuhnya negara anggota ASEAN menyetujui keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Singapura menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang menolak keanggotaan Timor Leste. Singapura berpikir bahwa ekonomi Timor Leste belum memadai dan dikhawatirkan akan menambah beban bagi ASEAN lainnya, serta Timor Leste dianggap belum mampu menghadapi tantangan globalisasi sejalan dengan berdirinya Komunitas ASEAN (Arisanto, 2020).

Pada mulanya, tujuan pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional adalah untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi ketika Perang Dingin (1947–1991), serta untuk menjaga stabilitas di negara kawasan Asia Tenggara (Nugroho, 1994). Selain itu ASEAN sebagai organisasi regional juga bertujuan untuk membuat negara-negara anggota menjadi lebih dekat pada tingkat ekonomi, politik, keamanan, dan sosiokultural. (Börzel dkk., 2016)

Sudah 5 dekade ASEAN berdiri, bukan berarti tidak ada konflik di negara-negara anggota tersebut. ASEAN pernah hampir bubar dikarenakan konflik antara Filipina dengan Malaysia atas Sabah pada tahun 1968, dan pada tahun yang sama juga, pemerintah Singapura menjatuhi hukuman mati kepada dua anggota angkatan laut Indonesia atas dakwaan pembunuhan.

Berbeda dengan Uni Eropa yang mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil *voting*, ASEAN tidak menggunakan sistem pengambilan suara (*voting*) untuk mengambil suatu keputusan. Prinsip musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*) dan saling membantu (*solidarity*) menjadi prinsip dasar kerja sama ASEAN yang tertuang pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* pada tahun 1976 (ASEAN, t.t.c). Karena prinsip itulah, negara-negara anggota ASEAN masih tetap bisa mempertahankan kedaulatan negaranya dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Ketika sidang PBB, negara-negara anggota Uni Eropa dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diwakilkan oleh Dewan Uni Eropa sedangkan ASEAN masih harus mengirimkan perwakilan setiap negara anggotanya untuk mengikuti sidang PBB.

Pada tahun 2007, sepuluh negara anggota melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura. Piagam ASEAN ini bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN yang awalnya hanya dari sebuah sekumpulan negara yang berbasis politik menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien (ASEAN, t.t.a).

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN berkembang yang awalnya hanya menjadi wadah untuk mengurangi efek dari Perang Dingin menjadi salah satu organisasi regional yang paling berhasil yang ada di sistem internasional sekarang ini selain Uni Eropa (Koesrianti, 2014). Meskipun sifatnya berbeda, ASEAN dan Uni Eropa sama-sama memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas negara-negara kawasan.

B. PERAN INDONESIA DI ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, Indonesia sering dibicarakan sebagai '*natural born leader*' atau 'pemimpin alamiah' bagi ASEAN itu sendiri dikarenakan geografinya, populasi yang besar, dan perekonomian terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Karena faktor-faktor ini juga Indonesia dianggap sebagai pemimpin ASEAN secara *de facto* (Acharya, 2014). Dengan alasan Indonesia memiliki perekonomian terbesar di antara negara kawasan juga, Indonesia menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk ke organisasi G20.

Sebelum organisasi ASEAN dibentuk, negara-negara kawasan Asia Tenggara sedang dalam tingkat ketakutan dan kecurigaan luar biasa terhadap Indonesia. Terlebih lagi setelah Soekarno mengatakan kebijakan 'konfrontasi' saat itu. Kebijakan 'konfrontasi' Soekarno adalah kebijakan mengancam atas ketidaksenangan beliau terhadap agenda pembentukan Negara Federasi Malaysia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Setelah Presiden Soekarno lengser, Presiden Soeharto memiliki kebijakan luar negeri yang bertolak belakang dari kebijakan Soekarno. Presiden Soeharto ingin membuktikan bahwa Indonesia akan menggunakan sistem kerja sama dibandingkan aksi-aksi yang bersifat koersif (ancaman) layaknya Soekarno terhadap Malaysia. Pemerintahan Orde Baru dianggap sukses karena dapat menjaga stabilitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara tanpa pengaruh dari dua kubu (Amerika Serikat dan Uni Soviet) yang saat itu mendominasi dunia, sejalan dengan prinsip Indonesia yang memprakarsai Gerakan Non-Blok. Konsekuensi negara yang menjadi anggota Gerakan Non-Blok adalah tidak dapat melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral terkait militer. Akan tetapi, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia telah mencederai makna gerakan itu sendiri karena Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara '*big powers*' (Yani & Montratama, 2017).

Selain prinsip utama ASEAN yang *non-interference* dan menjunjung tinggi nilai kedaulatan negara anggotanya, kehadiran Indonesia di ASEAN dapat dikatakan sebagai penengah di antara konflik-konflik yang terjadi. Sebagai contohnya, Indonesia menjadi penengah antara konflik Kamboja dengan Thailand pada tahun 2008 hingga 2011.

Indonesia menjadi penengah terhadap konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand atas perselisihan Kuil Preah Vihear pada 2011. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pergi dan bernegosiasi dengan pemimpin kedua negara tersebut serta menghadiri pertemuan di United Nation Security Council (UNSC). Indonesia yang saat itu sebagai ketua ASEAN[2] diamanahkan oleh UNSC untuk menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia kemudian mengadakan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau *Informal ASEAN Foreign Ministerial Meeting* (IAMM) di Jakarta guna menyelesaikan konflik di kawasan tersebut. Selama pertemuan, menteri luar negeri dari negara konflik tersebut setuju dengan hasil pertemuan bahwa Indonesia akan mengirimkan militer Indonesia dan pengamat sipil untuk memantau daerah

2 Indonesia pernah menjadi Ketua ASEAN sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1976, 2003, dan 2011

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perbatasan yang disengketakan. Walaupun demikian, pada akhirnya Thailand tidak menyetujui hasil akhir dari perundingan tersebut dan membawa masalah ini ke International Court of Justice (ICJ).

Dalam bidang ekonomi, melalui KTT ASEAN ke-9 di Bali atau yang biasa disebut Bali Concord II yang dilakukan pada tahun 2003, Indonesia mengusulkan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pertemuan ini dilaksanakan dalam konteks menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Organization (AFTA) dan menghadapi kebangkitan ekonomi Tiongkok dan India. Pada awalnya kesepakatan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2020, akan tetapi diubah menjadi 2015 karena tekad ASEAN dalam membangun ekonomi kawasan.

C. DINAMIKA INDONESIA DI ASEAN: APAKAH ASEAN MASIH PENTING UNTUK INDONESIA DI MASA DEPAN?

Seperti yang kita bahas sebelumnya, ASEAN merupakan prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Indonesia diprediksikan menjadi negara raksasa Asia ke-3 setelah Tiongkok dan India sejalan dengan berkembangnya kekuatan ekonomi dan diplomasi Indonesia (Robert et.al, 2015). Akan tetapi ada beberapa spekulasi bahwa sejak Indonesia masuk ke G20 dan menjadi *long-time leader* Gerakan Non-Blok, diprediksikan bahwa Indonesia dalam 40 tahun ke depan akan lebih mandiri dan tidak akan terikat lagi oleh ASEAN. Indonesia sudah melakukan banyak sekali kebijakan luar negeri terhadap ASEAN. Indonesia bukan hanya bercita-cita menjadi *vocal player* dalam tingkat regional saja melainkan menjadi *vocal player* dalam tingkat global (Sambhi, 2015).

Menurut Robert dan Habir (2015) dalam buku *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and The Regional Order*, Indonesia akan tetap dan terus membutuhkan ASEAN. Dalam buku tersebut dijelaskan ada tiga faktor mengapa ASEAN sangat dibutuhkan untuk mengejar kepentingan nasional Indonesia. Pertama, kecenderungan Indonesia untuk tetap menahan *great powers* dan *external regional powers* ke

Buku ini tidak diperjualbelikan.

negara-negara Asia Tenggara, sejalan dengan visi dan misi Indonesia sebagai negara pemrakarsa Gerakan Non-Blok. Indonesia akan tetap menahan *great powers,* khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia berkepentingan terhadap lingkungan Kawasan yang harus tetap aman dan stabil. Singkatnya, Indonesia membangun kondisi yang demokratis untuk dapat hidup berdampingan dengan kekuatan besar di Asia. Juga, fungsi utama Indonesia dalam strategi *partnership* dengan negara-negara non-ASEAN seperti Australia, Korea Selatan, India, dan Jepang. *Strategic partnership* ini menunjukkan dengan jelas bahwa keinginan Indonesia untuk melihat kekuatan regional bukan hanya didominasi oleh kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kedua, berkembangnya arsitektur negara-negara Asia Timur mengingatkan bahwa ASEAN akan tetap berperan penting untuk Indonesia di masa mendatang, hal ini dapat dilihat bahwa arsitektur tersebut dibangun dan dipertahankan oleh ASEAN dan negara-negara mitra untuk memfasilitasi keterlibatan kekuatan eksternal dan global. Semakin meluasnya isu-isu yang ada di ASEAN akan membuat Indonesia semakin berhubungan erat dengan negara-negara adidaya non-ASEAN.

Ketiga, ASEAN tidak pernah menjadi satu-satunya opsi alat diplomasi Indonesia. Sampai saat ini, ASEAN tidak sepenuhnya berperan penting dalam menjaga keamanan Indonesia. Maksudnya, Indonesia dapat mengatasi *security peace* sendiri tanpa bantuan eksklusif ASEAN. Menurut Wuryandari (2008), Indonesia akan tetap butuh ASEAN dikarenakan ASEAN sebagai instrumen yang diharapkan mampu menyeimbangi kekuatan-kekuatan besar (*power balancer*) yang terletak di luar kawasan.

D. INDONESIA EMAS 2045, ASEAN, DAN SDGS 17

Untuk mencapai agenda SDGs memang membutuhkan usaha dari berbagai aktor hubungan internasional. Viotti dan Kauppi (2013) dalam bukunya *International Relations and World Politics* menjelaskan bahwa ada empat aktor hubungan internasional, yaitu negara, *non-governmental organization* (*NGO*), organisasi internasional, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

individu. SDGs yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2030 merupakan refleksi akan terwujudnya stabilitas ekonomi kawasan, pertumbuhan pendapatan yang kuat, transformasi struktural dan peningkatan infrastruktur yang kemudian dapat menjadi *support system* pembangunan kawasan regional terkhususnya ASEAN.

Bab ini berpendapat bahwa SDGs 17 yang berbunyi "*partnership for the goals*" atau "kemitraan untuk tujuan" adalah induk yang membawahi ke-16 tujuan lainnya yang saling terhubung antara satu tujuan ke tujuan lainnya. Sebagai contoh, suatu negara melakukan kerja sama di bidang ekonomi. Diharapkan dengan dilakukannya kerja sama ekonomi ini akan mencapai agenda SDGs pada poin 1, 2, 8, 9, dan 10.

Perdana Menteri Thailand lewat pidatonya di *East Asia Summit* ke-13 menyampaikan bahwa ASEAN akan fokus pada tiga komponen utama dalam prioritas kemitraan ASEAN, yaitu *advancing, partnership,* dan *sustainability*. Pertama, makna *advancing* untuk menuju visi ASEAN yang berbasis masa depan (*future oriented)*. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi akibat Revolusi Industri 4.0, meningkatkan daya saing dan menciptakan sistem imunitas terhadap efek negatif dari perkembangan teknologi maupun tantangan masa depan.

Kedua, *partnership* yang memfokuskan kekuatan kerja sama regional yang mengutamakan ASEAN-*led* dan ASEAN-*centred mechanism*. Komponen ini menitikberatkan pada satu kondisi: jika kerja sama dengan mitra global dalam bidang ekonomi akan menjadi keuntungan bersama dan menguntungkan bagi negara-negara anggota, kemitraan strategis akan diperkuat.

Ketiga, yang dimaksud dari *sustainability* adalah kemitraan yang berkesinambungan. Sejalan dengan misi SDGs "*no one left behind*", ASEAN yang saat ini telah menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia harus memastikan bahwa kemitraan strategis ini akan menguntungkan negara-negara anggota dan mengurangi perbedaan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN baik dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pembangunan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sejak ASEAN dibentuk, hubungan internasional di Asia Tenggara bermain pada dua *level* kerja sama, yaitu *state-to-state bilateral level* dan *multilateral level* (Pye & Weatherbee, 2005). *State-to-state bilateral level* merupakan kerja sama yang dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri ataupun kerja sama ASEAN dengan dengan negara-negara intra-ASEAN. Sementara itu, multilateral level adalah kerja sama ASEAN dengan beberapa aktor-aktor hubungan internasional di luar kawasan Asia Tenggara. Contoh kerja sama multilateral level adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP merupakan langkah kemitraan strategis dalam bidang perdagangan yang bertujuan meningkatkan perdagangan yang mencakupi seluruh anggota ASEAN dan 5 negara lainnya (Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan)[3]. RCEP akan mencakup lebih dari setengah penduduk dunia dan lebih dari 30 persen (US$ 26,2 triliun) total Produk Domestik Bruto dunia (US$ 26,2 triliun) (ASEAN, 2020).

Sebenarnya konsep RCEP sudah ada ketika KTT ASEAN di Kamboja pada tahun 2012 dan baru bisa ditandatangani delapan tahun kemudian pada November 2020 (Indonesia diwakilkan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto). Tujuan RCEP adalah mengintegrasikan perjanjian perdagangan ASEAN kepada 6 negara mitra dagang ASEAN. Perjanjian ini banyak mendukung kelayakan pendekatan "ASEAN-*centred*" (Mie, 2020).

Indonesia yang merupakan anggota dari kerja sama ini harus melakukan pemanfaatan potensi sebesar-besarnya demi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan SDGs. Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk tidak hanya menjadi pasar dalam RCEP, melainkan juga menjadi pedagang dalam kerja sama ini. Namun, ada potensi permasalahan di antara negara anggota ASEAN dengan 5 negara non-ASEAN dalam RCEP; mayoritas negara ASEAN yang masih berkembang akan menghadapi negara-negara non-ASEAN yang notabene adalah negara maju. Lalu, kesenjangan tingkat teknologi

3 Pada awal pembentukannya, India termasuk anggota RCEP. India keluar dari keanggotaan RCEP pada tahun 2019.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan infrastruktur mewajibkan negara-negara ASEAN melakukan revitalisasi demi mencapai kepentingan masing-masing. Selain itu, ASEAN secara keseluruhan harus menyiapkan strategi agar kerja sama ini dapat bermanfaat untuk negara-negara anggota (ASEAN, 2019).

Ibarat satu tubuh yang saling melengkapi satu sama lain, Indonesia dan ASEAN tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi satu sama lain. Pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, produksi yang berkelanjutan dan konsumsi, serta ketahanan merupakan lima prioritas kerja sama ASEAN demi tercapainya agenda SDGs. Lima prioritas ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika salah satu masalah tersebut dapat diatasi, berbagai masalah yang lainnya juga dapat teratasi. Indonesia juga harus mengimplementasikan apa yang telah dihasilkan dari kesepakatan yang telah dilakukan ASEAN demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dan SDGs.

Asia Tenggara sejak dulu memang menjadi tempat strategis karena secara geografis diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tidak dapat disangkal bahwa negara-negara luar kawasan, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Jepang memiliki kepentingan di Asia Tenggara. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi ASEAN dalam menghadapi permasalahan geopolitik di daerah kawasan seiring berkembangnya ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat kemitraan di ASEAN (ASEAN, 2019). Dalam melakukan kerja sama, rasa saling percaya dan terbuka merupakan dasar kemitraan yang efektif. Indonesia selalu mengedepankan sentralitas ASEAN dalam melakukan kemitraan yang strategis sejalan dengan visi dan misi ASEAN. Usaha ini akan bermanfaat seiring dengan arah kebijakan Indonesia (ASEAN, 2019).

Selain menjalankan mitra strategis dengan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia juga aktif menginisiasi kerja sama dengan aktor hubungan internasional non-ASEAN. Indonesia menginisiasi kemitraan global yang tertuang dalam *Bali Declaration on ASEAN Community on Global Community of Nations* (Bali Concord III). Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Marty Natalegawa menyebutkan bahwa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bali Concord III akan menjadi satu kesatuan yang akan membantu menyelesaikan permasalahan global. Memang tidak dipungkiri bahwa ASEAN akan semakin bersinar pada masa mendatang. Dengan demikian, Indonesia dinilai sudah tepat memprioritaskan ASEAN dalam berbagai kebijakan politik luar negerinya. Indonesia tetap dan akan terus berusaha untuk melakukan kerja sama efektif yang akan saling menguntungkan negara-negara ASEAN dan negara mitra ASEAN.

E. PENTINGNYA ASEAN UNTUK INDONESIA DI MASA DEPAN

Doktrin politik luar negeri Indonesia 'bebas aktif' menempatkan Indonesia menjadi negara yang aktif dalam kegiatan internasional. Indonesia selalu menghindari menjadi objek dalam perpolitikan internasional dan akan terus berusaha untuk memecahkan konflik-konflik internasional. Salah satu upaya peran Indonesia dalam implementasi doktrin politik luar negerinya adalah menjadi *founding father* ASEAN.

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN yang awalnya hanya bertujuan untuk mengurangi efek Perang Dunia II terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara telah berevolusi menjadi organisasi regional yang diapresiasi oleh masyarakat internasional. Prinsip musyawarah dan menghormati kedaulatan negara anggota menjadikan ASEAN masih eksis hingga saat ini. Peran Indonesia yang aktif dalam menginisiasi program bagi kebaikan negara-negara kawasan pun merupakan implementasi doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia juga memiliki posisi vital dalam ASEAN itu sendiri.

Apakah ASEAN penting untuk Indonesia di masa depan? Jawabannya iya, Indonesia pun masih memerlukan bantuan ASEAN, karena bagaimana pun ASEAN itu sudah melekat dalam citra Indonesia dan salah satu fondasi yang kuat untuk Indonesia melangkah ke ranah internasional. ASEAN, dengan Bali Concord III, akan membuat nama-nama anggota Asia Tenggara lebih aktif dalam kancah politik global. Kemitraan strategis yang dilakukan ASEAN, akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Akan sangat dekat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan SDGs ini jika semua kemitraan strategis ini dimanfaatkan potensinya oleh Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa doktrin politik luar negeri Indonesia bebas aktif memiliki peran vital di Asia Tenggara dan ditunjukkan melalui intensitas Indonesia dalam menginisiasi kerja sama strategis dengan negara-negara anggota maupun negara mitra ASEAN. Kerja sama strategis inilah yang akan berefek positif terhadap pembangunan kawasan, baik itu terhadap anggota ASEAN maupun terhadap negara mitra ASEAN.

REFERENSI

Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315796673

Arisanto, P. T. (2020). Timor Leste's accession to ASEAN 2011: An analysis of international factors. *Jurnal Dinamika Global*, *5*(02), 150–170. https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.208

ASEAN (2019). *Masyarakat ASEAN/Edisi 21/April 2019*. http://setnas-asean.id/site/uploads/document/magazine/5d28609504aa1-mma-21-single-page-18-juni.pdf

ASEAN. (2020). *ASEAN hits historic milestone with signing RCEP*. https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/ (diakses pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 15.42)

ASEAN. (t.t.a) *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. https://asean.org/asean/asean-charter/charter-of-the-association-of-southeast-asian-nations/, (diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 20.37)

ASEAN. (t.t.b) *History of ASEAN*. https://asean.org/asean/about-asean/history/ (diakses 17 Januari 2021, pada pukul 17.53)

ASEAN. (t.t.c) *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976*. https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/, (diakses pada 7 Februari 2021, pukul 00.13)

Bappenas. (2017). *Pilar pembangunan ekonomi*.

Börzel, T. A., Goltermann, L., & Striebinger, K. (2016). *Roads to regionalism: Genesis, design, and effects of regional organizations*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315606675

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Idris, M. (2021, 1 April). Ramalan Sri Mulyani: Jadi negara maju, ekonomi RI masuk 5 besar dunia. *Kompas*. https://money.kompas.com/read/2021/04/01/235100126/ramalan-sri-mulyani-jadi-negara-maju-ekonomi-ri-masuk-5-besar-dunia?page=all.

Kadarisman, M. (2017). Analisis kepentingan indonesia dalam meratifikasi Piagam Asean (Asean Charter). *Sociae Polites, 15*(1), 1–22. https://doi.org/10.33541/sp.v15i1.437

Koesrianti. (2014). *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sejarah konstitusi dan integrasi kawasan*. Airlangga University Press.

Mie, O. (2020, 30 Desember). Signing of the RCEP and the future order asian order. *The Diplomat*. https://thediplomat.com/2020/12/signing-of-the-rcep-and-the-future-asian-order/ (diakses 6 Februari 2021, pukul 21.18)

Nugroho, M. S. E. (1994). *ASEAN and security in Southeast Asia* [Tesis master, Naval Postgraduate School Monterey, California]. Defense Technical Information Center. https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA294762

Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2021. (2021, 6 Januari). *Kementerian Luar Negeri RI*. https://kemlu.go.id/portal/i/read/2048/berita/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021

Putra, B. A. (2015). Indonesia's leadership role in ASEAN: History and future prospects. *Ijasos-International E-Journal of Advances in Social Sciences, 1*(2), 188–197. http://ijasos.ocerintjournals.org/tr/download/article-file/89506

Pye, L. W., & Weatherbee, D. E. (2005). International relations in Southeast Asia: The struggle for autonomy. *Foreign Affairs, 84*(6). https://doi.org/10.2307/20031829

Roberts, C. B., & Habir, A. D. (2015). Indonesia-Australia relations: Progress, challenges and potential. Dalam C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian, L. (Ed.), *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order* (195–223). https://doi.org/10.1057/9781137397416_10

Sambhi, N. B (2015). Untitled [Ulasan buku *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order*, oleh C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian, L (Ed.)]. *Contemporary Southeast Asia, 37*(3), 502–504. https://doi.org/10.1355/cs37-3m

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). *International relations and world politics* (5th ed.). Pearson Education, Inc.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Wuryandari, G. (2008). Politik luar negeri Indonesia: Refleksi dan prediksi 10 tahun. *Jurnal Penelitian Politik LIPI, 5*(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.503

Yani, Y. M., & Montrama, I. (2017). Quo vadis politik luar negeri indonesia. PT Elex Gramedia Komputindo. https://doi.org/717080875

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VII

Kerja Sama Indonesia-Pasifik Selatan: Penguatan Ikatan Ekspor-Impor Indonesia dan Pasifik Selatan melalui Pacific Island Forum

Muhammad Zidane Faturrahman

Selama berabad-abad lamanya Indonesia telah tinggal berdampingan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Meskipun secara keorganisasian, Indonesia masuk ke dalam ASEAN dan menjadi salah satu pendiri asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi Indonesia juga memiliki sejarah panjang dan kedekatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya Pasifik Selatan. Hal itu terlihat dalam berbagai hal, mulai dari fitur-fitur kebudayaan, kemaritiman, hingga berbagi tantangan yang sama: persoalan iklim, lingkungan hidup, serta perekonomian berkelanjutan. Sepertiga wilayah Indonesia yang juga berada di Samudra Pasifik telah menjadikan kawasan ini bagaikan keluarga. Pasifik Selatan memiliki karakteristik hamparan lautan luas dan pulau-pulau yang berada di bagian selatan Samudera Pasifik. Dari sisi geografis, Indonesia jelas berbatasan langsung dengan beberapa negara yang menjadi bagian dari kawasan Pasifik. Sebut saja Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

Australia menjadi salah satu negara pendiri Forum Kepulauan Pasifik atau *Pacific Island Forum* (PIF) bersama dengan Selandia Baru,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepulauan Cook, Fiji, Nauru, Tonga, dan Samoa. PIF merupakan nama baru dari dari Forum Pasifik Selatan atau *South Pacific Forum*, dan didirikan untuk merefleksikan lokasi geografis negara-negara yang berada di utara dan selatan Pasifik. Di dalamnya ada Australia, Papua Nugini, Kepulauan Cook, Fiji, Kaledonia Baru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Federasi Mikronesia, Palau, Polinesia Prancis, Selandia Baru, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Tonga, dan Vanuatu.

Beberapa negara yang selama ini diketahui telah berkontribusi dan memiliki peran penting terhadap negara-negara di Pasifik selatan adalah Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, Tiongkok, dan Rusia. Hal ini tidak terlepas dari jejak masa lalu banyak negara di kawasan ini yang memiliki hubungan kolonialisme dengan sejumlah negara tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negara-negara di Pasifik Selatan pun mulai membuka hubungan dengan negara-negara selain dari bekas penjajahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang bertetangga langsung dengan kawasan ini.

A. PERKEMBANGAN RELASI INDONESIA DAN PASIFIK SELATAN

Indonesia merupakan salah satu dari 18 Mitra Wicara atau *Post-Forum Dialogue Partners* dari PIF. Ketujuh belas lainnya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, Inggris, Italia, Jepang, Kanada, Korea, Kuba, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa. Artinya, jika ditilik dari kacamata strategis, baik Indonesia maupun Forum Kepulauan Pasifik sama-sama saling memandang penting hubungan antara satu sama lain. Bagi Indonesia, kawasan Pasifik Selatan memiliki arti dan peran yang sangat penting, selain kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan di Pasifik Selatan penting artinya bagi Indonesia yang sedang gencar mendorong pembangunan di segala bidang. Hal itu juga turut menopang upaya Indonesia untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera.

Indonesia sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia yang kini mulai diperhitungkan di tataran internasional. Ditopang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

oleh jumlah penduduk yang besar (keempat terbesar di dunia), sumber daya alam yang melimpah, juga posisi yang strategis: diapit oleh dua benua, yakni Benua Asia dan Australia serta dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi yang berdampingan langsung menjadikan posisi Indonesia lebih strategis dibandingkan dengan negara-negara lainnya untuk berhubungan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Indonesia sendiri sangat aktif menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan dengan organisasi-organisasi internasional. Tidak terkecuali dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Hubungan diplomasi Indonesia-Pasifik Selatan pertama kali dimulai pada tahun 1974, yakni dengan Fiji. Sejak itu, Indonesia terus membuka hubungan dengan negara-negara lainnya yang menjadi bagian dari Forum Kepulauan Pasifik. Kini, hubungan diplomatik itu telah berkembang kian luas menjadi hubungan ekonomi dan bisnis, pariwisata, serta kebudayaan.

Baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik Selatan sama-sama berada dalam posisi saling membutuhkan satu sama lain. Kerja sama di antara kedua belah pihak menjadi jangkar yang dapat memperkuat masing-masing pihak. Pada 2019, Indonesia pun turut memprakarsai *Pacific Exposition* pertama di Auckland, Selandia Baru. Tujuannya untuk membangun keterikatan serta mempercepat peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pariwisata, dan kebudayaan antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi anggota Pacific Island Forum.

Perekonomian negara-negara Pasifik Selatan memang relatif lebih terbatas dibandingkan Indonesia serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ataupun kawasan lain pada umumnya. Hal itu lantaran letak geografis yang terpencil, dengan luas daratan yang sangat terbatas dan dikelilingi oleh lautan luas, serta kapasitas sumber daya manusia yang juga terbatas. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini pada umumnya mengandalkan impor untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, termasuk impor bantuan dari negara-negara yang lebih besar dan lebih maju. Merujuk pada kondisi tersebut, penting untuk kemudian dibahas mengenai potensi yang bisa didapatkan dari kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan. Melalui kerja sama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ekonomi dan peran vital yang dapat dimainkan oleh Indonesia, esai ini membahas hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang akan saling menguntungkan.

B. KERJA SAMA EKONOMI

Pasifik Selatan jelas merupakan kawasan yang sangat penting bagi Indonesia. Namun, jika dibandingkan kawasan-kawasan lainnya di berbagai belahan dunia, sesungguhnya kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan masih terbatas dan memiliki ruang yang sangat besar untuk lebih ditingkatkan lagi. Pengembangan pasar ekspor komoditas Indonesia ke kawasan itu pun masih tergolong rendah. Sebagai gambaran, pada 2018 (sebelum era pandemi Covid-19) total perdagangan antara Indonesia dengan negara kawasan Pasifik tercatat tercatat US$10,67 miliar (Juswanto, 2016). Angka ini naik 3,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$10,37 miliar. Pada periode Januari–Maret 2019, total nilai perdagangan Indonesia dengan negara kawasan Pasifik pun tercatat mencapai US$2,04 miliar (Kemendag perkuat ekspor, 2019).

Jika ditilik lebih lanjut, sesungguhnya kehadiran produk ekspor Indonesia di kawasan tersebut dapat dilihat sebagai representasi penerimaan masyarakat setempat terhadap Indonesia. Hal itu sekaligus juga dapat menggambarkan bagaimana kedekatan hubungan antara kedua negara. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan mitra dagang yang potensial bagi Indonesia. Penguatan pasar ekspor dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dalam mendorong arus lalu lintas orang, barang dan jasa, juga konektivitas dari Indonesia timur ke Pasifik (Juswanto, 2016). Di antara negara-negara kawasan Pasifik yang menjadi tujuan terbesar ekspor Indonesia yakni Australia, Selandia Baru, Timor Leste, Papua Nugini, dan Fiji. Dengan Australia, total perdagangan Indonesia pada 2019 mencapai US$17,7 miliar. Nilai ini menjadikan Indonesia sebagai partner ke-13 terbesar bagi negeri kanguru (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, t.t.).

Dari nilai tersebut, perdagangan barang tercatat mencapai US$11,3 miliar, yang ditopang oleh ekspor-impor komoditas per-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanian dan pertambangan. Dari Australia, Indonesia mengimpor produk-produk pertanian. Minyak mentah dan produk manufaktur menjadi kunci ekspor Indonesia ke Negeri Kanguru. Sementara itu, sebanyak US$6,4 miliar merupakan nilai perdagangan jasa yang dilakukan antara kedua negara. Jasa-jasa perjalanan yang terkait dengan pendidikan menjadi kunci ekspor Australia ke Indonesia. Di samping itu, nilai ekspor Indonesia ke Australia ditopang oleh kunjungan wisatawan, khususnya ke Bali.

Dengan Selandia Baru, volume perdagangan Indonesia secara total mencapai US$2,3 miliar per Agustus 2019 (New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2019). Jika mengacu data tersebut, Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan dari Selandia Baru, kendati tipis. Nilai ekspor Indonesia ke Selandia Baru pada periode tersebut mencapai US$1,11 miliar (Hermanto, 2018). Produk barang dan jasa yang menjadi komoditas ekspor utama di antaranya ialah bahan makanan, minyak bumi mentah, bahan bakar mineral, dan pupuk. Sebaliknya, nilai impor dari Selandia Baru mencapai US$1,19 miliar. Produk barang dan jasa yang menjadi komoditas impor utama yakni produk olahan peternakan, seperti susu dan daging, kemudian kayu, serta pendidikan dan pariwisata.

Produk-produk utama yang diekspor Indonesia ke kawasan Pasifik yaitu komponen elektronik, kelapa sawit, ban, dan tembakau. Sementara itu, produk impor terbanyak yang didapat Indonesia dari negara kawasan Pasifik yakni batubara bitumen, produk peternakan, gandum, konsentrat bijih besi, dan gula mentah. Pemerintah memang telah berupaya memperkuat ekspor ke negara di kawasan Pasifik dengan melakukan misi dagang untuk membuka peluang pasar baru. Hal itu sebagaimana yang dilakukan Kementerian Perdagangan pada Juli 2019—atau sebelum pandemi Covid-19 hadir dan memporakporandakan kehidupan serta perekonomian dunia—dengan membawa puluhan perusahaan di sektor makanan dan minuman, elektronik, jasa keuangan, juga energi dan otomotif.

Beberapa penghasilan utama yang diandalkan oleh negara-negara di kawasan ini mencakup sektor pertanian, perkebunan kelapa,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kerajinan tangan, dan pariwisata. Perikanan serta pengolahan biota laut juga menjadi salah satu sektor yang potensial, mengingat kawasan Pasifik Selatan yang didominasi oleh lautan dan berada dalam cakupan Samudera Pasifik ini kaya akan sumber daya alam bahari.

Banyak negara besar yang berkepentingan menangkap ikan di kawasan tersebut pun menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara yang menempati kawasan seluas 30 juta km persegi bagian selatan Samudera Pasifik ini, terutama sejak berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bagi Indonesia, ini merupakan suatu nilai tambah karena ZEE Indonesia juga berhubungan langsung dengan ZEE sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan (Permana, 2021). Kolaborasi antara dua zona ekologis yang kaya akan sumber daya alam menjadi kekuatan yang strategis sekaligus bernilai ekonomis tinggi. Sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut (Permana, 2021).

Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar sekaligus pendorong perekonomian bagi kawasan Pasifik Selatan. Laporan Bank Dunia memproyeksikan potensi sektor pariwisata di Kepulauan Pasifik dapat menghasilkan lebih dari US$1,6 miliar dan lebih dari 110.000 pekerjaan tambahan di Pasifik pada 2040 (de Haan, 2020). Perkembangan teknologi juga telah membantu membuka pasar pariwisata global, meningkatkan kesadaran, dan akses ke destinasi-destinasi pariwisata di kawasan.

Sebelum pandemi Covid-19 menghantam dunia, perkembangan teknologi telah mendorong sektor pariwisata di negara-negara Pasifik Selatan bertumbuh hingga dua digit. Namun, pandemi Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar ke seluruh dunia, telah memukul sektor pariwisata yang menjadi andalan sebagian besar negara Pasifik Selatan. Di satu sisi, 'keterisolasian' secara geografis telah menjadi keuntungan tersendiri bagi negara-negara di kawasan ini dalam mencegah masuknya pandemi ke kawasan mereka, yakni dengan memperketat aliran orang yang datang dan menginjakkan kaki di kawasannya. Di sisi lain, turunnya arus kunjungan wisatawan asing, khususnya dari Asia, telah menyebabkan kawasan ini kehilangan jutaan dolar AS dari sektor pariwisata. Untuk sektor pertanian,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beberapa potensi bagus yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan ini secara umum yaitu kopi, kakao, kopra, kelapa sawit, dan tebu.

C. INDONESIA SEBAGAI NEGARA KUNCI

Di luar Australia dan Selandia Baru, di Pasifik Selatan terdapat lima negara kunci yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan negara-negara lainnya, baik dari sisi politik maupun ekonominya. Kelimanya memiliki hubungan ekonomi yang relatif lebih banyak dan lebih menghasilkan bagi pembangunan di negara masing-masing dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan. Kelima negara tersebut yakni Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Island dan New Caledonia.

Fiji merupakan salah satu yang menarik karena posisinya sebagai *hub* bagi negara-negara lainnya di Samudera Pasifik dan memiliki rute pelayaran yang dapat diandalkan di kawasan. Negara ini dilengkapi dengan infrastruktur jalan senilai US$11 miliar, 1.200 jembatan, 47 dermaga, 5 pelabuhan komersial, serta 25 bandara lokal dan 2 bandara internasional yang mempermudah arus barang dan jasa di kawasan (Ministry of Foreign Affairs Fiji, t.t.).

Fiji juga memiliki level inflasi yang rendah dan pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) yang selalu positif sejak 2012. Struktur perpajakan Fiji juga ramah terhadap bisnis, dengan 20% pajak korporat dan tarif yang lebih rendah 10% bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pasifik Selatan (*South Pacific Stock Exchange*) (Ratu, 2014). Beberapa sektor yang ditawarkan oleh Fiji yaitu agrikultur, audio visual, energi, perikanan, kehutanan, kesehatan, ITC, manufaktur, pertambangan dan *groundwater*, serta pariwisata (Ministry of Foreign Affairs Fiji, t.t). Pariwisata merupakan sektor yang menjadi pendorong utama ekonomi Fiji. Hal ini didukung oleh karakteristik Fiji yang dilingkupi oleh iklim hangat tropis dan kaya akan keragaman kebudayaan. Kontribusi sektor pariwisata mencapai lebih dari 30% terhadap GDP Fiji (Ministry of Foreign Affairs Fiji, t.t). Pada 2017, sebanyak 870.309 wisatawan menghabiskan 2 miliar FJD di Fiji dan menghidupi sekitar 1.200 bisnis terkait di negeri itu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Naiknya jumlah wisatawan asing pun menciptakan *demand* baru di Fiji, baik dari sisi produk, fasilitas, juga jasa (Sheany, 2017). Kondisi ini pun pada akhirnya mendorong pemerintah setempat untuk menawarkan insentif bagi pelaku usaha perhotelan melalui Fiji Revenue and Customs Authority.

Tidak jauh dari Fiji, ada Kepulauan Cook yang juga mengandalkan sektor pariwisata untuk menopang perekonomiannya. Sebanyak 70% GDP negara yang diberi nama dari Kapten Cook ini berasal dari sektor pariwisata (Septiari, 2019). Selain itu, ekonomi negara ini juga ditopang oleh sektor pertanian, ekspor mutiara hitam, penjualan lisensi memancing bagi armada luar negeri, dan keuangan. Di antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Kepulauan Cook merupakan salah satu yang mencatatkan GDP tertinggi, yakni US$299 juta pada tahun 2016 dan GDP per kapita sebesar US$16.700 (Septiari, 2019). Hal itu tidak terlepas dari dukungan Selandia Baru terhadap perekonomian negara itu. Bahkan, di kawasan seluas 240 km persegi itu, dolar Selandia Baru menjadi mata uang resmi yang digunakan untuk bertransaksi.

Tentu saja, Papua Nugini—salah satu negara yang terbesar baik dari segi geografis, jumlah penduduk, maupun perekonomiannya—menarik untuk dirangkul. Apalagi, negara ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia timur, baik di bagian darat maupun laut. Kerja sama dengan Papua Nugini merupakan keniscayaan yang perlu ditingkatkan oleh Indonesia karena akan menguntungkan kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan.

Sejak merdeka pada 1975, negara tetangga ini sangat mengandalkan potensi sumber daya alam, khususnya tembaga, emas, dan perak. Papua Nugini memang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral, minyak, dan gas alam (Blaskett, 1989). Hanya saja, pemanfaatannya tidak optimal karena berbagai tantangan, termasuk kondisi medan serta tingginya biaya infrastruktur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat setempat juga mengembangkan potensi kopi hingga menjadi salah satu andalan baru negara ini untuk mendukung perekonomian. Diversifikasi ekonomi juga dilakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pemerintah setempat dengan mengembangkan sektor telekomunikasi dan transportasi. Papua Nugini juga telah memandang Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan (Suryadinata, 1996). Lokasi Indonesia yang berada di sisi paling ujung benua Asia serta peran strategis Indonesia di tataran regional juga menjadi jembatan bagi negara Papua Nugini untuk berhubungan dengan negara lainnya di Asia. Jalinan yang baik antara Papua Nugini dan Indonesia dapat menopang negara tersebut untuk meningkatkan hubungannya dengan negara Asia lainnya.

Kemitraan di antara kedua negara telah terjalin dalam beragam sektor, termasuk energi, kepariwisataan, dan hubungan antar masyarakat atau *people to people*. Sepanjang kurun waktu 2009 hingga 2013, nilai perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini telah bertumbuh sebesar 18,73% (Anshari, 2016). Namun, masih banyak ruang untuk mendorong pertumbuhan kerja sama perdagangan antara kedua negara. Tentu saja peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mendorong swasta agar mau mengambil peran lebih untuk melakukan perdagangan dan investasi lintas batas.

Kerja sama bisnis, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, merupakan potensi besar yang dapat ditingkatkan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia maupun negara-negara kawasan Pasifik. Australia dan Selandia Baru, contohnya, dikenal dengan kualitas produk pertanian dan peternakannya (Hermanto, 2018). Jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lainnya seharusnya dapat mereduksi biaya logistik. Ditilik dari sisi perdagangan, hal ini akan menguntungkan karena harga produk-produk pertanian dan peternakan impor yang beredar di dalam negeri dapat semakin ditekan.

Dari sisi investasi, kerja sama di bidang pengembangan teknologi pertanian dan peternakan juga selayaknya mendapat sorotan lebih. Sebagaimana diketahui, dari sisi teknologi, sektor pertanian dan peternakan di dua negara pentolan kawasan Pasifik itu sudah tak dapat diragukan lagi. Indonesia seharusnya dapat memanfaatkannya dengan melakukan pertukaran *skill* dan pengetahuan yang dapat membantu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

meningkatkan kualitas teknologi pertanian dan peternakan di dalam negeri.

Dua cara ini dapat membantu Indonesia meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dan peternakannya. Dengan begitu, ada peluang *supply* yang akan lebih terjamin yang dapat mengatasi ancaman terjadinya krisis pangan. Bahkan pada titik tertentu, bukan tidak mungkin akan membantu Indonesia mewujudkan kembali swasembada sektor pertanian dan peternakan sehingga memiliki kekuatan untuk melakukan ekspor produk-produk dari kedua sektor tersebut. Itu hanyalah sekelumit contoh. Tentunya peluang peningkatan kerja sama masih sangat luas hingga ke banyak sektor lainnya, dengan mengacu pada perjanjian kerja sama bilateral maupun multilateral yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagai contoh dengan Selandia Baru, Indonesia memiliki kerja sama di bawah payung ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Regional Comprehenship Economic Partnership (RCEP). Selain AANZFTA dan RCEP, kerja sama perdagangan dan investasi dengan Australia juga dipayungi oleh Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Langkah Indonesia untuk menggelar pertemuan multilateral pertama bersama negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang bertajuk Forum Indonesia-Pasifik Selatan atau *Indonesia-South Pacific Forum* (ISPF) pada 2019 lalu perlu diapresiasi, kendati sebetulnya dapat dilakukan jauh sebelumnya. Apalagi mengingat kedekatan geografis dan sejarah panjang antara Indonesia dan kawasan di benua lautan tersebut. Namun, hal ini merupakan langkah maju dari hubungan yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan masing-masing negara di Pasifik Selatan. Pada gelaran tersebut, Indonesia dan para negara tetangga di kawasan yang lebih dari 50% berupa lautan itu sepakat untuk saling membuka diri (Sinaga, 2019).

Kerja sama konkret perdagangan akan diperkuat. Hambatan perdagangan dan investasi akan dikurangi. Kemudian, kedua pihak juga akan menggiatkan kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas, maupun kerja sama pembangunan (Sinaga, 2019). Salah satu lang-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kah konkret untuk mendorong perdagangan yakni dengan mulai dilakukannya pembahasan *preferential trade agreement* (PTA) yang akan menjadi pondasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sebagai langkah awal, pembahasan tersebut dimulai dengan proses negosiasi PTA dengan Papua Nugini. Selanjutnya, ada rencana untuk meluncurkan PTA pula dengan Fiji.

Pada saat yang sama, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan perusahaan konstruksi asal Indonesia yang akan menjadi platform kerja sama untuk mendukung proyek-proyek di negara-negara Pasifik Selatan. Beberapa proyek potensial yang dapat didukung oleh kedua perusahaan itu yakni proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Meskipun beberapa rencana pengembangan kerja sama tersebut terhambat oleh penyebaran wabah Covid-19 di seluruh dunia, tetapi potensinya tetap terbuka. Besar kemungkinan bahwa setelah pandemi teratasi, kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan akan semakin ditingkatkan.

D. TANTANGAN INDONESIA KE DEPAN

Kendati kaya akan potensi, banyak negara di kawasan Pasifik Selatan yang belum dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang dimilikinya. Selain Australia dan Selandia Baru, sebagian besar anggota *Pacific Island Forum* masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, serta minimnya investasi dan bantuan dari negara lain. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi Indonesia untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan dengan mendorong investasi ke negara-negara di Pasifik Selatan. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi yang menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Namun, bonus demografi bagai pedang bermata dua. Bila dimanfaatkan dengan baik, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia; begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya generasi milenial sebagai generasi penerus estafet pembangunan ekonomi di Indonesia untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mempersiapkan diri menjadi *human capital* yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Karena pada 2045 mendatang, generasi milenial akan berada pada puncak usia produktif. Ini akan menjadi masa depan kita karena Indonesia 100 tahun ke depan, generasi milenial akan ada di puncak usia produktif (sekitar 40–51 tahun). Namun, waktu yang dimiliki Indonesia untuk bisa menikmati bonus demografi ini sangat terbatas, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas SDM terutama generasi milenial melalui pendidikan, agar dapat memberikan dampak positif baik bagi lingkungannya, atau bahkan perekonomian Indonesia. Demi mencapai Indonesia emas 2045, hal yang sangat vital adalah pendidikan.

Arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan Indonesia mengacu pada dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati pada tanggal 21 Mei 2015 oleh para utusan dari 160 negara melalui the *World Education Forum* 2015 yang diorganisasi oleh UNESCO bersama UNICEF, Bank Dunia, UNFPA, UNDP, UN Women dan UNHCR, yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, pada 19–22 Mei 2015 (Holzhacker & Agussalim, 2019). Tujuannya ialah untuk memastikan pemerataan pendidikan dasar, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau baik untuk anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Juga meningkatkan generasi siap kerja yang berkualitas dan terampil, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pembangunan berkelanjutan. Di sinilah generasi milenial perlu memiliki kemampuan perekonomian yang inovatif yang dapat membantu negara secara tidak langsung dalam aspek memajukan perekonomian. Dengan pengembangan ekonomi kreatif, maka modernisasi harus lebih digencarkan disertai dengan kejelian berinovasi dalam bekerja dengan efisien dan efektif.

Apalagi negara-negara di kawasan tersebut sangat tergantung kepada impor komoditas-komoditas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan. Belum lagi beberapa tantangan yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil pada umumnya, yakni keterbatasan sumber daya alam, keadaan yang terpencil, dan kondisi yang rentan terhadap bencana alam. Dengan berbagai situasi dan kondisi tersebut, sudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

selayaknya bagi Indonesia untuk merangkul negara-negara yang menjadi saudara di kawasan Pasifik Selatan ini. Lebih khusus lagi apabila melihat perkembangan Indonesia yang semakin maju, sudah selayaknya Indonesia membuka peran lebih di kawasan Pasifik Selatan.

Prioritas hubungan luar negeri Indonesia setelah kawasan Asia Tenggara mestilah kawasan Pasifik Selatan. Tolak ukur keseriusan Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sesungguhnya dapat diukur mulai dari beragam kunjungan, penandatanganan nota kesepahaman, rencana kerja sama, bantuan teknis dan non teknis hingga beragam bantuan atau hibah lainnya. Jika melihat kekuatan ekonomi Indonesia yang kini mulai diakui secara internasional, tentu saja perlu peran aktif republik ini untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi serta mendorong peningkatan pembangunan kapasitas di negara-negara di kawasan tetangga tersebut.

Kerja sama yang terjalin dengan baik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, khususnya di bidang ekonomi dan politik, akan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun rasa saling percaya antara kedua belah pihak, dan pada akhirnya penopang kuat bagi kedaulatan Indonesia. Sebuah kawasan Pasifik yang lebih sejahtera, lebih stabil dan damai tentulah menjadi mimpi kita bersama. *South Pacific Forum* yang telah berganti nama menjadi *Pacific Island Forum* menjadi wadah yang dapat dirangkul oleh Indonesia untuk memperkuat posisi negeri ini di kawasan.

Indonesia bersama dengan sejumlah negara di dunia telah menyepakati sebuah rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Rencana aksi global yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs) ini memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030. Di antara 17 tujuan SDGs yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat yang merupakan poin ke-16 dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang merupakan poin ke-17. Penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia-Pasifik Selatan melalui peningkatan ikatan ekspor-impor merupakan aksi bersama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang mengimplementasikan poin ke-16 dan poin ke-17 tujuan dari SDGs. Dengan peningkatan ikatan kerja sama kedua belah pihak, diharapkan target SDGs 2030 akan tercapai.

REFERENSI

Anshari G, Y. S. (2016). *Hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan* [Tesis]. Departemen Ilmu Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar.

Blaskett, B. (1989) *Papua New Guinea-Indonesia relations: A new perspective on the border conflict* [tesis PhD, Australian National University]. ANU Open Research Repository. https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/113878

de Haan, J. (2020, March 4). *Indonesia makes claim for new borders in the South Pacific*. Future Directions International. https://www.futuredirections.org.au/publication/indonesia-makes-claim-for-new-borders-in-the-south-pacific/

Hermanto, N. F. N. (2018). Arah kebijakan kerja sama pertanian Indonesia di kawasan Asia Pasifik. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *36*(1), 63.

Holzhacker, R., & Agussalim, D. (2019). *Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN: National and regional approaches, Volume 1*. Brill.

Juswanto, W. (2016). *Economic growth and sustainable development in the Pacific Island countries*. Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/219266/adbi-pb2016-6.pdf

Kedutaan Besar Australia di Indonesia. (t.t.). *Perdagangan dan investasi*. Diambil pada February 18, 2021, dari https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/trade.html

Kemendag perkuat ekspor ke kawasan Pasifik. (2019, 12 Juli). *Kementerian Perdagangan*. https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-perkuat-ekspor-ke-kawasan-pasifik-1

Ministry of Foreign Affairs Fiji. (t.t.). *Fiji represented at the Indonesia South Pacific Forum*. Diakses pada February 18, 2021, dari http://www.foreignaffairs.gov.fj/component/content/article/38-press-releases-2018/1246-pr-fiji-represented-at-the-indonesia-south-pacific-forum

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2019). *Indonesia*. https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/south-east-asia/indonesia/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Permana, E. (2021, January 6). Indonesia announces 5-step foreign policy. *Anadolu Agency*. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-announces-5-step-foreign-policy/2100582/

Ratu, A. S. (2014, Juni 20). RI dan Fiji perkuat kerja sama kelautan dan perikanan. *Wartaekonomi*. https://www.wartaekonomi.co.id/read31095/ri-dan-fiji-perkuat-kerja-sama-kelautan-dan-perikanan.

Septiari, D. (2019, July 13). RI opens ties with Cook Islands, Niue. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/13/ri-opens-ties-with-cook-islands-niue.html

Sheany. (2017, March 15). Indonesia, Fiji strengthen relations on trade, security. *Jakarta Globe*. https://jakartaglobe.id/news/indonesia-fiji-strengthen-relations-trade-security/

Sinaga, Y. A. (2019, March 21). Indonesia tingkatkan kehadiran di Pasifik Selatan melalui ISPF. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/813392/indonesia-tingkatkan-kehadiran-di-pasifik-selatan-melalui-ispf.

Suryadinata, L. (1996). *Indonesia's foreign policy under Suharto: Aspiring to international leadership*. Times Academic Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian 3

Aktivitas Indonesia dalam Organisasi Internasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 8

Indonesia dan Keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB: Posisi Strategis dan Potensi Penguatan Pengaruh

Muhammad Ibrahim Arfah

Visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikannya di bulan Oktober 2019 menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu tujuan utamanya adalah Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia-Pasifik (BAPPENAS, 2019). Menjadi negara paling berpengaruh di Asia-Pasifik tentu bukan urusan mudah, apalagi di kawasan yang sama terdapat beberapa negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Walaupun begitu, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, Indonesia adalah satu negara penting terutama dikaitkan dengan kontribusi Indonesia dalam organisasi internasional. Bab ini berfokus pada peran dan kontribusi Indonesia dalam organisasi internasional, terutama di lingkup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sejak berdirinya PBB 75 tahun yang lalu pada 24 Oktober 1945, organisasi ini telah memberi banyak kontribusi demi terciptanya kestabilan dan terjaganya perdamaian dunia. PBB sendiri memiliki beberapa dewan dengan fokus tugas yang berbeda demi menjalankan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

semua fungsinya sebagai organisasi internasional. Salah satu badan penting PBB adalah Dewan Keamanan (DK). Sebagai badan utama PBB untuk mengurusi konflik dan menjaga perdamaian, DK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang memaksa 193 anggota PBB lainnya demi penjagaan perdamaian. Badan ini berisikan lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis) serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih bergantian untuk periode dua tahun (Council on Foreign Relations, 2020). Sejak 28 September 1950 silam, setelah masuknya Indonesia sebagai anggota PBB, Indonesia sendiri telah menduduki posisi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak empat kali pada tahun 1973–1972, 1995–1996, 2008–2009, dan terakhir 2019–2020 lalu yang mewakili kawasan Asia-Pasifik (Kementerian Luar Negeri, 2019a). Tampak jelas bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan mempunyai potensi untuk berperan penting di kawasan Asia-Pasifik (sesuai visi Indonesia Emas 2045) melalui keterlibatannya di DK PBB.

Lebih jauh lagi, buku ini mendefinisikan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Indonesia Maju yang Berkelanjutan. Dengan mendasarkan pandangan berkelanjutan pada pemenuhan target-target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama merujuk pada SDGs 17 yakni penguatan implementasi serta revitalisasi kemitraan global untuk mencapai target keberlanjutan, visi Indonesia Emas 2045 sedang dikaitkan dengan aspek koherensi kebijakan (SDGs 17.14) dan respek terhadap pandangan nasional/lokal dari negara (SDGs 17.15). Oleh karena itu, muncul pertanyaan: apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam kerangka DK PBB dan sejauh apa Indonesia sudah membangun koherensi kebijakan serta menjaga respek terhadap nasionalitas/lokalitas kebijakan? Apa yang bisa dilakukan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ke depan dalam menjalankan visinya untuk "Indonesia Emas 2045" yang maju, berkelanjutan, dan memiliki pengaruh besar di kawasan? Bab ini akan lebih berfokus pada dampak keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang baru saja selesai (2019–2020). Dengan begitu, dapat tergambarkan apa saja dampak positif yang bisa diperoleh dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

disumbangkan Indonesia terkait kedudukannya di Dewan Keamanan PBB, terutama dengan belajar dari masa lalu dan demi masa depan.

A. PERAN PENTING KEANGGOTAAN TIDAK TETAP INDONESIA DI DK PBB

Berangkat dari ketulusan niat demi ikut memikul beban menjaga perdamaian dunia, hasil kampanye Indonesia dalam sengitnya persaingan dalam memperoleh kursi ini berbuah manis setelah menang telak dari Maladewa sebagai perwakilan kawasan Asia-Pasifik. Dari hasil pemungutan suara, Indonesia berhasil memperoleh 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam pemilihan tersebut. Adapun Maladewa hanya mendapat 46 suara (Firman, 2018). Terhitung sejak 1 Januari 2019, Indonesia langsung bergerak setelah dilantik hingga berakhirnya masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2020 kemarin. Keanggotaan Indonesia sendiri dalam PBB sudah memberikan banyak manfaat bagi nama bangsa sendiri, di mana peran aktif Indonesia juga begitu terlihat jelas dan bisa dirasakan oleh khalayak internasional.

Adapun empat fokus utama yang dibawa Indonesia dalam waktu keanggotaan 2019–2020: (1) penguatan ekosistem perdamaian dan keseimbangan global; (2) peningkatan sinergi antara organisasi kawasan-kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian; (3) pembentukan pendekatan komprehensif secara universal untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan (4) penekanan arti penting kemitraan global demi tercapainya sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan (Santi, 2018). Dapat dilihat bahwa secara spesifik, terutama di poin keempat, Indonesia menekankan arti penting SDGs 17 (Kemitraan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan) serta menitikberatkan sinergi dan koherensi kebijakan. Sementara itu, kemerdekaan untuk Palestina dan penanganan masalah kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh, menjadi isu utama yang dibawa Indonesia dalam kampanyenya sejak Januari 2018 hingga bertugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB sejak Januari 2019 hingga Desember 2020.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia sebagai negara berdaulat terus berupaya untuk membuat perbedaan dengan kebijakan luar negerinya. Sebagai negara demokrasi dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk menyebarkan nilai perdamaian di luar wilayahnya (Norlyanti, 2018). Strategisnya posisi Indonesia ini juga cukup memengaruhi banyak bidang. Salah satunya, Indonesia bisa ikut andil dalam kegiatan harian DK PBB. Indonesia, sebagai salah satu calon negara besar di Asia-Pasifik, bisa lebih eksis untuk menampakkan kekuatan dalam ikut membangun koherensi kebijakan dan turun langsung dalam pensterilan kawasan yang sedang berkonflik. Misalnya, campur tangan Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan di Rohingnya untuk kawasan ASEAN dan dengan mengirimkan pasukan yang disebut dengan Kontingen Garuda menuju kawasan konflik perang, seperti Sudan Selatan, Lebanon, Republik Afrika Barat, Kongo, dan Afganistan (Hananto, 2020). Jumlah pasukan perdamaian yang dikirim Indonesia adalah yang terbanyak di kawasan Asia Tenggara (Hananto, 2020), dan nomor delapan tertinggi di dunia (Wahyuni & Andrianto, 2020). Bahkan, di Asia-Pasifik, jumlah pasukan perdamaian Indonesia, dari data menurut Wahyuni dan Andrianto (2020) adalah yang tertinggi, yakni sebanyak 2.837 orang.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian PBB di bawah komando DK PBB ini sudah menjadi salah satu fitur utama politik luar negeri Indonesia sejak lama. Pengiriman pasukan perdamaian ini sudah dilakukan Indonesia sejak Pasukan Konga I dikirim ke Mesir tahun 1957 (Anwar, 2014). Tidak hanya terlibat aktif, keberadaan pasukan perdamaian Indonesia mendapatkan banyak pujian terkait profesionalitas tentaranya dan kontribusinya terhadap misi yang diberikan (Hutabarat, 2014, 186). Dalam perayaan hari PBB tanggal 24 Oktober 2014 di Universitas Budi Luhur, Koordinator PBB untuk Indonesia, Douglas Broderick, memberikan pujian terhadap peran aktif Indonesia dalam kaitannya dengan pengiriman pasukan perdamaian (UN praises Indonesia, 2014).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menariknya lagi, dalam kaitannya dengan pasukan perdamaian, Indonesia yang pada tahun 2020 menjadi Presiden DK PBB berhasil membuat sejarah dengan mendorong disahkannya Resolusi 2538. Resolusi 2538 merupakan resolusi pertama usulan Indonesia yang disahkan di level DK PBB, dengan dukungan dari 97 negara sponsor dan disetujui oleh seluruh anggota DK PBB. Resolusi ini mengetengahkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, terutama dalam konteks pasukan perdamaian PBB. Selain itu, resolusi ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan jumlah perempuan dalam misi PBB, perlu kerja sama dalam pelatihan dan peningkatan kemampuan (*capacity-building*), perlunya pengembangan jaringan dan pusat data untuk personel perempuan, serta perlunya penyediaan fasilitas khusus bagi personel perempuan (Kemlu, 2020a). Keberhasilan ini membuktikan kemampuan Indonesia menjadi *bridge-builder* bagi isu-isu perdamaian keamanan yang berkelindan dengan isu pembangunan berkelanjutan (terutama urusan kesetaraan gender). Walaupun komitmen dan kemampuan Indonesia mendorong diakuinya peran perempuan dalam pasukan perdamaian ini sempat diragukan, tapi ternyata Indonesia mampu membuktikan salah satu janji kampanyenya sebagai anggota tidak tetap DK PBB (Salim, 2017).

Di luar konteks pasukan perdamaian, sayangnya, Indonesia punya masalah besar dengan perannya di DK PBB. Salah satu isu yang sering mengemuka adalah banyak anggapan yang muncul bahwa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu tidaklah memiliki dampak yang cukup signifikan dan tidak strategis dalam konteks pengambilan kebijakan global. Hal ini menjadi satu tantangan dikarenakan adanya hak veto oleh anggota tetap DK PBB dalam pengambilan keputusan di PBB (Dariyanto, 2018). Dalam hal ini, anggota tidak tetap atau *Elected Ten* (E10) diharapkan dapat mempertahankan dan membuat anggota tetap DK PBB atau *Permanent Five* (P5) untuk ikut memperhitungkan dan betul-betul mengesampingkan egoisme politik yang bahkan dapat mencoreng nama mereka sendiri. Saling membangun kepercayaan dan diplomasi yang bersih akan lebih memberikan banyak keuntungan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebelumnya, perlu juga diketahui apa saja kewenangan yang dimiliki oleh anggota DK PBB guna melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 Piagam PBB untuk Dewan Keamanan, para anggota DK PBB diberi kewenangan dalam bertugas yang telah dicantumkan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII dari *Charter of the United Nations* (United Nations, t.t.). Menjatuhkan sanksi-sanksi seperti pembatasan kepada suatu negara hingga pemberian kuasa untuk menggunakan persenjataan demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional termasuk dari salah satu kewenangan yang bisa digunakan oleh anggota DK PBB. Bahkan dengan adanya kewenangan ini, tidak menutupi adanya konsekuensi yang harus diterima masing-masing anggota demi berjalannya urusan domestik dan luar negeri mereka.

Bersama dengan semua kewenangan-kewenangan yang sampai saat ini hanya dapat ditentukan oleh mereka yang menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan, menjadi salah satu dari personil DK PBB (walaupun hanya anggota tidak tetap) bukanlah semata-mata ajang berprestise belaka. Singkat kata, dengan posisi strategis yang didapatkan itu, posisi tawar Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan isu yang dibawanya akan mendapatkan suara dalam pengambilan keputusan terkait keamanan yang kemudian akan disahkan DK PBB. Contoh keberhasilan Indonesia mendorong dan mengesahkan resolusi terkait peran perempuan dalam menjaga perdamaian dunia menjadi bukti nyata peran dan potensi Indonesia sebagai calon negara besar di Asia-Pasifik.

Bahkan, sebagai perwakilan dari negara-negara di Asia-Pasifik, Indonesia juga mengikutsertakan keinginan negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan yang berada di kawasan, dan kepentingan *middle-power*. Salah satunya adalah keinginan negara *middle-power* untuk menjadi warga dunia yang baik yang aktif dalam skala global (Cooper, 2011, 321). Misalnya saja, di minggu terakhirnya sebagai Presiden DK PBB, Indonesia memimpin sidang terkait aksi terorisme, konflik di Timur Tengah, dan keamanan siber (Septiari, 2020). Isu lain yang juga krusial adalah Rohingya, karena Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah perwakilan negara-negara Asia Tenggara. Sebagai perwakilan, Indonesia bisa menyuarakan arti penting kerja sama PBB dengan organisasi kawasan seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik Rohingya (Indonesia to put, 2019). Yang juga menarik, Indonesia seakan membawa kebiasaan dialog di ASEAN ke DK PBB. Sebagai presiden DK di akhir 2020, Indonesia mempromosikan *sofa talk*, sebuah tradisi khas Indonesia berupa kegiatan diskusi dan dialog informal tanpa agenda resmi dan tanpa catatan rekaman pertemuan (Septiari, 2020). Cara ini dianggap sukses menembus kebekuan birokrasi dan kecenderungan untuk menghindari isu sensitif dalam tradisi diplomasi di PBB.

Beberapa bukti di atas menunjukkan bahwa selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019–2020, Indonesia telah mampu memainkan perannya, tidak saja dalam isu keamanan tetapi juga dalam mempertemukan isu perdamaian-keamanan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti kesetaraan gender. Persoalannya, sebagaimana disampaikan oleh Jenne (2019), fokus hanya pada persoalan pasukan perdamaian saja tidak cukup untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di DK PBB. Terlebih, salah satu isu lain yang juga dijanjikan akan dibawa oleh Indonesia adalah persoalan Palestina (Indonesia resmi jadi, 2019). Apakah Indonesia mampu menjadi warga dunia yang baik, memformulasikan koherensi kebijakan dan sinergi dalam isu Palestina? Ataukah Indonesia justru terjebak dalam narasi-narasi dukungan penuh terhadap Palestina tanpa hasil yang substansial? Bagian selanjutnya dari tulisan ini mengetengahkan hal tersebut.

B. PERJUANGAN INDONESIA TERKAIT ISU PALESTINA DI PBB

Dengan atensi Indonesia yang kuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan dunia, Indonesia juga harus lebih aktif menyuarakan keprihatinannya kepada dunia. Sebagaimana yang telah terjadi pada masa kepresidenannya saat menjabat sebagai anggota DK PBB, Indonesia cukup berhasil dalam memperjuangkan isu yang selama ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

telah dibawanya. Salah satu isu yang menarik—dan cukup konsisten dibawakan—tetapi sampai hari ini belum selesai juga yakni terkait kemerdekaan Palestina. Walaupun belum sepenuhnya sampai pada titik yang dimimpikan, Indonesia tetap bersikukuh demi pembebasan itu walaupun dengan konsekuensi yang harus diterima (Rezasyah, 2019).

Konsekuensi yang diterima Indonesia sendiri hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan keinginannya untuk memperjuangkan Palestina, sejalan dengan perkataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berisikan "Palestina sebagai jantung politik luar negeri Indonesia, di mana setiap helaan napas diplomasi Indonesia di situ ada Palestina ... upaya kita tidak akan pernah berhenti untuk membantu Palestina" (Jadi anggota tidak, 2019). Perjuangan yang telah mendarah daging bagi bangsa Indonesia tidak akan disia-siakan pada kesempatan yang begitu penting. Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik yang sudah begitu lama terjadi dan belum menemui titik terang akan berakhirnya permasalahan pelik ini. Kontribusi Indonesia dalam pergerakan demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina sendiri sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. Indonesia selalu berada di garis terdepan demi ikut membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina yang telah lama dirampas. Berdasarkan dari cita-cita yang mulia Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa, Indonesia adalah bangsa yang akan selalu mendukung kemerdekaan suatu bangsa yang mengalami penindasan.

> "Diplomasi Indonesia akan terus memperjuangkan Palestina untuk kemanusiaan dan keadilan. Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya dalam bentuk dukungan politik tetapi juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis. Secara spesifik, di bidang ekonomi, Indonesia telah menerapkan *'zero tariff'* untuk berbagai produk Palestina yang masuk ke pasar Indonesia. Tahun ini, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama di bidang desalinasi air dan kesehatan. Sekali lagi, Palestina adalah jantung dari politik luar negeri Indonesia, dan dalam setiap hembusan nafas bangsa Indonesia Diplomasi, di sana Anda akan menemukan perjuangan kami untuk Palestina. Pada kesempatan Agustus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini, Indonesia kembali mengimbau dunia internasional untuk terus memberikan dukungannya kepada Palestina."

Pernyataan Menlu Indonesia, Retno Marsudi pada kampanye menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada Januari 2018 lalu (Norlyanti, 2014).

Berdirinya hubungan antara Indonesia dengan negara yang berada di Timur Tengah dimulai dari masuknya para pelajar yang ingin menuntut ilmu di sana, sehingga terjalinlah hubungan pendidikan (Mudore, 2019). Tokoh yang yang cukup memengaruhi Indonesia di antaranya KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan dan beberapa generasi setelahnya seperti Prof. Dr. Quraish Shihab, Ust. Abdul Somad dan masih banyak lagi. Mereka adalah contoh pelajar yang menyelesaikan pendidikan di Timur Tengah. Sebagai bangsa pertama yang mengakui akan kemerdekaan Indonesia, Indonesia sendiri telah sejak dulu memiliki hubungan yang erat dengan Palestina. Menyusul Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, pada saat itu Indonesia sangat memerlukan suara dukungan untuk pengakuan demi berdaulatnya sebuah negara (Mudore, 2019).

Dengan menganut sistem politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya, mengupayakan berjalannya isu yang dibawa, dan selalu menjadi bagian dari solusi dari persoalan bangsa-bangsa dengan banyak mengedepankan pendekatan yang saling menguntungkan (Noor, 2019). Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik di tingkat bilateral, regional, dan global (Satris, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyatakan dukungannya untuk perdamaian konflik ini, seringkali terhambat dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh negara anggota tetap DK PBB sehingga seruan Pemerintah Indonesia menjadi tidak ada artinya (Wibowo, 2017). Hak veto inilah yang menyebabkan banyaknya resolusi unggul yang telah dirundingkan dan dipersiapkan dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

matang sia-sia belaka karena ditolak dengan keberadaan hak veto tersebut. Akibatnya, muncul anggapan yang mengatakan bahwa usaha dalam kedudukan negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidaklah menguntungkan. Walaupun begitu, Menlu Retno dalam sambutannya setelah terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB menekankan akan membuka suara untuk forum dewan agar lebih mempertimbangkan suara-suara E10 (Dariyanto, 2018). Mengingat salah satu tujuan akan adanya DK PBB sendiri adalah untuk memberikan perhatian khusus atas sengketa yang mungkin tidak mendapat sorotan lebih atau perhatian dunia (Norliyanti, 2018), maka DK PBB haruslah bertindak lebih bijak lagi dalam menangani suatu problem dan mengesampingkan ego masing-masing demi tercapainya kedamaian yang bermakna.

Indonesia dalam lingkup PBB sendiri telah memainkan banyak perannya untuk Palestina. Tidak hanya di PBB, usaha Indonesia di banyak organisasi Internasional juga tidak luput dari menyuarakan isu kemerdekaan ini. Indonesia telah memainkan peran ko-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifikator dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Mudore, 2019). Dalam praktiknya, Indonesia sudah berupaya keras untuk mengangkat isu Palestina ini menjadi isu utama di DK PBB, walaupun harus berseberangan dengan negara besar seperti AS. Misalnya, pada bulan November 2019, Indonesia menolak usulan AS untuk melegalkan pemukiman Israel di Tepi Barat dan berhasil menggalang dukungan dari 10 anggota tidak tetap DK PBB untuk mendesak Presiden DK mengeluarkan kecaman terhadap Israel serta meminta Israel menghentikan aktivitas pembangunan pemukiman ilegalnya (Kemlu, 2019b). Beberapa bulan sesudahnya, Indonesia terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Palestina PBB (Kemlu, 2020b). Di bulan Juni 2020, Indonesia melalui Menlu Retno mengeluarkan pernyataan tegas terkait Palestina. Pertama, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada Palestina melalui United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) (Kemlu, 2020c). Yang kedua, dalam per-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

temuan virtual DK PBB, Menlu Retno menegaskan aspek ilegalitas dari aneksasi formal oleh Israel (Kemlu, 2020d). Menjelang akhir jabatannya sebagai Presiden DK PBB di bulan Agustus 2020, Duta Besar (Dubes) Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia menginisiasi pertemuan tanggal 25 Agustus terkait dengan *"Palestine question"* demi memastikan tidak ada aneksasi ilegal serta memastikan komitmen menjaga wilayah Palestina tetap terjaga (Fillion, 2020).

Dari sisi diplomatik sendiri, Indonesia telah membangun relasi dan kepercayaan yang sangat dalam dengan Palestina, tetapi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel sendiri belum terjalin sama sekali. Bahkan dengan tegas Indonesia menyatakan keengganannya untuk membuka hubungan diplomatik sebelum Israel memberikan hak kemerdekaan bagi Palestina (Wibowo, 2017). Dengan tidak adanya hubungan lebih mendalam antara kedua belah pihak negara dalam proses perdamaian, maka tujuan perdamaian yang ingin dicapai masih sangat jauh. Uniknya, di bulan Desember 2020, Chief Executive of the United States Agency for International Development (USAID), Adam Buehler menawarkan untuk meningkatkan bantuan dan investasi pada Indonesia sampai dua kali lipat bila Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel (Levingston, 2020). Rumor dan pernyataan ini sempat dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Faizasyah mengatakan bahwa Kemlu tidak pernah membuka kontak dengan Israel dan akan konsisten memegang mandat konstitusi mengenai kemerdekaan Palestina (Shofa & Wahyuni, 2020).

Walaupun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Dubes Djani, Indonesia harus menunjukkan toleransi, menjaga jaringan, dan harus bersabar. Dalam bahasa Djani,

> *"All of this is in the DNA of every Indonesian; we have been taught to be very patient in many ways. Our way of diplomacy has always been quiet diplomacy, we are not into megaphone diplomacy. But our diplomacy is geared toward finding solutions to our problems" (Fillion, 2020).*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sampai detik ini, persoalan Palestina ini masih belum mampu didorong untuk menjadi isu utama DK PBB, lagi-lagi menunjukkan bahwa peran sebagai anggota tidak tetap, walaupun krusial, tetap dibatasi oleh kekuasaan kuat dari para anggota tetap.

C. LANGKAH MEMPERKUAT PENGARUH INDONESIA DI KURSI KEANGGOTAAN DK PBB

Apa saja langkah yang perlu diambil oleh Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi pengaruhnya sebagai salah satu negara yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik PBB? Sebagai salah satu negara yang sangat berperan aktif dalam berkegiatan di ranah PBB, Indonesia cukup disegani oleh negara-negara anggota yang lain akibat hasil usahanya dalam memberikan banyak sumbangsih yang boleh dikata tidak mudah untuk disaingi.

Contohnya saja dalam pengiriman personel militer bantuan dari Indonesia untuk PBB dalam penempatan wilayah konflik, Indonesia sendiri sudah masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan kontribusi personil militer terbanyak di PBB baik laki-laki maupun perempuan. Tidak tanggung-tanggung, terhitung sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirimkan personel militernya dengan total sebanyak 37.128 orang, yang terjun dalam 28 Operasi Penjaga Perdamaian PBB secara keseluruhan (Firman, 2018). Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB adalah peluang besar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan melaksanakan seluruh agenda maupun visi politik internasional Indonesia (Noor, 2019).

Dalam hal ini, bagi Indonesia, dapat ditinjau beberapa aspek yang perlu dilakukan dan yang perlu dipertahankan demi mendapatkan pengaruh lebih di kursi keanggotaan PBB, khususnya untuk satu kursi DK PBB. Adapun beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan berkenaan dengan pengaruh Indonesia di PBB seperti tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah personel militer yang telah dikirimkan dalam penyelesaian di wilayah yang berkonflik sebagai misi utama Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana yang telah diketahui, Indonesia berada dalam jajaran 10 besar, tepatnya peringkat ke-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pada tahun 2019 lalu, dari 124 negara penyumbang personel (Nailufar, 2020). Untuk memperjuangkan suara demi kemerdekaan Palestina khususnya dan aktif untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian konflik dunia secara umum, sikap Indonesia sebaiknya terus berkontribusi pada perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi, "Indonesia terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," ucap Presiden Jokowi (Pesan berbahasa Indonesia, 2020).

Selain itu, berusaha untuk memaksimalkan kebijakan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dalam negeri sendiri, bisa menjadi salah satu contoh bagi negara lain dalam penerapan prinsip R2P ini. Sebab, setelah disahkannya Prinsip R2P ini dalam KTT PBB 2005 silam, masih banyak yang bingung dan salah paham terkait prinsip ini, sehingga dibutuhkannya peninjauan ulang dan pengenalan yang dalam bagi masyarakat (Alexandra, 2012). Indonesia yang mengusung politik bebas aktif sebaiknya terus melaksanakan kampanye sehat bersih yang tidak merugikan negara dari sisi manapun dalam misi pencarian kedudukan, salah satunya dalam kursi anggota DK PBB. Dengan kemampuan yang baik dalam berdiplomasi dan banyak berkontribusi Indonesia mampu menjadi suri tauladan (Noor, 2019).

D. INDONESIA EMAS 2045 DAN AKTIVISME DI PBB

Genap sudah 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang juga seiring dengan peringatan 75 tahun berdirinya PBB. Jalan ini bukanlah hal yang mudah untuk ditapaki selama ini. Jalan Indonesia, dengan berakhirnya kedudukan di Dewan Keamanan PBB kemarin, merupakan satu awal yang baru untuk langkah Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur. Melalui itu pula diharapkan Indonesia terus membawa perubahan yang signifikan pada banyak konflik. Bukti-bukti di bagian sebelumnya menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan DK PBB berjalan seiring dengan tujuan perdamaian Indonesia.

Sebagai langkah akhir untuk menutup bab ini, harapannya adalah dengan segala yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga jajarannya demi memakmurkan Indonesia dalam ranah internasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan khususnya di lingkup PBB, untuk tetap mempertahankan semua torehan yang pernah didapatkan dan terus berusaha untuk meningkatkannya. Hal ini sangatlah berkaitan keterkaitannya dengan visi "Indonesia Emas 2045" karena menjadi langkah awal untuk Indonesia mampu dalam menampakkan wujudnya sebagai negeri yang besar dan berpengaruh, terutama di kawasan Asia-Pasifik. Semakin banyaknya kemitraan yang bisa dibangun atas kepercayaan satu sama lain, Indonesia selangkah lebih dekat dengan visi revolusionernya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kandidat negara maju di masa mendatang. Sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Bambang Brodjonegoro, visi Indonesia Emas 2045 mencanangkan Indonesia sebagai negara yang maju, tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk mencapai kepentingan nasional, serta ditujukan untuk membangun tata dunia yang berkeadilan sejalan dengan peningkatan peran Indonesia di Asia-Pasifik (BAPPENAS, 2019).

Bagaimanapun, Indonesia adalah bangsa yang kokoh dan kuat; peluang dalam menyukseskan segala perencanaan ke depannya masih dapat diprediksi dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Langkah-langkah yang diambil pun demi memperkuat posisinya di mata dunia. Hanya masalah waktu saja sampai Indonesia bisa bersaing ketat dan akan sampai pada titik itu. Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk sekali lagi bisa menduduki kursi di DK PBB, karena tidak sedikit manfaat yang bisa didapatkan dari duduknya Indonesia pada posisi itu. Semakin banyaknya gerakan reformatif dan bantuan yang solutif bisa diperlihatkan Indonesia ke dunia, semakin berpeluang lagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beberapa tahun ke depan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

Alexandra, L. (2012). Indonesia and the responsibility to protect. *The Pacific Review*, *25*(1), 51–74, https://doi.org/10.1080/09512748.2011.632964.

Anwar, D. F. (2014). Indonesia's peacekeeping operations: History, practice, and future trend. Dalam C. Aoi & Y. Heng (Ed.), *Asia-Pacific nations in international peace support and stability operations* (189–210). Palgrave Macmillan.

BAPPENAS. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur*. https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.

Cooper, D.A. (2011). Challenging contemporary notions of middle power influence: Implications of the proliferation security initiative for "Middle Power Theory". *Foreign Policy Analysis*, *7*(3), 317–336. https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2011.00140.x.

Council on Foreign Relations. (2020). *The UN Security Council*. https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council.

Dariyanto, E. (2018, 26 Juli). Makna 'strategis' Indonesia jadi anggota tak tetap DK PBB. *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-4134902/makna-strategis-indonesia-jadi-anggota-tak-tetap-dk-pbb

Fillion, S. (2020, 3 Agustus). Indonesia's legacy in the Security Council: Daring to save lives. *Pass Blue*. https://www.passblue.com/2020/08/03/indonesias-legacy-in-the-security-council-daring-to-save-lives/.

Firman, T. (2018, 11 Juni). Tak hanya sekali Indonesia duduk di Dewan Keamanan PBB. *tirto.id*. https://tirto.id/tak-hanya-sekali-indonesia-duduk-di-dewan-keamanan-pbb-cL6Q

Hananto, A. (2020, 21 April). Mengenal Kontingen Garuda, dan peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. *Good News from Indonesia*. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/04/21/mengenal-kontingen-garuda-dan-peran-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia.

Hutabarat, L. F. (2014). Indonesian participation in the UN peacekeeping as an instrument of foreign policy: Challenges and opportunities. *Global & Strategis*, *8*(2), 183–199.

Indonesia resmi jadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. (2019b, 2 Januari). *VOA Indonesia*. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html.

Indonesia to put Muslim issues forward at UN Security Council. Voice of America. (2019a Januari 10). *VOA*. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesia-put-muslim-issues-forward-un-security-council.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia emban tugas ini. (2019, 3 Mei). *Kompas*. https://internasional.kompas.com/read/2019/05/03/12042381/jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-indonesia-emban-tugas-ini?page=all

Jenne, N. (2019, 23 Februari). Indonesia must look beyond peacekeeping to impress at the UN. *East Asia Forum*. https://www.eastasiaforum.org/2019/02/23/indonesia-must-look-beyond-peacekeeping-to-impress-at-the-un/.

Kementerian Luar Negeri RI. (2020a, 29 Agustus). *UN Security Council adopts Indonesia's resolution on female peacekeepers*. https://kemlu.go.id/ankara/en/news/8407/un-security-council-adopts-indonesias-resolution-on-female-peacekeepers.

Kementerian Luar Negeri RI. (2020b, 5 Februari). *Indonesia terpilih kembali menjadi Wakil Ketua Komite Palestina PBB*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1019/view/indonesia-re-elected-as-vice-chair-of-the-un-ceirpp.

Kementerian Luar Negeri RI. (2020c, 23 Juni). *Extraordinary ministerial pledging conference for UNRWA: Indonesia tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di tahun 2020*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1405/view/extraordinary-ministerial-pledging-conference-for-unrwa-indonesia-increases-humanitarian-aid-for-palestine-in-2020.

Kementerian Luar Negeri RI. (2020d, 25 Juni). *Indonesia prakarsai pertemuan DK PBB tolak rencana aneksasi Israel*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1410/view/indonesia-initiates-un-security-council-meeting-to-reject-israels-annexation-plan.

Kementerian Luar Negeri. (2019a, 8 April). *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.

Kementerian Luar Negeri. (2019b, 20 November). *Indonesia galang DK PBB tolak upaya legalkan pemukiman Israel di Palestina*. https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/3343/indonesia-invites-united-nations-security-council-to-reject-efforts-to-legalize-israeli-settlements-in-palestine.

Levingston, I. (2020, 22 Desember). Indonesia could get billions in U.S. funding to join Israel push. *Bloomberg*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-22/indonesia-could-get-billions-in-u-s-funding-to-join-israel-push?sref=BIAk2Vdl.

Mudore, S. B. (2019). Peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-palestina. *Jurnal CMES*, *12*(2), 170–181. https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nailufar, N. N. (2020, 4 Maret). Peran Indonesia di PBB. *Kompas*. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/170000869/peran-indonesia-di-pbb?page=all

Noor, B. A. (2019). *Alasan indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah]. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50062?mode=full

Norlyanti, N. (2018). Indonesia non-permanent member of United Nations Security Council: Pursuit of peace for Rohingya and Palestine. Dalam *Proceedings of the 5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)* (99–104). https://doi.org/10.2991/icosaps-18.2018.24.

Pesan berbahasa Indonesia Jokowi di Sidang PBB: Corona hingga perdamaian dunia. (2020, 24 September). *Kumparan News*. https://kumparan.com/kumparannews/pesan-berbahasa-indonesia-jokowi-di-sidang-pbb-corona-hingga-perdamaian-dunia-1uG10SD7kfP/full.

Rezasyah, T. (2019). Peranan diplomat Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di PBB (Masa presidency of the UNSC Mei 2019). *Jurnal ICMES*, *3*(2), 122–136. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55.

Salim. T. (2017, 28 Februari). Chances rare for Indonesian women peacekeepers. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/chances-rare-for-ri-women-peacekeepers.html.

Santi, N. (2018, 9 Juni). Empat fokus Indonesia sebagai anggota DK PBB. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180609075412-134-304777/empat-fokus-indonesia-sebagai-anggota-dk-pbb.

Satris, R. (2019). Peranan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina pasca pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. *POLITEA*, *2*(2), 161–170. https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884.

Septiari, D. (2020, 1 September). Indonesia ends UNSC presidency with focus on peacekeeping. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/31/indonesia-ends-unsc-presidency-with-focus-on-peacekeeping.html.

Shofa, J. N. & Wahyuni, N. C. (2020, 14 Desember). Indonesia denies in talks with Israel. *Jakarta Globe*. https://jakartaglobe.id/news/indonesia-denies-in-talks-with-israel/.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

UN praises Indonesia for its contributions to peacekeeping operations. (2014, 25 Oktober). *ANTARA News*. https://en.antaranews.com/news/96236/un-praises-indonesia-for-its-contributions-to-peacekeeping-operations.

United Nations. (t.t.). *Charter of the United Nations*. https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html.

Wahyuni, N.C. & Andriyanto, H. (2020, 16 Oktober). Indonesia among top contributors to UN peacekeeping mission. *Jakarta Globe*. https://jakartaglobe.id/news/indonesia-among-top-contributors-to-un-peacekeeping-mission/.

Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina (The involvement of the Indonesian Government in the peace process of Israeli-Palestinian conflict). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, *3*(1), 1–28.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IX

Peran Indonesia dalam Permasalahan Pengungsi di Dunia

Annisa Sekaringrat

Visi Indonesia 2045 dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 serta didukung oleh empat pilar utama yang sejalan dengan tren-tren besar yang sedang terjadi di dunia. Tren dunia pertama yang menjadi referensi bagi Visi Indonesia 2045 adalah isu demografi global (BAPPENAS, 2019). Isu demografi global ini tidak hanya menyangkut pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang diperkirakan akan meningkat sebanyak 1,1% pada tahun 2045, tetapi juga menyangkut kesenjangan antarwilayah serta perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dari wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia ke kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Oseania dipandang sebagai sebuah hal yang dapat menyeimbangkan pasar tenaga kerja global (BAPPENAS, 2019). Terlihat jelas disini bahwa jenis migrasi yang dimaksud adalah migrasi dengan motif ekonomi, atau dalam kata lain perpindahan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat-manfaat ekonomi yang lebih baik di tempat baru. Luput dari bahasan ini adalah perpindahan manusia yang dilakukan karena terpaksa, sebagai akibat dari konflik, perang dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

persekusi yang mengancam nyawa seseorang; atau dalam kata lain: isu pengungsi.[1]

Meskipun disayangkan, terlupakannya isu pengungsi sesungguhnya tidak mengejutkan, mengingat pengungsi pada awalnya juga terlewatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dirancang sejak tahun 2015. Pengungsi baru masuk sebagai indikator dalam SDGs pada akhir 2019 ketika pertemuan IAEG-SDGs 10 dilangsungkan di Addis Ababa, setelah advokasi gabungan dari Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dengan Joint IDP Profiling Service (Nahmias, & Baal, 2019). Padahal, dua dari prinsip universal SDGs, yakni pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan *leave no one behind* seharusnya juga mengikutsertakan pengungsi sebagai salah satu kelompok yang pemenuhan HAM-nya kerap terabaikan. Disertakannya pengungsi sebagai salah satu indikator dalam SDGs merupakan sebuah pencapaian penting untuk memastikan bahwa para pengungsi selalu dilibatkan dalam agenda-agenda pembangunan dunia. Mengingat status legal mereka yang tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara asalnya, inklusi tertulis ini diperlukan untuk menjamin bahwa pengungsi tidak lagi terlewatkan dalam setiap agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tulisan ini membahas mengenai isu pengungsi di Indonesia dan peran yang telah dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagian pertama membahas mengenai peranan pemerintah Indonesia dalam advokasi isu pengungsi di tingkat global dan regional. Penulis berargumen bahwa Indonesia seharusnya bisa menggunakan posisinya di level internasional untuk membahas isu pengungsi secara spesifik. Selanjutnya, penulis membahas Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan ini merupakan sebuah perkembangan

1 Menurut Konvensi Jenewa 1951, pengungsi didefinisikan sebagai "orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut (UNHCR, t.t.a).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang penting bagi penanganan isu pengungsi di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang harusnya bisa dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah. Terkait dengan hal ini, penulis mengidentifikasi beberapa celah kebijakan serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membantu pengungsi di dalam negeri. Penulis berargumen bahwa pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang beberapa kebijakan terkait pengungsi dan berkolaborasi aktif dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM), serta bekerja sama dengan LSM lokal dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang berada di Indonesia.

A. ISU PENGUNGSI DAN ADVOKASI INTERNASIONAL INDONESIA

Subbab ini membahas mengenai advokasi Indonesia sejauh ini terkait isu pengungsi di level global dan regional serta peran apa yang bisa diambil oleh Indonesia ke depan. Salah satu peran aktif yang telah diambil Indonesia dan sedikit banyak berkaitan dengan isu pengungsi adalah dalam isu Palestina. Selain aktif dalam diplomasi untuk kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah dalam berbagai konferensi untuk tujuan perdamaian di Palestina, misalnya dalam *International Conference on the Question of Jerusalem* pada 2015 dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 2016 tentang Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Selain itu, Indonesia juga memberikan dukungan material bagi warga Palestina, misalnya melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, bantuan dana untuk pembangunan *Indonesia Cardiac Center* di Gaza, serta kontribusi finansial kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada 2009–2014. Meskipun peran Indonesia terhitung cukup banyak dalam hal ini, perlu diingat bahwa bantuan tersebut hanya terbatas pada warga Palestina yang berada di wilayah Palestina, dan tidak mencakup warga Palestina yang telah pergi dari wilayah tersebut dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi pengungsi di Indonesia. Jalur diplomatik yang ditempuh oleh Indonesia seringkali hanya menyasar perdamaian dan kemerdekaan Palestina, tanpa membahas secara spesifik mengenai kelangsungan pengungsi Palestina.

Di tingkat regional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara misalnya, telah banyak kritik yang dilontarkan atas kurangnya tindakan dan solusi yang diberikan bagi krisis kemanusiaan di Rohingya. Human Rights Watch (HRW) mengkritik prioritas organisasi kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk memulangkan kembali kelompok etnis Rohingya ke Myanmar tanpa membahas lebih lanjut akar permasalahan tersebut, yakni diskriminasi sistematik yang mereka alami dari pemerintah (ASEAN: Overhaul regional, 2020). Mendorong repatriasi kelompok Rohingya tanpa memastikan terjaminnya keselamatan dan pemenuhan hak-hak sipil mereka berisiko akan terulangnya krisis yang sama. Isu pengungsi Rohingya tidak hanya penting bagi negara-negara anggota ASEAN saja, tetapi juga bagi Bangladesh yang kini menjadi rumah bagi sebagian besar pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, respons regional dibutuhkan untuk mencapai penyelesaian kolektif dari seluruh negara yang terlibat.

Di tingkat bilateral, Indonesia kerap bekerja sama dengan Australia dalam penanganan isu pengungsi. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdekat secara geografis membuat Australia memberikan banyak bantuan bagi Indonesia dalam hal penanganan isu pengungsi dan keimigrasian. Beberapa contoh bantuan yang diberikan oleh Australia bagi Indonesia adalah peningkatan kapasitas sistem perbatasan dan keimigrasian Indonesia, pendanaan bagi IOM Indonesia, dan perbaikan fasilitas di beberapa rumah detensi imigrasi (Ilham, 2020). Besarnya peran Australia dalam penanganan pengungsi di Indonesia dapat dirasakan ketika terjadi perubahan kebijakan di Australia. Pemotongan pendanaan Australia untuk IOM Indonesia menyebabkan IOM tidak lagi bisa menyediakan bantuan untuk pengungsi yang tiba di Indonesia setelah 15 Maret 2018 (Ilham, 2020). Pengungsi yang tidak menerima dana bantuan IOM menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terbengkalai dan banyak dari mereka yang kemudian mendirikan tenda-tenda di depan kantor UNHCR karena pemerintah menolak mengambil tanggung jawab atas mereka (Missbach, 2018).

Argume dala bab ini ialah bahwa peran Indonesia dalam hal pengungsi masih terbatas. Indonesia seharusnya bisa mengambil peran yang lebih aktif dalam isu ini melalui posisinya di organisasi internasional seperti di ASEAN dan Dewan HAM PBB. Melalui organisasi ini, Indonesia bisa mendorong berjalannya skema *burden and responsibility sharing* dalam perlindungan pengungsi. Skema ini merupakan sebuah bentuk kerja sama internasional ketika sebuah negara secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk melindungi pengungsi yang seharusnya tidak jatuh di bawah yurisdiksi mereka, atau melalui berbagai jenis bantuan untuk membantu negara lain memenuhi kewajiban perlindungan pengungsi (Newland, 2011). Salah satu contoh skema ini adalah ketika pada 2015 Jerman memutuskan untuk menerima pengungsi Suriah yang, bila mengacu pada regulasi Dublin, seharusnya jatuh di bawah tanggung jawab negara lain. Mengingat persebaran jumlah pengungsi yang jauh lebih banyak berada di negara berkembang (84%) daripada di negara maju (16%) (Karasapan, 2020), Indonesia seharusnya bisa bekerja sama dengan negara-negara lain di tingkat regional seperti Malaysia, Thailand, dan Bangladesh untuk memasukkan isu pengungsi dalam agenda diskusi di tingkat regional dan global, demi mendorong berjalannya *burden and responsibility sharing* ini. Selain itu, pendekatan bilateral juga dapat ditingkatkan dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 agar pengungsi yang berada di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan di negara ketiga.

Meskipun penempatan di negara ketiga merupakan salah satu solusi jangka panjang[2] yang ideal, kesempatan ini sangat terbatas. Menurut data UNHCR, hanya kurang dari 1% jumlah pengungsi di seluruh dunia yang mendapatkan kesempatan untuk penempatan

2 *Durable solutions* atau solusi jangka panjang untuk pengungsi yang diusahakan oleh UNHCR antara lain adalah integrasi local, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga (UNHCR, t.t.c).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di negara ketiga (UNHCR, t.t.). Solusi yang lain yakni pemulangan sukarela, juga sulit dilakukan mengingat konflik di negara asal masih terus berjalan dan akar permasalahan belum terselesaikan, seperti kasus Rohingya yang telah disebutkan sebelumnya. Pemulangan secara sepihak juga tidak mungkin dilakukan karena melanggar prinsip *non-refoulement*[3] yang terdapat pada hukum HAM internasional. Oleh karena itu, selain advokasi aktif di tingkat internasional, pemerintah Indonesia juga harus bersiap menjadi rumah bagi pengungsi tersebut dan memfasilitasi berjalannya integrasi lokal melalui serangkaian kebijakan domestik.

Subbab berikutnya membahas lebih dalam mengenai kebijakan dalam negeri Indonesia terkait pengungsi, dengan fokus utama Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016. Meskipun kebijakan ini merupakan sebuah kemajuan bagi penanganan isu pengungsi di Indonesia, penulis berpendapat bahwa masih banyak celah yang seharusnya bisa diisi oleh pemerintah, baik secara sepihak maupun dengan kerja sama bersama LSM lokal atau organisasi internasional yang berada di Indonesia seperti IOM dan UNHCR.

B. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016: PENCAPAIAN DAN BATASAN

Pilihan Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol tahun 1967 kerap dijadikan dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam pembentukan kebijakan mengenai pengungsi. Dalam salah satu *webinar* yang dilaksanakan oleh media the Jakarta Post pada 7 Oktober 2020, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah memberikan "lebih" bagi isu pengungsi di level regional dan global semisal melalui peran Indonesia di Bali Process, serta kerja sama bilateral dengan Australia terkait *irregular maritime arrival* (IMA) (The Jakarta Post 2020). Di tataran domestik, Perpres Nomor 125/2016 menjadi landasan dan

3 Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada orang yang seharusnya dipulangkan ke negara dimana mereka terancam akan mendapatkan penyiksaan, atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan direndahkan (OHCHR, t.t.). Prinsip ini berlaku bagi seluruh migran kapan saja, terlepas dari status keimigrasian mereka.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kerangka utama untuk pengelolaan isu pengungsi. Perpres ini memberikan mandat bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan penanganan pengungsi, serta menekankan tugas UNHCR sebagai organisasi di bawah naungan PBB dalam pengelolaan pengungsi.

Perpres ini mengatur beberapa hal penting mengenai pengungsi, antara lain penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian (Perpres 125/2016). Terkait penemuan dan pengamanan pengungsi, perpres ini memberikan arahan untuk aksi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*/SAR) di wilayah perairan Indonesia, serta menghimbau masyarakat untuk melaporkan penemuan pengungsi kepada instansi terkait untuk pengamanan. Di satu sisi, arahan ini mencegah terjadinya krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Laut Andaman pada tahun 2015 ketika Indonesia, Malaysia, dan Thailand mencegah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya untuk bersandar dan membiarkan mereka terlunta-lunta di laut lepas tanpa adanya kebutuhan dasar seperti air dan makanan (Gleeson, 2020; Southeast Asia: End, 2015). Namun, di sisi lain peraturan ini merupakan proses sekuritisasi yang menempatkan pengungsi sebagai sebuah ancaman yang perlu diamankan. Sekuritisasi isu pengungsi ini telah ditemui pula di Amerika dan Eropa, dan berdampak pada pengabaian hak perlindungan pengungsi yang tertera dalam Konvensi 1951 (Hammerstadt, 2014). Alih-alih dilindungi dan diakui sebagai kelompok rentan, pengungsi justru dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan. Salah satu dampak dari proses sekuritisasi ini telah terlihat di tingkat akar rumput ketika sebagian warga di wilayah Daan Mogot Jakarta Barat menolak digunakannya kawasan mereka sebagai tempat penampungan pengungsi (Anugrahadi, 2019).

Mengenai penampungan pengungsi, Perpres 125/2016 memberikan landasan untuk penampungan pengungsi di luar rumah detensi imigrasi (rudenim). Perlu kita ingat bahwa pengungsi terpaksa kabur dari negaranya untuk menghindari persekusi, konflik, dan perang. Mengingat rudenim diperuntukkan bagi orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, penempatan pengungsi di dalam rudenim

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi kurang tepat. Terlebih lagi, pengungsi yang ditempatkan di rudenim lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran HAM (Missbach, 2015). Koordinasi Pemerintah Indonesia dengan pihak eksternal, seperti UNHCR dan IOM, perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan akomodasi yang layak dan aman bagi pengungsi tersebut. Dalam penempatan pengungsi di tempat tinggal sementara, peraturan ini menggarisbawahi pentingnya pembagian ruangan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama (Perpres 125/2016). Pertimbangan atas berbagai faktor identitas individu ini penting untuk memahami permasalahan individu sebagai hasil dari titik temu berbagai faktor identitas dan posisi mereka dalam relasi kekuasaan[4] (Crenshaw, 1991; Bastia, 2014; Carastathis, 2014). Misalnya, permasalahan pengungsi perempuan Muslim yang berkeluarga akan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pengungsi perempuan non-Muslim yang belum menikah. Penyesuaian tempat penampungan berdasarkan berbagai faktor yang berbeda membuat konflik antarkelompok pengungsi dapat dikurangi dan membuat respon kemanusiaan yang diberikan dapat disesuaikan kebutuhan masing-masing. Selain itu, pemahaman terhadap aspek sejarah dan kultur juga sebaiknya dijadikan pertimbangan. Misalnya, konflik yang terjadi antara kelompok etnis Pashtun dan Hazara di Afghanistan sangat mungkin masih terbawa hingga mereka berada di negara lain. Oleh karena itu, respons pemerintah terhadap kelompok yang berbeda ini juga harus disesuaikan.

C. CELAH KEBIJAKAN DOMESTIK DAN PERAN LSM

Meskipun telah memberikan kerangka bagi sebagian isu mengenai pengungsi, masih terdapat beberapa isu yang patut dicantumkan dan menjadi bahasan lebih lanjut dalam Perpres 125/2016, misalnya kesehatan dan pendidikan. Dua isu ini berada di dalam kerangka target 3 dan 4 SDGs yang diluncurkan oleh PBB dan karenanya, perlu menjadi prioritas pula dalam isu pengungsi. Terkait dengan dua aspek

4 Pendekatan/konsep yang dimaksud disini adalah konsep interseksionalitas. Untuk penjelasan lebih lanjut dan contoh kasus tentang pendekatan ini, lihat Fiddian-Qasmiyeh (2014).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini, pemerintah perlu meninjau ulang larangan bagi pengungsi untuk bekerja dan membuka bisnis. Larangan ini membuat pengungsi menjadi tergantung pada bantuan yang diberikan oleh donor dan tidak mampu mengusahakan secara mandiri penghidupan yang lebih layak bagi diri mereka sendiri. Tinjauan terhadap kebijakan ini berkaitan erat dengan tujuan SDGs 1 dan 2, yakni penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

Dari sisi kesehatan, minimnya ketersediaan akses kesehatan bagi pengungsi membuat LSM untuk mengisi celah yang tidak disediakan oleh pemerintah ini. LSM seperti Dompet Dhuafa menyediakan akses bagi pengungsi untuk pemeriksaan kesehatan di klinik-klinik mereka (The Jakarta Post, 2020). Namun, mengingat kesehatan pengungsi juga memiliki kaitan erat dengan kesehatan masyarakat secara umum, pemerintah seharusnya lebih aktif dalam menyediakan akses kesehatan bagi pengungsi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Dari sisi pendidikan, UNHCR melaporkan bahwa sebanyak 577 pengungsi anak-anak diterima di sekolah negeri yang terakreditasi (UNHCR, 2020). Sekilas terlihat cukup banyak, tetapi nyatanya jumlah ini hanya mencakup sekitar 20% dari total jumlah pengungsi anak-anak yang berada di Indonesia (2.878 orang). Meskipun beberapa LSM telah menyediakan berbagai wahana pendidikan informal untuk pengungsi, semisal Jesuit Refugee Service (JRS) dan Roshan Learning Center, peran aktif pemerintah amat dibutuhkan untuk memastikan pendidikan formal tersedia bagi pengungsi anak-anak. Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan misalnya, pemerintah dapat memberikan arahan untuk penerimaan bagi sekolah-sekolah dasar untuk menerima pengungsi anak-anak sebagai pelajar dan memastikan hak mereka atas pendidikan terpenuhi. Selain memperoleh pendidikan yang akan memudahkan mereka untuk melanjutkan kehidupan ketika *resettlement* di negara ketiga atau repatriasi ke negara asal; diterimanya pengungsi anak-anak di sekolah lokal dapat meningkatkan pengertian dan pengetahuan warga sekitar mengenai pengungsi. Proses sosialisasi dan interaksi antara pengungsi dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat lokal diharapkan mampu mengurangi stigma negatif yang melekat pada pengungsi dan memungkinkan masyarakat untuk melihat mereka bukan sebagai sebuah ancaman yang harus diwaspadai, tetapi sebagai sesama manusia yang perlu dirangkul dan dimengerti. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa anak-anak ini telah mengalami dan menyaksikan peristiwa traumatik di negara asal mereka yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka (Hart, 2014). Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya menjadi sebuah hak yang harus dipenuhi, tetapi juga sebuah kebutuhan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan pengungsi anak-anak.

Selain pendidikan formal, berbagai LSM lokal dan lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR telah memberikan pembekalan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi pengungsi yang berada di Indonesia (The Jakarta Post, 2020). Pendidikan ini akan memudahkan para pengungsi ketika mereka ditempatkan di negara ketiga atau ketika mereka memilih untuk pulang ke negara asalnya. Namun, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, besar kemungkinan bahwa pengungsi akan tetap tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, akan lebih baik jika keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh pengungsi ini disalurkan selama mereka berada di Indonesia.

Pelarangan pengungsi untuk bekerja di Indonesia memang memiliki dasar yang kuat, yakni kekhawatiran bahwa pengungsi akan mengambil lapangan pekerjaan masyarakat. Akan tetapi, larangan ini membuat pencapaian dua *goals* pertama SDGs terhambat: yakni penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Dua tujuan ini berkaitan erat, mengingat kemiskinan akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pangan. Bagi pengungsi di Indonesia, larangan untuk bekerja membuat mereka tetap bergantung pada bantuan yang diberikan donor dan *humanitarian agency.* Ketersediaan bantuan ini tidak selalu terjamin pemenuhannya bagi semua, mengingat ketergantungan bantuan ini terhadap ada atau tidaknya donor. Terlebih lagi, ketergantungan ini membuat kesempatan untuk memiliki penghidupan dan kehidupan yang layak jadi terabaikan. Tanpa penghasilan, pengungsi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka jika bantuan gagal diperoleh.

Berbagai riset juga telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bantuan berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengungsi, serta relasi sosial mereka (Turner, 1999; Jaji, 2009). Beberapa LSM seperti Suaka dan Dompet Dhuafa telah mengadvokasi pentingnya pencabutan larangan ini dengan memperbolehkan pengungsi untuk membuka bisnis mikro (Damarjati, 2019; The Jakarta Post, 2020). Pendidikan vokasi yang diberikan oleh UNHCR, LSM, dan beberapa institusi lain dapat menjadi lebih produktif apabila pengungsi-pengungsi ini diberikan kelonggaran untuk bisa berwirausaha. Selain menjadi penghasilan ekonomi bagi diri mereka sendiri dan keluarga, bisnis mereka juga berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengungsi yang lain.

D. OPTIMALISASI PERAN INDONESIA MAJU 2045 DALAM ISU PENGUNGSI

Sebagai calon negara maju di level global pada tahun 2045, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran yang lebih aktif dalam advokasi isu pengungsi secara spesifik. Melalui posisinya dalam organisasi internasional dan regional seperti ASEAN dan Komisi HAM PBB, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menempatkan isu pengungsi sebagai agenda prioritas di level internasional. Selain mengusahakan perdamaian dan penyelesaian konflik yang menyebabkan munculnya pengungsi, isu pengungsi sendiri secara spesifik juga harus dibicarakan dalam poin diskusi di berbagai forum pemerintahan baik di level internasional, regional, dan bilateral. Skema *burden and sharing responsibility* harus terus didorong untuk memastikan terjaminnya pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Selain itu, di level domestik, pemerintah harus meningkatkan respons dan kebijakan mengenai pengungsi, mengingat kemungkinan mereka akan tinggal untuk waktu yang lama di Indonesia.

Terlepas dari pencapaian Pemerintah Indonesia melalui Perpres 125/2016 dalam pengelolaan pengungsi di dalam negeri, masih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

banyak aspek-aspek yang perlu dibenahi dan isu yang perlu dibahas terkait penanganan pengungsi, semisal di bidang akses kesehatan dan pendidikan, serta pembukaan kesempatan wirausaha bagi pengungsi. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi, Pemerintah Indonesia seharusnya mengadopsi pendekatan kemanusiaan yang inklusif dalam isu ini. Pengungsi kabur dari negara asal mereka bukan karena melakukan perbuatan kriminal, tetapi karena nyawa mereka terancam bila tetap tinggal di negara mereka. Tidak ada orang yang ingin meninggalkan rumah mereka untuk melakukan perjalanan berbahaya yang juga mengancam keselamatan mereka. Telah banyak tercatat korban jiwa yang tidak selamat ketika perjalanan sebelum sampai di tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, mereka perlu dilihat sebagai manusia yang memerlukan perlindungan dan memiliki kebutuhan khusus; bukan sebagai ancaman yang perlu diamankan dan ditertibkan. Prinsip *"leaving no one behind"* yang mendasari target-target SDGs tidak akan bisa ditegakkan apabila pengungsi diabaikan dari rumusan kebijakan pembangunan Indonesia saat ini dan di masa depan.

Partisipasi Indonesia dalam menangani persoalan pengungsi berkaitan erat dalam implementasi seluruh target SDGs. Secara mendasar, pengikutsertaan pengungsi sebagai sasaran dalam implementasi SDGs di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip "leaving no one behind" yang mendasari target-target SDGs. Perlu diingat bahwa target SDGs ditujukan "for people and the planet" (United Nations, t.t.). Dengan kata lain, kedamaian dan kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir dari seluruh target SGDs merupakan hak setiap manusia tanpa terkecuali; terlepas dari status kewarganegaraan dan/atau ijin tinggal yang dimiliki. Oleh karena itu, pengikutsertaan kelompok pengungsi dalam kebijakan pembangunan nasional merupakan poin penting dalam pencapaian target-target SDGs. Penghapusan kemiskinan (target pertama), kelaparan (target kedua), serta pemenuhan hak-hak kesehatan (target ketiga) dan pendidikan (target keempat) baru bisa dikatakan berhasil apabila kelompok pengungsi juga turut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diikutsertakan dalam program-program pembangunan. Partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi merupakan kunci dalam pencapaian prinsip dan target SDGs yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

E. PENGUNGSI DAN TANTANGAN INDONESIA KE DEPAN

Terlewatkannya kelompok pengungsi dari rencana pembangunan merupakan penyimpangan dari dua prinsip universal SDGs, yakni pendekatan berbasis HAM dan *leave no one behind*. SDGs ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kelompok pengungsi perlu diikutsertakan secara eksplisit dalam proyek pembangunan di setiap level; mengingat mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka. Peran Pemerintah Indonesia dalam isu pengungsi di tingkat bilateral, regional dan internasional masih terbatas. Indonesia seharusnya bisa memainkan posisi strategis yang dimiliki di organisasi internasional seperti ASEAN dan Dewan HAM PBB untuk mengikutsertakan isu pengungsi dalam agenda pembahasan. Perpres 125/2016 merupakan sebuah kemajuan bagi penanganan isu pengungsi di level domestik, utamanya dalam hal penemuan dan penampungan pengungsi.

Akan tetapi, masih terdapat celah kebijakan dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang merupakan target ketiga dan keempat dari SDGs. Tidak tersedianya akses yang memadai dari pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi lantas diisi oleh LSM dan organisasi internasional. Mereka tidak hanya menyediakan akses kesehatan dan pendidikan, tetapi juga turut mengadvokasi diberikannya ijin bagi pengungsi untuk membuka bisnis mikro untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Partisipasi Indonesia dalam isu pengungsi berkaitan erat dengan target-target SDGs seperti pemenuhan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Hal ini juga tidak lepas dari prinsip utama SDGs yakni HAM dan *leave no one behind* yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap manusia memperoleh hak yang sama dan tidak ada siapapun yang ditinggalkan dalam proses pembangunan. Target SDGs, baik di level nasional maupun internasional, baru bisa dikatakan tercapai apabila setiap orang dan semua kelompok masyarakat telah terpenuhi kebutuhannya, termasuk kelompok pengungsi.

REFERENSI

Anugrahadi, A. (2019, 14 Juli). Warga menolak pengungsian di Kalideres, ini kata pencari suaka. *Liputan 6*. https://www.liputan6.com/news/read/4012401/warga-menolak-pengungsian-di-kalideres-ini-kata-pencari-suaka.

ASEAN: Overhaul regional response to Rohingya crisis. (2020). *Human Rights Watch*. https://www.hrw.org/news/2020/06/26/asean-overhaul-regional-response-rohingya-crisis#

BAPPENAS. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur*. https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.

Bastia, T. (2014). Intersectionality, migration and development. *Progress in Development Studies*, *14*(3), 237–248. https://doi.org/10.1177/1464993414521330.

Carastathis, A. (2014). The concept of intersectionality in feminist theory. *Philosophy Compass*, *9*(5), 304–314. https://doi.org/10.1111/phc3.12129.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, *43*(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039.

Damarjati, D. (2019). UNHCR harap Indonesia izinkan pengungsi cari pemasukan. *Detik*. https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan.

Fiddian-Qasmiyeh, E. (2014). *Gender and forced migration*. Dalam E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long & N. Sigona (Ed.), *The Oxford Handbook of refugee and forced migration studies*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0010.

Gleeson, M. (2020, 29 Juni). The Andaman Sea crisis: 5 years on. *Kaldor Centre for International Refugee Law*. https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/andaman-sea-crisis-5-years.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hammerstadt, A. (2014). The securitization of forced migration. Dalam E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long & N. Sigona (Ed.). *The Oxford handbook of refugee and forced migration studies.* Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0033.

Hart, J. (2014). Children and forced migration. Dalam E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long, & N. Sigona (Ed.). *The Oxford handbook of refugee and forced migration studies.* Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0047.

Ilham. (2020, 2 Februari). Transforming refugee policies in Indonesia. *The ASEAN Post*. https://theaseanpost.com/article/transforming-refugee-policies-indonesia

IOM. (2020). Largest Rohingya group to arrive in Indonesia since 2015 receives support in North Aceh. [Press Release] https://www.iom.int/news/largest-rohingya-group-arrive-indonesia-2015-receives-support-north-aceh

Jaji, R. (2009). Masculinity on unstable ground: Young refugee men in Nairobi, Kenya. *Journal of Refugee Studies*, *22*(2), 177–194. https://doi.org/10.1093/jrs/fep007.

Kaldor Center for International Refugee Law. *Turning back boats.* [Factsheet] https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/turning-back-boats-0#:~:text=Under%20international%20law%2C%20Australia%20has,which%20the%20boat%20is%20registered.

Karasapan, O. (2020). Sharing the burden of the global refugee crisis. *The Brookings Institute*. https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/27/sharing-the-burden-of-the-global-refugee-crisis/#:~:text=Developed%20countries%20hosted%2016%20percent,countries%20took%20in%2084%20percent.&text=In%202018%2C%20just%202.9%20million,million%20IDPs%20and%20600%2C000%20refugees.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Isu Palestina.* https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina.

Missbach, A. (2015). *Troubled transit: Asylum seekers stuck in Indonesia.* ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Missbach, A. (2018). The Impacts of Australia's funding cuts on refugees in Indonesia. *Asia & The Pacific Policy Society*. https://www.policyforum.net/falling-through-the-cracks/.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nahmias, P. & Baal, N. K. (2019, 2 Desember). Including forced displacement in the SDGs: A new refugee indicator. *UNHCR Blog*. https://www.unhcr.org/blogs/including-forced-displacement-in-the-sdgs-a-new-refugee-indicator/.

Newland, K. (2011). *Cooperative arrangements to share burdens and responsibilities in refugee situations short of mass influx* (Discussion Paper). Disiapkan untuk UNHCR Expert Meeting on International Cooperation to Share Burdens and Responsibilities. https://www.unhcr.org/uk/4ef332d29.pdf.

OHCHR. (t.t.) *The principle of non-refoulement under International Human Rights Law.* https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. (2016, 31 Desember). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016.

Southeast Asia: End Rohingya boat pushbacks. (2015). *Human Rights Watch*. https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks

The Jakarta Post. (2020, 7 Oktober). *JakPost Up Close #18: Bridging the gap in refugee response in Southeast Asia.* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=hdTWAT-MI4k.

Turner, S. (1999). Angry young men in camps: Gender, age and class relations among Burundian refugees in Tanzania. *UNHCR Working Paper: New Issues in Refugee Research*, *9*(9), 145–156.

UNHCR. (t.t.a). *Pengungsi.* UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/pengungsi

UNHCR. (t.t.b). *Resettlement.* UNHCR UK. https://www.unhcr.org/uk/resettlement.html

UNHCR. (t.t.c). *Solusi komprehensif.* UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif

UNHCR. (2020). *Sekilas data.* UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance.

United Nations. (t.t.). *The 17 Goals*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB X

Indonesia dan WTO: Potensi Peran Indonesia sebagai Pendorong Kerja Sama Utara-Selatan

Annisa Pratamasari

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) turut menyumbangkan kontribusinya untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs) sebagai organisasi perdagangan terbesar. Menampung negara maju dan berkembang, serta mencakup banyak area dalam 17 tujuan SDGs, WTO juga telah melaporkan tinjauan komprehensif ke Forum Politik Tingkat Tinggi PBB (*UN's High-level Political Forum*/HPLF) yang menghubungkan antara penciptaan sistem perdagangan multilateral yang lebih bebas dan lebih adil. Di antara 17 tujuan tersebut, perdagangan internasional dapat berkontribusi dalam mencapai SDGs 1 (dengan mengurangi kemiskinan melalui keterbukaan perdagangan); SDGs 2 (dengan menghilangkan distorsi perdagangan di bidang pertanian dan mencapai ketahanan pangan); SDGs 3 (dengan memberlakukan TRIPS untuk menjamin akses ke obat-obatan yang terjangkau); SDGs 5 (dengan menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan melalui perdagangan internasional); SDG 8 (dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melalui perdagangan internasional); SDG 9 (dengan memastikan bahwa teknologi, pengetahuan, dan inovasi ditransfer melalui keterbukaan pasar); SDG 10 (dengan memperkuat inisiatif *Aid for Trade* untuk membangun kapasitas di negara-negara kurang berkembang atau *least developed country*/LDC); SDG 14 (dengan melarang subsidi yang mendorong penangkapan ikan secara berlebihan dan ilegal); dan SDG 17 (dengan meningkatkan pangsa perdagangan untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang).

Perdagangan internasional sendiri merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang, dengan cara memperluas jaringan untuk menggunakan sumber daya sebuah negara secara efisien, serta mendapatkan sumber daya, teknologi, dan investasi dari negara lain (WTO, 2018a). Sementara itu, SDG 17 berupaya untuk menjalin semua tujuan SDG dalam perdagangan internasional melalui peningkatan kemitraan di antara negara-negara anggota WTO, serta garansi inklusivitas perdagangan antar-anggota. Oleh karena itu, bab ini akan secara deskriptif menjelaskan bagaimana koalisi dan kemitraan di WTO dibentuk dan bekerja pada isu-isu perdagangan yang krusial bagi negara-negara berkembang, seperti pertanian, *Special and Differential Measures* (S&D), dan kapas. Di samping itu, juga akan dibahas bagaimana mereka menjembatani kesenjangan antara anggota yang lebih maju dan yang sedang berkembang (kemitraan dan koalisi Utara-Selatan). Secara lebih spesifik, bab ini akan mencoba untuk menyoroti peran Indonesia, atau kurangnya peran Indonesia, dalam berkontribusi pada pencapaian SGD di WTO melalui pembinaan kemitraan antara negara-negara Utara dan Selatan (SDG 17). Pada bagian akhir, penulis juga akan mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah selanjutnya bagi Indonesia di WTO hingga Indonesia dapat mencapai target Indonesia 2045 (yang juga berisikan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri) dan SDG 2030.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. INDONESIA, WTO, DAN NEGARA BERKEMBANG LAIN

Indonesia membuktikan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral melalui keanggotaan di WTO sejak 1 Januari 1995, setelah sebelumnya telah bergabung dengan pendahulu WTO, yakni GATT pada 24 Februari 1950. Selain itu, Indonesia terdaftar sebagai anggota ASEAN, APEC, G20, G33, RCEP, dan berbagai FTA-RTA dengan berbagai entitas ekonomi lainnya. Hal ini membuktikan komitmen Indonesia untuk membangun kemitraan dengan negara-negara lain. Sementara itu, Laporan Perdagangan WTO (2020c) menyebutkan bahwa Indonesia masih mendapatkan skema preferensial di bawah *Generalized System of Preferences* (GSP) dan penerima *Aid-for-Trade*. Dengan kata lain, Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai negara berkembang (*developing countries*) yang menerima konsesi dan perlakuan berbeda dalam berbagai sektor perdagangan, seperti pertanian dan tekstil, serta aturan-aturan perdagangan terkait subsidi dan tarif.

Bab ini menaydari bahwa sebagian besar koalisi aktif sebelum SDG dirumuskan pada tahun 2015; oleh karena itu, mereka mungkin tidak cocok untuk menjadi 'studi kasus'. Namun, bab ini ingin menyatakan bahwa negosiasi isu perdagangan bukanlah, dan tidak akan pernah menjadi, proses yang berlangsung cepat dan instan. Satu perjanjian perdagangan bilateral saja, misalnya Korea-US FTA, butuh waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan ditandatangani, apalagi perjanjian multilateral besar yang melibatkan banyak pihak dengan beragam kepentingan. Selain itu, WTO (2018a) juga meleburkan SDG ke dalam isu perdagangan melalui proses *mainstreaming trade,* yang berisikan fasilitasi perdagangan, *capacity-building* bagi non-negara maju, dan penguatan perdagangan multilateral yang mencakup semua negara. Isu-isu perdagangan yang sedang dinegosiasikan juga dihubungkan dengan pencapaian SDG berdasarkan pada asumsi bahwa perdagangan internasional dapat menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa koalisi-koalisi yang dibahas dalam esai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini secara tidak langsung juga berperan dalam *mainstreaming trade* dan pencapaian SDG melalui negosiasi-negosiasi di WTO.

Sementara itu, sebagai negara berkembang, kita juga dapat melihat bahwa posisi dan kepentingan Indonesia tetap tidak berubah selama satu dekade, terlepas dari keberadaan SDG dan pencanangan Visi 2045 di era Presiden Jokowi. Indonesia telah berada dalam komisi-komisi tersebut selama bertahun-tahun dan mempertahankan fokus mereka pada isu-isu yang sama, seperti produk pertanian dan kapas, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kasus-kasus ini akan tetap relevan dan berkaitan dengan ambisi Indonesia dalam mencapai SDGs serta bergerak menuju tujuannya, menjadi negara maju di tahun 2045.

Kembali pada WTO, sejak GATT berdiri hingga digantikan oleh WTO, salah satu kritik yang masih sering diutarakan adalah ketimpangan posisi negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan internasional. Proposisi jumlah negara berkembang di WTO memang melampaui negara maju, tetapi hal ini tidak dapat diterjemahkan sebagai kekuatan posisi mereka dibanding dengan negara-negara maju. Apalagi pangsa ekspor dunia untuk negara berkembang hanya mencapai 34,7%, dibandingkan 65,3% untuk negara maju pada tahun 2017 (Gonzales, 2019). Narlikar (2003) mengungkapkan bahwa *peripheralization* (marginalisasi) posisi negara berkembang dan struktur sistem internasional di berbagai organisasi internasional membuat mereka tidak dapat menggunakan kapasitas mereka secara penuh untuk menyuarakan kepentingan mereka, apalagi untuk memaksimalkan keuntungan dari keanggotaan mereka. Oleh karena itu, anggota-anggota WTO seringkali membentuk suatu koalisi atau kerja sama untuk memastikan bahwa kepentingan mereka tercapai dan keinginan mereka didengar oleh anggota lain; begitupun dengan negara-negera berkembang yang juga memiliki koalisinya sendiri. Meskipun pada awalnya koalisi negara berkembang dibentuk hanya untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap proposal koalisi negara maju, tetapi sejak *Singapore Issue*[1] dan Putaran Uruguay,

1 Singapore Issue merujuk kepada kebijakan kompetisi, transparansi dalam pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan, dan isu tentang investasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

koalisi ini secara aktif mengajukan proposal kontra dan keaktifan untuk menegosiasikan poin-poin dalam dua proposal yang berseberangan (Low, 2007).

Ada dua tipe koalisi di GATT/WTO: blok dan aliansi berbasis isu. Koalisi berbentuk blok, seperti halnya Uni Eropa, biasanya bergerak atas dasar kesamaan kepentingan dan posisi, atau setidaknya mereka akan berusaha menyelaraskan posisi dan suara mereka agar mereka dapat bergerak sebagai satu suara. Sementara itu, aliansi berbasis isu biasanya hanya akan bergerak untuk menyikapi satu isu tertentu dan dapat dibubarkan jika isu tersebut telah diselesaikan—meskipun untuk beberapa aliansi, seperti G20 and Café au Lait, dapat meluas ke isu lainnya sehingga memperpanjang umur aliansi. Cepaluni, Galdino, dan Oliveira (2011) juga menegaskan bahwa koalisi yang lebih besar (dalam hal jumlah anggota) dapat lebih berhasil untuk melobi posisi dan mencapai tujuan mereka. Selain itu, aliansi berbasis isu seperti Cairns Group atau G20, terbukti lebih fleksibel dan lebih mungkin mencapai tujuan negosiasi mereka.

Keberhasilan koalisi G20 di Cancun dalam isu pertanian ditengarai sebagai salah satu bukti keberhasilan dan efektivitas mereka dalam menjalin komunikasi dan mempertahankan posisi bersama (*joint position*) hingga akhir (Narlikar & Tussie, 2004). Sementara itu, koalisi semacam G20, *Group of Least Developed Countries* (LDC), *Small and Vulnerable Economies* (SVE), dan *Like-Minded Group* (LMG) tidak membentuk koalisi berdasarkan kesamaan isu, melainkan kesamaan agenda yang ingin diangkat dalam negosiasi perdagangan. G20 merupakan koalisi baru pada tahap negosiasi di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Cancun 2003.

Di WTO, Indonesia bergabung dalam beberapa koalisi, baik koalisi campuran antara negara maju-berkembang, atau sesama negara berkembang, seperti G33; G20; NAMA-11; Alliance on Strategic Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM); Like-Minded Groups (LMG); 'W52 Sponsors'; dan CAIRNS Group (Narlikar & Tussie, 2004; Syadullah & Dwiyanti, 2020; WTO, 2020c). Keterlibatan Indonesia dalam komisi-komisi tersebut dilandaskan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pada tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, dan terfokus pada sektor dan isu krusial seperti pertanian, hak cipta (*intellectual property*), dan *e-commerce* (Syadullah & Dwiyanti, 2020).

B. PERAN INDONESIA DI KOALISI NEGARA BERKEMBANG DI WTO

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan koalisi di mana Indonesia menjadi anggota. Dapat dikatakan, untuk beberapa koalisi, peran Indonesia tidak terlalu terlihat, yang mengindikasikan bahwa Indonesia harus lebih berupaya di masa depan untuk memimpin koalisi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa alasan mengapa negara membentuk koalisi untuk putaran perundingan di WTO. Salah satu alasan paling nyata adalah kemungkinan untuk didengar jika salah satu anggota beroperasi sendiri karena WTO memiliki ratusan anggota dan banyak agenda (Jusko, 2009), belum lagi kerugian struktural sebagai negara berkembang. Uni Eropa (UE), sebagai suatu blok perdagangan, lebih mungkin mengajukan proposal sebagai satu unit dalam perjanjian perdagangan dan proposal tersebut akan lebih mungkin untuk diterima. Meskipun Indonesia sendiri juga merupakan anggota ASEAN, sayangnya integrasi ASEAN belumlah mapan seperti UE sehingga ASEAN tidak pernah bergerak sebagai satu kesatuan dalam perundingan WTO. Akibatnya, Indonesia dan anggota lainnya bergabung dengan koalisi terpisah untuk isu-isu terpisah (koalisi berbasis isu). Untuk Indonesia, perannya paling menonjol dalam tiga koalisi ini: Cairns, G20, dan G33.

1. *Keterlibatan Indonesia di dalam Cairns Group*[2]
   Seperti telah diketahui, sektor pertanian merupakan salah satu isu yang paling rumit untuk dinegosiasikan sehingga sektor ini tidak mendapatkan perhatian dari GATT/WTO selama empat dekade awal semenjak rezim perdagangan internasional ini berdiri. Akar

2 Saat ini, Cairns beranggotakan Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Uruguay, Viet Nam. Ukraina merupakan pengamat (*observer*) dalam grup ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

permasalahan yang menyebabkan *deadlock* dalam negosiasi ini adalah perbedaan posisi antara negara maju— seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang—dan negara berkembang dalam menyikapi aturan perdagangan untuk produk-produk pertanian. Negara maju tersebut berusaha mempertahankan posisi mereka dengan cara melindungi sektor pertanian mereka melalui pemberian subsidi besar kepada petani domestik dan pemberlakuan tarif tinggi untuk impor produk pertanian. Hal ini dinilai tidak adil bagi banyak negara berkembang yang mengandalkan produk pertanian sebagai salah satu komoditas ekspor utama mereka. Selain itu, ada pula permasalahan akses pasar serta perlakuan khusus (*special and differential treatment*/SDT) terhadap produk-produk sensitif, termasuk untuk produk pertanian (Syadullah & Dwiyanti, 2020). Liberalisasi perdagangan menuntut negara berkembang untuk membuka pasar mereka terhadap barang impor dengan standar tarif WTO, tetapi negara berkembang (termasuk Indonesia) menilai bahwa pembukaan pasar tanpa diikuti oleh pengurangan subsidi produk-produk sensitif (pertanian, tekstil, kapas, dll.) di negara maju akan mematikan sektor tersebut di negara berkembang.

Oleh karena itu, Cairns didirikan pada 1986 sebelum Putaran Uruguay dimulai dengan tujuan untuk menegosiasikan besaran subsidi pertanian yang diberikan oleh AS, UE, dan Jepang, serta mendukung pemberlakuan SDT bagi negara berkembang (Cairns Group, t.t.). Cairns merupakan koalisi negara-negara pengekspor produk pertanian dan mereka bergerak berdasarkan kesamaan kepentingan dalam liberalisasi produk pertanian (WTO, 2017). Koalisi ini terdiri atas gabungan negara maju dan negara berkembang dan dinilai sukses dalam menegosiasikan posisi mereka di Putaran Uruguay (Cepaluni, Galdino, & Oliveira, 2011). Berbeda dengan berbagai koalisi informal lainnya, Cairns terkesan lebih formal karena anggota-anggotanya bertemu secara rutin melalui pertemuan tingkat menteri (Jusko, 2009). Cairns juga kerap berdiskusi dan menyelaraskan agenda dengan G20

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang juga fokus pada isu pertanian. Koalisi ini dinyatakan sukses pada awal Putaran Uruguay. Namun, pasca-November 1992, walaupun mereka berhasil menghambat klausul mengenai hak cipta ke dalam perjanjian (Cepaluni, Galdino, & Oliveira, 2011), mereka dinilai gagal pada putaran perundingan berikutnya. Meskipun demikian, koalisi ini masih berjalan hingga kini dan terus mencatat beberapa tonggak bersejarah dalam perundingan perdagangan, seperti ketika mereka berhasil menyetujui eliminasi sejumlah subsidi ekspor pada tahun 2015 (Cairns Group, t.t.).

Bagi Indonesia, produk pertanian masih menjadi salah satu komoditas perdagangan utama setelah manufaktur dan pertambangan, yakni sekitar 25,5% pada 2018 (WTO, 2020b), serta merupakan salah satu produsen dan konsumen beras terbesar di pasar dunia (Harris, 2003). Oleh karena itu, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan perdagangan dan industri yang memengaruhi ekspor dan impor produk pertanian. Pada tahun 2003, Indonesia berkomitmen untuk mereformasi sektor perdagangan dengan cara mereduksi tarif terkait produk pertanian hingga 10% per item dalam jangka waktu 10 tahun (Hidayat, 2002; Harris, 2003).

Indonesia sendiri telah bergabung dengan Cairns Group sejak awal berdirinya, tetapi dapat dikatakan bahwa perannya masih bersifat moderat dan tidak selalu menyetujui proposal koalisi ini kepada WTO (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag, 2020]; Harris, 2003) karena Cairns Group beranggotakan eksportir produk pertanian, sedangkan Indonesia juga berada di posisi importir dan berkepentingan untuk melindungi pekerja di sektor krusial ini. Oleh karena itu, Indonesia pernah menolak untuk menandatangani proposal posisi Cairns Group pada tahun 2002 (Kwa, 2002) yang meminta WTO untuk mereduksi tarif pertanian hingga 25% (untuk tarif 0–50%) dan 50% (untuk tarif 50–250%) dan mengajukan syarat bahwa Cairns harus mengecualikan empat produk (beras, gula, kedelai, dan jagung) dari proposal mereka. Proposal Indonesia ditolak oleh Cairns.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain itu, di luar isu liberalisasi perdagangan, Indonesia juga selalu menekankan pentingnya isu-isu non-perdagangan, seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan desa yang tidak termasuk isu di dalam Cairns, hingga perwakilan Indonesia pernah meminta izin untuk mencabut keanggotaan di Cairns kepada Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi ditolak oleh Cairns (Hidayat, 2002). Hingga kini, Indonesia tetap berada dalam komisi ini dan menyatakan dukungan akan kelanjutan Agenda Doha, seperti penyelesaian beberapa isu perundingan terkait subsidi domestik, *public stock holding* (*PSH*), dan *special safeguard mechanism* (*SSM*) (Kemendag, 2020).

2. *Keterlibatan Indonesia di dalam G20*[3]

Koalisi ini terbentuk di Cancun tahun 2002 dengan tujuan ambisius untuk mereformasi aturan perdagangan mengenai pertanian dan beranggotakan kombinasi negara berkembang dan negara maju—perlu dicatat, koalisi ini berbeda dengan Grup G20 yang berisikan para menteri keuangan. (WTO, 2017). Narlikar dan Tussie (2004) menyatakan bahwa koalisi G20, yang dimotori oleh India, Tiongkok, dan Brasil di Cancun merupakan salah satu contoh nyata keberhasilan negara-negara berkembang untuk mendorong agenda mereka dalam perundingan perdagangan di WTO.

Koalisi ini kemudian bekerja berdasarkan 'Doha Mandate' yang bertujuan untuk mengeliminasi subsidi ekspor secara bertahap dan memperbaiki akses pasar, serta membahas isu ketahanan pangan, dukungan domestik, dan pengembangan desa bagi negara berkembang (Delgado & Soares, 2005). Dalam hal ini, AS dan UE kembali menjadi pihak oposisi G20 dan Cairns Group dalam hal: 1) pemotongan tarif impor, ketika negara berkembang menilai AS dan UE memberlakukan tarif yang terlalu tinggi;

3 G20 beranggotakan Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Tiongkok, Cuba, Ekuador, Mesir, Guatemala, India, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipina, Afrika Selatan, South Africa, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, Bolivarian, Zimbabwe.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan 2) akses pasar bagi produk negara maju ke negara-negara berkembang, saat negara maju menolak untuk memotong subsidi pertanian mereka (Fan, 2016).

Di koalisi ini, Indonesia baru bergabung setelah Cancun, yakni pada pertemuan menteri di Brasil tahun 2003, yang bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen anggota koalisi pasca-'serangan' Amerika Serikat untuk memecah belah anggota koalisi. G20 tetap mempertahankan posisi mereka dengan proposal detail mengenai isu-isu yang telah dijelaskan di atas, meskipun dominasi mereka mulai berkurang sejak 2005. Sayangnya, Brazil-lah yang lebih berperan dalam koalisi ini, sedangkan Indonesia tampaknya kurang berperan sentral dan lebih fokus sebagai koordinator G33. Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu, 2014), Indonesia masih tetap aktif dalam berbagai koalisi, termasuk G20, melalui formulasi posisi bersama yang menjunjung Agenda Doha, serta aktif menegosiasikan kepentingan Indonesia dalam pembangunan ekonomi, hak asasi ekonomi (*property rights*), dan perdagangan multilateral secara umum.

3. *Keterlibatan Indonesia di dalam G33*[4]

G33, yang juga menyebut diri mereka sebagai "Friends of Special Products," memulai pertemuan tingkat menteri di Cancun dan mendeklarasikan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk membuka akses pasar produk pertanian (WTO, 2017). Grup ini juga memperjuangkan kebebasan negara berkembang untuk mengajukan 'produk strategis' versi mereka sendiri demi mempertahankan tingkat tarif, serta mengajukan 'mekanisme

4 G33 ini sesungguhnya memiliki sekitar 40 anggota: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Tiongkok, Kongo, Côte d'Ivoire, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea Selatan, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipina, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, China Taipei, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Bolivarian, Zambia, Zimbabwe

Buku ini tidak diperjualbelikan.

safeguard khusus' (*special guard mechanism*/SPM) demi melindungi sektor domestik dari serbuan produk impor (Narlikar, 2003). G33 cukup konsisten dalam menyuarakan Agenda Doha hingga saat ini.

Salah satu terobosan G33 adalah proposal 'Bali Package' di Konferensi Tingkat Menteri tahun 2013 di Bali, Indonesia, yang berhasil menghasilkan '*Trade Facilitation Agreement*' (Kemenlu, 2014). Sebelum Konferensi Bali dimulai, G33 telah menyusun proposal yang terdiri dari 3 elemen terkait dengan pembayaran langsung kepada petani lokal (Bellman dkk., 2013). Proposisi ini dikenal dengan sebutan '*green box*' dan ditengarai tidak akan menyebabkan distorsi perdagangan karena hasil panen petani kecil umumnya hanya dikonsumsi pribadi dan diperdagangkan di kalangan komunitas saja (Hepburn & Bellman, 2013).

G33 berargumentasi bahwa proposal ini diajukan demi kelangsungan hidup petani lokal, diperlakukan sebagai *public stock holding* (PST)—stok barang publik yang digunakan untuk membantu petani miskin (Syadullah & Dwiyanti, 2020), dan dapat disebut sebagai bantuan (*aid*). Proposal ini juga diajukan dalam rangka menguatkan ketahanan pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, proposal ini disetujui di WTO beserta klausul mengenai fasilitasi perdagangan bagi negara berkembang, dan pengaturan/penyeragaman bea masuk (Bellman, 2014). Indonesia juga berperan sebagai ketua sidang menteri G33 pada KTM X Nairobi, Kenya, dengan memperjuangkan Special Products (SP) dan SPM agar dapat diterima dan diterapkan di WTO, tetapi belum berhasil (Delanova, 2016).

Pada pertemuan WTO di tahun-tahun berikutnya, Indonesia masih berbicara sebagai wakil G33 untuk menyampaikan posisi mereka. Seperti pada Pertemuan Komisi Perdagangan di April 2015, Indonesia kembali menekankan pentingnya SP, SSM, dan PST untuk mewujudkan ketahanan pangan (WTO, 2015a). Pada pertemuan selanjutnya di Juli 2015, Indonesia, sebagai perwakilan G33, mengungkapkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagian anggota WTO yang masih ragu mengambil langkah maju dalam negosiasi perdagangan pasca 'Bali Package' (WTO, 2015b).

C. MEMAINKAN PERAN SEBAGAI INISIATOR KOALISI

Berdasarkan Visi Indonesia 2024 (Bappenas, 2020), perdagangan internasional diperkirakan tumbuh hingga 3,4% per tahun dengan negara berkembang sebagai penghasil *output* perdagangan sebanyak 71%. Indonesia sendiri berambisi untuk menjadi salah satu negara ramah investasi di Asia dan dunia, serta meningkatkan daya saing ekspor di perdagangan internasional (Bappenas, 2020). Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dan bonus demografi, bukan mustahil jika Indonesia dapat meraih ambisi tersebut di 2024.

Dalam WTO selaku organisasi perdagangan terbesar, melalui uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia telah berperan aktif dalam membangun kemitraan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai organisasi internasional, termasuk WTO. Meskipun demikian, Indonesia masih jarang mengambil peran sebagai inisiator pada koalisi-koalisi yang telah diikuti. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi, Indonesia perlu mengambil peran lebih sebagai inisiator dalam berbagai koalisi yang diikuti di WTO. Saat ini, Indonesia telah menjalankan peran dengan baik sebagai wakil dari G33, tetapi G33 bukanlah satu-satunya koalisi tempat Indonesia bernaung. Untuk isu yang dibahas, meskipun kebanyakan dari koalisi Indonesia dan negara berkembang lain terfokus pada isu pertanian, ke depan Indonesia dapat pula berperan lebih dalam isu-isu terkini seperti *e-commerce* dan hak ekonomi.

Selain itu, cukup disayangkan pula bahwa sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia belum mampu mengajak anggota lain untuk menyelaraskan suara mereka sebagai satu kesatuan di forum-forum multilateral. Jika mengambil contoh Uni Eropa (UE), kita dapat melihat bahwa mereka dapat membentuk aliansi blok yang kuat di forum multilateral seperti WTO dan dapat mengambil tindakan sebagai satu kesatuan dalam penyelesaian sengketa dagang, termasuk dengan Indonesia untuk kasus *anti-dumping*, misalnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Layaknya ASEAN, UE juga beranggotakan negara maju dan negara berkembang, tetapi mereka berada di beberapa tingkat integrasi lebih tinggi dari ASEAN, yakni level koordinasi kebijakan perdagangan domestik. Saat ini, ASEAN telah berupaya melakukan penyelarasan kebijakan yang dapat mempermudah perdagangan antar anggota, seperti ASEAN *Single Windows* (ASW), dan sebagian besar anggota juga tergabung dalam berbagai blok/regionalisme untuk perdagangan (seperti RCEP). Melihat tren ini, Indonesia dapat berperan untuk menginisiasi kemitraan antar anggota ASEAN di level multilateral seperti WTO hingga ASEAN dapat membentuk aliansi blok yang memiliki satu suara dan meningkatkan posisi tawar mereka.

REFERENSI

Bappenas. (2020). *Visi Indonesia 2045*. https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/contents-deputi-bidang-ekonomi/visi-indonesia-2045/

Bellmann, C. (2014). The Bali Agreement: Implications for development and the WTO, *International Development Policy | Revue internationale de politique de développement*, Vol. 5.2, 2014. https://doi.org/10.4000/poldev.1744

Bellmann, C., Hepburn, J., Krivonos, E., & Morrison, J. (2013). *G33 proposal: Early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*. ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development. https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/171992

Cairns Group. (t.t.). *Background on the Cairns Group and the WTO Doha Round.* https://www.cairnsgroup.org/Pages/wto_negotiations.aspx.

Cepaluni, G., Galdino, M., & Oliveira, A. (2011). The bigger, the better: Coalitions in the GATT/WTO. *Brazilian Political Science Review, 6*(2), 28–55. https://doi.org/10.1590/S1981-38212012000200002

Delanova, M. (2016). Diplomasi ekonomi Indonesia dan negara-negara berkembang dalam G33 untuk mempromosikan proposal special products dan special safeguard mechanism. *Jurnal Dinamika Global*, *1*(01), 14—31. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12

Delgado, N.G., & Soares, A. C. D. O. (2005). The G20: Its origin, evolution, meaning, and prospects. *Global Issue Papers, 25*(5), 13. https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/internationalepolitik/GIP_25_Engl_G-20.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Fan, Y. (2016). Evolving strategy: South-South coalition in the GATT/WTO. *China and WTO Review, 2*(1), 69–84. http://dx.doi.org/10.14330/cwr.2016.2.1.03

Gonzales, A. (2019, 12 Maret). Bridging the divide between developed and developing countries in wto negotiations. *Peterson Institute for International Economics (PIIE) Blogs*. https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/bridging-divide-between-developed-and-developing-countries-wto

Harris, D. N. (2003, 23–25 Oktober). *Agricultural trade reform and industry adjustment in Indonesia* (No. 1225-2016-98629) [Presentasi makalah]. Policy Reform and Adjustment Workshop, Imperial College London, Wye Campus 15757, International Agricultural Policy Reform and Adjustment Project (IAPRAP). http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.15757

Hepburn, J., Bellmann, C. (2013, 11 November). WTO rules: How could the G33 proposal affect food security? *GREAT Insights, Volume 2, Issue 8. November 2013*. https://ecdpm.org/great-insights/multiple-dimensions-trade-development-nexus/wto-rules-g-33-proposal-affect-food-security/

Hidayat, N. (2002, November 8). *WTO, Indonesian agriculture, and food security* [Seminar]. AFTINET Seminar on Alternatives to the WTO, Sydney, Australia. https://www.aftinet.org.au/papers/hidayat1.html.

Jusko, R. (2009). Coalitions of countries in the GATT/WTO negotiations. *International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 18*(2), 70–91. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26591286.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2014). *World Trade Organization (WTO)* (List of Multilateral Cooperation). https://kemlu.go.id/portal/en/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020, Januari 28). *Hadiri pertemuan Cairns Group, Mendag dukung isu pertanian dibahas di KTM WTO Ke-12* (Siaran Pers). https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/hadiri-pertemuan-cairns-group-mendag-dukung-isu-pertanian-dibahas-di-ktm-wto-ke-12-1.

Kwa, A. (2002). Laying the groundwork for Cancun: Another Doha "success"? *Focus on the Global South*. https://focusweb.org/laying-the-groundwork-for-cancun-another-doha-success/

Low, P., & Ethier, W. J. (2007). Is the WTO doing enough for developing countries? Dalam G. A. Bermaan & P. C. Mavrodis (Ed.), *WTO Law and Developing Countries* (324–357). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511674518.013.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mariatulkubtia, A. (2020). Peran WTO dalam menjembatani benturan kepentingan antara Uni Eropa dan Indonesia dalam perdagangan biodiesel. *Andalas Journal of International Studies, 9*(1), 16–33. https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.16-33.2020.

Narlikar, A. (2003). *International trade and developing countries: Bargaining coalitions in the GATT & WTO*. Routledge.

Narlikar, A., & Odell, J. (2006). The strict distributive strategy for a bargaining coalition: The Like Minded Group in the World Trade Organization, 1998–2001. Dalam J. Odell (Ed.), *Negotiating trade: Developing countries in the WTO and NAFTA* (115–144). Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491610.004.

Narlikar, A., & Tussie, D. (2004). The G20 at the Cancun Ministerial: Developing countries and their evolving coalitions in the WTO. *World Economy*, *27*, 947–966. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2004.00636.

Syadullah, M., & Dwiyanti, A. (2020). Position of Indonesia in WTO reform. *International Journal of Economics and Financial Issues, 10*(1), 42–51. https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2020-01-6.html

World Trade Organization, (2018a). *Mainstreaming trade to attain the Sustainable Development Goals*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/sdg_e.pdf.

World Trade Organization, (2018b). *The WTO and the Sustainable Development Goals*. https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/sdgs_e/sdgs_e.htm.

World Trade Organization, (2020a). *Indonesia* (Tariff Profiles 2020). https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/ID_E.pdf.

World Trade Organization. (2015a, April 27). *Minutes of meeting: April 27, 2015 Trade Negotiations Committee meeting*. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/C/M36.pdf&Open=True

World Trade Organization. (2015b, Juli 31). *Minutes of meeting: Juli 31, 2015 Trade Negotiations Committee Meeting*. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/C/M37.pdf&Open=True

World Trade Organization. (2016). *Substantive Inputs to the 2016 HLPF – WTO'S Contribution towards the 2030 Agenda and the SDGs*. United Nations Sustainable Development Knowledge Platform. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10236World%20Trade%20Organization%20contribution%20recd%202016-May-19.pdf.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

World Trade Organization. (2017, Desember). *Groups in the negotiation.* https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm#grp017.
World Trade Organization. (2020b). *Indonesia* (Trade profiles 2020). https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ID_e.pdf.
World Trade Organization. (2020c). *Indonesia and the WTO* (*Member information*). https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm.
World Trade Organization. (2020d, Desember). *Trade Policy Review: Indonesia.* https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp501_e.htm.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XI

Indonesia dan G20: Memainkan Peran Mediator Antara Ekonomi Negara Maju dan Berkembang

Elmo Juanara

G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai jawaban atas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu, telah muncul pemahaman bahwa isu ekonomi negara tidak dapat dihadapi sendiri sehingga dibutuhkan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut (Putri, 2020). G20 menjalankan pertemuan rutin setiap tahun, yang dikenal dengan nama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Anggota G20 secara bergilir akan menjadi tuan rumah dari konferensi ini. Konferensi Tingkat Tinggi perdana dimulai pada tahun 2009 yang diselenggarakan di Pittsburgh, Amerika Serikat (Arieza, 2019).

Pada mulanya, G20 adalah sebuah forum ekonomi. Forum ekonomi ini diwakilkan oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari setiap negara anggota. Setelah menjadi G20, kepala negara ikut mewakili keanggotaan ini. Sistem koordinasi G20 dilakukan oleh tiga pihak yang biasa disebut sebagai "*Troika*". Ketiga pihak tersebut yaitu ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua mendatang. Hal ini menarik, dengan membuat konsep Troika, maka kesinambungan informasi dan tujuan akan terus terjaga dengan baik (Downie,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2016). Permasalahan yang sering muncul dalam organisasi, terlebih organisasi besar, yaitu terputusnya informasi dari kepemimpinan satu periode ke periode lain. Konsep Troika menjadikan ketua saat ini memiliki gambaran yang jelas dari program sebelumnya, disaat yang bersamaan ketua yang lama masih dapat mendampingi ketua saat ini. Begitu juga ketua selanjutnya mendapatkan banyak informasi dan serta pengalaman dari kepemimpinan sebelumnya.

Bab ini membahas mengenai peran Indonesia dalam forum G20 yang diharapkan dapat memainkan peran lebih sebagai mediator antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks ekonomi. Bab ini juga memberikan refleksi dari terpuruknya kondisi ekonomi dunia akibat Covid-19 dan harapan ke depan untuk keluar dari situasi ketidakpastian ini.

A. G20 SEBAGAI MODEL KERJA SAMA DUNIA

G20 menjadi prototipe kerja sama dunia yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Pasalnya, kerja sama yang dilakukan oleh G20 ini merupakan kerja sama yang terdiri atas negara-negara perekonomian besar dunia, baik negara maju maupun berkembang. Jika dijumlahkan, G20 mencakup 80 persen produk dunia bruto, 75 persen perdagangan dunia, dan 2/3 populasi dunia. Dengan berhimpunnya negara-negara ekonomi besar dunia yang memiliki tujuan bersama yang jelas ke dalam G20, maka forum ini menjadi wadah strategis untuk memutuskan kebijakan-kebijakan besar dunia (Kirton, 1999). Model kerja sama G20 juga sangat cocok diterapkan di tingkat dunia, karena keanggotaan G20 mencakup seluruh dunia. Setiap benua atau kawasan memiliki representatifnya masing-masing. Konfigurasi keanggotaan yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang menjadi nilai tambah atas model kerja sama ini. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki potensi ekonomi utama dunia, serta terdiri atas negara maju dan berkembang, kerja sama di G20 ini dapat menjadi *role model* untuk organisasi ataupun forum sejenis. Harapannya, model kerja sama dunia yang diterapkan G20 dapat membawa banyak perubahan dan menjaga kestabilan. Dengan catatan, setiap anggotanya memiliki

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tujuan yang selaras untuk mengimplementasikan agenda-agenda yang telah disepakati.

Jika ditelisik lebih lanjut, angka-angka yang merepresentasikan G20 tersebut merupakan angka yang tidak main-main. Jika 80 persen produk bruto dunia ada di G20, maka setiap kebijakan G20 terkait ekonomi akan berdampak besar pada dunia. Begitu pun sebaliknya, jika terjadi ketidakstabilan ekonomi dunia, maka G20 seharusnya dapat menjadi forum yang efektif dalam upaya penstabilan tersebut. Selain produk dunia bruto, 75 persen perdagangan dunia yang tercakup di dalam G20 juga merupakan sebuah angka yang sangat besar. Oleh karena itu, sudah seharusnya forum yang diadakan oleh G20 dapat membuat ekosistem dan iklim perdagangan dunia lebih kondusif. Isu perang dagang antar-anggota G20 tentu menyebabkan ketidakstabilan di dunia. Problem ini mungkin dapat direduksi melalui wadah forum G20. Sementara itu, jika dilihat bahwa G20 memiliki keterwakilan sebanyak 2/3 populasi dunia, maka angka ini sangat cukup untuk melakukan perubahan pada ekonomi dunia. Populasi manusia akan menghasilkan hal-hal konsumtif yang secara langsung akan berdampak pada ekonomi. Maka sudah seharusnya, negara-negara yang tergabung dalam G20 melihat betul potensi dan peluang G20 sebagai wadah strategis untuk membuat perekonomian dan perdagangan tingkat dunia yang lebih baik.

B. PELUANG DAN MANFAAT BAGI INDONESIA BERGABUNG KE DALAM G20

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kesempatan strategis untuk dapat bergabung ke dalam G20. Terlebih, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung ke dalam G20. Padahal jika dilihat lebih lanjut lagi dan mengacu kepada data Bank Dunia tahun 2017, ada juga negara maju di Asia Tenggara seperti Singapura, atau negara yang memiliki PDB per kapita lebih besar daripada Indonesia seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand. Namun, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam G20. Selain potensinya sebagai *global buyer* yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak secara sistemik kepada stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan lebih lanjut memberikan kontribusi stabilitas perekonomian di Asia dan dunia (Putri, 2020).

Selain menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung ke dalam G20, Indonesia memiliki peluang untuk dapat merasakan atmosfer bekerja sama dengan banyak negara maju lainnya yang ada di G20. Atmosfer ini dapat menjadi sarana strategis bagi Indonesia untuk belajar, melihat, dan bekerja sama secara langsung dengan negara-negara tersebut. Peluang kerja sama dalam sektor ekonomi atau lainnya sangat memungkinkan dimulai dari forum ini. Peluang perdagangan internasional atau ajakan investasi kepada negara-negara maju merupakan salah satu opsi yang tepat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada periode pertamanya, menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program prioritasnya. Program infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan stimulus pergerakan ekonomi di tanah air. Dengan terbangunnya infrastruktur yang baik dan memadai di tanah air, maka perdagangan antardaerah atau antarwilayah semakin lebih mudah. Isu infrastruktur ini merupakan contoh dari turunan agenda dan kesepakatan dalam forum G20. G20 yang memiliki peran untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan ekonomi dunia menjadikan isu perdagangan, investasi, dan tentunya infrastruktur sebagai salah satu program yang perlu disukseskan oleh negara-negara anggotanya. Bagi Presiden Jokowi yang lebih memfokuskan pemerintahannya pada isu-isu domestik, isu infrastruktur ini menjadi agenda strategis tersendiri. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai di tanah air, dapat mendorong dengan cepat mobilisasi sumber daya domestik (Larasati, & Natasya, 2017).

Selain peluang membawa isu domestik ke forum internasional, Indonesia juga sukses meraih status sebagai *middle power*, berkat kepemilikannya atas sejumlah sumber daya kunci seperti populasi, kekuatan militer, atau besaran *Gross Domestic Product* (GDP). Untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mempertahankan posisinya, negara *middle power* dituntut untuk mengambil manuver-manuver yang membuat mereka tetap kompetitif dalam lanskap politik internasional yang terus berubah (Alvian dkk., 2017). Indonesia sebagai negara *middle power* tentu memiliki peluang yang cukup strategis dalam menjalankan kepentingan domestiknya di dalam forum G20. Sebagai negara kekuatan menengah dan bukan termasuk kekuatan besar, tentu Indonesia harus berhati-hati dalam melangkah dan membangun diplomasi. Sebagai contoh, dalam pergulatan perang dagang di antara anggota G20, Indonesia harus dapat memosisikan diri sebagai pertengahan, tidak memihak kepada salah satu kekuatan.

Hal ini menjadi hal yang cukup penting, mengingat selama ini Indonesia telah berhasil membuka dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain, baik Barat maupun Timur. Kemampuan dalam berdiplomasi dan merespons kesepakatan-kesepakatan yang ada di G20 ini lah yang perlu dipertajam oleh Indonesia. Oleh karena itu, memberikan porsi yang sesuai pada setiap kebijakan dan isu yang ada merupakan langkah yang tepat. Dengan kata lain, Indonesia mampu berdiri sebagai kekuatan menengah untuk mendapatkan legitimasi internasional dan mengajak negara-negara lain untuk turut serta dan mendukung gagasan pertengahan tersebut.

C. INDONESIA DI ANTARA RAKSASA G20

Sebenarnya, Indonesia patut berbangga menjadi anggota G20, karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil masuk. Hal ini kemudian dibuktikan dengan prestasi Indonesia sebagai anggota G20, yaitu pertumbuhan ekonominya terbesar ketiga di antara negara G20 pada kuartal I tahun 2019, yaitu sebesar 5,07 persen (Arieza, 2019). Jika dibandingkan dengan Tiongkok dan India, masing-masing memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen dan 6,1 persen pada kuartal tersebut (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Raihan itu dapatkan dikatakan sebagai sebuah prestasi bagi Indonesia, yang dapat membuktikan dirinya layak sebagai anggota G20 dan memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

turbulensi ekonomi global. Kondisi turbulensi ini melanda semua negara, dan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. Namun sampai sekarang, Indonesia tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut

Dengan raihan prestasi ini, Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa suara dan *bargaining position*-nya dapat di dengar di dalam forum G20. Selain *bargaining position* di dalam forum, capaian prestasi ini juga diharapkan dapat mendatangkan berbagai investasi bilateral atau multilateral di antara negara G20. Datangnya berbagai investasi akan melahirkan perdagangan baru dan menumbuhkan kanal ekonomi, sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga atau bahkan ditingkatkan.

Terlepas dari raihan prestasi tersebut, Indonesia masih menyandang status sebagai negera berkembang. Di G20, selain ditemani oleh negara-negara berkembang lainnya, seperti India, Afrika Selatan dan sebagainya, Indonesia juga dikelilingi oleh negara-negara maju. Kondisi ini sebenarnya merupakah sebuah ujian bagi kepercayaan diri Indonesia sebagai negara berkembang untuk dapat menunjukkan potensinya di masa depan.

Ujian kepercayaan diri pertama Indonesia yaitu berada di antara negara-negara maju di G20. Berada ditengah-tengah raksasa tersebut mungkin bukan hal yang mudah bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi mereka yang cepat mungkin dapat menciutkan nyali ketika berdiskusi dalam forum tersebut. Dalam ujian ini, diperlukan visi yang mengglobal, sehingga apa yang menjadi kepentingan Indonesia dapat selaras dengan mayoritas dari kepentingan para raksasa-raksasa tersebut. Dengan demikian, akan lebih mudah menemukan benang merah keselarasan.

Ujian kepercayaan diri kedua yaitu berada di antara negara-negara berkembang. Sejatinya ini bukan menjadi masalah besar, karena berada di tengah-tengah negara yang sejajar. Tetapi terkadang berada di tengah-tengah yang negara sejajar dapat mengurangi kepercayaan diri dikarenakan kita berada di tahap yang sama, hanya mereka dapat lebih cepat melangkah. Oleh karena itu, hadirnya Indonesia di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam forum G20 dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan dalam rangka terus meningkatkan marwah Indonesia di tingkat internasional, sehingga darinya dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan domestik negara.

D. MOTOR ASIA TENGGARA DAN KEPENTINGAN KOLEKTIF

Forum keanggotaan G20 telah memosisikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk sebagai G20 (Putri, 2020). Hal ini memperkuat *positioning* Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mengapa demikian? karena G20 merupakan forum penentu kebijakan ekonomi dunia, sehingga secara tidak langsung Indonesia akan membawa suara dari Asia Tenggara.

Dengan demikian, Indonesia dapat disebut sebagai motor dari Asia Tenggara yang dapat menyuarakan kepentingan kolektif negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini tentu bukan hal yang mudah, mengingat ada banyak negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Tetapi hal tersebut dapat menjadi tantangan Indonesia untuk berperan aktif serta dapat membuktikan dirinya mampu dan pantas menjadi perwakilan G20 dari Asia Tenggara.

Sebagai contoh, terorisme dan keamanan mungkin dapat menjadi salah satu isu yang bisa disuarakan Indonesia di forum G20. Pasalnya, kedua isu tersebut menjadi isu yang hangat akhir-akhir, terkhusus di Kawasan Asia Tenggara. Misalnya, dengan isu terorisme, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia kerap menjadi sasaran. Padahal kita tahu, terorisme merupakan isu yang berkaitan erat dengan dinamika di skala global, tidak eksklusif pada satu negara saja. Kasus terorisme ini dikhawatirkan akan mengancam negara-negara muslim di dunia. Oleh karena itu, jika Indonesia dapat menangani isu ini dengan baik, terkhusus di Kawasan Asia Tenggara, tentu akan menjadi contoh yang baik bagi negara-negara muslim lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. INDONESIA SEBAGAI *EMERGING ECONOMY*

Dalam konteks perekonomian, Indonesia juga harus memahami posisi dan tanggung jawabnya untuk mewakili negara-negara berkembang lain yang ada di Asia Tenggara. Karena pertumbuhan ekonominya yang tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang yang ada, Indonesia dikategorikan masuk ke dalam *emerging economy* (Larasati & Natasya, 2017). Dengan kategori *emerging economy* inilah Indonesia mendapatkan hak istimewa untuk duduk di dalam klub bergengsi ini.

Indonesia mampu menunjukkan kekuatan yang melekat selama krisis ekonomi global saat ini. Ekonominya diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,3% tahun ini, seperti yang diperkirakan oleh IMF, yang lebih baik daripada banyak negara berkembang lainnya di G20, kecuali Tiongkok (7,7%) dan India (5,4%). Ini jauh lebih tinggi dari Brasil (2,3%), Rusia (2%) atau Meksiko (3,7%) (European Centre for Development Policy Management [ECDPM], 2014). Dengan kondisi kategorisasi Indonesia sebagai *emerging economy*, Indonesia memilih memainkan peran diplomasi *middle way* pada politik luar negerinya. Pilihan ini membuat Indonesia menghindari konfrontasi politik global yang ada. Sebaliknya, Indonesia lebih memilih untuk mencari kepentingan bersama dari berbagai kelompok negara-negara berkembang lainnya. *Emerging economy* memang menjadi label yang menarik untuk disematkan kepada Indonesia. Tetapi hal ini perlu ditingkatkan lebih baik, mengingat sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi domestik, berbeda dengan Tiongkok dan India yang pertumbuhan ekonominya didorong oleh ekspor.

F. PENYESUAIAN KESEPAKATAN G20 DENGAN AGENDA NASIONAL

Salah satu manfaat yang dirasakan Indonesia ketika bergabung menjadi anggota G20 yaitu Indonesia dapat memiliki isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi global. Isu ini tentu mencakup tidak hanya negara maju atau hanya negara berkembang,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tetapi juga permasalahan umum yang ada di negara-negara di dunia. Oleh karena itu, mengimplementasikan kesepakatan strategis yang ada di forum tersebut ke dalam agenda-agenda nasional tanah air menjadi sebuah aksi yang perlu dicermati.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kesepakatan yang dilakukan di dalam forum G20 dengan agenda nasional yang ada di Indonesia agar tercipta harmonisasi, dan tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. Jika tidak, banyak komitmen-komitmen atau kesepakatan di dalam forum G20 yang tidak dapat dipenuhi. Tidak terpenuhinya komitmen dalam forum tersebut oleh anggota G20 dapat menimbulkan citra buruk bagi negara tersebut. Dampaknya, suara serta posisinya dalam forum mungkin akan kurang didengar.

Kemampuan dalam mengimplementasikan dan menyelaraskan agenda forum global dengan agenda nasional tentu membutuhkan administrasi yang kuat. Presiden Indonesia diharapkan mampu mengoordinasikan kesepakatan global tersebut menjadi agenda nasional yang memiliki dampak positif dan strategis untuk kepentingan domestik Indonesia. Tantangan yang muncul adalah penyesuaian visi misi pimpinan negara dengan kondisi global terkadang tidak semuanya selalu sama. Oleh karena itu, pemilahan kesepakatan perlu dipikirkan kembali.

G. CELAH SEMPIT BONUS DEMOGRAFI

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai bonus demografi Indonesia terus bergulir. Pasalnya, hal ini menjadi harapan dari para pakar dan pemimpin negara mengenai potensi yang bisa diakselerasi dari bonus demografi. Namun, para peneliti juga banyak memberikan peringatan mengenai ancaman yang dapat terjadi jika Indonesia tidak dapat mengelola bonus demografi ini dengan tepat.

Bonus demografi diasumsikan dapat mendongkrak perekonomian nasional melalui pertumbuhan tenaga kerja produktif. Dalam kasus Indonesia, bonus demografi belum dioptimalkan secara maksimal karena kebijakan pemerintah yang masih setengah hati.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ekonomi Indonesia tumbuh melalui konsumsi kelas menengah yang didapat dari bonus demografi. Namun, konsumsi perlu diimbangi dengan produktivitas sehingga Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Jati, 2015).

Pemanfaatan bonus demografi yang tepat dapat menjadi salah satu metode untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi negara mediator antara negara maju dan berkembang. Kita dapat melihat beberapa negara yang sekarang menjadi negara maju, karena mereka mampu memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi di Indonesia ini lebih merupakan sebuah anugerah daripada musibah, tetapi dalam rangka membuktikan anugerah ini hanya ada waktu sedikit atau celah yang sangat sempit dalam memanfaatkannya. Kita dapat melihat Malaysia dan Singapura yang tidak masuk ke dalam G20 karena jumlah penduduknya yang kecil, meskipun per PDB kapitanya tinggi. Jika disimpulkan, benar bahwasanya Indonesia masuk ke G20 karena murni jumlah penduduknya yang banyak serta adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Berkaca kepada Jepang dan Korea Selatan, kedua negara yang menjadi anggota G20 ini merupakan negara yang berhasil maju dikarenakan berhasil memanfaatkan bonus demografi yang dimilikinya kala itu. Kedua negara tersebut dulunya merupakan negara yang terpuruk. Sebagai contoh, Jepang pernah mengalami kelumpuhan ekonomi yang sangat besar usai serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu merupakan kota strategis untuk perekonomian dan perdagangan Jepang sehingga dampak ekonominya sangat terasa. Namun, kini Jepang telah berubah menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari bagaimana cara Jepang memanfaatkan bonus demografi yang mereka miliki. Hal ini berdampak kepada maju tidaknya suatu negara kelak.

Contoh lain, Korea Selatan pernah memulai di posisi yang setara dengan Indonesia usai perang tahun 1950-an. Data dari World Bank menyatakan bahwa peningkatan ekonomi Korea Selatan mulai berangsur-angsur meninggalkan Indonesia pada rentang tahun 1973–1977 (World Bank, t.t.) Setelahnya, ekonomi negara ini maju secara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pesat. Dalam sebuah sebuah kajian kenegaraan, pernah disampaikan bahwa pada waktu itu nilai tukar Rupiah lebih kuat dibandingkan dengan Won Korea Selatan. Sudah menjadi rahasia umum, salah satu pesatnya pertumbuhan ekonomi negara ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologinya. Salah satu yang sering dikenal dunia yaitu perusahaan *smartphone* asal Korea Selatan, yaitu Samsung. Di saat yang bersamaan, industri otomotif Korea Selatan ini, yang dikenal dengan merk Hyundai mulai masuk ke pasar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari kedua negara ini, Indonesia dapat banyak belajar tentang bagaimana mengelola bonus demografi menjadi sebuah keuntungan strategis jangka panjang bagi sebuah negara. Pengelolaan yang salah terhadap kondisi ini dapat mengakibatkan malapetaka yang besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kunci utama keberhasilan negara maju yaitu sumber daya manusia (SDM). Sebab, tidak ada lagi negara maju yang hanya bertumpu kepada kekayaan sumber daya alam (SDA) saja, tetapi lebih ke bagaimana memanfaatkan kekuatan dari SDA-nya.

Negara yang maju, negara di G20 yang memiliki PDB per kapita yang tinggi, sudah dapat dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang baik pula bagi penduduknya. Dengan pendidikan yang tepat bagi para penduduknya, maka bukan yang mustahil bagi Indonesia mencapai SDM yang unggul. Hal ini sesuai dengan visi dari Presiden Indonesia, untuk mencapai SDM yang unggul. Hal ini harus di dorong dan di dukung bersama oleh seluruh elemen pemerintah agar tujuan besar tersebut dapat segera tercapai. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, celah pemanfaatan bonus demografi Indonesia kian kecil, kian sempit, sehingga waktu yang dimiliki tidak lagi sebanyak dahulu.

H. INDUSTRIALISASI DAN KERAN PERDAGANGAN STRATEGIS

Di samping itu, Indonesia harus mengembangkan ekonomi berbasis industri sebagaimana yang dilakukan negara maju lainnya. Negara-negara maju yang ada di G20 berfokus pada industri besar-besaran

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai sarana daya ungkit ekonominya. Mereka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, investasi, dan perdagangan yang ada. Indonesia sebagai negara berkembang yang ada di G20, patutnya dapat mencontoh hal ini. Dengan berada dalam forum G20, seharusnya Indonesia bisa melihat banyak hal positif yang bisa ditiru. Bergabungnya Indonesia dari forum tersebut dapat membuat kerja sama bilateral yang lebih intim dengan negara yang memiliki kesesuaian dengan Indonesia. Terkhusus kerja sama dalam hal investasi dan pembangunan industrialisasi di tanah air.

Hal ini juga akan bisa terakselerasi mengingat Indonesia sedang mengalami bonus demografi hingga hari ini. Para pakar memprediksi kondisi ini akan mencapai puncaknya hingga 2045. Oleh karena itu, saat ini angkatan usia produktif memiliki jumla yang lebih besar dibandingkan angkatan tidak produktif. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai industrialisasi dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada melalui forum G20. Dengan cara menjalin kerja sama dengan negara maju atau negara berkembang yang ada.

Dorongan untuk industrialisasi di Indonesia ini harus diiringi dengan reformasi kebijakan yang sesuai. Jika demikian, Indonesia bisa mendatangkan investasi di berbagai sektor dan memungkinkan melakukan industrialisasi dalam skala besar. Walaupun konsekuensi logis dari industrialisasi ini terjadinya peningkatan impor, tetapi sifatnya merupakan bahan mentah untuk keperluan industri. Kondisi selanjutnya dapat di strategikan dengan melakukan perdagangan strategisnya dengan negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara terlebih dahulu.

I. TRANSFER TEKNOLOGI DARI NEGARA MAJU

Selain bonus demografi, ada hal lain yang menjadi anugerah bagi Indonesia, yaitu dekatnya Indonesia dengan negara-negara maju di dalam forum G20. Ada satu hal penting yang bisa dilakukan ketika bergabung dalam forum ini dalam rangka mendorong dan menggenjot industrialisasi di tanah air, yaitu melakukan transfer teknologi dari negara maju.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

India merupakan salah satu negara maju yang berhasil memanfaatkan peluang ini, peluang bonus demografi dan berperan aktif untuk menempel pada negara maju. India mencoba menempel ketat Amerika Serikat untuk mendapatkan transfer teknologi. Walaupun kita ketahui jumlah penduduk India sekarang terbesar ke-2 di dunia setelah Tiongkok, dan Indonesia masih nomor empat di dunia, tetapi hal ini dapat menjadi gambaran dan cerminan dari Indonesia untuk menggali manfaat lebih pada forum G20 daripada sekedar melakukan diplomasi-diplomasi normatif.

Hal ini merupakan kesempatan emas, dengan posisi Indonesia yang mengambil peran tengah dalam diplomasi di luar negeri, Indonesia dapat bergerak bebas dan aktif untuk belajar transfer teknologi ini dari negara-negara maju di G20. Artinya, tidak ada tendensi ke satu arah. Ini sebuah peluang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika ini berhasil, usia produktif atau angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya besar dapat terwadahi pada industri-industri tanah air, sehingga angka penyerapan tenaga kerja semakin besar, dan pada akhirnya akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat lagi. Dengan langkah tersebut, taji Indonesia di mata G20 akan semakin menguat dan diharapkan bisa memberikan pengaruh yang besar di forum tersebut kelak.

J. TANTANGAN COVID-19

Pandemi itu bernama Covid-19, begitulah yang tertulis dalam Laporan Tahunan 2020 yang dilansir Sekretariat Presiden (2020). Covid-19 menjadi sebuah momok baru sekaligus tantangan tidak hanya Indonesia, melainkan seluruh negara di dunia ini. Ujian kepemimpinan setiap negara di uji melalui pandemi ini. Lemah atau kuatnya kepemimpinan akan dibuktikan dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil guna menanggulangi wabah ini. Banyak sekali media yang menyiarkan tentang dampak terberat dari Covid-19 selain kesehatan, yaitu ekonomi. Mau tidak mau, ekonomi seluruh negara menjadi jatuh, bahkan negara maju pun yang sudah teruji dengan berbagai macam krisis sebelumnya tidak mampu bertahan di tengah krisis kesehatan ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kesehatan atau ekonomi; menjadi dilema yang perlu diputuskan dengan matang. Tentu tidak untuk kepentingan saat ini saja, melainkan juga jauh ke depan. Bagi negara maju, mengutamakan kepentingan kesehatan tentu utama, karena negara tersebut sudah memiliki cadangan ekonomi yang memadai. Namun, lain cerita bagi negara berkembang: memilih salah satu menjadi seperti *trade off*. Forum G20 saat ini pun diuji kembali dengan krisis ekonomi, yang bahkan tidak hanya ekonomi, melainkan kesehatan. G20 lahir atas ketidakmampuan G7 dalam menanggulangi krisis ekonomi global. Hal itu terulang kembali saat ini dengan ujian yang lebih berat, yaitu pandemi Covid-19.

Kemampuan setiap negara dalam menanggulangi krisis ini menjadi perhatian utama. Forum-forum regional atau bahkan internasional dinilai tidak lebih efektif dibandingkan melakukan aksi di lingkup negara. G20 tidak akan mampu dalam menyelesaikan permasalahan ini jika setiap negara tegas dan berfikir efektif untuk setiap penanggulangannya. Oleh karena itu, setiap negara perlu memikirkan solusi-solusi terbaik bagi negaranya, kemudian memberikan inspirasi tersebut di kepada negara lainnya. Indonesia dapat melakukan hal tersebut, atau menerima inspirasi tersebut dari negara lain.

K. MENJADI INSPIRATOR ASIA TENGGARA

Pada bagian akhir bab ini, disampaikan sebuah renungan dan perubahan signifikan yang terjadi pada saat situasi seperti ini. Dalam kondisi ketidakpastian yang melanda dunia atau krisis global, konsep-konsep atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelum-sebelumnya dilakukan tentu akan berubah drastis. Perubahan di dapat dimulai dari kesepakatan-kesepakatan global hingga tataran agenda-agenda domestik negara.

Dengan kondisi demikian, pola hubungan kerja sama mungkin akan berubah juga. G20 sebagai model kerja sama dunia tentu diharapkan memiliki alternatif yang tepat bagi pemulihan ekonomi global saat ini. Dan Indonesia, sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang berada di G20, memiliki peluang besar untuk mengambil

Buku ini tidak diperjualbelikan.

celah ini: sebagai negara representasi Asia Tenggara yang berhasil memberikan alternatif tersebut di level kawasan.

Memainkan peran sebagai mediator untuk negara maju dan negara berkembang tentu memiliki tantangan yang berat, terlebih di situasi pandemi seperti ini. Sebuah hal yang memalukan jika menyerah pada keadaan; bukan hal yang mustahil untuk mencari alternatif dari kondisi seperti ini dan keluar menjadi salah satu pemenang yang dapat menjadi inspirator di Asia Tenggara.

Kita melihat sudah ada beberapa negara di Asia Tenggara yang mampu melakukan penanggulangan terbaiknya di tengah krisis ini, dan Indonesia terus berusaha menuju ke arah sana. Setiap negara memiliki tantangannya masing-masing. Terkhusus menjadi mediator antara negara maju dan berkembang, terlebih di tengah krisis seperti ini, menjadi inspirator di Asia Tenggara adalah langkah tepat dan aman. Menjalin hubungan dan kerja sama kemanusiaan di antara negara maju dan berkembang yang ada di Asia Tenggara akan mengembalikan sedikit demi sedikit stabilitas ekonomi negara. Di titik itulah Indonesia dapat muncul tidak hanya sebagai mediator, tetapi sebagai inspirator.

Oleh karena itu, dalam rangka berupaya menjadi inspirator Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals ke 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya untuk bangkit dan pulih dari turbulensi ekonomi diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dan elemen, dalam hal ini kerja sama antar negara. Lingkup kerja sama ini dapat dispesifikkan dalam lima kategori yaitu Keuangan, Teknologi, Pengembangan Kapasitas, Perdagangan, dan isu-isu sistemik.

Pada akhirnya, G20 hanya menjadi sekadar forum dari para negara-negara dengan ekonomi besar di dunia jika kesepakatan yang dibuat tidak benar-benar dilakukan dengan komitmen dan kesungguhan yang kuat. Merupakan sebuah kesempatan emas Indonesia bisa tergabung dalam forum ini, tetapi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendongkrak posisi Indonesia dimata dunia tentu jauh lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

penting. Harapannya, Indonesia dapat lebih meningkatkan perannya lagi dalam meluaskan kemitraan, menebar kebermanfaatan, dan menularkan semangat gotong-royong kepada negara-negara lain.

REFERENSI

Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, *6*(2). https://doi.org/10.18196/hi.62112

Arieza, U. (2019, 28 Juni). Melihat 'taji' Indonesia di antara negara raksasa G20. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628134408-532-407329/melihat-taji-indonesia-di-antara-negara-raksasa-g20

Downie, C. (2016). One in 20: The G20, middle powers and global governance reform. *Third World Quarterly, 38*(7), 1493–1510. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1229564

European Centre for Development Policy Management (ECDPM). (2014). *Indonesia as an emerging power*. https://ecdpm.org/great-insights/emerging-economies-and-africa/indonesia-emerging-power-2/ Diakses pada 20 April 2021

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia triwulan IV 2019. https://www.bappenas.go.id/files/2715/8529/3891/Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_Triwulan_IV_2019.pdf.pdf

Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia. *Populasi*, *23*(1), 1–19.

Kirton, J. (1999). What is the G20? *G20 Research Group*, *30*. www.g7utoronto.ca

Larasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, *10*(2), 155.

Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk kemajuan ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, *XIII*(1), 53.

Sekretariat Presiden. (2020). *Laporan tahunan 2020: Bangkit untuk Indonesia maju*. https://www.presidenri.go.id/laporan-tahunan-2020/

World Bank. (t.t.). GDP (current US$) – Indonesia, Korea, Rep. *World Bank Group*. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1985&locations=ID-KR&start=1960 diakses pada Februari 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XII

Peran Indonesia dalam APEC: Mendorong Kerja Sama Multilateral untuk Pembangunan Global

Binar Mentari Malahayati

Pada bulan November 2020, Indonesia beserta 20 negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) lainnya berkumpul untuk *APEC Economic Leaders' Meeting* (AELM) ke-27 yang dihadiri pemimpin negara/ekonomi anggota APEC. Pertemuan yang diselenggarakan di Malaysia ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Pimpinan (*Leaders Declaration*) yang mencakup situasi serta agenda APEC pada tahun 2020, di antaranya merupakan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan usaha peningkatan perdagangan dan investasi.

Seiring dengan komitmen yang telah diambil APEC untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat pada konferensi tersebut, negara-negara anggota APEC juga menyatakan komitmen mereka terhadap peningkatan tindakan stimulus ekonomi untuk dampingan perkembangan fiskal yang berkelanjutan serta perkembangan ekonomi negara (APEC, 2020b). Pada dokumen yang sama, terdapat juga penekanan terhadap pentingnya kolaborasi multilateral global yang konstruktif demi keberhasilan dukungan teknologi dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menangani pandemi Covid-19 dan upaya memastikan adanya perlindungan kesehatan yang holistik secara universal.

APEC merupakan organisasi regional Asia-Pasifik yang berperan sebagai forum kerja-sama internasional untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan stabil, seiring mendorong percepatan integrasi regional ekonomi Asia-Pasifik (APEC, 2020c). Forum APEC dibentuk pada tahun 1989 oleh beberapa negara yang hampir semua berlokasi di daerah Asia-Pasifik, salah satunya ialah Indonesia. Di dalam APEC, Indonesia direpresentasikan oleh Presiden. Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI, 2019), APEC memiliki manfaat yang sangat berguna bagi Indonesia, yakni: 1) membentuk kepercayaan dan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan negara mitra; 2) proyek-proyek pelatihan yang ada bisa membantu peningkatan kapasitas dan daya saing Indonesia; 3) memastikan posisi Indonesia di pasar Asia-Pasifik untuk produk ekspor unggulan Indonesia; dan 4) sebagai media peningkatan investasi Indonesia di kalangan anggota APEC. APEC memiliki Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan tiap tahun dengan lokasi negara anggota yang dirotasi dengan mekanisme tersendiri. Adapun Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT APEC dua kali: tahun 1994 di Bogor dan 2013 di Bali.

Dalam upaya global penanganan Covid-19, Indonesia mengambil sikap aktif melalui berbagai bentuk partisipasi. Salah satunya ialah kolaborasi dengan beberapa negara asing (Afrika Selatan, Australia, Inggris, Brazil, Jerman, Kanada, Maroko, Perancis, Peru, Singapura, dan Turki) melalui Covid-19 International Coordination Group (ICG), di mana Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, secara langsung menekankan dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB mengenai solidaritas global melawan Covid-19 (Kemlu RI, 2020).

Terkait dengan perkembangan fiskal yang berkelanjutan, Indonesia telah berhasil mendapatkan bantuan keuangan dari berbagai macam negara, organisasi internasional, NGO, serta sektor privat. Berdasarkan Pinandita (2020), per April 2020, Indonesia telah mendapatkan total 58 bantuan keuangan dari pihak-pihak tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Retno Marsudi juga mengatakan bahwa diplomasi Indonesia akan berlanjut pada dua fokus utama, yakni: perlindungan masyarakat dan fasilitasi kerja sama internasional. Dari fakta tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak tahun 2020, Covid-19 telah menjadi bagian dari usaha kolaboratif untuk kemajuan dan pembangunan global. Namun, apa arti penting perkembangan ini untuk hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia? Mungkinkah dorongan dari penanganan dampak Covid-19 mendukung partisipasi multilateral Indonesia dengan APEC?

Bab ini akan membahas partisipasi Indonesia dalam APEC dalam lingkup pembangunan global per tahun 2020 dan prospek hubungan internasional Indonesia ke depan. Kemajuan dan hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo juga akan ditelaah dan dengan seperlunya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya untuk mengetahui perkembangan yang telah tercapai oleh Indonesia dalam hubungannya dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDG) 17.

A. INDONESIA DAN SDGS 17

Para pemimpin dunia, disertai sekitar 193 kepala negara, berhasil mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) sebagai perwujudan kesepakatan pembangunan global pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Dokumen SDGs yang disahkan tersebut berjudul "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" (*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*). SDGs disusun dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Diperkirakan sekitar 8,5 juta suara warga di seluruh dunia berkontribusi terhadap perumusan Tujuan dan Tujuan SDGs (Infid, 2017).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah daerah yang meliputi kabupaten dan kota menjadi garda depan mengimplementasikan tujuan dan sasaran SDGs.

Sejak diadopsi tahun 2015, Indonesia telah dua kali melaporkan pelaksanaan dan capaian SDGs, yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2019 dalam bentuk *voluntary national review* (VNR). Kedua dokumen VNR tersebut mencatat prioritas tujuan yang berbeda untuk Indonesia. VNR 2017 Indonesia mencantumkan delapan tujuan prioritas negara, yakni Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, dan 17. Sementara itu, pada VNR 2019, tujuan prioritas Indonesia mengalami sedikit perpindahan menjadi Tujuan 4, 8, 10, 13, 15, dan 17. Sebagaimana dapat diamati, kedua dokumen tersebut memiliki beberapa prioritas tujuan yang konsisten dipegang oleh Indonesia, yaitu Tujuan 4 dan 17.

SDG Tujuan 17 adalah "*strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development*" yang merefleksikan tujuan untuk pengokohan realisasi kemitraan dan kerja sama dari dalam dan luar negeri demi pembangunan yang berkelanjutan global. Dari aksi Indonesia yang melibatkan target 17 sebagai bagian dari target prioritas pada kedua VNR yang lalu, dapat dimengerti bahwa kerja sama antarnegara merupakan salah satu pedoman inti dari realisasi Indonesia untuk mencapai SDGs.

Dalam VNR 2017, SDG Tujuan 17 dicantumkan sebagai lingkungan pendukung, bersama Tujuan 5 tentang kesetaraan gender, untuk mencapai tujuan akhir Tujuan 1 yakni penghapusan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Nawacita dan RPJMN 2015–2019, Indonesia turut serta membantu negara berkembang lainnya untuk mencapai SDGs dan memastikan implementasi prinsip "Tidak Meninggalkan Satu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Orang pun" di antara Negara Selatan-Selatan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi multilateral Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSST), Indonesia mengimplementasikan dua buah upaya.

Pertama, peningkatan sistem koordinasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDG pada tahun 2010 demi realisasi KSST untuk kontribusi yang berkelanjutan terhadap pembangunan nasional dan global. Tim tersebut terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini juga merupakan bentuk dari upaya Indonesia dalam mencapai Target 17.3 untuk "memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber" melalui indikator pembagian tempat dalam total anggaran domestik untuk bantuan pembangunan resmi dalam KSST. Kedua, pemastian partisipasi yang inklusif dengan melibatkan akademisi, komunitas lokal, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan sektor swasta, untuk menampung berbagai sudut pandang dan aspirasi. Indonesia juga mengharapkan agar upaya ini dapat membantu merealisasikan tujuan KSST untuk pengentasan kemiskinan.

Komitmen Indonesia untuk KSST dapat diamati melalui partisipasi Indonesia yang kian meningkat dalam program-program pelatihan yang mendukung negara-negara Asia lainnya, termasuk Afghanistan, Timor Leste, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan beberapa negara Afrika seperti Ethiopia, Ghana, dan Nigeria. Kerja sama triangular yang awalnya hanya dilakukan dengan Jepang, telah diperluas ke Jerman, Inggris, Amerika Serikat, serta Islamic Development Bank (IDB).

Menurut Bappenas (2017), kesuksesan implementasi program-program KSST dapat diamati melalui beberapa indicator sebagai berikut.

1) Tim koordinasi nasional KSST telah mengembangkan prosedur operasional standar (SOP) proses bisnis koordinasi KSST untuk meningkatkan kinerja kementerian/lembaga dalam memberikan bantuan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2) Pada periode 2000–2012, Indonesia mengorganisasi program KSST untuk negara-negara Asia, Afrika, Pasifik, dan Amerika Latin dengan alokasi budget 49,8 juta USD. Hasilnya menguntungkan untuk negara-negara Selatan, sebagaimana diharapkan.
3) Jumlah partisipan program KSST mengalami peningkatan dari 451 partisipan (2014) menjadi 652 partisipan (2015). Ke depan, jumlah partisipan KSST diproyeksikan turut meningkat seiring dengan meningkatnya alokasi budget KSST.
4) Telah dilakukan kerja sama dengan sektor swasta, akademik, dan ormas di KSST. Sebagai contoh, kerja sama dengan sektor swasta, Menteri Pertanian RI, dan Menteri Pertanian Sudan pada tahun 2014 dengan produsen traktor di Indonesia.
5) Keterlibatan dalam KSST juga membuahkan keuntungan ekonomi dan politik untuk Indonesia, seperti kerja sama perdagangan komoditas semen beku dengan Kirgizstan, serta kerja sama dengan Sudan, Madagaskar, dan Nambia dalam bidang alat dan mesin pertanian.

Di sisi lain, Tujuan 17 dipasangkan dengan Tujuan 16, terkait perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, sebagai *enabler* dalam VNR tahun 2019. Pada VNR terbaru ini, tujuan prioritas akhir Indonesia adalah Tujuan 10, yakni tentang pengurangan ketimpangan (*inequality*). Kali ini juga, partisipasi Indonesia di dalam KSST disorot oleh VNR sebagai salah satu indikator krusial Tujuan 17. Menurut Bappenas (2019), KSST merupakan kombinasi kerja sama yang berperan sebagai langkah penting untuk Indonesia menjadi lebih aktif dalam kerja sama pembangunan internasional. Indonesia berhasil menjadi *middle-income country*, salah satunya karena partisipasi aktif dalam KSST. Setelah jatuhnya pendanaan aktivitas KSST pada tahun 2016, pendanaan KSST mulai meningkat hingga pada tahun 2018 hampir kembali sama pada jumlah pendanaan tahun 2015 (Bappenas, 2019). Komitmen ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dan komunitas global dalam mengembangkan kerja sama yang konsisten pada basis prinsip keuntungan bersama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

SDG Tujuan 17 juga memiliki beberapa target yang menekankan kerja sama dalam bidang ekonomi antarnegara. Salah satunya ialah Target 17.3, yang telah diangkat pada pembahasan partisipasi Indonesia dalam hubungan KSST. Sebagai bagian dari sumber pendapatan pemerintah, *remittances* (pengiriman uang) merupakan hal yang turut patut diamati dalam bidang ekonomi suatu negara. Dapat diamati dari Bappenas (2019), sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, jumlah aliran *remittances* dari buruh migran Indonesia, relatif terhadap PDB, tidak mengalami peningkatan yang progresif. Aliran *remittances* Indonesia dalam kurun waktu tersebut hanya bergerak di sekitar 0,8% hingga 1,1%. Ada kemungkinan bahwa hal ini disebabkan oleh moratorium penyebaran dan kebijakan larangan buruh Indonesia asing di beberapa negara sejak tahun 2011. Dengan situasi tersebut potensi peningkatan jumlah aliran *remittances* optimal akan memungkinkan jika ada peningkatan tingkat produktivitas pekerja migran Indonesia di negara penerima. Salah satu usaha yang telah dilakukan Indonesia ialah pembuatan program desa migran produktif (Desmigratif) oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI) yang turut serta menyusun model bisnis mekanisme transfer uang melalui telepon genggam.

Di sisi lain, terdapat juga Target 17.5 tentang "mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk negara kurang berkembang". Sebagai negara berkembang, Indonesia bergerak mencapai target ini melalui pelaksanaan kelanjutan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tidak hanya menyediakan informasi investasi di Indonesia untuk target dalam negeri bersama instansi pemerintahan daerah, tetapi juga untuk negara asing.

Terdapat juga Target 17.13 yang mengacu pada "meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan" dan memiliki indikator *macroeconomic dashboard* yang merupakan dasbor untuk informasi makro ekonomi global dan nasional suatu negara tertentu. Indonesia telah berupaya merealisasikan target ini melalui kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Dewasa ini,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dasbor makro ekonomi Indonesia dapat diakses secara transparan oleh publik melalui akun resmi di Instagram dan situs daring resmi.

B. POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN JOKOWI

Prinsip politik luar negeri Indonesia merupakan prinsip dasar konstan yang terus menjadi dasar kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan variabel penting dalam hubungan internasional karena variabel tersebutlah yang menentukan cara suatu negara berinteraksi dan bereaksi terhadap situasi di dunia internasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip politik luar negeri yang dipegang adalah prinsip bebas-aktif. Hal tersebut bukan berarti politik luar negeri dilakukan secara bebas dan terus menerus. Melainkan, prinsip tersebut mencakup dua karakteristik, yakni: bebas dalam arti Indonesia tidak memihak ke suatu kubu karena pengaruh kekuatan maupun kekuasaan tertentu, serta aktif dalam arti Indonesia terus berjuang untuk "kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di dunia" (Haryanto, 2014). Walaupun kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia mungkin memiliki perbedaan di tiap masa pemerintahan, prinsip tersebut berdikari dan tetap menjadi basis dari kebijakan yang telah dirancang.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo berhasil melanjutkan posisinya sebagai presiden untuk masa jabatan yang kedua. Pada waktu yang bersamaan, situasi politik luar negeri Indonesia juga dibuka dengan status keanggotaan tidak tetap di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk kali ke empat. Hal ini patut diketahui karena terakhir kali Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memiliki keanggotaan tidak tetap di DK adalah periode tahun 2007–2008 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Indonesia juga pernah memiliki keanggotaan tidak tetap pada periode tahun 1974–1975 dan 1995–1996.

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2019), di masa periode keanggotaan DK tersebut, Indonesia menempatkan 4 isu prioritas, yakni: 1) perdamaian dan stabilitas global; 2) membangun sinergi antar-organisasi regional untuk menopang perdamaian dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

stabilitas internasional; 3) meningkatkan kerja sama antarnegara dan DK untuk melawan terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme; serta 4) mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Isu khusus yang dipilih oleh Indonesia pada saat tersebut adalah isu Palestina. Adapun topik utama pembahasan DK periode 2019–2020 yaitu penjaga perdamaian perempuan (*female peacekeepers*). Mengikuti topik utama ini, Indonesia mengeluarkan beberapa inisiatif yang salah satunya mencakup pembahasan isu *women, inclusivity and the state of democracy* pada Bali Democracy Forum, serta penyelenggaraan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) *Women Interfaith Dialog* di Jakarta (Kemlu RI, 2020).

Inisiatif yang telah diambil Indonesia untuk merealisasikan prioritas DK periode tersebut merefleksikan rasa syukur Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK 2019–2020 sebagaimana telah diupayakan sejak tahun 2015 pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2015 tersebut, Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia "tidak akan menurunkan *engagement*-nya dengan dunia internasional" (Kemlu RI, 2015). Dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri tahun 2015, Indonesia dinyatakan berhasil membangun 18 kemitraan strategis/komprehensif dengan negara sahabat. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia tampak meletakkan fokus hubungan internasional pada hubungan bilateral dibanding hubungan multilateral maupun trilateral. Hal ini bisa juga dapat diamati melalui rencana Indonesia untuk mengembangkan kerja sama maritim dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif pada tingkat bilateral, dan penyelesaian draft "*Bilateral Investment Treaty*" untuk rezim perjanjian baru investasi Indonesia.

Terlepas dari maraknya kolaborasi bilateral Indonesia periode 2015–2019, Indonesia tampak memperluas lingkup kolaborasi melalui bentuk kolaborasi di luar kerja sama bilateral pada tahun 2019. Selain dari konsultasi konsuler dengan Australia, India, Iran, Uni Eropa, Jepang, dan Korea, Indonesia juga menyusun kerja sama trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina demi peningkatan keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Sebagai tambahan, kerja sama multi-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lateral Indonesia kali ini tidak hanya tampak pada partisipasi aktif dalam ASEAN, tetapi juga pada pengambilan inisiatif Indonesia dalam menjadi anggota tidak tetap DK periode 2019–2020.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga tampak mengeluarkan beberapa pernyataan menyangkut kerja sama multilateral global di Debat Umum Sesi ke-75 Sidang Umum PBB virtual pada 23 September 2020. Di dalam pidato tersebut, beliau menekankan pentingnya realisasi kerja sama multilateral global dalam situasi pandemi Covid-19. Berikut kutipan tentang multilateralisme di dalam pidato Presiden Joko Widodo:

> *"... Amidst current global situation, I would like to convey several ideas. First, the UN should continue to improve its role, carry out reforms, revitalization and efficiency. The UN should be able to prove that multilateralism delivers, including in times of crisis. The UN should be more responsive and effective in solving various global challenges. And we all bear a responsibility to continue to strengthen the UN so that the UN remains relevant and increasingly contributive, in line with the challenges of the times. The United Nations is not just a building in New York City but a common goal and commitment of all nations to achieve world peace and prosperity for future generations. Indonesia has an unshakable faith in the UN and multilateralism. Multilateralism is the only way that can provide equality ...."* (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, 2020)

Perlu dimengerti bahwa dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo tidaklah bermaksud untuk menantang efektivitas kerja sama multilateral global secara hampa. Melainkan, beliau sekali lagi menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara yang mendukung kerja sama multilateral dan menghimbau semua penduduk global untuk merealisasikan kerja sama multilateral dalam situasi pandemik dewasa ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. PERAN INDONESIA DALAM APEC: MENUTUP BOGOR GOALS 2020, MENATAP PUTRAJAYA VISION 2040

Di balik riuh-rendah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, ada beberapa hal yang patut dirayakan dalam konteks hubungan negara Indonesia dengan APEC. Pertama, *Bogor Goals* yang disusun pada tahun 1994 di Bogor telah berhasil mencapai puncaknya, yakni pada tahun 2020. Hal ini dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) virtual APEC 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. KTT virtual tahun 2020 mengangkat tema "*Optimising Human Potential Towards a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot. Prioritise. Progress*" yang "mencerminkan harapan akan ketahanan, kelincahan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Asia-Pasifik melalui konsep kesejahteraan bersama selama pandemi Covid-19" (Presiden Jokowi hadiri, 2020).

Bogor Goals merupakan kumpulan target yang diciptakan oleh APEC bagi negara anggota menuju perdagangan bebas dan terbuka di lingkup Asia-Pasifik melalui pengurangan hambatan perdagangan, serta promosi aliran keluar masuk barang, jasa dan modal secara bebas (Isa, 2017). Dari target-target tersebut, *Osaka Action Agenda* disusun pada tahun selanjutnya, 1995, sebagai bentuk realisasi Bogor Goals. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang (1995), isi dari Osaka Action Agenda memiliki beberapa fokus, di antaranya: tarif, tindakan non-tarif, jasa, serta investasi. Tiap area fokus tersebut dilengkapi dengan tujuan, pedoman, dan rancangan aksi kolektif. Sebagai contoh, untuk area tarif, APEC memiliki tujuan "ekonomi-ekonomi APEC mencapai perdagangan bebas dan terbuka di area Asia-Pasifik melalui: pengurangan tarif progresif dan pemastian transparansi rezim tarif ekonomi-ekonomi APEC". Contoh aksi kolektif dari bagian tarif Osaka Action Plan merupakan pembuatan pangkalan data tarif untuk membantu tugas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam bidang tersebut. Di dalam makalah Osaka Action Agenda, dituliskan bahwa akan ada laporan tahunan tiap ekonomi anggota APEC dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nama Laporan Perkembangan Bogor Goals APEC 2020 (*APEC's Bogor Goals Progress Report*).

Menurut laporan pengecekan fakta *Bogor Goals* 2020, Indonesia berhasil meraih pencapaian atau kemajuan signifikan di beberapa bidang. Salah satu bidang tersebut adalah investasi. Hal ini terkait dengan Target 17.3 rencana pembangunan global SDGs mengenai investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*/FDI). Berdasarkan APEC (2020e), penanganan Indonesia terhadap rezim investasi langsung asing telah dirampingkan pada beberapa area yaitu kerangka regulasi, daftar investasi negatif, dan sistem perizinan bisnis/investasi. Selain itu, upaya Indonesia dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih transparan juga diakui sebagai kemajuan signifikan oleh APEC, di mana terjadi peningkatan jumlah institusi dari 135 menjadi 351 institusi yang telah menyerahkan total 263.469 dokumen hukum untuk diintegrasikan ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Semua regulasi terkait tarif juga telah tersedia untuk akses publik melalui situs daring JDIH pada tahun 2019. Meskipun terdapat cukup banyak jumlah perkembangan dari sektor tarif Indonesia, APEC tidak memasukkan perkembangan-perkembangan tersebut ke dalam daftar capaian yang perlu dicatat.

Sebagai anggota APEC di saat periode Bogor Goals 2020, Indonesia turut serta mengumpulkan laporan Rencana Aksi Individu (*Individual Action Plan*) tiap 2 tahun menuju 2020 yang dapat diakses oleh masyarakat publik secara *online*. Pada laporan Rencana Aksi Individu 2020, Indonesia menyatakan mendukung sistem perdagangan multilateral di kawasan Asia Pasifik dalam upaya meningkatkan perkembangan sektor perdagangan dan investasi sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai target Bogor Goals 2020 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). Berdasarkan laporan yang sama, sejak tahun 2018, Indonesia berhasil memfinalisasi beberapa negosiasi perdagangan yang mencakup persetujuan bilateral dan regional yang memiliki dampak terhadap pengurangan tarif. Persetujuan-persetujuan tersebut di antaranya ialah: ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sejak Agustus 2019;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, berlaku per 1 Maret 2018 menjelang pemberlakuan regulasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.19/PMK.101/2018 yang disahkan pada 15 Februari tahun tersebut; ASEAN-India Free Trade Area (ASEAN-India FTA); Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) per 31 Juli 2019; Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA); dan *MoU* (*Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman) Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products per 21 Februari 2019.

Pada KTT APEC 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo juga turut mengesahkan Deklarasi Kuala Lumpur (*Kuala Lumpur Declaration*) dan Putrajaya Vision 2040 bersama para pemimpin APEC. Kedua-puluh satu pimpinan ekonomi APEC tersebut turut mengeluarkan Deklarasi Kuala Lumpur pada KTT virtual APEC ke-27 yang berpusat di Kuala Lumpur. KTT virtual APEC 2020 mencakup beberapa prioritas yang didasarkan pada situasi pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, antara lain: melawan dan mengurangi dampak COVID-19, terutama terhadap sistem ekonomi Asia-Pasifik; mengembangkan sistem naratif perdagangan dan investasi; mengembangkan partisipasi ekonomi inklusif melalui ekonomi digital dan teknologi; mendorong keberlanjutan yang inovatif dan inklusif; memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan (APEC, 2020d). Indonesia, sebagai salah satu ekonomi APEC, mengakui pentingnya peran dan kepentingan kebijakan stimulus dalam proses pemulihan ekonomi dan pembuatan lapangan kerja selama masa pandemi. Upaya ini direalisasikan melalui program bansos (bantuan sosial), serta subsidi upah/gaji pekerja yang terdampak pandemi per pertengahan tahun 2020. Ketiga prioritas Deklarasi Kuala Lumpur selanjutnya berhasil dicakup menjadi satu kesatuan visi, yaitu Visi Putrajaya atau *Putrajaya Vision*.

Putrajaya Vision merupakan pengganti Bogor Goals yang berperan sebagai visi dari APEC. Seusai KTT virtual APEC 2020, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengatakan, "Putrajaya Vision 2040 merupakan kelanjutan dari Bogor Goals yang telah mencapai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tenggatnya pada tahun 2020 ini. Visi baru ini akan menjadi landasan selanjutnya kerja sama APEC untuk 20 tahun ke depan" (Menlu: KTT APEC, 2020). Putrajaya Vision memiliki visi yaitu komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040 untuk kemakmuran semua orang dan generasi mendatang. Untuk mencapai visi tersebut, Putrajaya Vision mengambil tiga fokus: 1) penguatan sistem perdagangan dan investasi, 2) pengembangan inovasi dan digitalisasi, serta 3) perkembangan yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Sama seperti dengan pendahulunya, Bogor Goals 2020, Putrajaya Vision memberi perhatian khusus untuk sistem perdagangan dan investasi. Sementara itu, Bogor Goals mengusahakan untuk pengurangan halangan (*barriers*) untuk perdagangan dan investasi, Putrajaya Vision memberikan urgensi khusus untuk integrasi ekonomi dengan cara yang *market-driven* dan juga melalui agenda Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). Seperti sebelumnya, APEC menekankan kesepakatannya terhadap peraturan-peraturan yang telah disusun oleh World Trade Organization (WTO) dalam mempromosikan stabilitas perdagangan global. Adapun topik yang baru memiliki kategori tersendiri yang menjadi salah satu fokus utama APEC dengan Putrajaya Vision adalah pengembangan inovasi dan digitalisasi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan bisnis dalam berpartisipasi di ekonomi global yang sudah saling terhubung, APEC hendak menciptakan lingkungan yang turut mendukung inovasi dan meningkatkan produktivitas dan dinamisme ekonomi (APEC, 2020d). Hal ini juga disertai dengan upaya memperkuat kepercayaan konsumen dan bisnis dalam transaksi digital dengan memperkuat infrastruktur digital. Sebelumnya, dalam Bogor Goals 2020, pengembangan inovasi jatuh di bawah fokus fasilitasi bisnis, tanpa keterangan tentang usaha digitalisasi. Namun, seiring perkembangan teknologi yang meningkat secara eksponensial sejak tahun 2000, para pimpinan APEC menyadari bahwa peran teknologi dan dunia digital berhak menjadi area fokusnya sendiri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain itu, APEC juga berinisiatif mendorong reformasi struktural untuk pemberdayaan perempuan pada tahun 2020. Inisiatif ini selaras dengan fokus utama DK periode 2019/2020 yang membawa isu inklusivitas proses demokrasi dan penjaga perdamaian untuk perempuan, di mana DK menyorot fokus untuk partisipasi perdamaian dan demokrasi, APEC menyorot fokus untuk partisipasi ekonomi perempuan. Berdasarkan APEC (2020a), angka partisipasi angkatan kerja perempuan telah menurun di beberapa waktu terakhir, dan 'kurang dari setengah ekonomi APEC telah menetapkan kebijakan untuk persamaan gaji perempuan dan laki-laki'. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu dari kendala untuk mendorong partisipasi perempuan ke dalam dunia ekonomi. Laporan Kebijakan Ekonomi APEC 2020 (AEPR) menumpukan proses reformasi struktural ekonomi dengan kebijakan yang tepat berbasis data ilmiah.

Reformasi struktural berbasis gender juga telah diupayakan oleh Indonesia pada dekade terakhir sebagai anggota APEC dalam bentuk inisiatif Desa Damai (*peace village initiative*) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inisiatif Desa Damai merupakan program yang diinisiasi dan dikawal oleh Wahid Foundation dengan tujuan menempatkan perempuan di posisi pemimpin dalam upaya menjaga perdamaian di lingkup komunitas lokal. Bersama dengan UN Women, Wahid Foundation membuka berbagai workshop desa/kampung damai pada tahun 2018 yang mengundang sekitar 60 anggota komunitas lokal sekitar pulau Jawa dalam rangka membuat desa/kampung mereka lebih damai (Davis, 2018). Tema utama dalam workshop tersebut merupakan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan perdamaian, konsep yang sebelumnya asing di dalam lingkup tersebut. Dalam konteks Desa Damai, perdamaian mengacu pada toleransi antar komunitas, terutama agama dan kepercayaan. Hal ini merupakan poin penting bagi Indonesia sebagai negara yang multikultural dan majemuk.

Latar belakang dari program ini sendiri ialah berdasarkan survei organisasi Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme telah meningkat di Indonesia (UN Women, 2019).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun program ini tidak dibuat eksklusif untuk perempuan, per Agustus 2019, jumlah perempuan yang berpartisipasi di kelompok kerja Kampung Damai adalah 40% (UN Women, 2019). Upaya peningkatan partisipasi perempuan ini pun bukanlah hasil satu negara Indonesia saja, melainkan kerja sama dengan organisasi internasional (UN Women) dan dibiayai oleh pemerintah Jepang. Melalui upaya ini, dapat dimengerti bahwa hubungan Indonesia-Jepang yang salah satunya telah dibina oleh partisipasi mutual di APEC, memiliki pengaruh yang signifikan.

Kembali pada laporan kebijakan ekonomi APEC 2020, diterangkan bahwa tantangan dan hambatan utama yang dialami Indonesia dalam usaha pemberdayaan ekonomi perempuan adalah karena perempuan memegang tanggung jawab pengasuhan anak dan keluarga, serta budaya patriarkal yang seringkali mengakibatkan diskriminasi gender. Menurut Woetzel dkk. (2018), ekspektasi masyarakat terhadap perempuan berasal dari konsep "kodrat" yang merujuk pada keharusan dan kelayakan perempuan untuk memegang peran "pengasuh". Melalui kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang rendah dapat ditelusuri sebagai hasil yang bersangkutan pada pernikahan dan memiliki anak dibawah 2 tahun (APEC, 2020a).

D. MASA DEPAN KERJA SAMA INDONESIA DAN APEC

Kerja sama internasional bukanlah konsep yang asing untuk Indonesia. Sejak masa kolonial, kerja sama internasional telah menjadi praktik hingga mengantar Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tekad untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia". Oleh karena itulah Indonesia menjadi anggota organisasi-organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan yang ada di dalamnya seperti WTO, WHO, ILO dan lain-lain serta Organisasi kerja sama Islam (OKI), ASEAN, OPEC, APEC dan lain-lain dengan prinsip yang kita kenal dengan politik bebas-aktif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif dalam kerja sama ekonomi, Indonesia turut mendirikan dan menjadi anggota aktif dari APEC pada tahun 1989, dan menjadi tuan rumah KTT pada tahun 1994 di Bogor. Terakhir, Indonesia turut serta mengesahkan dan memberi komitmen dalam pengadopsian visi APEC terbaru, yakni Visi Putrajaya atau *Putrajaya Vision 2040*, sehubungan dengan berakhirnya visi *Bogor Goals 2020*. Dengan pengadopsian ini, secara langsung Indonesia telah setuju untuk memberikan komitmen kuat untuk tujuan integrasi ekonomi Asia-Pasifik dalam wadah APEC.

Keterlibatan Indonesia dengan dunia internasional pun tidak berhenti pada lingkup Asia Pasifik saja. Sesuai dengan tema dan prioritas APEC 2020 yang bertumpu pada konsep reformasi struktural untuk pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan, serta posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK periode 2019–2020, Indonesia telah membuktikan bahwa komitmen yang dimiliki Indonesia merupakan komitmen yang kokoh dan proaktif, salah satunya melalui Inisiatif Desa Damai (*Peace Village Initiative*) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia.

Kerja sama multilateral juga menjadi prioritas Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs. Tujuan 17 menjadi landasan konstan Indonesia untuk mencapai target utama SDGs. Karena hal tersebut, Indonesia memberikan komitmen penuh untuk kerja sama dan kemitraan, dengan penekanan pada kerja sama luar negeri. Dengan peran aktif yang diambil Indonesia di KSST, hubungan multilateral Indonesia dengan beberapa negara Asia dan Afrika tampak membuahkan hasil positif bagi perkembangan ekonomi pada semua pihak.

Dewasa ini, dengan maraknya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, ketergantungan satu sama lain, dalam konteks negara, bukanlah hal yang dapat dihindari. Selayaknya yang telah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Debat Umum PBB, kerja sama multilateral menjadi titik fokus strategi penanganan dan pengurangan dampak negatif dari pandemi ini.

Sebagai sebuah kesimpulan, dapat dikatakan bahwa selama ini pemerintah telah, sedang, dan akan terus memainkan peran penting

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam kerja sama multilateral di berbagai bidang dan tingkatan. Kerja sama tersebut telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam percepatan pencapaian agenda-agenda pembangunan. Sebaliknya, Indonesia juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian agenda-agenda global. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan situasi global dan pengalaman kerja sama internasional tersebut, Indonesia perlu terus melanjutkan, memperkuat dan memperluas kerja sama multilateral untuk tahun-tahun ke depan. Kerja sama multilateral ini dilakukan tidak hanya demi mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, tetapi juga untuk turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

REFERENSI

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020a). *APEC Economic Policy Report 2020 Structural Reform and Women's Empowerment*. https://www.apec.org/Publications/2020/11/2020-APEC-Economic-Policy-Report

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020b). *2020 Leaders' Declaration*. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020c). *About APEC*. Asia-Pacific Economic Cooperation. https://www.apec.org/about-us/about-apec

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020d). *APEC Putrajaya Vision 2040*. APEC. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm/Annex-A

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020e). *Fact sheet on Individual Efforts Made towards the Achievement of the Bogor Goals*. https://www.apec.org/-/media/Files/AboutUs/AchievementsBenefits/2020/Fact-Sheets/Indonesia-Fact-Sheet-Template.docx?la=en&hash=04F81AE65634B3C6B38769C71C4E95CC13EC2D17

Bappenas. (2017, June 14). *Voluntary national review (VNR): Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world*. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25469INDONESIA_VNR_PPT.pdf

Bappenas. (2019, June 13). *Voluntary national reviews (VNR): Empowering people and ensuring inclusiveness and*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

equality. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23803INDONESIA_Final_Cetak_VNR_2019_Indonesia_Rev2.pdf

Davis, L. (2018, 22 Oktober). In Indonesia, women-led Peace Villages discuss ways to move their vision forward. *UN Women | Asia and the Pacific*. https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/10/ways-to-move-their-vision-forward

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2020). *Individual Action Plan Update for Indonesia for 2020.* https://www.apec.org/-media/Files/AboutUs/AchievementsBenefits/2020/IAP/Indonesia-IAP-Update.docx?la=en&hash=238CE9D97E156B51ACDE017BF1A2CA3EDA023776

Haryanto, A. (2014) Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia: Perspektif teori peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 4*(2), 17–27. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/165

Menlu: KTT APEC 2020 hasilkan Dokumen Visi 2040 & Deklarasi Kuala Lumpur. (2020, November 21). *Sekretariat Kabinet Republik Indoensia*. https://setkab.go.id/menlu-ktt-apec-2020-hasilkan-dokumen-visi-2040-deklarasi-kuala-lumpur/

Infid. (2017). *Apa itu SDGs*. https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu

Isa, T. (2017). *BOGOR GOALS the way forward* [PowerPoint slides]. Pacific Economic Cooperation Council. https://www.pecc.org/resources/regional-cooperation/2435-bogor-goals-the-way-forward/file#:~:text=Bogor%20Goals%20in%20brief,and%20capital%20among%20APEC%20economies.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia [@Kemlu_RI]. (2015, 8 Januari). *Indonesia tidak akan menurunkan engagement-nya dengan dunia internasional - Menlu #PPTM2015* [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Kemlu_RI/status/553032942700597250

Kementerian Luar Negeri Jepang. (1995). *MOFA: The Osaka Action Agenda*. https://www.mofa.go.jp/policy/economy/apec/1995/agenda.html

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2020*. https://kemlu.go.id/portal/en/read/946/view/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2020

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB.* https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). *Asia Pacific Economic Cooperation*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, Apr. 8). *Menlu RI tekankan pentingnya kemitraan dan sinergi dalam telekonferensi Covid-19 International Coordination Group*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1182/view/menlu-ri-tekankan-pentingnya-kemitraan-dan-sinergi-dalam-telekonferensi-covid-19-international-coordination-group

Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2020, September 23). *Speech of the President of the Republic of Indonesia on General Debate of the 75th Session United Nations General Assembly (Virtually) Wednesday, 23 September 2020 at the Merdeka Palace, Jakarta*. https://setkab.go.id/en/speech-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-on-general-debate-session-of-the-75th-united-nations-general-assembly-virtually-wednesday-23--september-2020-at-the-merdeka-palace-jakarta/

Pinandita, A. (2020). Indonesia receives 58 foreign aid packages for COVID-19 relief: Foreign Minister. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/09/indonesia-receives-58-foreign-aid-packages-for-covid-19-relief-foreign-minister.html

Presiden Jokowi hadiri KTT APEC 2020 secara virtual. (2020, November 20). *Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden*. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-hadiri-ktt-apec-2020-secara-virtual/

UN Women. (2019). *The Peace Village Initiative: Women leading peace In Indonesia*. https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/11/ap-peace-village-concept-brief_28aug19-compressed.pdf?la=en&vs=1444

Woetzel, J., Madgavkar, A., Sneader, K., Tonby, O., Diaan-Yi, L., Lyndon, J., Sha, S., Krishnan, M., Ellingrud, K., & Gubieski, M. (2018). The power of parity: Advancing women's equality in Asia Pacific. *McKinsey Global Institute, McKinsey & Company*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-asia-pacific

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB XIII

Diplomasi Aktivis à la Indonesia: Menyongsong Indonesia Emas 2045

Radityo Dharmaputra

Buku ini bermula dari hipotesis bahwa untuk merealisasikan Indonesia Emas 2045, pemenuhan target-target Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pilihan isu *niche diplomacy* merupakan sebuah langkah yang dapat diambil oleh Indonesia. Melalui bab-bab sebelumnya, telah dievaluasi peran dan perilaku global Indonesia, baik di level hubungan bilateral dengan negara maju, dengan negara *middle-power* lainnya, dengan negara berkembang, maupun di forum-forum multilateral. Beberapa pola umum bisa ditarik dari penjelasan masing-masing penulis di setiap bab. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana Indonesia masih berfokus pada bantuan internasional, baik dalam bentuk investasi finansial maupun pengembangan kapasitas domestik, dalam hubungannya dengan negara-negara yang lebih maju seperti AS, Tiongkok, Australia, dan Uni Eropa. Walaupun memang dikaitkan dengan salah satu target SDGs yang menekankan pentingnya kemitraan dengan negara-negara "Utara" (atau negara yang sudah maju secara ekonomi), yang menarik adalah Indonesia tidak (atau belum) memainkan perannya sebagai wakil negara-negara berkembang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketika berhubungan dengan negara maju, Indonesia seakan kembali menjadi negara berkembang yang masih membutuhkan bantuan.

Misalnya saja, dalam tulisannya di Bab 2, Pasha Aulia Muhammad berargumen bahwa kerjasama Indonesia dengan AS masih berfokus pada keinginan Indonesia untuk mendapatkan bantuan luar negeri dari AS, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan ekonomi. Contoh yang diberikan, misalnya, menunjukkan bagaimana Indonesia diuntungkan dengan adanya bantuan AS berupa beasiswa bagi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, peluang pembangunan *spaceport* SpaceX di Indonesia juga menunjukkan masih berfokusnya upaya Indonesia pada peningkatan kapasitas untuk menjadi negara yang maju secara ekonomi. Justru menarik adalah argumen Muhammad bahwa Indonesia bisa mengambil keuntungan dengan menjadi alternatif tempat investasi bagi AS di saat berlangsungnya konflik dagang AS-Tiongkok. Argumen ini sejalan dengan salah satu strategi diplomasi ekonomi dalam Renstra 2020–2024 milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu, 2020, 93), yang menekankan pemanfaatan peluang ekonomi, perdagangan dan investasi dari persaingan dagang Tiongkok dan AS. Dari sini, peran yang nampak justru peran Indonesia sebagai *tertius gaudens*, meminjam konsep Schweller (2017, 5) untuk menunjukkan negara *middle-power* yang membenturkan negara-negara besar demi kepentingannya sendiri.

Hal yang kontras justru tampak dalam relasi Indonesia dengan Tiongkok. Artikel Ahmad Hidayat dan Kurnia Trisno Yudhonegoro (Bab 3) menunjukkan bahwa posisi Tiongkok yang tidak jelas (sesama negara "Selatan" atau asimetris "Utara-Selatan") berdampak pada dualitas posisi Tiongkok di mata Indonesia. Di satu sisi, Tiongkok dianggap partner kerja yang bisa saling bekerja demi kemajuan bersama. Di sisi lain, Tiongkok dianggap juga (terutama karena adanya beban sejarah problem etnis Tionghoa) sebagai aktor yang menekan dan mencoba memanfaatkan Indonesia. Cara pandang ini tentu berbeda dengan cara Indonesia melihat AS. Meminjam (lagi) konsep Schweller (2017), peran yang dimainkan Indonesia dalam relasinya dengan Tiongkok ini lebih dekat dengan peran *kingmaker*, yang ditunjukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk memberikan keuntungan pada satu pihak (dalam sebuah kontestasi polar di kawasan). Meskipun demikian, usulan Hidayat dan Yudhonegoro agar Indonesia mencoba menyeimbangkan posisi Tiongkok di kawasan, baik dengan menguatkan peran Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) maupun meningkatkan hubungan dengan aktor besar lain (seperti AS maupun Uni Eropa) bisa jadi justru mengkonfirmasi cara pandang lain khas *middle-power*, yaitu *balancer* atau *stabilizer* (Jordaan, 2003; Schweller, 2017). Peran untuk menjaga keseimbangan kawasan ini selama ini bisa dimainkan dengan baik oleh Indonesia, terutama melalui ASEAN.

Sementara itu, menilik kasus Australia—dibahas di Bab 4 oleh Fauziah Mayangsari—kembali berorientasi pada pemenuhan kepentingan Indonesia dalam kaitannya dengan bantuan peningkatan kapasitas masyarakat dan komunitas lokal ataupun bantuan teknis (terutama di bidang teknologi dan inovasi). Dalam konteks ini, Indonesia mengedepankan kepentingan domestiknya daripada penguatan kapasitas global maupun promosi peran/perilakunya sebagai negara maju. Akan tetapi, banyak program yang justru sejalan dengan prinsip perilaku "warga dunia yang baik". Misalnya saja, dalam program MAMPU kerjasama Indonesia-Australia, program pemberdayaan perempuan yang diusung dalam SDGs menjadi salah satu topik utama.

Diplomasi Indonesia menjadi menarik ketika target mitranya bukan lagi negara besar dan maju, tetapi justru negara-negara "Selatan". Tiga kasus (Palestina, ASEAN, dan Pasifik Selatan) menjadi fokus utama kerjasama Indonesia dengan negara-negara berkembang. Berbeda halnya dengan relasi Indonesia-negara maju, diplomasi Indonesia ke negara-negara berkembang memiliki dua karakteristik kunci. Yang pertama, Indonesia sangat aktif dan menjadi donor atau negara pemberi bantuan. Bila dikaitkan dengan SDGs 17, maka Indonesia mendorong kemitraan global dengan cara menjadi partner utama. Kondisi ini mengafirmasi status Indonesia yang tidak lagi sebatas negara berkembang, tetap sudah menjadi *emerging middle-power*. Misalnya saja, di Bab 5, Irfan Afendi mengetengahkan isu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bantuan kemanusiaan dan kesehatan dari Indonesia pada korban Covid-19 di Palestina. Sementara itu, di Bab 7, Muhammad Zidane Fathurrahman juga menunjukkan sejauh mana Indonesia aktif memberikan bantuan luar negeri di kawasan Pasifik Selatan. Kedua contoh kasus tersebut menunjukkan aktivisme Indonesia, tidak saja sebagai perwakilan negara-negara berkembang di Asia-Pasifik (yang berusaha memberikan corong suara bagi kepentingan mereka), tetapi juga memainkan peran sebagai warga dunia yang baik. Yang kedua, dalam konteks diplomasi Indonesia di Asia Tenggara, ASEAN justru menjadi kendaraan utama Indonesia untuk meningkatkan pengaruh di kawasan. Ini sebetulnya sejalan dengan argumen Jordaan (2003) bahwa *emerging middle-power* menjadi aktor aktif di kawasan yang juga mendorong integrasi regional. Penjelasan Muhammad Riefat Dhaniswara Arya Perkasa di Bab 6 menunjukkan dengan gamblang bagaimana Indonesia menggunakan kawasan Asia Tenggara (dan ASEAN) sebagai alat penyeimbangan kekuatan di kawasan, lagi-lagi menggarisbawahi peran sebagai *stabilizer* dari negara *middle-power*.

Aspek *middle-powership* dari Indonesia yang terkait dengan peran dan perilaku demi penguatan status sebagai negara berpengaruh di kawasan pada 2045 semakin terlihat nyata ketika pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan organisasi internasional dan isu-isu global. Bab 8 sampai 12 menelaah bagaimana Indonesia memainkan peranan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik dalam isu pengiriman pasukan perdamaian, perdamaian Israel-Palestina, isu pengungsi, maupun di organisasi internasional lain seperti World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan G20. Di sinilah peran dan perilaku Indonesia bisa begitu terlihat, terutama dalam kaitannya dengan enam kriteria Efstathopoulos (2018) maupun peran-peran lainnya yang sudah dijelaskan di bagian prolog.

Artikel Ibrahim Arfah di Bab 8, misalnya, menekankan aktivitas Indonesia selama dua tahun (2019–2020) bergabung menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mampu memosisikan diri sebagai warga dunia yang baik (terbukti melalui resolusi DK PBB tentang peran perempuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam pasukan perdamaian), aktif di forum multilateral (bahkan sempat menjadi presiden DK), mencoba untuk memimpin upaya resolusi konflik (lewat beberapa inisiatifnya dan usulan pertemuan terkait isu Palestina), dan bahkan menunjukkan ide kreatif melalui *sofa talk*. Selain itu, sebetulnya jelas dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di masa kampanye keanggotaan DK PBB, bahwa fokus Indonesia adalah isu peran perempuan dalam pasukan perdamaian dan perdamaian di Palestina. Fokus pada hanya dua hal ini mengilustrasikan *niche diplomacy* Indonesia. Sementara itu, keberhasilan Indonesia mendorong kecaman terhadap pemukiman ilegal Israel di DK PBB menunjukkan kemampuan membangun koalisi, sembari menunjukkan sikap revisionisnya dengan berseberangan/menentang AS. Walaupun demikian, komitmen terhadap perannya sebagai pendukung multilateralisme dan tatanan global jelas tampak dari upaya Indonesia untuk juga menjadi wakil ketua Komisi Palestina PBB.

Di saat yang sama, peran Indonesia menjadi tampak bermasalah dan kurang optimal di kasus pengungsi. Artikel Annisa Sekaringrat di Bab 9 menghadirkan beberapa strategi Indonesia merespons kasus pengungsi Palestina maupun Rohingya, dan menggarisbawahi kekurangan serta ketidaktepatan strategi dari Pemerintah Indonesia. Misalnya saja, Indonesia belum mampu menjadi suara dan perwakilan dari negara-negara berkembang dalam skema berbagi beban pengungsi. Indonesia juga belum bisa memainkan peran aktif di ASEAN maupun di Komisi/Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam kaitannya dengan penyelamatan pengungsi. Persoalan lain dalam konteks pengungsi ini ternyata terkait dengan kurangnya kapabilitas Indonesia untuk menjadi negara tujuan pengungsi (atau bahkan untuk menjadi negara singgah). Padahal, isu pengungsi ini adalah salah satu isu krusial di masa depan. Bagaimana lantas Indonesia hendak menjadi negara berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik, kalau Indonesia tidak mampu memberikan contoh di level domestik, tidak mampu bekerjasama secara efektif dengan negara mitra seperti Australia, dan tidak mampu menjadi perwakilan bagi negara berkembang di institusi internasional?

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Aktivisme Indonesia di forum internasional diakui dalam penjelasan Annisa Pratamasari di Bab 10 mengenai WTO. Indonesia, misalnya, terlibat aktif dalam banyak koalisi seperti di G33, G20, maupun CAIRNS Group. Misalnya, dalam koalisi G20, Indonesia ikut memperjuangkan reformasi aturan perdagangan produk pertanian, sebagai refleksi perilaku revisionis dan perannya sebagai suara negara berkembang. Persoalannya, walaupun sudah aktif, Indonesia belum menjadi inisiator dalam koalisi-koalisi yang diikutinya. Selain itu, Indonesia juga belum mampu menjalankan peran sebagai perwakilan suara negara berkembang maupun menjadi *coalition-builder*, karena Indonesia baru bergabung dengan koalisi-koalisi itu sebagai pengikut saja dan datang belakangan. Pratamasari juga mengingatkan bahwa Indonesia belum mampu menggerakkan integrasi kepentingan dan diplomasi ASEAN di WTO, sehingga negara-negara ASEAN masih berjalan sendiri-sendiri dengan koalisi masing-masing. Lagi-lagi, peran Indonesia secara regional belum terlihat di sini.

Pola yang agak berbeda, tetapi dengan nuansa yang serupa, muncul dari analisis Elmo Juanara di Bab 11, yang menelaah bagaimana Indonesia berperan di organisasi G20. Di kasus ini, peran *bridge builder* yang diutarakan Karim (2018) menjadi mengemuka, dikarenakan fakta bahwa G20 adalah forum kolaborasi antara negara-negara *great power* seperti AS dan Tiongkok; *major power* seperti negara-negara Uni Eropa (Prancis, Jerman, Italia), Inggris, Rusia, dan Jepang; serta kombinasi negara *middle-power* tradisional (Kanada dan Australia) dengan *emerging middle-power* seperti Argentina, Brazil, India, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia. Sebagaimana disampaikan Juanara, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara di G20, lagi-lagi menggarisbawahi peran Indonesia sebagai pemimpin regional yang mewakili kepentingan negara-negara di Asia Tenggara. Persoalannya, Indonesia selama ini berperan sebagai mediator saja, bukan sebagai inisiator. Hal serupa sebetulnya juga terlihat di WTO, ketika Pratamasari (di bab sebelumnya) berargumen bahwa Indonesia belum mampu menginisiasi koalisi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sementara itu, dalam kasus APEC, Binar Mentari Malahayati di Bab 12 menunjukkan bahwa Indonesia cukup aktif berperan, terutama dalam konteks Bogor Goals 2020 dan penggantinya Putrajaya Vision 2040. Dengan keterlibatannya dalam APEC, terutama dengan menyusun Individual Action Plan secara rutin dalam jangka waktu dua tahunan, Indonesia menunjukkan komitmennya pada multilateralisme dan penjagaan tatanan global. Komitmen untuk menjaga nama baik sebagai warga dunia juga tetap dilakukan dengan program Inisiatif Desa Damai yang mencoba mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam proses penciptaan perdamaian.

Ada satu pola penting yang harus digarisbawahi di sini terkait aktivisme dan multilateralisme Indonesia di forum internasional. Sebagai konsekuensi dari fokus Indonesia untuk melakukan *niche diplomacy* terkait isu perdamaian Palestina serta peran perempuan dalam pasukan perdamaian hingga berhasil diangkat di DK PBB, terpaksa dilakukan pengorbanan isu lain—seperti perdagangan—di forum berbeda. Kondisi ini sebetulnya menggambarkan keterbatasan negara *middle-power* dalam kaitannya dengan kapasitas diplomatik. Sebagai negara yang masih berupaya naik ke level yang lebih tinggi, keterbatasan ini adalah fitur normal dan perlu dihadapi oleh pengambil kebijakan. Pola terkait fokus pada *niche diplomacy* ini juga memperkuat argumen bahwa aspek pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini bisa menjadi fokus utama Indonesia sebagai warga dunia yang baik. Keberhasilan Indonesia dalam memenuhi janjinya terkait peran perempuan dalam pasukan perdamaian dapat menjadi modal yang kuat bagi aktivisme Indonesia di bidang lain, seperti pengungsi ataupun kemitraan Selatan-Selatan. Apalagi, Indonesia sudah berpengalaman menjadi negara utama bagi Pasifik Selatan dan memiliki pengalaman mewakili negara-negara berkembang di forum DK PBB maupun G20.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENUTUP: REKOMENDASI UMUM STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA 2045

Keseluruhan pembahasan di buku ini menampilkan potret yang serupa: bahwa perilaku dan peran yang selama ini dimainkan di level diplomasi global menjadi sangat krusial sebagai modal awal menjadi negara berpengaruh di kawasan; bahwa ada pengalaman perilaku dan peran Indonesia yang sudah cukup menjadi modal awal (seperti pengalaman di DK PBB maupun pengalaman menjadi donor bagi negara-negara Pasifik Selatan), tetapi juga ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dari strategi diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, ketika Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia menjadi negara maju dan terdepan di tahun 2045, seharusnya bukan hanya pembangunan ekonomi yang dikejar dengan segala cara, melainkan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju yang didasarkan pada kapabilitasnya (melalui pembangunan ekonomi dan bantuan luar negeri/investasi asing), pada perilakunya yang mencerminkan suatu negara *emerging middle-power*, dan pada peran yang selalu dimainkan di level kawasan.

Agar bisa dianggap penting, Indonesia harus bertindak dan berperan seperti layaknya negara penting. Status tidak datang mendahului perilaku. Pengakuan akan status Indonesia akan datang seiring dengan perilaku dan peran yang dimainkan Indonesia di kawasan. Target menjadi negara berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik berarti Indonesia harus aktif dahulu di forum-forum multilateral di kawasan (seperti APEC ataupun ASEAN), harus mampu mendorong dan memimpin upaya penyelesaian konflik (misalnya dalam kasus Rohingya ataupun krisis pengungsi), dan mampu mendorong ide-ide kreatif dalam diplomasi (seperti ide soal *sofa talk* di forum PBB). Di saat yang sama, Indonesia juga harus memahami keterbatasannya sebagai negara menengah dan berfokus pada isu-isu tertentu (seperti misalnya pengiriman pasukan perdamaian perempuan). Indonesia juga harus mampu memainkan perannya sebagai perwakilan negara berkembang (baik di forum G20, DK PBB, ataupun di WTO) dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai *bridge-builder* (misalnya antara Israel dan Palestina serta dalam dialog antar peradaban).

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan-pembahasan di bab-bab sebelumnya, epilog ini menampilkan beberapa rekomendasi dan saran-saran utama bagi pemerintah Indonesia, terutama terkait pencapaian status Indonesia yang berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik melalui peran dan perilakunya. Menlu Retno Marsudi memang sudah menekankan bahwa peningkatan kontribusi di kawasan dan dunia adalah pilar keempat (selain diplomasi ekonomi, perlindungan, dan kebangsaan/kedaulatan dalam prioritas 4+1) diplomasi Indonesia sampai 2024 (Hasugian, 2019). Akan tetapi, masih banyak aspek yang bisa dikembangkan, tidak hanya soal aktivisme di DK PBB, Dewan HAM, maupun ASEAN. Berikut ini adalah rekomendasi untuk Indonesia Emas 2045 yang berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

1. *Dalam kaitannya dengan upaya memosisikan diri sebagai warga dunia yang baik*:
    a. Perlunya aktivisme yang intens dalam promosi pembangunan berkelanjutan di kawasan yang melibatkan visi serta perspektif negara berkembang;
    b. Perlunya fokus pada isu-isu krusial yang menjadi urusan bersama masyarakat global, seperti kesetaraan gender, perdamaian antar-agama, dan pengungsi;
2. *Dalam kaitannya dengan aktivisme di forum multilateral*:
    a. Peningkatan keaktifan Indonesia di forum-forum kawasan, terutama ASEAN dan APEC;
    b. Pergeseran pola keaktifan Indonesia dari sekadar anggota koalisi/pendukung kebijakan menjadi inisiator ide dan penyusun koalisi di WTO ataupun di PBB;
3. *Dalam kaitannya dengan upaya memimpin resolusi konflik*:
    a. Perlunya pelibatan masyarakat serta prinsip dan pengalaman lokal dalam upaya penyelesaian konflik di level global;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

b. Perlunya menjalin relasi yang baik dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik agar Indonesia bisa berperan sebagai mediator;

4. *Dalam kaitannya dengan fokus pada* niche diplomacy:
   a. Perlunya memfokuskan sumber daya diplomatik pada isu-isu krusial yang bisa meningkatkan profil Indonesia sekaligus memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan peran perempuan maupun isu pengungsi;
   b. Perlunya menghindari *overstretching* dalam ruang lingkup isu dan pentingnya prinsip perluasan isu secara bertahap agar penggunaan sumber daya kita terfokus;
5. *Dalam kaitannya dengan menyediakan ide kreatif dalam berdiplomasi*:
   a. Perlunya melanjutkan inisiatif berbasis tradisi lokal seperti *sofa talk* atau model kompromi seperti yang diutarakan Duta Besar Djani (lihat Bab 8);
   b. Perlunya peningkatan keberanian untuk menawarkan solusi-solusi berbeda seperti konsep Indo-Pasifik;
   c. Perlunya penguatan peran masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah serta akademisi dalam praktik diplomasi multilateral;
6. *Dalam kaitannya dengan membangun dan memimpin koalisi satu ide*: Perlunya meneruskan kepemimpinan dan inisiasi isu dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan, baik di Pasifik Selatan, Timur Tengah, ataupun Afrika dan Asia Tenggara.

Perubahan cara pandang pemerintah, dari penekanan pada pemenuhan kapasitas dan kapabilitas sebagai negara maju menjadi upaya memberikan contoh bahwa Indonesia telah berhak menyandang status dan pengakuan sebagai negara berpengaruh (baik dalam konteks *middle-power* ataupun calon *major power*). Hal ini perlu didorong oleh semua pihak, terutama akademisi HI. Sederhananya, apabila kita ingin posisi kita dalam Asia Power Index oleh Lowy Institute di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahun-tahun mendatang meningkat, kita perlu mendorong pemerintah agar meningkatkan kualitas jaringan pertahanan, diplomasi dan aliansi regional, serta kemitraan dan pengaruh kawasan. Dalam upaya pemenuhan status dan proyeksi peran/perilaku tersebut, tentunya diperlukan infrastruktur diplomasi yang memadai baik dari segi birokrasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi (apalagi di masa pandemi). Rekomendasi yang diusulkan di bagian epilog ini merupakan saran secara umum (yang bisa dibaca dengan lebih lengkap di setiap bab), tetapi telah disesuaikan dengan kerangka berpikir yang diajukan, yakni pemahaman konsep *middle-power*. Oleh karena itu, pemerintah benar-benar perlu memperhatikan keseluruhan rekomendasi ini, demi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

REFERENSI

Efstathopoulos, C. (2018). Middle powers and the behavioural model. *Global Society*, *32*(1), 47–69. https://doi.org/10.1080/13600826.2017.1351422

Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: Distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, *30*(2), 165–181. https://doi.org/10.1080/0258934032000147282

Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: The cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, *72*(4), 343–363. https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis 2020-2024*. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc 3RyYSUyMEtlbWVubHUlMjAyMDIwLTIwMjQucGRm.

Hasugian, M. R. (2019, 29 Oktober). Menlu Retno sebut 4+1 prioritas politik luar negeri RI 2019–2024. *Tempo*. https://dunia.tempo.co/read/1265955/menlu-retno-sebut-41-prioritas-politik-luar-negeri-ri-2019-2024/full&view=ok

Schweller, R. (2017). The concept of middle power. Dalam V.D. Cha & M. Dumond (Ed.), *The Korean pivot: The study of South Korea as global power* (3–9). Center for Strategic and International Studies.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks

Aid for development, 56, 68
Anti-dumping, 168
Asia-PacificEconomic Cooperation (APEC), 159, 189, 190, 191, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206

Balance of power, 50
Bantuan luar negeri, 17, 22, 30, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 81, 138, 167, 208

Dewan Keamanan PBB, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 196, 197, 198, 203, 205, 208
Diplomasi, 36, 90, 96, 97, 107, 129, 130, 131, 138, 143, 169, 177, 180, 185, 188, 191

Enabling environment, 63, 64, 70

Foreign Direct Investment, 38, 200

G20, 18, 94, 96, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188
Geopolitik, 15, 16, 22, 57, 91, 100, 229
Globalisasi, 15, 96

Hutang, 17, 18

Investasi, 17, 21, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 66, 77, 82, 85, 113, 114, 115, 118, 133, 158, 160, 168, 176, 178, 184, 189, 190, 195, 197, 199, 200, 201, 202

Kapasitas inti, 63
Kebijakan luar negeri, 22, 23, 24, 28, 95, 96, 126, 191, 196
Kedaulatan, 47, 89, 90, 93, 95, 101, 117

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kemanusiaan, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 125, 126, 130, 132, 138, 144, 147, 148, 150, 152, 187
Kemitraan, 15, 16, 38, 46, 64, 66, 68, 71, 75, 81, 84, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 124, 125, 136, 158, 159, 168, 169, 192, 197, 205, 208
Kemitraan Selatan-Selatan, 45, 75, 77, 80, 87, 170, 193, 194, 195, 205
Konflik, 35, 36, 37, 38, 46, 76, 77, 84, 90, 92, 93, 95, 101, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 146, 147, 151
K-shaped recovery, 19

Marginalisasi, 160
Middle power, 128, 176, 188
Multi stakeholder, 45, 66, 71

Non-intervensi, 95

Organisasi internasional, 94, 97, 107, 123, 124, 145, 146, 151, 160, 168, 190, 204
Organisation for Economic Co-operation and Development, 43, 45, 56, 57, 58, 60, 66, 70

Pasukan perdamaian, 126, 127, 129
Pembangunan, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 80, 82, 85, 89, 91, 98, 102, 106, 111, 114, 115, 116, 117, 125, 127, 129, 132, 136, 142, 143, 152, 155, 166, 176, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 200, 203
Peningkatan kapasitas, 556, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 114, 144, 190
Perdagangan, 38, 41, 42, 43, 45, 61, 66, 91, 96, 99, 108, 109, 113, 114, 118, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 178, 182, 183, 184, 189, 194, 199, 200, 201, 202, 207, 226, 228
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 34, 44, 53, 60, 62, 65, 71, 76, 78, 87, 93, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 157, 171, 190, 191, 196, 198, 203, 204, 205, 207, 208
Perubahan iklim, 19, 20, 21, 28, 32, 34
Politik luar negeri, 89, 90, 96, 101, 126, 128, 130, 131, 136, 180, 196, 224
Positioning, 179

Resettlement, 149, 156
Responsibility to Protect, 135, 137
Rezim, 37, 162, 195, 197, 199, 200

SDGs,15, 16, 17, 18, 27, 28, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 66, 67, 68, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 116, 124, 125, 142,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

148, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 191, 192, 195, 200, 205, 207
Sofa talk, 129
Sustainable Development Goals, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 76, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 116, 118, 124, 125, 142, 148, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 191, 192, 195, 205, 207
Troika, 173
World Trade Organization, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 199, 202, 204
Zona Ekonomi Eksklusif, 110

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Editor

FAUZIAH ROHMATIKA MAYANGSARI

Sedang menempuh studi S-2 Asian and Pacific Studies di The Australian National University. Sebelumnya, Maya menyelesaikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Airlangga, Indonesia. Fokus kajian Maya adalah studi Indonesia, studi Asia Tenggara, dan hubungan bilateral Australia-Indonesia. Beberapa waktu terakhir, Maya tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan masyarakat sipil, serta isu gender. Tulisan terakhirnya yang dipublikasikan berjudul "Respon Pemerintah Australia terhadap Pandemi Covid-19: Koordinasi sebagai Kunci Efektivitas Kebijakan" di Jurnal Global Strategis (2020). Maya dapat dihubungi melalui mayangsr@outlook.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PASHA AULIA MUHAMMAD

Saat ini sedang menempuh studi Bachelor (S-1) Political Science and World Politics di National Research University Higher School of Economics St. Petersburg Filial. Penulis juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar Erasmus selama satu semester di University College London School of Slavonic and East European Sciences (UCL SSEES). Karya Pasha bersama dengan seorang penulis lain, Sudharmono Saputra, yang terakhir dipublikasikan adalah *White Paper* Komisi Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PPI Dunia, "Indonesia Terkucil? *Safe Travel Corridor* dan Ancaman Deglobalisasi Pasca Pandemi COVID-19." Pasha juga berpartisipasi aktif di berbagai organisasi dan menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan di dalam ataupun luar negeri. Pasha dapat dihubungi melalui: apasha@edu.hse.ru.

RADITYO DHARMAPUTRA

Adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga, Indonesia. Lulus S1 HI Unair, S-2 di bidang Perdamaian-Keamanan Internasional HI Unair serta S-2 Kajian Kawasan Rusia-Eropa Timur dari University of Glasgow dan University of Tartu, ia saat ini sedang mengambil program S3 di Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu, Estonia. Fokus kajian Radityo adalah politik luar negeri Rusia, identitas, budaya strategis, dan teori-teori keamanan internasional dalam HI. Ia terlibat dalam kegiatan riset di Cakra Studi Global Strategis (CSGS), Pusat Studi ASEAN (PSA) Unair, Emerging Indonesia Project (EIP), dan Centrius. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur II, Direktorat Penelitian dan Kajian, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia. Radityo dapat dihubungi melalui radityo.dharmaputra@ut.ee/ radityo.dharmaputra@fisip.unair.ac.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biografi Penulis

AHMAD HIDAYAT

Adalah mahasiswa Magister Pembangunan Internasional di Yonsei University, Korea Selatan, melalui beasiswa Posco Asia. Sebelumnya, Hidayat menyelesaikan S-1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia dengan fokus kajian ekonomi politik internasional (IPE) dan ketertarikan khusus di kajian pembangunan internasional. Setelah lulus S1, Hidayat memiliki pengalaman terlibat dalam beberapa proyek riset dan pembangunan dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-UI dan USAID. Ahmad Hidayat dapat dihubungi melalui ahmad.hidayat.ma@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ANNISA PRATAMASARI

Adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Indonesia. Annisa lulus S1 dari HI Unair, Surabaya, S-2 dari Int'l Trade PCCU Taipei, dan saat ini sedang menempuh S-3 dalam bidang Int'l Commerce di GSIS Korea University. Belakangan ini Annisa menulis tentang topik-topik yang juga masuk dalam fokus kajiannya, seperti perdagangan internasional, isu Inter-Korea, dan Korean Wave. Annisa dapat dihubungi melalui annisa.pratamasari@fisip.unair.ac.id.

ANNISA SEKARINGRAT

Sedang menempuh program magister jurusan Global Migration di University College London (UCL) dengan beasiswa Chevening dari UK FCDO. Beberapa tulisan Annisa ketika menempuh program sarjana Hubungan Internasional di Universitas Airlangga telah dipublikasikan dalam jurnal maupun sebagai bab dalam buku, salah satunya berjudul "Russia's Response Toward Georgia's Attack: International System Analysis" di *Comparative Foreign Policy Analysis*, CSGS, Surabaya (2015). Annisa dapat dihubungi melalui Annisa.Sekaringrat.20@ucl.ac.uk.

BINAR MENTARI MALAHAYATI

Adalah mahasiswa S-1 jurusan Hubungan Internasional dan Studi Perdamaian di Universitas Ritsumeikan Asia Pacific di Beppu, Jepang. Mentari adalah penulis yang telah menerbitkan sebuah buku puisi "2304; Aren't you tired of beating yourself up" (2018), serta tulisan opini di the Jakarta Post mengenai terorisme dan kaitannya dengan kebencian "To fight terrorism normalize love, not hatred" (2019). Saat ini Mentari sedang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjalani proses penelitian tentang kritik terhadap keadilan transisi serta peran agama dalam proses radikalisme-terorisme. Mentari dapat dihubungi melalui binarmentari@gmail.com.

ELMO JUANARA

Sedang menempuh pendidikan *master by research* di Shizuoka University, Jepang dengan jurusan Management of Business Development. Riset yang ditekuni yaitu sistem informasi untuk pendidikan bencana di Indonesia. Saat ini aktif sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia Klaster Mahasiswa (MITI KM) dan sebagai Kordinator Wilayah Hamamatsu, PPI Shizuoka Jepang. Aktif menulis artikel di majalah PPI Jepang tahun 2020 dan berbagi pengalaman beasiswa di Jurnal Oshaberi PPI Jepang. Selain itu, sekarang tengah merintis *Non Profit Organization* yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dapat dihubungi melalui juanaraelmo@yahoo.com.

IRFAN AFENDI

Adalah mahasiswa S-1 jurusan Studi Islam dan Bahasa Arab di Dawaa University College, Lebanon. Sebelumnya, Irfan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Setelah lulus, Irfan sempat mengabdikan diri di pesantren selama dua tahun sebelum akhirnya berangkat melanjutkan studi pendidikan tinggi di Lebanon. Saat ini Irfan juga aktif berorganisasi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Lebanon dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdhatul Ulama Lebanon. Irfan dapat dihubungi melalui irfaanafnd@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KURNIA TRISNO YUDHONEGORO

Lulus S-1 dari Fakultas Pertanian dengan jurusan Agribisnis. Selepas lulus Kurnia sempat memegang lahan pertanian di Sukabumi, menanam sayuran selama hampir 2 tahun, namun nasib selanjutnya mengantarnya untuk mengabdi sebagai PNS di Kementerian Perdagangan mulai 2015. Pada 2019 Kurnia mendapatkan beasiswa S-2 dari LPDP di University of Adelaide program Master of Global Food and Agricultural Business. Hobi Kurnia antara lain adalah membaca dan bermain game komputer. Kurnia dapat dihubungi melalui ktyudhonegoro1@gmail.com.

MUHAMMAD IBRAHIM ARFAH

Saat ini sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif tepatnya di Fakultas Usuluddin Jurusan Aqidah Filsafat, Mesir. Ibrahim telah mempublikasikan beberapa karya tulis baik fiksi dan non-fiksi, di antaranya buku antologi cerpen yang bertajuk "Kampung 1000 Cahaya" (2016) dan "Sosok" (2020). Selain itu, Ibrahim juga pernah menulis biografi singkat Syekh Abdul Halim Mahmud Grand Syekh Al-Azhar yang ke-44. Beberapa tulisan berita yang pernah ditulis Ibrahim dapat dibaca pada laman Web media Wawasan KKS Mesir. Selain menjadi anggota komisi HI Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia, dia juga tengah menjabat sebagai koordinator Departemen Kajian Turas dan Bahasa Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Mesir. Ibrahim dapat dihubungi melalui ibrahimarfah28@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

MUHAMMAD RIEFAT DHANISWARA ARYA PERKASA

Saat ini sedang menempuh Strata-1 jurusan Hubungan Internasional di Süleyman Demirel University, Turki. Riefat memiliki ketertarikan terhadap studi Geopolitik, Ekonomi Internasional dan Keamanan Internasional. "Hubungan Indonesia-ASEAN" merupakan tulisan pertamanya yang akan dipublikasikan. Riefat dapat dihubungi melalui riefatdhr@gmail.com.

MUHAMMAD ZIDANE FATURRAHMAN

Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Teknik Sipil di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Aktif bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di UTM dalam pelaksanaan penyambutan mahasiswa baru pelajar indonesia tahun 2020 dan acara UTM E-Sport League pada tahun 2021. Zidane tertarik membaca buku dalam topik seputar Sejarah, Politik, dan Ekonomi. Zidane dapat dihubungi melalui Mzf2609@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Koordinator PPI Dunia	: Choirul Anam Charles University, Ceko
Direktur	: Denny Irawan The Australian National University, Australia
Wakil Direktur	
1. Bidang Khusus	: Gresika Bunga Sylvana City University of New York, Amerika Serikat
2. Bidang Sosial	: Radityo Dharmaputra University of Tartu, Estonia
3. Bidang Sains dan Teknologi	: Oscar Karnalim University of Newcastle, Australia
4. Bidang SDM dan Lingkungan Hidup	: Muhammad Aswin Rangkuti University of Copenhagen, Denmark

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 1: Ekonomi

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

https://doi.org/10.14203/press.357

Seri 2: Kebudayaan

Editor: Adrian Perkasa & Diandra Pandu Saginatari

https://doi.org/10.14203/press.363

Seri 3: Hubungan Internasional

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari, Pasha Aulia Muhammad, & Radityo Dharmaputra

https://doi.org/10.14203/press.366

Seri 4: Hukum

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, & Edmond Febrinicko Armay

https://doi.org/10.14203/press.398

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 5: Pendidikan

Editor: Afifah Muharikah, Athifah Utami, & Randi Proska Sandra

https://doi.org/10.14203/press.374

Seri 6: Kesehatan

Editor: Anthony Paulo Sunjaya & Sandy Ardiansyah

https://doi.org/10.14203/press.364

Seri 7: Lingkungan

Editor: Radityo Pangestu, Raisa Rifat, Desy A. Prihardini, & Februriyana Pirade

https://doi.org/10.14203/press.359

Seri 8: Energi

Editor: Sindu Daniarta & Nuralfin Anripa

https://doi.org/10.14203/press.360

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

Seri 9: Teknologi

Editor: Ahmad Sony Alfathani, Muhammad Ali, & Rilwanu Ar Roiyyaan

https://doi.org/10.14203/press.383

Seri 10: Pangan

Editor: Hilmy Prilliadi & Siti Mustaqimatud Diyanah

https://doi.org/10.14203/press.368

Seri 11: Maritim

Editor: Ratna Nur Inten, Salsyabilla Ika Putri Aryaningrum, & Aries D. Siswanto

https://doi.org/10.14203/press.373

Seri 12: Timur Tengah

Editor: Muhammad Luthfi Hidayat, Muhamad Rofiq Muzakkir, & Nur Fajri Romadhon

https://doi.org/10.14203/press.348

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Buku ini merupakan seri ketiga dari rangkaian tersebut.

Seri Hubungan Internasional mendukung poin ke-17 SDGs, yakni "kemitraan untuk mencapai tujuan". Buku ini berisi pemikiran kumpulan pelajar Indonesia yang menyajikan berbagai wawasan serta ide baru mengenai hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara di seluruh dunia. Terbagi menjadi tiga bagian, buku ini membahas kemitraan Indonesia dengan negara besar, negara berkembang, dan organisasi internasional.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan di bidang hubungan internasional dan pembangunan. Temukan beragam sudut pandang serta ide menarik terkait kemitraan internasional Indonesia sebagai penyalur energi positif pelajar Indonesia sedunia. Selamat membaca!

LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

DOI: 10.14203/press.366

ISBN 978-602-496-210-4

ISBN 978-602-496-207-4